BADAN POM
BALAI BESAR POM
DI KUPANG

LAPORAN KINERJA 2025

Balai Besar POM di Kupang











KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerahNya sehingga Laporan Kinerja tahun 2025 BBPOM di Kupang dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BBPOM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan selama periode Tahun Anggaran 2025. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja BBPOM di Kupang pada periode berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BBPOM di Kupang diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa dipahami mengenai kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal BBPOM di Kupang, semoga Laporan Kinerja tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, 26 Februari 2026

Kepala Balai Besar POM di Kupang



Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHTS
BALAI BESAR POM DI KUPANG



Implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana

Pastikan Keamanan Pangan, BPOM Kupang bersama Gubernur NTT melakukan Inspeksi Langsung dalam Program MBG.

JANUARI



Pencanangan Pembangunan ZI Menuju WBBM

Langkah Konkret BPOM Kupang menuju pemerintahan yang bersih dan melayani dengan melibatkan berbagai pihak.

FEBRUARI



Naik Level UPT menjadi Balai Besar POM di Kupang

Pengukuhan kenaikan kualifikasi menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.

MARET



Penghargaan atas Kontribusi kepada Pelayanan Publik

BBPOM Kupang terima Investment Award dalam kategori Pujian atas Komitmen Pelayanan Pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang

APRIL



BBPOM Kupang jajaki kerjasama Internasional

BBPOM Kupang didampingi Biro Kerjasama dan Humas Badan POM menjalin kerjasama lintas negara dengan Timor-Leste

MEI



BBPOM Kupang Gencarkan Program Desa Pangan Aman

BBPOM Kupang edukasi kader dan masyarakat desa melalui bimbingan teknis untuk mendorong kemandirian pangan aman

JUNI

HIGHLIGHTS
BALAI BESAR POM DI KUPANG



Sinergi Badan POM dan Pemerintah provinsi NTT

Badan POM melalui BBPOM Kupang bersama Gubernur NTT mendorong UMKM tembus Pasar Global lewat program OVOP.

JULI



Raih 2 Penghargaan dalam KPPN Kupang Award Semester 1

BBPOM Kupang menorehkan prestasi dengan 2 penghargaan dalam acara KPPN Kupang Award Semester 1 Tahun 2025.

AGUSTUS



BBPOM Kupang serahkan Tersangka dan Barang Bukti

PPNS BBPOM Kupang melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

SEPTEMBER



Desa, Pasar dan Sekolah Binaan BBPOM Kupang raih Prestasi Nasional

BBPOM Kupang Peringkat ke-4 sebagai UPT BPOM dengan Penghargaan Lomba GERMAS SAPA Terbanyak

OKTOBER



Penguatan Mutu SDM Pengujian Laboratorium

BBPOM Kupang tingkatkan kompetensi SDM Laboratorium melalui pelatihan identifikasi dan verifikasi metode analisis.

NOVEMBER



BBPOM Kupang meraih predikat Informatif Terbaik

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik Lembaga Vertikal INFORMATIF TERBAIK

DESEMBER

PENGHARGAAN
BALAI BESAR POM DI KUPANG



Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori PELAYANAN PRIMA yang diselenggarakan oleh BPOM



Predikat Terbaik II sebagai Satuan kerja pengguna KKP dengan Capaian Prosentase Realisasi KKP Tertinggi Periode s.d Semester I Tahun 2025, Dengan Capaian Target Sebesar 31,73%



Peringkat ke empat sebagai UPT BPOM Dengan Penghargaan Lomba GERMAS SAPA TERBANYAK



Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai Badan Publik Lembaga Vertikal INFORMATIF TERBAIK

PENGHARGAAN
BALAI BESAR POM DI KUPANG



Penghargaan sebagai Satker dengan Capaian Transaksi KKP TERAKTIF I Kategori Jumlah Transaksi Periode Semester I Tahun 2025



Penghargaan sebagai Satker dengan Capaian Transaksi KKP TERAKTIF II Kategori Persentase Capaian Periode Semester I Tahun 2025



Penghargaan TOP 22 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM Tahun 2025 dengan inovasi Dobrak Stunting

PENGHARGAAN
BALAI BESAR POM DI KUPANG



Balai Besar Terbaik 1 pada Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan



Balai Besar Terbaik 3 pada Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan



Penghargaan dengan kategori PUJIAN sebagai Bentuk Apresiasi Atas Kontribusi Terhadap Komitmen Pelayanan Pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar POM (BBPOM) di Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM (BPOM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya Keputusann Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap tahun. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Tahun 2025 dan upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Kupang Tahun 2025 terdapat 8 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 BBPOM di Kupang serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari 8 sasaran kegiatan terdapat 2 sasaran kegiatan yang tidak mencapai target dan 6 sasaran kegiatan telah tercapai. Dari 28 IKSK terdapat 5 IKSK yang tidak mencapai target dan 23 IKSK telah mencapai target. Berikut hasil pencapaian kinerja BBPOM di Kupang pada Tahun 2025, yaitu:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Kupang pada tahun 2025 adalah **92,21 %** dengan predikat **Baik.**
2. Sasaran Kegiatan (1) **Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **106,67** dengan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut:
   a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 110,21 ketegori Tidak Dapat Disimpulkan

b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan capaian sebesar 108,69 kategori Sangat Baik
c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100 kategori Baik.
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 106,75 kategori Sangat Baik.
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,71 kategori Sangat Baik.
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
i. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,03 kategori Sangat Baik.
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 114,81 kategori Tidak Dapat Disimpulkan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 100,25 kategori Sangat Baik
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan capaian sebesar 104,75 kategori Sangat Baik
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 106,34 kategori Sangat Baik.

o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian 100 kategori Baik

3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** nilai pencapaian sasarannya memperoleh nilai sebesar 100 dengan kategori Baik.
4. Sasaran Kegiatan ke-3 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di masing-masing wilayah kerja UPT** memperoleh NPS sebesar 100,98 (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai berikut:
   a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 103,93 kategori Sangat Baik
   b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan realisasi 10 sekolah dan capaian sebesar 100% kategori Baik.
   c. Jumlah desa pangan aman dengan realisasi 4 Desa dan capaian sebesar 100% kategori Baik.
   d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan realisasi 1 Pasar dan capaian sebesar 100% kategori Baik.
5. Sasaran Kegiatan Ke-4 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** memperoleh NPS sebesar 141,72 diukur dengan pencapaian IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 141,72 kategori Tidak Dapat Disimpulkan.
6. Sasaran Kegiatan 5 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** memperoleh NPS sebesar 76,34 diukur dengan pencapaian IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 76,34 kategori Cukup
7. Sasaran Kegiatan 6 **Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif** memperoleh NPS sebesar 111,11 diukur dengan pencapaian IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 111,11 kategori Tidak Dapat disimpulkan.

8. Sasaran Kegiatan 7 **Layanan Publik UPT yang prima** memperoleh NPS sebesar 104,68 diukur dengan pencapaian IKSK Indeks Pelayanan Publik yang memperoleh predikat Pelayanan Prima dengan nilai 4,92 dan capaian sebesar 104,68 kategori Sangat Baik
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** memperoleh NPS sebesar 92,15 diukur dengan pencapaian beberapa IKSK sebagai berikut:
    a. Nilai Pembangunan ZI dengan capaian sebesar 96,86 kategori Baik
    b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 97,08 kategori Baik
    c. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 80 kategori Cukup
    d. Indeks Manajemen Risiko dengan capaian sebesar 94,67 kategori Baik

Penyerapan anggaran BBPOM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output/*kegiatan adalah sebesar Rp. 20.524.129.168 atau 62,46% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.861.512.000.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI 11
1.4. ISU STRATEGIS 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029 21
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 23
2.3. PERJANJIAN KINERJA 26
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 33
2.5. METODE PENGUKURAN 37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 42
3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA 174
3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA 192
3.4. REALISASI ANGGARAN 193
3.5. KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BELU 210
3.6. KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR 302
BAB IV PENUTUP 397
4.1. KESIMPULAN 397
4.2. SARAN ATAU REKOMENDASI 400

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Profil SDM Berdasarkan Gender dan Umur 8
Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja BBPOM di Kupang 9
Gambar 2.1 Visi Badan POM 21
Gambar 2.2 Asta Cita Presiden 22
Gambar 3.1 Grafik NKO tahun 2025 42
Gambar 3.2 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan..... 3
Gambar 3.3 Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM 10
Gambar 3.4 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 15
Gambar 3.5 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 21
Gambar 3.6 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 27
Gambar 3.7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu 34
Gambar 3.8 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 40
Gambar 3.9 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 45
Gambar 3.10 Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 51
Gambar 3.11 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 56
Gambar 3.12 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan 61
Gambar 3.13 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar 67
Gambar 3.14 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT 73
Gambar 3.15 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 78
Gambar 3.16 Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 85
Gambar 3.17 Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 90
Gambar 3.18 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 96
Gambar 3.19 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan..... 102
Gambar 3.20 Jumlah Desa Pangan Aman 107
Gambar 3.21 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas..... 112
Gambar 3.22 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 120
Gambar 3.23 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT 128
Gambar 3.24 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesai sesuai standar 136

Gambar 3.25 Indeks Pelayanan Publik UPT 141
Gambar 3.26 NILAI PEMBANGUNAN ZI 148
Gambar 3.27 Nilai AKIP 155
Gambar 3.28 NILAI Kinerja Anggaran 163
Gambar 3.29 indeks manajemen risiko 169

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Cakupan Wilayah Kerja BBPOM di Kupang 3
Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana BBPOM di Kupang 5
Tabel 1.3 Jumlah ASN BBPOM di Kupang 7
Tabel 1.4 Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi pada wilayah kerja BBPOM di Kupang 10
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan 2025 24
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 26
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 29
Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 33
Tabel 2.5 Rincian target RAPK yang telah direvisi 35
Tabel 3.1 Perhitungan NKO BBPOM di Kupang 43
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun 2025 46
Tabel 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW III) 174
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025 194
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Kegiatan (Rincian Output) Tahun 2025 194
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Per IKSK Tahun 2025 196
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025 199
Tabel 3.8 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025 202
Tabel 3.9 Perhitungan Efisiensi Per Sasaran Kegiatan 207
Tabel 3.10 Luas Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu 210
Tabel 3.11 Penyebaran Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk di wilayah Loka POM di Kabupaten Belu 211
Tabel 3.12 Rencana Kinerja Tahunan 2025 220
Tabel 3.13 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 223
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 233
Tabel 3.15 Data Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Sumba Timur 303
Tabel 3.16 Jumlah ASN Loka POM di Kabupaten Sumba Timur 304
Tabel 3.17 Data Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur 307
Tabel 3.18 Rencana Kinerja Tahunan 2025 310
Tabel 3.19 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 312
Tabel 3.20 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 314
Tabel 3.21 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 317
Tabel 3.22 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 319
Tabel 3.23 Capaian Kinerja 323

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem pengukuran tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP oleh Badan POM (BPOM) dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dan tahunan. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan kewajiban Balai Besar POM (BBPOM) di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Tahun 2025, BBPOM di Kupang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 92,21 dengan predikat **Baik**, sehingga beberapa upaya perbaikan masih perlu dilakukan terhadap Sasaran Kegiatan dengan NPS dibawah 100 atau belum mencapai target. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025, BBPOM di Kupang menyusun Laporan Kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan BBPOM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. BBPOM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT Badan POM yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan Wilayah Kerja BBPOM di Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Cakupan Wilayah Kerja BBPOM di Kupang

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
BBPOM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka

TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) BPOM berdasarkan Peraturan BPOM nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Kupang sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BBPOM di Kupang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis BBPOM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapain visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, dalam rangka mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai yaitu **menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu**.

Tugas utama BBPOM di Kupang adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan, dimana hal ini menunjukkan posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan Obat dan Makanan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran BBPOM di Kupang sebagai bagian integral dari BPOM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. BBPOM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan, untuk itu BBPOM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk

melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai *outcome* dari pengawasan Obat dan Makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

INTERNAL

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana BBPOM di Kupang

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	LuasBangunan/Tanah: 2.438 m^2/3646m^2 dengan nilai Rp. 13.283.192.284,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah: 142m^2/ 750m^2
3.	Gedung Loka POM di Belu	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah: 212 m^2/ 2860m^2
4.	Tanah Loka POM di Sumba Timur	1 unit / bidang	Luas Bangunan/ Tanah: 0 m^2/ 3950m^2
5.	Sumber Listrik (PLN) BBPOM di Kupang	105 KVA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	7 unit	7 unit kondisi baik
8.	Kendaraan Roda 2	4 unit	4 unit kondisi baik

BBPOM di Kupang memiliki lahan seluas 3.646 m^2 berdasarkan Sertifikat Nomor 24.13.01.01.4.00539 Nomor NIB 24.13.01.01.01335 a/n Pemerintah Indonesia cq Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2016. Lahan tersebut dimanfaatkan untuk fungsi perkantoran, pelayanan publik, serta laboratorium. Hingga tahun 2025, luas bangunan yang telah terbangun mencapai 2.438 m^2.

Secara umum, pemenuhan kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja sampai dengan Desember 2025 telah cukup mendukung operasional. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah sumber daya manusia dan meningkatnya kebutuhan perkantoran, diperlukan pengadaan tambahan alat

pengolah data dan meubelair untuk memperkuat layanan manajemen pengawasan Obat dan Makanan.

Pengujian laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Kupang terus ditingkatkan kapasitasnya. Upaya ini dilakukan agar laboratorium mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkesinambungan. Pada tahun 2024 telah dilakukan renovasi gedung laboratorium BBPOM di Kupang sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pengujian. Renovasi ini diikuti dengan penyediaan peralatan laboratorium yang memiliki tingkat sensitivitas dan akurasi memadai, sesuai dengan persyaratan ruang lingkup yang tertuang dalam Good Laboratory Practice (GLP). Dengan dukungan fasilitas tersebut, laboratorium diharapkan mampu menghasilkan data uji yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BBPOM Kupang mulai menerapkan konsep *green laboratory* (laboratorium hijau) yang berorientasi pada keberlanjutan. Penerapan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi energi dan biaya operasional, serta memperkuat aspek keselamatan kerja. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen BBPOM Kupang dalam mendukung inovasi berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan. Kualifikasi pendidikan dan kompetensi menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pengawasan.

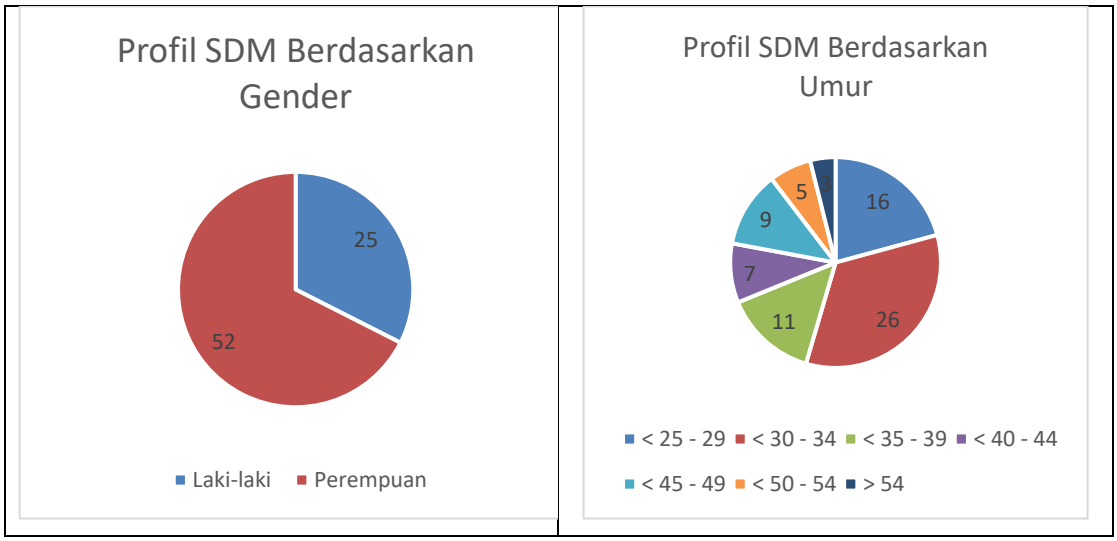
Sampai dengan Desember 2025, jumlah ASN di Balai Besar POM Kupang tercatat sebanyak 77 orang, terdiri atas 56 PNS, 3 CPNS, dan 18 PPPK. Pada tahun 2025, BBPOM Kupang menerima tambahan 3 CPNS dan 14 PPPK yang diangkat dalam dua tahap, yaitu Juni dan Oktober. Seluruh PPPK yang diterima merupakan pegawai penuh waktu, sehingga total PPPK yang ada terdiri dari 3 orang penerimaan tahun 2023, 1 orang penerimaan tahun 2024, dan 14 orang penerimaan tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 2

orang ditempatkan di Loka POM Kabupaten Belu dan 1 orang di Loka POM Kabupaten Sumba Timur sesuai kontrak kerja.

Pada tahun 2025 tidak terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti, namun terdapat 1 pegawai yang cuti di luar tanggungan negara, dan 2 pegawai mengikuti tubel dengan melepas jabatan. Desember 2025, sejumlah 5 pegawai mendapat mutasi ke daerah asal melalui jalur aspirasi, setelah lebih dari 15 tahun berkarya di UPT bukan daerah asal. SK mutasi tersebut berlaku mulai Januari 2026. Selain itu, pada Oktober 2025 terdapat tambahan 1 PNS yang mengisi jabatan Kepala BBPOM Kupang. Dengan demikian, jumlah ASN BBPOM Kupang hingga Desember 2025 tetap berjumlah 77 orang. Profil gambaran SDM BBPOM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah ASN BBPOM di Kupang

No	UPT	Pendidikan								Total
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SLTA	
1.	Kepala		1	0	0	0	0	0	0	1
2.	Bagian TU		1	0	0	7	1	8	1	18
3.	Fungsi Pengujian		1	9	4	15	3	0	0	32
4.	Fungsi Pemeriksaan		3	2	2	6	1	0	0	14
5.	Fungsi Penindakan		0	0	0	4	0	0	0	4
6.	Fungsi Informasi dan Komunikasi	1	1	1	0	5	0	0	0	8
	TOTAL	**1**	**7**	**12**	**6**	**37**	**5**	**8**	**1**	**77**



Gambar 1.1 Profil SDM Berdasarkan Gender dan Umur

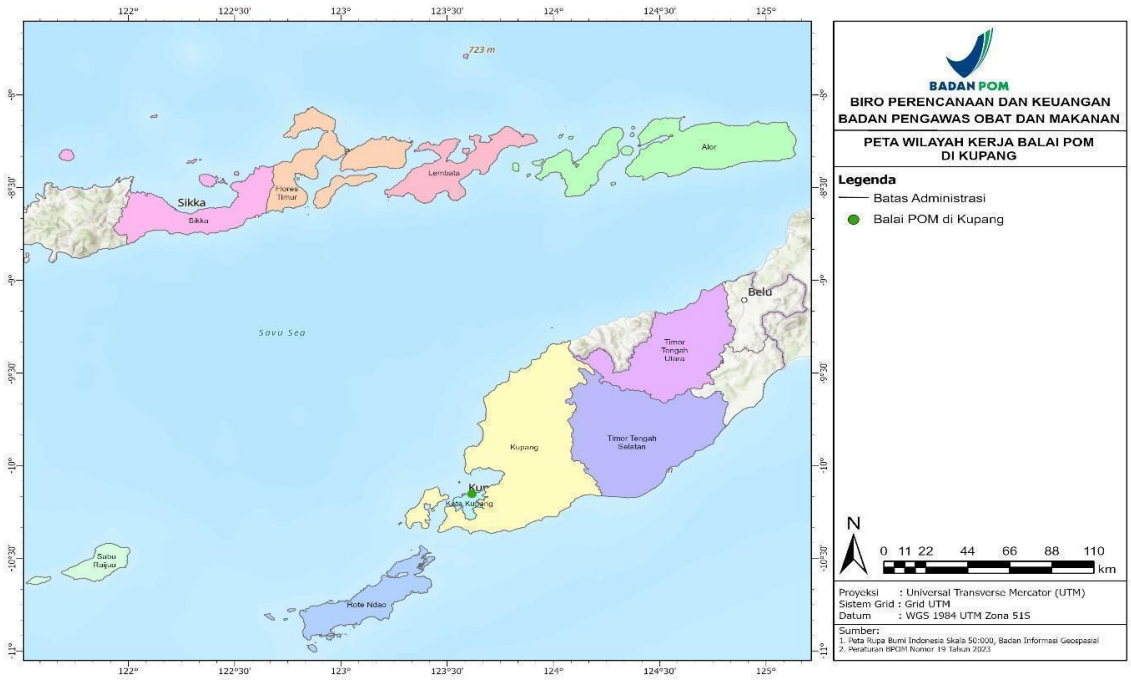
Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan BBPOM di Kupang pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran kegiatan **Rp. 32.391.308.000** (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 16,039,318,000. Selain itu juga terdapat revisi relaksasi blokir anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNPN di lingkungan Badan POM serta dukungan anggaran kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran BBPOM di Kupang menjadi **Rp.32.161.658.000**.

Pada triwulan III terdapat revisi anggaran terkait penambahan belanja pegawai dan operasional BBPOM di Kupang sebesar Rp. 624.136.000 sehingga total pagu anggaran BBPOM di Kupang menjadi **Rp.32.785.794.000**. Kemudian pada triwulan IV terdapat revisi relaksasi blokir serta penambahan anggaran uang makan sehingga pagu anggaran menjadi **Rp.32.861.512.000**

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan BBPOM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 9 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor(Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja BBPOM di Kupang

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi pada wilayah kerja BBPOM di Kupang

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Sarana yang diawasi tahun 2025
Sarana Produksi			
1	Industri Pangan	81	29
2	Industri Rumah Tangga Pangan	15	5
3	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	3	1
4	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	1
5	Industri Kosmetik	7	1
6	Sarana produksi Obat (Unit Transfusi Darah)	7	0
7	Industri Pangan Fortifikasi	1	1
TOTAL		**935**	**80**
Sarana Distribusi			
1	Pedagang Besar Farmasi	32	12
2	Apotek	376	127
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17	17
4	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	49	32
5	Puskesmas	289	52
6	Klinik	95	24
7	Toko Obat Berizin	52	29
8	Sarana Distribusi Pangan	1677	212
9	Sarana Distribusi Kosmetik	763	166
10	Sarana Distribusi Obat Tradisional	350	14
11	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	350	11
TOTAL		**4050**	**696**

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi BBPOM di Kupang seperti pada gambar 1.3



Gambar 1.3 Struktur Organisasi BBPOM di Kupang

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

   Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  a. ketua tim; dan
  b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari faktor internal maupun eksternal merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi kinerja BBPOM di Kupang. Dalam konteks tersebut, berbagai isu strategis berperan signifikan terhadap pencapaian target kinerja organisasi sepanjang tahun 2025. Isu-isu strategis yang dihadapi BBPOM Kupang antara lain mencakup keterbatasan jumlah dan kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, kebutuhan penguatan koordinasi internal, serta modernisasi infrastruktur dan sarana prasarana penunjang. Di sisi lain, peluang berupa digitalisasi proses bisnis, pemanfaatan teknologi mutakhir termasuk integrasi kecerdasan buatan, serta peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi faktor yang dapat mendorong efektivitas pengawasan.

Selain itu, ancaman eksternal seperti kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk, serta isu lingkungan dan keberlanjutan menuntut kesiapsiagaan organisasi dalam merumuskan kebijakan mitigasi. Dengan demikian, isu-isu strategis tersebut menjadi landasan penting bagi BBPOM Kupang dalam menetapkan arah kebijakan,

prioritas program, serta langkah penguatan kapasitas kelembagaan guna memastikan pengawasan obat dan makanan yang akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan. Isu-isu strategis BBPOM di Kupang yang dapat memengaruhi pencapaian kinerja BBPOM di Kupang pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. **Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten dan Loyal**

   BBPOM di Kupang didukung oleh pegawai yang profesional, yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Obat dan Makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di BBPOM di Kupang mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Profesionalisme dan dedikasi SDM BBPOM di Kupang telah ikut membangun reputasi BPOM sebagai pilar keandalan dan kepercayaan dalam pengawasan produk di Indonesia, memastikan bahwa hanya produk yang aman dan berkualitas yang tersedia untuk masyarakat. Komitmen ini memacu BBPOM di Kupang untuk terus berinovasi dan mengadopsi teknologi serta metodologi pengawasan terbaru, menjaga BPOM tetap unggul dalam menjawab dinamika tantangan yang terus berkembang dalam menjaga keamanan Obat dan Makanan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BBPOM di Kupang di wilayah kerja Nusa Tenggara Timur perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan Obat dan Makanan**.**

2. **Komitmen Kepemimpinan yang Kuat**

   Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di BBPOM di Kupang telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan BBPOM di Kupang mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BBPOM di Kupang tidak

hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Balai BBPOM di Kupang berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Komitmen yang kuat dari kepemimpinan BBPOM di Kupang menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BBPOM di Kupang tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan BBPOM di Kupang telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan

3. **Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi**

   BBPOM di Kupang telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Dalam pengujian Obat dan Makanan, BBPOM di Kupang memiliki kapasitas dan kapabilitasnya yang dapat diandalkan. Investasi pada peralatan laboratorium modern memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan BBPOM di Kupang untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan yang digunakan memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya. Dengan demikian, memungkinkan BBPOM di Kupang dapat melakukan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan, mulai dari analisis mikrobiologi hingga pengujian kimia.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja BBPOM di Kupang telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BBPOM di Kupang, pelaku usaha, dan masyarakat.

4. **Pertumbuhan Pasar Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dalam Negeri**

   Pasar produk Obat dan Makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BBPOM di Kupang untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BBPOM di Kupang berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil. Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BBPOM di Kupang kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BBPOM di Kupang dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status pelaku usaha produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang sebagai pelaku usaha yang terpercaya.

5. **Perkembangan Teknologi dan Digitalisasi Proses Bisnis dalam Penguatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Perkembangan teknologi yang pesat dan digitalisasi proses bisnis menjadi isu strategis yang harus diantisipasi oleh BBPOM Kupang dalam mendukung efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Transformasi digital membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pengawasan, mulai dari sistem registrasi, pelaporan, hingga pemantauan distribusi produk. Namun, percepatan digitalisasi juga menghadirkan tantangan berupa kebutuhan infrastruktur yang memadai, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan keamanan data dan integrasi sistem lintas sektor. Oleh karena itu, strategi pengawasan harus diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi yang adaptif, pengembangan sistem analitik berbasis data, serta penerapan manajemen risiko digital agar kinerja pengawasan tetap responsif terhadap dinamika industri farmasi dan pangan olahan yang semakin kompleks.

6. **Peningkatan Kolaborasi dengan Stakeholder**

Peluang BBPOM di Kupang untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah, pelaku usaha Obat dan Makanan, lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BBPOM di Kupang dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan Obat dan Makanan.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BBPOM di Kupang. Melalui kerja sama yang erat dengan pelaku usaha dan akademis, BBPOM di Kupang dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BBPOM di Kupang untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan

7. **Penguatan Pendampingan UMKM Kosmetik, Obat Bahan Alam, dan Pangan Olahan**

   Dukungan BBPOM di Kupang terhadap pendampingan UMKM di bidang kosmetik, obat bahan alam, dan pangan olahan merupakan isu strategis yang krusial dalam meningkatkan mutu produk sekaligus memperkuat sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UMKM memiliki peran penting dalam penyediaan produk lokal yang berdaya saing, namun sering menghadapi kendala terkait pemenuhan standar keamanan, mutu, dan regulasi. Melalui program pendampingan, BBPOM Kupang dapat memberikan bimbingan teknis, fasilitasi sertifikasi, serta edukasi mengenai penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) dan standar keamanan pangan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kepatuhan UMKM terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat ekosistem pengawasan dengan melibatkan pelaku usaha sebagai mitra strategis dalam perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pendampingan UMKM menjadi langkah strategis untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

8. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

   Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, BBPOM di Kupang memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi obat dan makanan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BBPOM di Kupang dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan obat dan makanan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

   Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan

standar keamanan obat dan makanan, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BBPOM di Kupang dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BBPOM di Kupang untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan obat dan makanan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BBPOM di Kupang sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

9. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi BBPOM di Kupang untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri Obat dan Makanan di wilayah kerjanya beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BBPOM di Kupang dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BBPOM di Kupang memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi dan daya saing pasar ekspor, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak

perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BBPOM di Kupang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

10. **Evolusi Produk dan Layanan Kesehatan**

    Evolusi produk dan layanan kesehatan membuka peluang bagi BBPOM di Kupang untuk memainkan peran dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, suplemen kesehatan, dan makanan fungsional, BBPOM di Kupang memiliki peluang untuk menerapkan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Peluang ini juga memungkinkan BBPOM di Kupang untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, BBPOM di Kupang memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru.

11. **Kapasitas Pengawasan yang Kuat**

    BBPOM di Kupang diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Kewenangan ini memberikan BBPOM di Kupang kekuatan untuk mengawasi demi melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan BBPOM di Kupang untuk secara efektif melakukan pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan mengacu padai kerangka regulasi pengawasan, BBPOM di Kupang memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang obat dan makanan.

12. **Perubahan Iklim**

    Perubahan iklim telah menjadi isu strategis yang berdampak langsung terhadap sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang

dilaksanakan oleh BBPOM di Kupang. Peningkatan suhu, kelembaban tinggi, serta frekuensi bencana seperti banjir dan kekeringan berpotensi meningkatkan risiko cemaran biologis dan kimia pada pangan, mempercepat kerusakan obat akibat gangguan stabilitas suhu, serta mengganggu rantai distribusi terutama di wilayah kepulauan dan rawan bencana. Selain itu, perubahan pola penyakit akibat faktor iklim dapat memicu lonjakan kebutuhan obat tertentu yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku peredaran produk ilegal. Kondisi ini menuntut penguatan pengawasan berbasis risiko, integrasi data iklim dengan sistem intelijen pengawasan, serta peningkatan ketahanan sarana distribusi dan laboratorium. Oleh karena itu, adaptasi regulasi dan transformasi menuju sistem pengawasan yang lebih responsif, digital, dan tangguh terhadap perubahan iklim menjadi langkah strategis untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk obat dan makanan secara berkelanjutan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

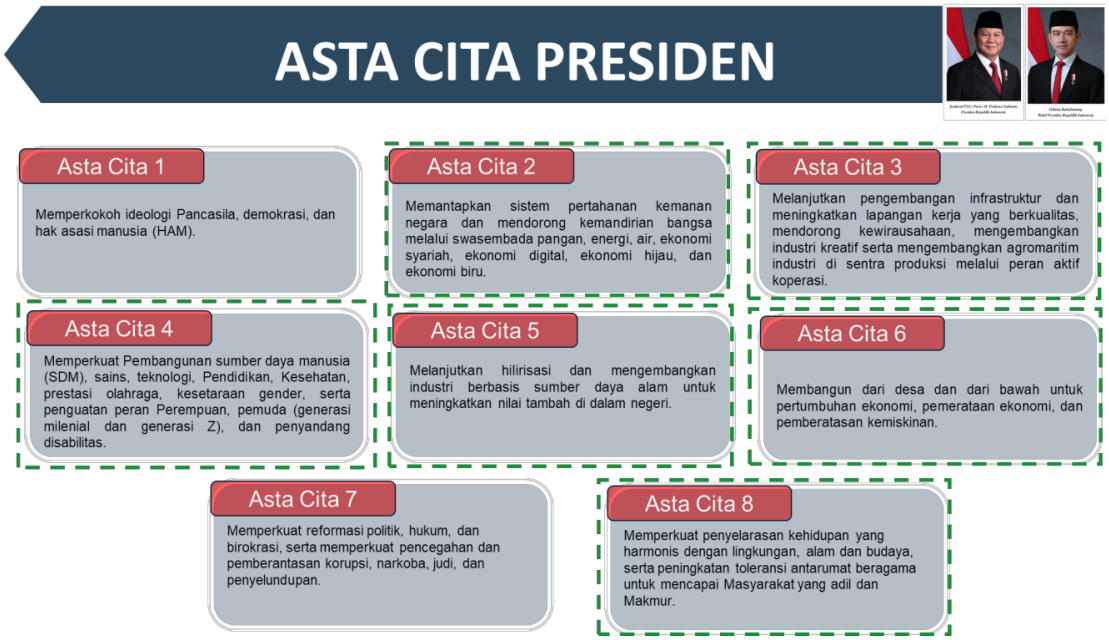
Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis BBPOM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2025-2029.

BBPOM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya yang mengacu pada Renstra BPOM 2025-2029 serta Asta Cita Presiden.

TERWUJUDNYA SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SEHAT DAN SEJAHTERA BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Gambar 2.1 Visi Badan POM

Untuk mewujudkan visi diatas, BBPOM di Kupang telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi – Presiden Terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Asta Cita Presiden

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Berikut adalah misi BPOM 2025-2029:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor HK.02.02.4B.09.24.186 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Tahunan 2025 tanggal 20 September 2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 disusun mengacu pada dokumen Rancangan Renstra BBPOM di Kupang 2025 – 2029, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2025. Selanjutnya BBPOM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga

digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah rincian target kinerja yang tercantum pada dokumen RKT 2025:

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,2
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96,7
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	81,5
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif		
10	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,75
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI	88,33
		Nlai AKIP	82,83
		Nilai Kinerja Anggaran	89,68
		Indeks Manajemen Risiko	3,4

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2025 disahkan, pada akhir Desember tahun 2024 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 dan DIPA Balai POM di Kupang sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat penyesuaian target terhadap beberapa indikator kinerja berdasarkan hasil reviu dari Unit Pengampu dan memperhatikan rancangan Renstra BBPOM di Kupang. Berikut adalah Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85%**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	**26%**
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80%**
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100%**
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85%**
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	**84%**
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**95%**
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80%**
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**96,13%**
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80%**
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**82,48%**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**50%**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**70,2 Nilai**
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**87,09 %**
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**10 Sekolah**
		16	Jumlah desa pangan aman	**4 Desa**
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1 Pasar**
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	**81%**
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**93%**
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90%**
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	**4,70 Indeks**
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	**90 Nilai**
		26	Nilai AKIP	**80,5 Nilai**
		27	Nilai Kinerja Anggaran	**93,77 Nilai**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
		28	Indeks Manajemen Risiko	**3 Indeks**

Sehubungan dengan Proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM sehingga dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merujuk pada Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, sehingga seluruh unit kerja melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Renstra BPOM 2025-2029. Revisi Perjanjian Kinerja ini memuat dan memperbaharui kembali breakdown target kinerja yang mengacu pada hasil desk kesepakatan target antara UPT dan Unit Pengampu yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2025. Revisi Perjanjian Kinerja BBPOM di Kupang dilakukan juga karena adanya peningkatan klasifikasi UPT dari Balai menjadi Balai Besar serta adanya pergantian pimpinan atau pejabat pada BBPOM di Kupang. Berikut adalah revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**90%**
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	**26%**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91%**
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100%**
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91%**
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	**84%**
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**95,5%**
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91%**
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**96,13%**
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**91%**
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**85,68%**
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**80%**
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100%**
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	**72,5**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
			sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**10%**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**50%**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**87,09**
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	**10**
		19	Jumlah desa pangan aman	**4**
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	**1**
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	**13,95%**
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**93%**
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90%**
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	**4,70**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	**90**
		26	Nilai AKIP	**80,5**
		27	Nilai Kinerja Anggaran	**5**
		28	Indeks Manajemen Risiko	**3**

Kegiatan :	**Anggaran**:
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 21.348.061.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp. 11.437.733.000

Penjelasakan terkait Perubahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan target dan manual indikator pada beberapa indikator yaitu:
    - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    - Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
    - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan mengalami perubahan manual Indikator kinerja pada cara perhitungannya yang dilatarbelakangi karena tidak semua UPT mempunyai komoditi UMKM sehingga dilakukan perubahan target PK 2025 semula 81% menjadi 13,95%.
2. Terdapat penambahan 3 indikator baru yang ditetapkan pada Triwulan 3 Tahun 2025 yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan target sebesar 80%, indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Kupang dengan target sebesar 100% dan indikator Persentase

Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan target sebesar 10%.

3. Terdapat perubahan cascading pada indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Kupang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang semula di *cascading* pada Sasaran Kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Kupang diubah pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengalami penyesuaian pada bulan agustus 2025 mengacu pada hasil revisi Perjanjian Kinerja 2025.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025

NO	IKSK	Bulan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	70	72	74	76	78	80	81	82	83	84	84	84

NO	IKSK	Bulan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
	ditindaklanjuti oleh stakeholder												
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	65	65	65	68	68	68	70	70	70	70.2
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	10	35	38	40	42	45	48	50	50	50	50
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	20	30	40	50	60	70	75	85	95	10
19	Jumlah desa pangan aman	0	0	20	35	60	65	75	80	85	90	95	4

NO	IKSK	Bulan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	20	30	50	60	70	80	85	90	95	1
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	81
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	10	20	30	40	50	60	70	80	90	93
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.5
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Berdasarkan hasil monitoring kinerja bulanan BBPOM di Kupang serta adanya revisi dokumen PK sehubungan dengan pemuktahiran Renstra BBPOM di Kupang terdapat perubahan pada target RAPK, berikut adalah rincian target RAPK yang telah direvisi:

Tabel 2.5 Rincian target RAPK yang telah direvisi

NO	IKSK	Bulan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91

NO	IKSK	Bulan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	72	74	76	78	80	81	84	84	84	84	84
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	95	95	95	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	85.68	85.68	85.68	85.68	85.68
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	65	65	65	68.78	68.78	68.78	69.49	69.49	69.49	72.5
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	0	10	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50

NO	IKSK	Bulan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	20	30	40	50	60	85	95	95	100	10
19	Jumlah desa pangan aman	0	0	20	35	60	65	75	75	80	80	100	4
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	20	30	50	60	70	85	95	95	100	1
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	30	40	50	60	82	83	84	85	13.95
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	10	20	30	40	50	55	60	70	80	93
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.5
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan disahkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe

Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\%Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100$$

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

   Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

   1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

   2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

c. Capaian Perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	△
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 70).	▼

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk BBPOM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKSK, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {(bobot x %capaian)1 + (bobot x %capaian)2 + ...(bobot x %capaian)n}/ n

Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

IE = %Capaian Output / %Capaian Input

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap kurang efisien

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

1. Jenis NKO

   Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

   a) NKO Periodik

      NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

   b) NKO Tahunan

      NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

      - Capaian Perjanjian Kinerja

        Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

      - Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada BBPOM di Manado merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan diterbitkan oleh

inspektorat yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah dengan faktor koreksi dari capaian kine rja yang dinormalisasi sebagai berikut :

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

2. Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

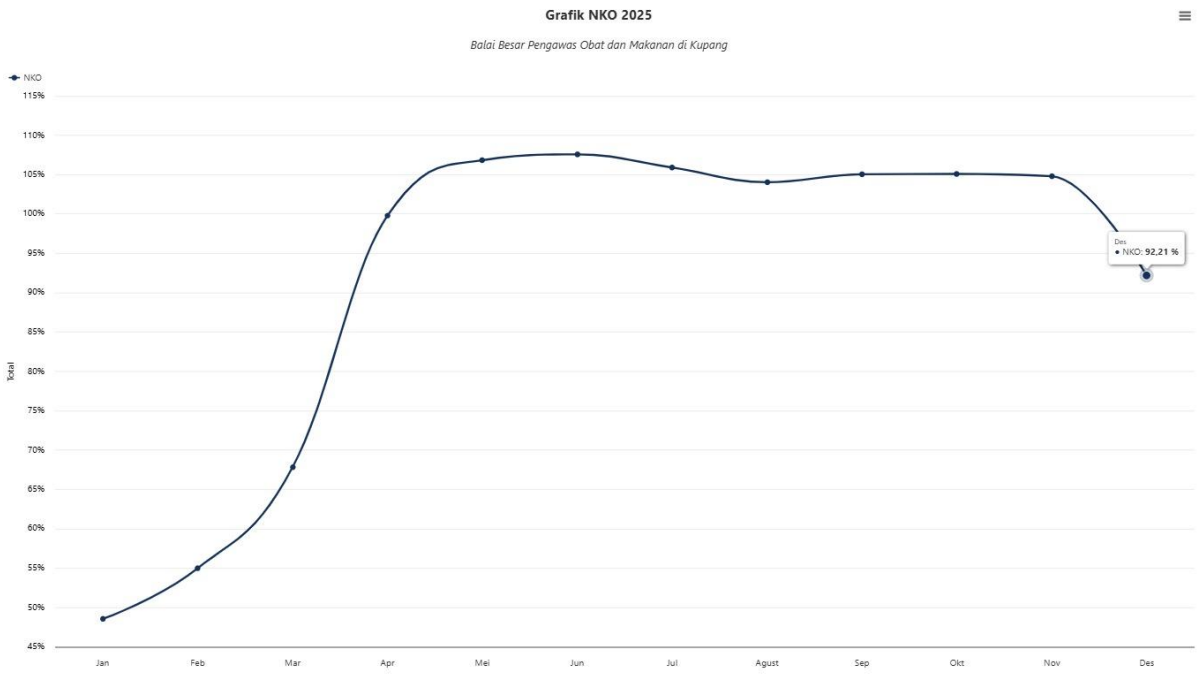
Dalam implementasi atas pengukuran kinerja di BBPOM di Kupang, masing-masing fungsi/bagian menyampaikan perkembangan rencana aksinya setiap bulan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja.
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya capaian kinerja.
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran.
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran.
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan.
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja.
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja BBPOM di Kupang selama periode Tahun 2025. Capaian Kinerja BBPOM di Kupang tahun 2025 diperoleh berdasarkan perbandingan antara Realisasi dan Target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPOM di Kupang sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025**.** Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi SIMETRIS E-Performance, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 sebesar **92,21%** dengan predikat **Baik**. Berikut rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Kupang pada tahun 2025:



Gambar 3.1 Grafik NKO tahun 2025

Tabel 3.1 Perhitungan NKO BBPOM di Kupang

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%Capaian Terhadap Target	Normalisasi Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	99,04	110,04	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00	28,26	108,69	108,69	Sangat Baik
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84,00	89,67	106,75	106,75	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,50	100,00	104,71	104,71	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%Capaian Terhadap Target	Normalisasi Capaian	Keterangan
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100,00	104,03	104,03	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	98,37	114,81	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,20	100,25	100,25	Sangat Baik
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	104,75	104,75	104,75	Sangat Baik
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,50	77,10	106,34	106,34	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10,00	10,00	100,00	100,00	Baik

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%Capaian Terhadap Target	Normalisasi Capaian	Keterangan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	50,00	100,00	100,00	Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	90,51	103,93	103,93	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00	100,00	Baik
		19	Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	100,00	Baik
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	100,00	Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,95	19,77	141,72	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93,00	71,00	76,34	76,34	Cukup
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	100,00	111,11	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%Capaian Terhadap Target	Normalisasi Capaian	Keterangan
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,92	104,68	104,68	Sangat Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	90,00	87,17	96,86	96,86	Baik
		26	Nilai AKIP	80,50	78,15	97,08	97,08	Baik
		27	Nilai Kinerja Anggaran	5,00	4,00	80,00	80,00	Cukup
		28	Indeks Manajemen Risiko	3,00	2,84	94,67	94,67	Baik
TOTAL CAPAIAN						**2581,77**		
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)						**92,21**		
PREDIKAT NKO						**Baik**		

A. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Pada bulan agustus 2025 terdapat perubahan terhadap Perjanjian Kinerja BBPOM di Kupang. Berdasarkan hasil Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2025, namun terdapat beberapa indikator kinerja yang dilakukan pengukuran kinerja pada akhir tahun. Berikut adalah pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	99,19	110,21	Tidak Dapat Disimpulkan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00	28,26	108,69	Sangat Baik
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84,00	89,67	106,75	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	100,00	104,71	Sangat Baik
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100,00	104,03	Sangat Baik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	98,37	114,81	Tidak Dapat Disimpulkan
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,56	100,70	Sangat Baik
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	104,75	104,75	Sangat Baik
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,50	77,10	106,34	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10,00	10,00	100,00	Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	50,00	100,00	Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	90,51	103,93	Sangat Baik

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00	Baik
		19	Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	Baik
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,95	19,77	141,72	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93,00	71,00	76,34	Cukup
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	100,00	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,92	104,68	Sangat Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	90,00	87,17	96,86	Baik
		26	Nilai AKIP	80,50	78,15	97,08	Baik
		27	Nilai Kinerja Anggaran	5,00	4,00	80,00	Cukup

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI
		28	Indeks Manajemen Risiko	3,00	2,84	94,67	Baik

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Kupang, sebagai berikut:

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

a. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
b. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
c. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
e. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90	99,19	110,21	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi IKSK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,19% dari target 90% dengan capaian terhadap target sebesar 110,0% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi IKSK sampai dengan Agustus 2025 masih dalam kategori **Sangat Baik**, namun dari September sampai Desember 2025 terjadi peningkatan capaian sehingga realisasi tinggi dan kategori capaian berubah menjadi **Tidak Dapat Disimpulkan**. Hal ini disebabkan karena adanya kelebihan kategori sampel dari kelas terapi musculoskeletal dan system saraf pusat yang disampling dari sarana tidak berijin. Sarana tidak berijin di Provinsi NTT banyak menjual obat dari kelas terapi musculoskeletal dan system saraf pusat. Hal ini meningkatkan jumlah sampel yang diambil dan diuji sehingga capaian melebihi target dan tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	90	99,19	110,21	Tidak dapat disimpulkan

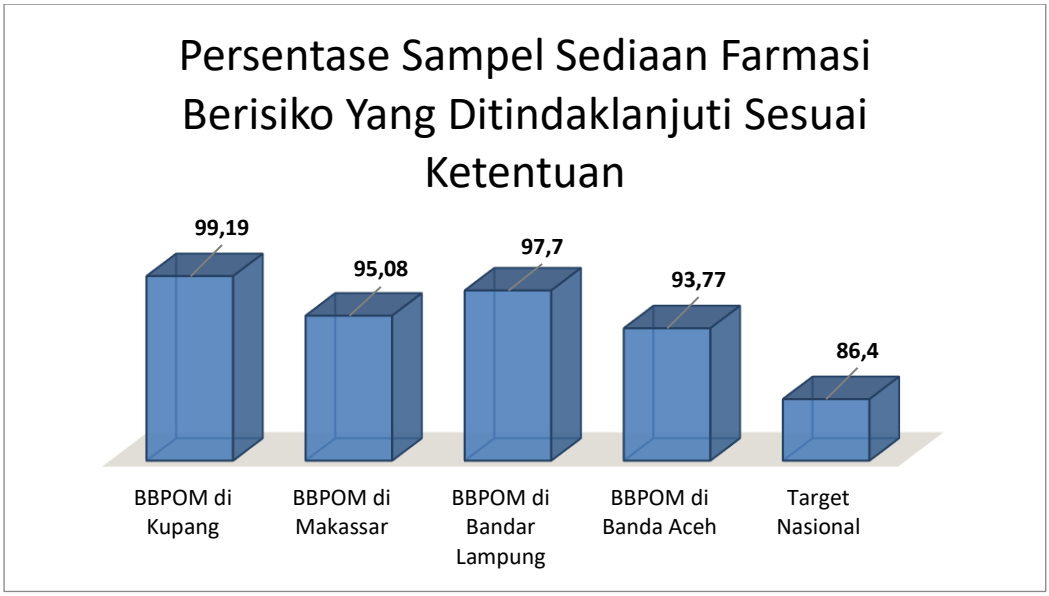
IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94	99,19	105,52	Tercapai / Melampaui ▲

IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal karena persentase realisasi yang dicapai 99,19% lebih besar dari target akhir Renstra yang ditetapkan yaitu sebesar 94%, sehingga dikategorikan **Tercapai/Melampaui**. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sampel sediaan farmasi berisiko yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.2 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Realisasi IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada BBPOM di Kupang tahun 2025 mencapai 99,19%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian BBPOM di Bandar Lampung sebesar 97,7%, BBPOM di Makassar sebesar 95,08% dan BBPOM di Banda Aceh sebesar 93,77%. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 86,40%, capaian BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja yang berada jauh di atas target nasional. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut terhadap sediaan farmasi berisiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Realisasi IKSK telah berhasil mencapai, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang secara sistematis memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1) Kerja sama lintas fungsi yang optimal antar unit dalam setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan sampling, penerimaan sampel, perencanaan pengujian, hingga pengadaan reagen dan media, berjalan dengan baik. Koordinasi yang terstruktur ini memastikan kelancaran operasional dan mengurangi potensi hambatan.
2) Ketersediaan daftar kemampuan uji laboratorium baik Kimia maupun mikrobiologi secara regional, sehingga mempermudah petugas dalam pelaksanaan sampling. Hal ini meningkatkan efisiensi serta akurasi pelaksanaan pengujian sesuai pedoman sampling dan pengujian.
3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap seluruh tahapan bisnis proses, mulai dari sampling, penerimaan sampel di TPS, hingga pengujian. Mekanisme ini memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala maupun potensi masalah, sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan.

Terhadap capaian IKSK Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko keterlambatan pelaporan hasil uji. Aktivitas

pengendalian yang dilakukan adalah rapat koordinasi (nota dinas, daftar hadir, notulen), monitoring dan evaluasi timeline pengujian. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tetap dilaksanakan secara optimal. Tahun 2025, IKSK ini dikaitkan dengan peristiwa risiko keterlambatan pelaporan hasil uji dan sampel rusak atau hilang pada proses pengiriman.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala /Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi tercapai, tidak ada kendala	Terus ditingkatkan secara terstruktur penguatan kerja sama lintas fungsi antar unit dalam setiap tahapan proses mulai dari perencanaan sampling, penerimaan sampel, perencanaan pengujian, hingga pengadaan reagen untuk memastikan kelancaran operasional sekaligus meminimalkan potensi hambatan.	Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala setiap bulan untuk memastikan keselarasan perencanaan sampling, penerimaan sampel, pengujian, dan pengadaan reagen.	Jan-Des 2026	Y	O-4	Keterlambatan pelaporan hasil uji
			Mengoptimalkan pemanfaatan daftar kemampuan uji laboratorium baik kimia maupun mikrobiologi, dan dimanfaatkan secara konsisten sebagai acuan dalam pelaksanaan sampling.	Melakukan sosialisasi internal mengenai daftar kemampuan uji laboratorium kimia dan mikrobiologi agar seluruh petugas memahami dan menggunakannya secara konsisten	Jan-Des 2026	Y	O-4	Keterlambatan pelaporan hasil uji

			Monitoring dan evaluasi bulanan terhadap seluruh tahapan bisnis proses perlu dipertahankan dan diperkuat sebagai mekanisme dalam mengidentifikasi dini kendala maupun potensi masalah, sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target.	Menetapkan rencana bulanan sampling, penerimaan sampel, dan pengujian sebagai dasar evaluasi.	Jan-Des 2026	Y	O-6	Sampel rusak atau hilang pada proses pengiriman

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh:

1) Pelaksanaan kegiatan sampling secara konsisten sesuai Renlak dan Pedoman Sampling
2) Koordinasi dengan KMEI dan Ditwas terkait untuk memastikan setiap kendala dapat segera diatasi, sehingga kelancaran operasional tetap terjaga.
3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di laboratorium melalui *on the job training* (OJT) bagi personel baru dan memperkuat kompetensi petugas dalam melaksanakan sampling sesuai ketentuan.
4) Evaluasi penerimaan sampel untuk masing-masing komoditi secara rutin setiap bulan berfungsi sebagai mekanisme monitoring berkelanjutan. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi masalah dan memastikan tindak lanjut terhadap sampel berisiko dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan.

2. Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada

perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.

j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00	28,26	108,69	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM pada tahun 2025 mencapai 28,26%, dengan capaian terhadap target sebesar 108,69% dan dikategorikan **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	-	-
	2025	26,00	28,26	108,69	Sangat Baik

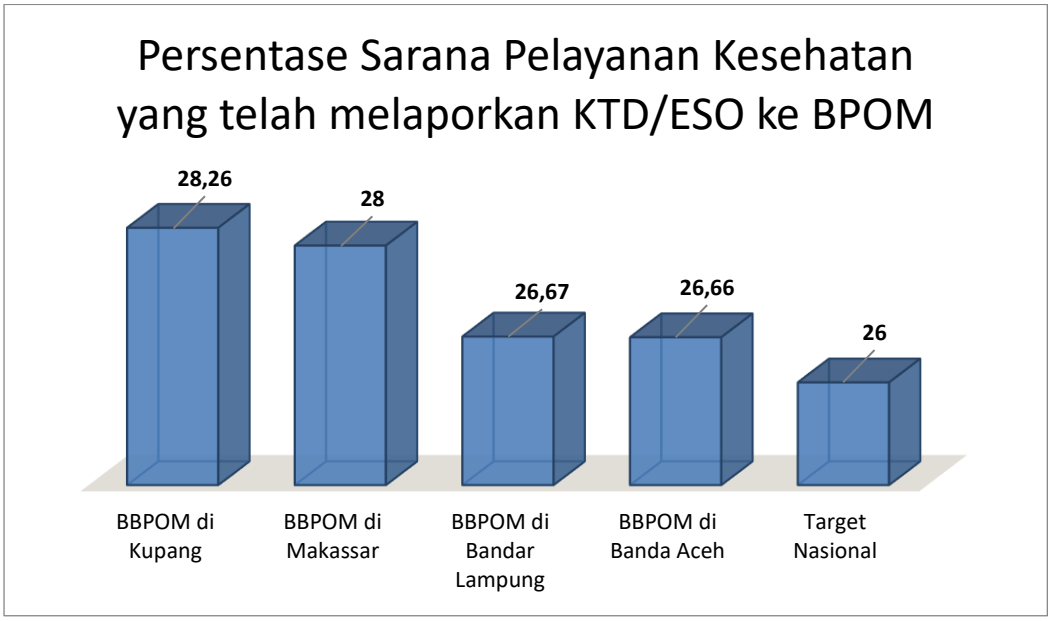
IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM	30,00	28,26	94,20	Akan Tercapai ▲

IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM menunjukkan kinerja yang cukup optimal karena persentase realisasi yang dicapai 94,20% lebih kecil dari target akhir Renstra yang ditetapkan yaitu sebesar 30%, sehingga dikategorikan **Akan Tercapai**. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di Kupang pada 2025 terhadap target Renstra belum mencapai target. Tenaga Medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan perlu peningkatan kesadaran untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi melalui kegiatan pendampingan dan pemberian apresiasi bagi yang melaporkan secara rutin.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.3 Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Realisasi IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM pada BBPOM di Kupang tahun 2025 mencapai 28,26%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Makassar sebesar 28%, BBPOM di Bandar Lampung sebesar 26,67% dan BBPOM di Aceh sebesar 26,66%. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 26%, capaian BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan berada jauh di atas target nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terkait pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kefarmasian serta tindak lanjut terhadap IKSK tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Realisasi IKSK telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang secara sistematis memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1) Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan untuk mengetahui kendala terkait pelaporan KTD/ESO dan tindak lanjut perbaikan

2) Pelaksanaan pendampingan dan desk kepada tenaga medis/tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapat bimtek KTD/ESO
3) Pemberian apresiasi secara tertulis kepada fasilitas pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD /ESO melalui E-MESO

Terhadap capaian IKSK Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ke BPOM telah dilakukan identifikasi risiko untuk mengelola atau mengurangi risiko yang teridentifikasi yang dapat memengaruhi kinerja atau capaian IKSK. Peristiwa risiko yang dapat dikaitkan dengan IKSK ini adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO melalui aplikasi e-Meso rendah, sehingga untuk mitigasi risiko atau perbaikan, aktivitas pengendalian yang disiapkan adalah melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada tenaga kesehatan di sarana pelayanan kefarmasian terkait farmakovigilans dan cara pelaporan KTD/ESO melalaui aplikasi e-Meso, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melaksanakan advokasi kepada stakeholder. Dengan adanya identifikasi risiko dan aktivitas pengendalian yang tepat maka kinerja IKSK ini dapat tercapai dengan kategori **Sangat Baik**.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala /Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi tercapai, tidak ada kendala	Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan untuk mengetahui kendala terkait pelaporan KTD/ESO dan tindak lanjut perbaikan	Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan untuk mengetahui kendala terkait pelaporan KTD/ESO dan tindak lanjut perbaikan	Jan-Des 2026	Y	S-3	Sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO melalui aplikasi e-MESO rendah

			Pelaksanaan pendampingan dan desk secara rutin kepada tenaga medis/tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapat bimtek KTD/ESO	Pelaksanaan pendampingan dan desk secara rutin kepada tenaga medis/tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapat bimtek KTD/ESO	Jan-Des 2026	Y	S-3	Sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO melalui aplikasi e-MESO rendah
			Pemberian apresiasi secara konsisten kepada fasilitas pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD /ESO melalui E-MESO tepat waktu.	Pemberian apresiasi secara konsisten kepada fasilitas pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD /ESO melalui E-MESO tepat waktu	Jan-Des 2026	Y	S-3	Sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO melalui aplikasi e-MESO rendah

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh:

1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam mengenali, mendokumentasikan, dan melaporkan KTD/ESO
2) Optimalisasi aplikasi e-MESO BPOM dengan fitur *user-friendly*
3) Monitoring dan evaluasi berkala kepatuhan sarana pelayanan kesehatan terhadap kewajiban pelaporan
4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan KTD/ESO
5) Kolaborasi lintas ektor untuk perkuatan jejaring pelaporan dan tindak lanjut KTD/ESO

3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.
d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
    1) kesesuaian target sampel UPT;
    2) kesesuaian parameter uji;
    3) ketepatan pengambilan kesimpulan;
    4) ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
    5) ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:
    1) Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian;
    2) Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi;
    3) Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS;
    4) Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS; dan
    5) Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 mencapai 100%, dengan capaian terhadap target sebesar 109,89% dan dikategorikan **Sangat Baik**. Pelaksanaan pengujian sampel Pangan Olahan tahun 2025 hingga pelaporan melalui SIPT meliputi: 262 sampel BBPOM di Kupang, 80 sampel Loka POM Manggarai Barat, 66 sampel Loka POM Sumba Timur, 33 sampel Loka POM Belu, serta 1 sampel BPOM di Ende. Dari keseluruhan sampel tersebut, terdapat 218 sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh BBPOM di Kupang dengan status Memenuhi Syarat (MS), serta 44 sampel dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-
	2025	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

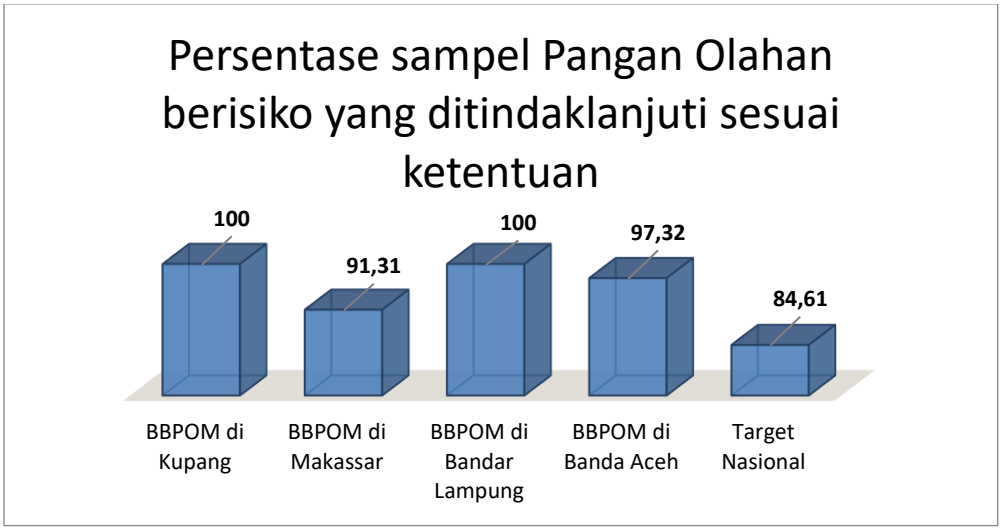
IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	Tercapai / Melampaui ▲

IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal karena persentase realisasi yang dicapai 100% lebih besar dari target akhir Renstra yang ditetapkan yaitu sebesar 95%, sehingga dikategorikan **Tercapai/Melampaui**. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sampel pangan olahan berisiko yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling, teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.4 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Realisasi IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada BBPOM di Kupang tahun 2025 mencapai 100%. Capaian ini setara dengan BBPOM di Bandar

Lampung, serta lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Banda Aceh sebesar 97,32% dan BBPOM di Makassar sebesar 91,31%. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 84,01%, capaian BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan berada jauh di atas target nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut terhadap pangan olahan berisiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan capaian IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada BBPOM di Kupang tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1) Koordinasi yang efektif antara bagian pemeriksaan dan pengujian, sehingga terdapat kesesuaian jumlah sampel yang diperiksa dengan jumlah sampel yang diuji.
2) Ketersediaan reagen, suku cadang, dan baku pembanding yang memadai, sehingga pengujian dapat dilaksanakan secara optimal dan memenuhi parameter uji kritis.
3) Kepatuhan terhadap *timeline* pengujian, di mana seluruh proses pengujian dapat diselesaikan tanpa melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.
4) Kompetensi penguji yang memadai, sehingga pelaksanaan pengujian sesuai dengan metode analisis yang tercantum dalam Pedoman Sampling 2025.

Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mencerminkan efektivitas manajemen sumber daya, ketepatan pelaksanaan prosedur, serta kualitas kompetensi teknis yang mendukung keberhasilan pengawasan pangan olahan berisiko di wilayah kerja BBPOM di Kupang.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko keterlambatan pelaporan hasil uji. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi timeline

pengujian. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala /Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	1. Peningkatan koordinasi yang efektif antara bagian pemeriksaan dan pengujian, sehingga terdapat kesesuaian jumlah sampel yang diperiksa dengan jumlah sampel yang diuji 2. Perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala etersediaan reagen, suku cadang, dan baku pembanding sehingga pengujian dapat dilaksanakan secara optimal dan memenuhi parameter uji kritis 3. Kepatuhan terhadap timeline pengujian, di mana seluruh proses pengujian dapat diselesaikan tanpa melebihi batas waktu yang telah ditetapkan 4. Perncanaan dan peningkatan kompetensi SDM penguji secara berkala	Monev regional laboratorium setiap triwulan	Januari – Desember 2026	Y	O-4	Keterlambatan pelaporan hasil uji

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menunjang keberhasilan capaian indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, BBPOM di Kupang melaksanakan sejumlah kegiatan strategis, antara lain:

1) Melaksanakan koordinasi antara tim pemeriksaan dan tim pengujian terkait jumlah rencana sampling dan pengujian sesuai target Rencana Pelaksanaan (Renlak) 2026.
2) Melakukan koordinasi antara tim pemeriksaan dan Tim Pengelola Sampel (TPS) mengenai mekanisme pengiriman sampel.
3) Menjalankan pengambilan sampel dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling yang berlaku.
4) Menyampaikan laporan hasil pengujian sampel yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT).
5) Menyusun perencanaan pengadaan reagen, suku cadang, dan baku pembanding secara tepat guna mendukung kelancaran pengujian.
6) Merancang perencanaan parameter pengujian serta pembagian tugas penguji untuk menciptakan kerja sama tim yang solid.
7) Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi penguji sesuai dengan Metode Analisis (MA) yang diperbarui setiap tahun.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mencerminkan komitmen terhadap efektivitas koordinasi, ketepatan perencanaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mendukung keberhasilan pengawasan pangan olahan berisiko secara berkelanjutan.

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai

sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Definisi IKSK indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar menjelaskan bahwa Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Baik

Realisasi IKSK Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar adalah 100,00 % dengan capaian terhadap target sebesar 100,00% dengan kategori **Baik**. Pelaksanaan pengujian sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB tahun 2025 sesuai dengan pelaporan SIPT sebanyak 23 sampel yang terdiri dari sampel yang disampling oleh

petugas BBPOM bersama Dinas Kesehatan Kota Kupang sebanyak 8 sampel dan sampel pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten (Sumba Barat Daya, Sumba Timur TTU dan TTS) sebanyak 15 sampel pangan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	2024	-	-	-	-
	2025	100,00	100,00	100,00	Baik

IKSK Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

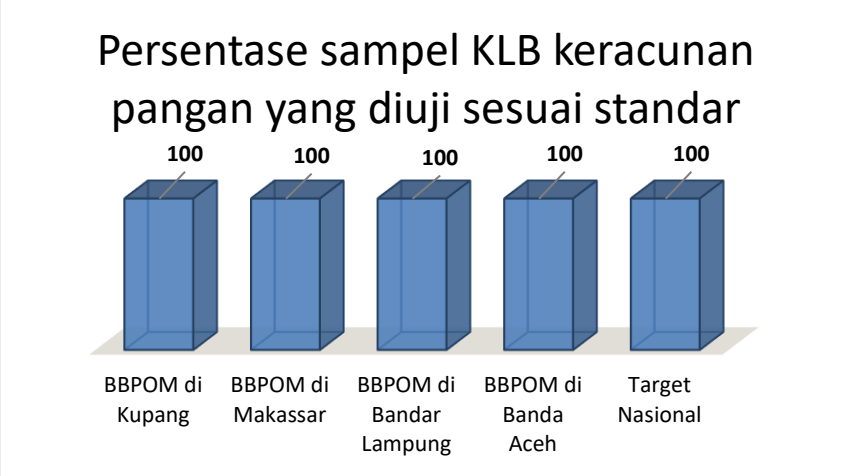
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Tercapai / Melampaui ▲

Realisasi IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar telah tercapai sesuai dengan target akhir Renstra yaitu 100%, dengan kategori **Tercapai/Melampaui**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah tercapai untuk target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029. Keberhasilan IKSK ini mencerminkan kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB Keracunan Pangan (KP) berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara

pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara BBPOM di Kupang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam tim KLB KP.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.5 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Realisasi IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar pada BBPOM di Kupang tahun 2025 mencapai 100%. Capaian ini setara dengan BBPOM di Makassar, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Banda Aceh yaitu 100%. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%, capaian BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja yang optimal karena mencapai target nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut terhadap sampel KLB keracunan pangan telah dilaksanakan dan diuji sesuai standar.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar pada BBPOM di Kupang tahun 2025 telah berhasil mencapai target. Keberhasilan tersebut didukung oleh sejumlah faktor, antara lain:

1) Penyusunan draft Surat Keputusan (SK) Tim Gerak Cepat KLB Tahun 2025 sesuai dengan tim kerja yang bertugas mengawal indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji berdasarkan standar.
2) Perencanaan pengadaan media dan reagen setelah adanya relaksasi anggaran.
3) Pemantauan ketersediaan media dan reagen untuk parameter yang paling sering diduga sebagai penyebab KLB.
4) Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor terkait laporan investigasi KLB keracunan pangan.
5) Pengagendaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penanganan KLB keracunan pangan.
6) Terjalinnya kerja sama yang baik antara BBPOM di Kupang, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan Badan Gizi Nasional (BGN).
7) Kemampuan laboratorium dalam memenuhi permintaan uji terhadap agen yang diduga sebagai penyebab KLB.

Sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang, direkomendasikan untuk mengadakan bimbingan teknis (bimtek) penanganan KLB keracunan pangan secara terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tim, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan efektivitas penanganan KLB keracunan pangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa keterlambatan deteksi dan respon penanganan KLB Keracunan Pangan. Aktivitas pengendalian risiko untuk IKSK ini dilakukan dengan membentuk SK tim gerak cepat UPT dan membuat SOP mikro penanganan KLB. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tetap dilaksanakan secara optimal.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala /Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Tidak ada kendala	1. Pembaharuan Surat Keputusan (SK) Tim Gerak Cepat KLB 2. Perencanaan dan pemantauan ketersediaan media dan reagen untuk parameter yang paling sering diduga sebagai penyebab KLB 3. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor terkait laporan investigasi KLB keracunan pangan 4. Perencanaan dan monev kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penanganan KLB keracunan pangan 5. Meningkatkan koordinasi yang baik sama antara BBPOM di Kupang, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan Badan Gizi Nasional (BGN)	1. Pembaharuan Surat Keputusan (SK) Tim Gerak Cepat KLB 2. Perencanaan dan pemantauan ketersediaan media dan reagen untuk parameter yang paling sering diduga sebagai penyebab KLB 3. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor terkait laporan investigasi KLB keracunan pangan 4. Perencanaan dan monev kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penanganan KLB keracunan pangan 5. Meningkatkan koordinasi yang baik sama antara BBPOM di Kupang, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dan Badan Gizi Nasional (BGN)	Jan-Des 2026	Y	O-8	Keterlambatan deteksi dan respon penanganan KLB Keracunan Pangan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menunjang keberhasilan capaian IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar, BBPOM di Kupang melaksanakan beberapa kegiatan strategis, antara lain:

1) Terjalinnya kerja sama yang baik antara BBPOM di Kupang dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
2) Kemampuan laboratorium dalam memenuhi permintaan uji terhadap parameter yang diduga sebagai penyebab kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.
3) Pengembangan jejaring kerja sama lintas sektor dengan dinas kesehatan, rumah sakit, dan laboratorium daerah untuk mempercepat investigasi KLB keracunan pangan
4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis lanjutan dan sertifikasi kompetensi penguji terkait metode analisis terbaru
5) Penguatan sistem manajemen mutu laboratorium melalui audit internal berkala untuk memastikan konsistensi pelaksanaan pengujian sesuai standar.
6) Optimalisasi sistem informasi laboratorium dengan integrasi data hasil pengujian ke dalam platform digital yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

Kegiatan tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi kelembagaan dan kesiapan laboratorium dalam mendukung penanganan KLB keracunan pangan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen BBPOM di Kupang dalam menjaga keamanan pangan melalui pengawasan yang terstandar dan responsif terhadap potensi risiko kesehatan masyarakat.

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan;
b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling;
c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya;
d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan);
e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Pada Tahun 2025, IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target kinerja sebesar 91%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh sampel PIRT berisiko telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengujian sampel PIRT pada tahun

2025 sampai dengan tahap pelaporan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) telah dilaksanakan terhadap 22 sampel. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 109,89%, sehingga kinerja pada indikator ini berada pada kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut, serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan pangan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

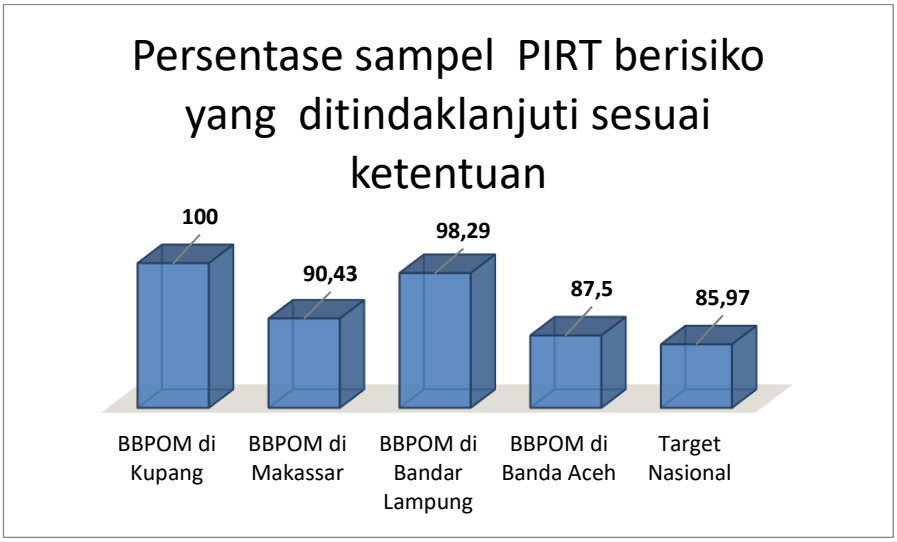
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	Tercapai / Melampaui ▲

IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 95%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh sampel PIRT berisiko yang teridentifikasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan capaian tersebut, persentase capaian terhadap target akhir renstra

mencapai 105,26%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk PIRT berisiko, serta komitmen yang kuat dalam menjamin keamanan pangan. Oleh karena itu, capaian indikator ini dikategorikan **Tercapai/Melampaui** target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.6 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Jika dibandingkan dengan UPT lainnya realisasi kinerja BBPOM di Kupang lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Makassar yang mencapai 90,43%, BBPOM di Lampung sebesar 98,29%, dan BBPOM di Aceh sebesar 87,50%. Dengan capaian tersebut, BBPOM di Kupang tidak hanya memenuhi target nasional, tetapi juga menunjukkan kinerja yang lebih baik. Perbandingan ini menggambarkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan di BBPOM Kupang berada pada kategori sangat baik.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Realisasi IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah mencapai target tahun 2025. Keberhasilan tersebut didukung oleh sejumlah faktor, antara lain:

1) Sampling dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling PIRT tahun 2025 yang telah dibuat
2) Sampel PIRT telah terealisasi 100% dan selesai diuji dan dilaporkan sesuai dengan Pedoman Sampling
3) Terdapat 2 (dua) jenis sampel yang TMS parameter uji telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:
   a) 1 (satu) sampel jenis kopi yang TMS parameter Okratoksin A kemungkinan disebabkan karena sarana produksi tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama praktik panen, pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan pasca panen yang baik
   b) 1 (satu) sampel jenis hasil olahan buah (manisan buah) yang TMS parameter Benzoat dan Siklamat kemungkinan disebabkan karena sarana IRTP sarana produksi tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama penambahan BTP sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran produk pangan.
4) Terhadap sampel PIRT yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian), telah dilakukan tahapan awal tindak lanjut oleh BBPOM di Kupang sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut. Tindak lanjut tersebut meliputi pembuatan surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk melakukan pembinaan terhadap 12 sampel Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang TMK Label, surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kab. TTU untuk melakukan pembinaan terhadap 1 sampel IRTP yang TMK Label, surat rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kab.Alor untuk melakukan pembinaan terhadap 3 sampel IRTP yang TMK Label, penyampaian hasil pengujian kepada pelaku usaha IRTP, serta koordinasi dengan Loka POM di Kab. Manggarai Barat untuk

melakukan pemeriksaan terhadap salah 1 produk PIRT asal Manggarai Barat dan telah mendapat laporan penarikan produk.

Terhadap capaian IKSK Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko keterlambatan pelaporan hasil uji. Aktivitas pengendalian risiko untuk IKSK ini adalah rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi timeline pengujian. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tetap dilaksanakan secara optimal dan tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	1. Memperhatikan kembali perhitungan untuk capaian terhadap target 2. Tetap menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target indikator secara rutin 3. Menindaklanjuti verifikasi capaian yang dikirimkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	1. Memperhatikan perhitungan untuk capaian terhadap target 2. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian target indikator secara rutin 3. Tindaklanjut verifikasi capaian yang dikirimkan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Tahun 2026	Y	O-4	Keterlambatan pelaporan hasil uji

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

1) Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap rencana dan realisasi sampling berperan penting dalam mengendalikan

pelaksanaan pengawasan, meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, serta memastikan kegiatan sampling dan pengujian berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan,

2) Efektivitas Pengujian dan Tindak Lanjut Sampel Berisiko

   Pengujian laboratorium terhadap sampel PIRT berisiko yang dilaksanakan secara konsisten menjadi dasar penetapan status sampel dan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman, termasuk pemeriksaan sarana, pengamanan, penarikan, dan pemusnahan produk TMS, sehingga berkontribusi langsung terhadap perlindungan masyarakat dan pencapaian indikator kinerja,

3) Sinergi Koordinasi Lintas Unit Kerja dan Lintas Sektor

   Koordinasi yang efektif dengan unit kerja lain dan lintas sektor mendukung penanganan kasus lintas wilayah secara cepat dan akuntabel, memperkuat implementasi pengawasan terpadu, serta menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan pemenuhan target hingga akhir tahun.

6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Disampaikan ke Stakeholder Tepat Waktu

Balai Besar pengawas Obat dan Makanan secara rutin melaksanakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk memastikan produk sediaan farmasi yang beredar aman, berkhasiat, bermutu dan bermanfaat. Dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan makanan perlu dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut keputusan dan rekomendasi hasil pengawasan yang telah dikeluarkan. Untuk itu salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur adalah persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Indikator ini menunjukkan seberapa besar keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, pemerintah, penanggung jawab dan atau pelaku usahaIndikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
d. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara perhitungan dan Formula pengukuran indikator tersebut sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

- A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%
- B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n.

  Contoh:

  %B3 = (Total pembilang (B1+B2+B3)) / (Total penyebut (B1+B2+B3)) x 100%

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	84,00	89,67	106,75	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder mencapai 89,67%, dengan capaian terhadap target sebesar 106,75% dan dikategorikan **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh BBPOM di Kupang telah ditindaklanjuti dengan baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	2024	73,00	83,90	114,93	Sangat Baik
	2025	84,00	89,67	106,75	Sangat Baik

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder pada tahun 2025 mencapai 89,67%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 83,90%. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen yang lebih kuat serta peningkatan pemahaman dari stakeholder terhadap pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, pendampingan yang dilakukan

oleh petugas BBPOM Kupang dalam membantu stakeholder menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian tersebut.

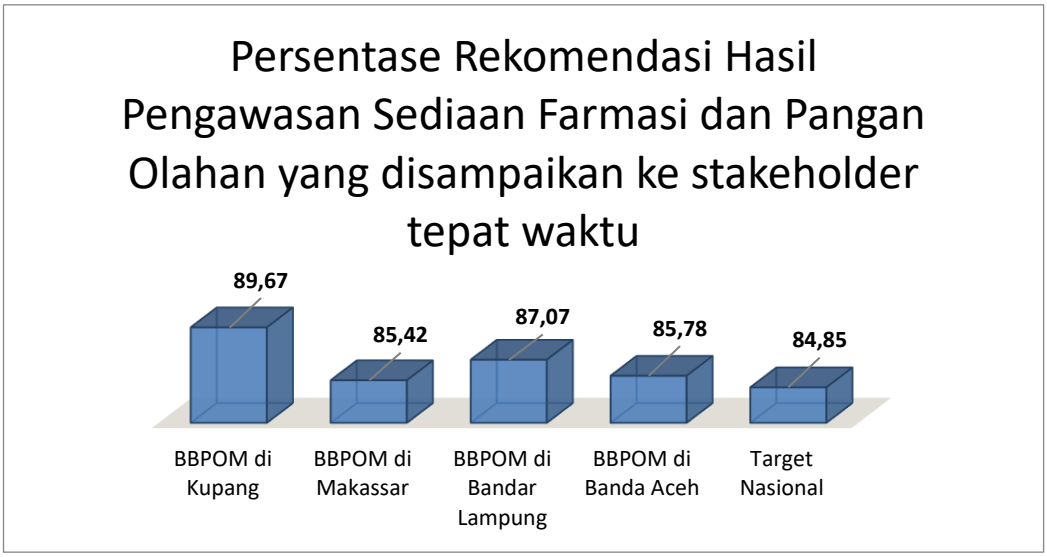
Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi pengawasan dan pendampingan yang diterapkan, sekaligus menegaskan peran aktif stakeholder dalam menjaga mutu dan keamanan sediaan farmasi serta pangan olahan. Diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan pada tahun 2026, melalui penguatan kolaborasi, konsistensi tindak lanjut, serta optimalisasi pendampingan yang berkesinambungan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	88,00	89,67	101,60	Tercapai / Melampaui ▲

Realisasi IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 88,00%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 89,67%. Hal ini menunjukkan bahwa stakeholder telah memiliki komitmen untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan. Hasil pengawasan tidak dipandang sebagai beban melainkan perbaikan secara terus menerus. Kinerja BBPOM di Kupang terhadap IKSK ini, pada jangka menengah menunjukkan peningkatan yang optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu

Realisasi IKSK Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder tahun 2025 mencapai 89,67%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Makassar sebesar 85,42%, BBPOM di Bandar Lampung sebesar 87,07% dan BBPOM di Banda Aceh yaitu 85,78%. Apabila dibandingkan dengan target nasional sebesar 84,85%, capaian BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja yang optimal karena mencapai target nasional. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut terhadap Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Realisasi IKSK telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan kategori sangat baik. Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang secara sistematis memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1) Komitmen Stakeholder

Peningkatan capaian dari 83,90% pada tahun 2024 menjadi 89,67% pada tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat dari stakeholder dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Hal ini mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

2) Peningkatan Pemahaman Regulasi

   Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BBPOM Kupang berkontribusi pada peningkatan pemahaman stakeholder mengenai standar keamanan, mutu, dan manfaat tindak lanjut pengawasan. Pemahaman yang lebih baik mendorong kepatuhan serta mempercepat proses tindak lanjut.

3) Pendampingan Intensif oleh BBPOM Kupang

   Peran aktif petugas BBPOM Kupang dalam memberikan pendampingan tidak hanya membantu penyelesaian tindak lanjut, tetapi juga meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap proses pengawasan.

4) Efektivitas Mekanisme Pengawasan

   Sistem pengawasan yang lebih terstruktur, transparan, dan berbasis risiko mendukung tercapainya hasil yang lebih optimal. Mekanisme ini memastikan bahwa rekomendasi pengawasan dapat segera ditindaklanjuti sesuai prioritas dan urgensi.

5) Kolaborasi dan Sinergi Antar Pihak

   Keberhasilan capaian juga dipengaruhi oleh adanya sinergi antara BBPOM Kupang, stakeholder, dan instansi terkait. Kolaborasi ini memperkuat koordinasi, mempercepat tindak lanjut, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko rendahnya tindak lanjut/*feedback* dari lintas sektor terhadap rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), monitoring dan evaluasi rencana aksi TKPPOM serta monitoring dan evaluasi CAPA. Dengan identifikasi risiko maka

tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	-	1. Sosialisasi dan edukasi untuk peningkatan pemahaman stakeholder mengenai standar keamanan, mutu, dan manfaat tindak lanjut pengawasan. 2. Peran aktif petugas dalam memberikan pendampingans dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait tindaklanjut hasil pengawasan oleh stakeholder 3. Meningkatan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, transparan, dan berbasis risiko untuk mendukung tercapainya hasil yang lebih optimal 4. Kolaborasi dan sinergi antara BBPOM Kupang, stakeholder, dan instansi terkait dalam memperkuat koordinasi, percepatan tindaklanjut serta peningkatan akuntabilitas	1. Sosialisasi dan edukasi untuk peningkatan pemahaman stakeholder mengenai standar keamanan, mutu, dan manfaat tindak lanjut pengawasan. 2. Peran aktif petugas dalam memberikan pendampingans dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait tindaklanjut hasil pengawasan oleh stakeholder 3. Meningkatan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, transparan, dan berbasis risiko untuk mendukung tercapainya hasil yang lebih optimal 4. Kolaborasi dan sinergi antara BBPOM Kupang, stakeholder, dan instansi terkait dalam memperkuat koordinasi,	Tahun 2026	Y	O-5	Rendahnya Tindak Lanjut / Feed back dari lintas sektor terhadap Rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dalam pelaksanaan pengawasan	percepatan tindaklanjut serta peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh:

1. Monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan untuk mengidentifikasi dini terhadap masalah maupun potensi masalah sehingga dapat dicari solusi yang tepat untuk memastikan pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap surat tindak lanjut/rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh petugas pengawas, sehingga stakeholder dapat segera merespons dan melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan.
3. Pendampingan dan desk *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) oleh petugas pengawas bagi pelaku usaha yang belum memahami tata cara penyusunan CAPA untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban tindak lanjut pengawasan.
4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan untuk memperkuat tindak lanjut hasil pengawasan, sebagai bentuk keterlibatan lintas sektor dalam menyelesaikan rekomendasi pengawasan sesuai peran masing-masing
5. Dukungan lintas sektor, termasuk dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota melalui pemanfaatan anggaran DAK Non Fisik, yang berkontribusi pada efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, antara lain sosialisasi regulasi dan fasilitasi pembuatan CAPA bagi penanggung jawab serta pemilik sarana sediaan farmasi.

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
   1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
   2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan.
   3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada : regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,50	100,00	104,71	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 memiliki target kinerja sebesar 95,50%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100,00%, yang menunjukkan bahwa 3 (tiga) sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target, seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 104,71% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan pangan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	95,50	100,00	104,71	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

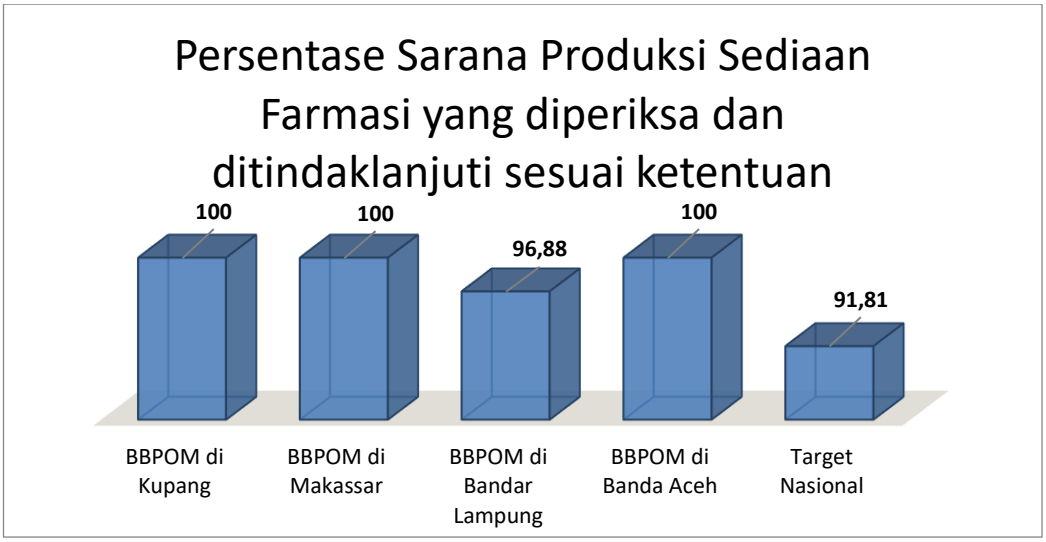
IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,00	100,00	101,01	Tercapai / Melampaui ▲

Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 99,00%, sementara

realisasi capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini berarti seluruh sarana produksi sediaan farmasi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan capaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 101,01%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sarana produksi sediaan farmasi, serta komitmen yang kuat dalam menjamin keamanan sediaan farmasi yang beredar. Oleh karena itu, capaian indikator ini dikategorikan **Tercapai/Melampaui** target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.8 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan data capaian IKSK Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang sangat baik. Capaian tertinggi adalah BBPOM di Kupang, BBPOM di Makassar dan BBPOM di Banda Aceh dengan persentase sebesar 100,00%, dan yang terendah adalah BBPOM di Lampung dengan capaian 96,88%. Mengacu pada target nasional sebesar 91,81%, maka BBPOM di

Kupang, BBPOM di Makassar, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Banda Aceh telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

IKSK ini telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Tahun 2025, ditargetkan 3 (tiga) sarana produksi sediaan farmasi dan seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana yang telah dibuat, dilaporkan di SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) tepat waktu, dan diterbitkan surat rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan ketentuan. Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan kinerja ini adalah:

1) Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana produksi telah memiliki kompetensi sebagai inspektur
2) Komitmen petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi, membuat tindak lanjut/ rekomendasi sesuai ketentuan dan pelaporan dilakukan tepat waktu
3) Dari tiga sarana yang diperiksa, seluruhnya MK (Memenuhi Ketentuan) dan telah ditindaklanjuti dengan memberikan surat peringatan kepada 1 (satu) sarana dan surat perbaikan hasil inspeksi kepada 2 (dua) sarana

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko rendahnya tindak lanjut/*feedback* dari lintas sektor terhadap rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), monitoring dan evaluasi rencana aksi TKPPOM serta monitoring dan evaluasi CAPA. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Penyampaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab sarana produksi sediaan farmasi dan memantau respon CAPA	Monitoring dan evaluasi CAPA tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Tahun 2026	Y	O-5	Rendahnya Tindak Lanjut / Feed back dari lintas sektor terhadap Rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan

f. Analisis program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

1) Konsisten melakukan pemeriksaan sarana sesuai target yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2) Melakukan komunikasi/ koordinasi dengan unit pembina di pusat dalam proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
3) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin
4) Komunikasi antara petugas/ fasilitator BBPOM di Kupang dengan penanggung jawab dan pemilik sarana produksi sediaan farmasi (UMOT, UKOT, kosmetika) dilakukan secara intens melalui WA Layanan Sertifikasi, sehingga dapat diperoleh umpan balik berupa CAPA/tindakan perbaikan dan pencegahan, meskipun belum semuanya dinyatakan sesuai (*closed*).

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas

produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

a. Ketepatan waktu tindak lanjut
b. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Pada Tahun 2025, IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target kinerja sebesar 91,00%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100,00%, yang menunjukkan bahwa 28 sarana produksi pangan olahan yang menjadi target, seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 109,89% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan pangan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

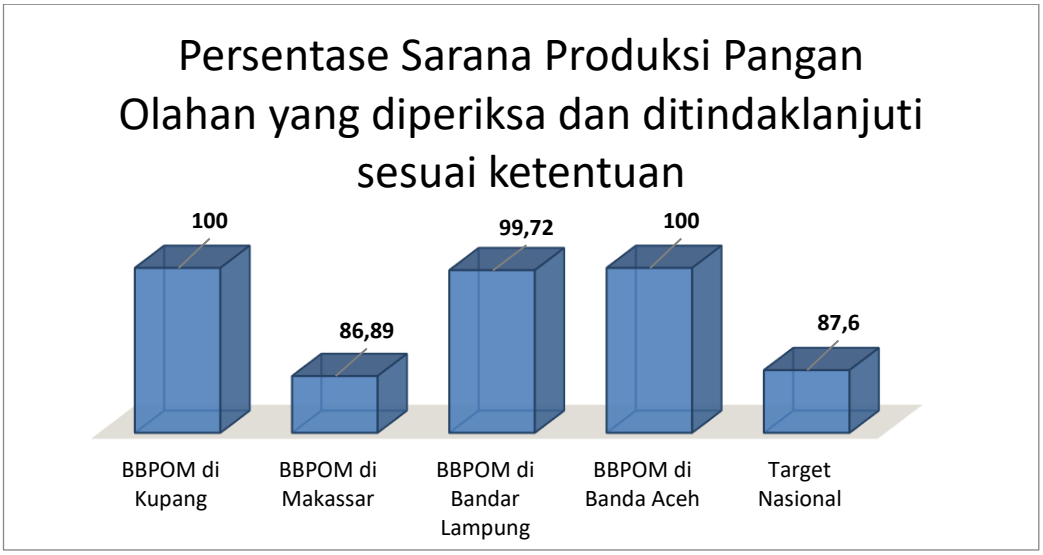
IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	Tercapai / Melampaui ▲

IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 95,00%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini berarti seluruh sarana produksi pangan olahan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan capaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 105,26%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sarana produksi pangan olahan, serta komitmen

yang kuat dalam menjamin keamanan pangan. Oleh karena itu, capaian indikator ini dikategorikan **Tercapai/Melampaui** target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.9 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan data capaian IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang sangat baik, dengan capaian 100,00% setara dengan BBPOM di Banda Aceh dan lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Bandar Lampung sebesar 99,72%, dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 86,89%. Mengacu pada target nasional sebesar 87,60%, maka BBPOM di Kupang, BBPOM Bandar Lampung dan BBPOM Banda Aceh telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Makassar belum mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana tahun 2025 yang telah dibuat, dilaporkan di SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) tepat waktu, dan diterbitkan surat rekomendasi tindak

lanjut sesuai dengan ketentuan. Beberapa analisis penyebab keberhasilan kinerja ini adalah :

1) Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana produksi telah memiliki kompetensi sebagai inspektur
2) Komitmen petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dan membuat tindak lanjut/ rekomendasi sesuai ketentuan. serta pelaporan dilakukan tepat waktu
3) Dokumen rencana inspeksi telah mencantumkan alternatif sarana pengganti sehingga realisasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan tetap dapat memenuhi target
4) Dari 28 (Dua Puluh Delapan) sarana yang diperiksa, 14 (empat belas) sarana MK (memenuhi ketentuan) dan 14 (empat belas) sarana yang TMK (tidak memenuhi ketentuan), telah ditindaklanjuti,dengan memberikan:
    a) Surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana kepada 12 sarana
    b) Surat peringatan kepada 6 sarana
    c) Surat rekomendasi peringatan sebanyak 5 surat
    d) Surat peringatan keras kepada 3 sarana
    e) Pencabutan IP CPPOB kepada 1 sarana

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko rendahnya tindak lanjut/*feedback* dari lintas sektor terhadap rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), monitoring dan evaluasi rencana aksi TKPPOM serta monitoring dan evaluasi CAPA. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Memantau respon CAPA dari pelaku usaha sarana produksi AMDK dengan hasil uji TMS, dan memantau laporan hasil penarikan produk	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindakan perbaikan dari sarana produksi AMDK dengan hasil uji TMS dan laporan hasil penarikan produk	Tahun 2026	Y	O-5	Rendahnya tindak lanjut / feedback dari lintas sektor terhadap rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh:

1) Pemeriksaan sarana secara konsisten sesuai target yang telah ditetapkan, dan tindaklanjut hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
2) Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan oleh petugas yang memiliki kompetensi sebagai Food Inspector, sehingga dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki, pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai prosedur, serta hasilnya dapat ditindaklanjuti secara tepat.
3) Koordinasi bersama ketua tim sampling pangan untuk menyusun surat tindak lanjut (pemberitahuan) kepada unit pembina terkait, yaitu Direktorat Peredaran Pangan Olahan BPOM dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM, untuk memastikan tindak lanjut hasil pengujian sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) dapat segera dilaksanakan.
4) Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan berkelanjutan

9. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

a. Pemeriksaan fasilitas ditribusi sediaan farmasi sangat penting dilakukan untuk memastikan produk sediaan farmasi yang beredar aman, berkhasiat, bermutu dan bermanfaat. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemeriksaan ini adalah persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
b. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
    1) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
    2) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
    3) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
    4) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
d. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

e. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

f. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	96,13	100,00	104,03	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan mencapai 100% dari target 96,13% dan capaian terhadap target sebesar 104.03% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	96,13	100,00	104,03	Sangat Baik

IKSK Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak dapat dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025

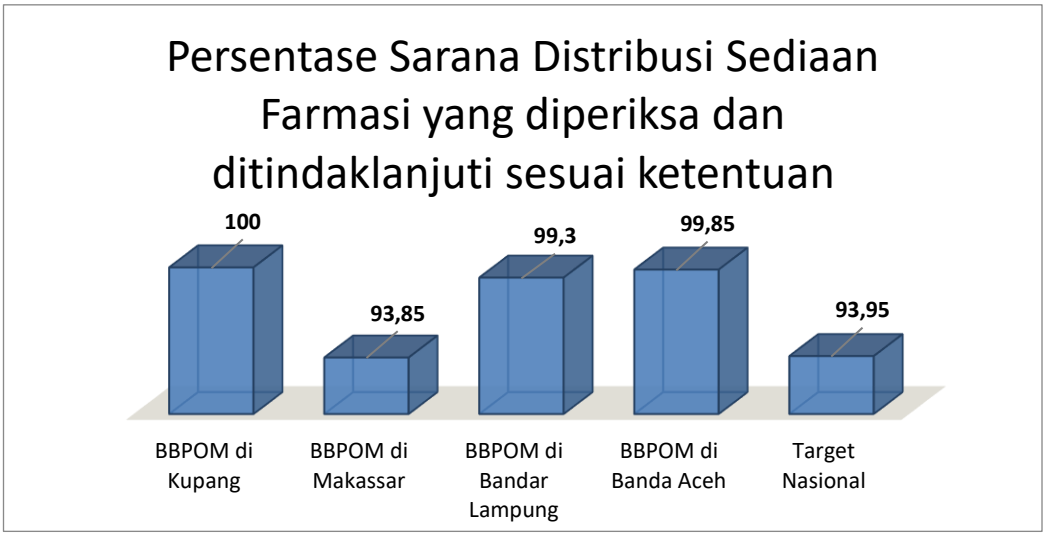
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99,38	100,00	100,62	Tercapai / Melampaui ▲

IKSK Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 99,38%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini berarti seluruh sarana distribusi sediaan farmasi telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan capaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 100,62%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi, serta komitmen yang kuat untuk memastikan produk sediaan farmasi yang beredar aman, berkhasiat, bermutu dan bermanfaat. Oleh karena itu, capaian indikator ini dikategorikan **Tercapai/Melampaui** target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.10 Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan data capaian IKSK Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang sangat baik, dengan capaian 100,00% lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM di Banda Aceh sebesar 99,85%, BBPOM di Bandar Lampung sebesar 99,30%, dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 93,85%. Mengacu pada target nasional sebesar 93,95%, maka BBPOM di Kupang, BBPOM Bandar Lampung dan BBPOM Banda Aceh telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Makassar belum mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

IKSK ini telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Persentase capaian kinerja mencapai 104,03%, menunjukkan bahwa adanya efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi, serta komitmen yang kuat untuk memastikan produk sediaan farmasi yang beredar aman, berkhasiat, bermutu dan bermanfaat. Beberapa faktor yang menjadi pendukung keberhasilan yaitu:

1) Penerapan perencanaan berbasis risiko dengan pemetaan sarana distribusi secara menyeluruh, dan pengawasan dilakukan sesuai dengan perencanaan. Hal ini memastikan setiap sarana yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dapat teridentifikasi dan masuk dalam prioritas pemeriksaan.
2) Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi.
3) Kompetensi SDM yang memadai melalui pelatihan berkelanjutan.
4) Pemanfaatan system pencatatan dan pelaporan berbasis digital melalui SIPT untuk meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan transparansi hasil pengawasan.
5) Peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait distribusi sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah tersedianya beberapa kegiatan yang mendukung capaian IKSK yaitu Inovasi PEPETIN UMKM 7 in 1, KIE terkait Obat dan Makanan, Pelaksanaan sanksi administratif, Inovasi Webinar SEO dan Inovasi VIZIN PRO. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	-	1. Pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan berbasis risiko 2. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan	1. Membuat perencanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi berbasis risiko 2. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi	Desember 2026	Y	S-1	Beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			sarana distribusi sediaan farmasi 3. Peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait distribusi sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui KIE	3. KIE dalam rangka peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait distribusi sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan				

f. Analisis program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh:

1) Monitoring dan Evaluasi Rutin

   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap bulan memungkinkan identifikasi dini terhadap masalah maupun potensi masalah. Dengan demikian, solusi dapat segera dirumuskan dan diterapkan sehingga efektivitas pengawasan tetap terjaga.

2) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan

   Pelatihan yang memadai bagi petugas pemeriksaan meningkatkan kompetensi teknis dan keterampilan praktis dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut yang sesuai ketentuan.

3) Dukungan Lintas Fungsi Internal

   Sinergi antarbagian di lingkungan BBPOM Kupang membantu mengatasi keterbatasan sumber daya. Dukungan lintas fungsi memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian tugas pengawasan.

4) Kolaborasi dengan Infokom

   Kerja sama dengan unit Infokom melalui kegiatan sosialisasi sediaan farmasi yang aman, pertukaran data, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan meningkatkan transparansi dan efektivitas penindakan.

5) Kerja Sama Lintas Sektor di Wilayah Kerja

Dukungan dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota melalui sosialisasi regulasi kepada penanggung jawab dan pemilik sarana distribusi sediaan farmasi, yang didanai dari anggaran DAK Non Fisik, memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2) Ketepatan waktu pelaporan
3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan, sebasar 100,00%, dari target kinerja sebesar 91,00%. Hal ini menunjukkan bahwa 142 sarana distribusi pangan olahan yang menjadi target, seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai

109,89% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan pangan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

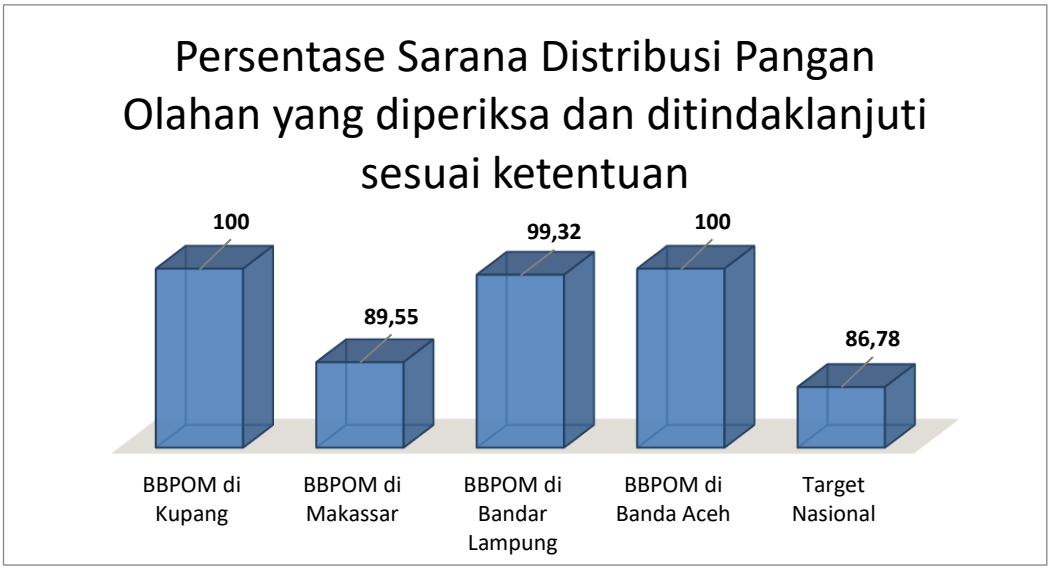
IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	Tercapai / Melampaui ▲

IKSK Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 95%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti seluruh sarana distribusi pangan olahan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan capaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 105,26%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan, serta komitmen yang kuat dalam menjamin keamanan pangan. Oleh karena itu, capaian indikator ini dikategorikan **Tercapai/Melampaui** target.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.11 Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan data capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan tahun 2025, menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang sangat baik, dengan capaian 100% setara dengan capaian BBPOM di Banda Aceh sebesar 100,00%, dan lebih tinggi dari BBPOM di Bandar Lampung sebesar 99,32%, dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 89,55%. Mengacu pada target nasional sebesar 86,78%, maka BBPOM di Kupang, BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Makassar telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

IKSK ini telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Persentase capaian kinerja mencapai 109,89%, menunjukkan bahwa adanya

efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi pangan olahan, serta komitmen yang kuat untuk memastikan produk pangan olahan yang beredar aman, berkhasiat, bermutu dan bermanfaat. Beberapa faktor yang menjadi pendukung keberhasilan adalah:

1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan setiap bulan
2) Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan sarana distribusi pangan olahan
3) Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana tahun 2025 yang telah dibuat
4) Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan telah terealisasi sebanyak 142 sarana dari target 142 sarana (100%), seluruhnya dilaporkan tepat waktu dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan
5) Dari 142 sarana yang diperiksa, 123 (seratus dua puluh tiga) sarana yang MK dan 19 (sembilan belas) sarana yang TMK, telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:
    a) Pembinaan kepada 116 sarana
    b) Peringatan kepada 24 sarana dan
    c) Peringatan keras kepada 2 sarana

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah tersedianya beberapa kegiatan yang mendukung capaian IKSK yaitu Inovasi PEPETIN UMKM 7 in 1, KIE terkait Obat dan Makanan, Pelaksanaan sanksi administratif, Inovasi Webinar SEO dan Inovasi VIZIN PRO. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	-	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan	Monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan	31 Desember 2026	Y	SDM - 2	Inkonsistensi Petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh:

1) Konsistensi Pemeriksaan Sarana

   Pemeriksaan sarana distribusi dilakukan secara konsisten sesuai target yang telah ditetapkan. Setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga efektivitas pengawasan tetap terjaga dan capaian indikator dapat dipenuhi secara optimal.

2) Komunikasi Efektif dalam Tim

   Terjalinnya komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dan Ketua Tim memungkinkan adanya solusi cepat apabila ditemukan kendala, seperti sarana yang tutup. Sarana tersebut segera diganti dengan sarana lain, sehingga target pemeriksaan tetap tercapai tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

3) Rapat Monitoring dan Evaluasi Rutin

   Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala memberikan ruang untuk meninjau capaian, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan. Mekanisme ini memastikan keberlanjutan peningkatan mutu pengawasan dan konsistensi capaian kinerja

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

IKSK ini termasuk dalam sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Definisi IKSK tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan Pangan Olahan.
c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.
g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	98,37	114,81	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan adalah 98.37 % dan capaian terhadap target sebesar 114.81% dengan kategori kinerja **Tidak Dapat Disimpulkan.** Realisasi kinerja melebihi dari yang ditargetkan sehingga capaian menjadi tidak dapat disimpulkan karena dalam pengawasan iklan, target yang disetujui sesuai dengan baseline sebesar 85,68% dikarenakan target dari renstra merupakan target keseluruhan iklan komoditi, selain itu karena merupakan indikator baru sehingga menggunakan database tahun sebelumnya yang tidak menjadi indikator kinerja utama.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	2024				
	2025	85,68	98,37	114,81	Tidak Dapat Disimpulkan

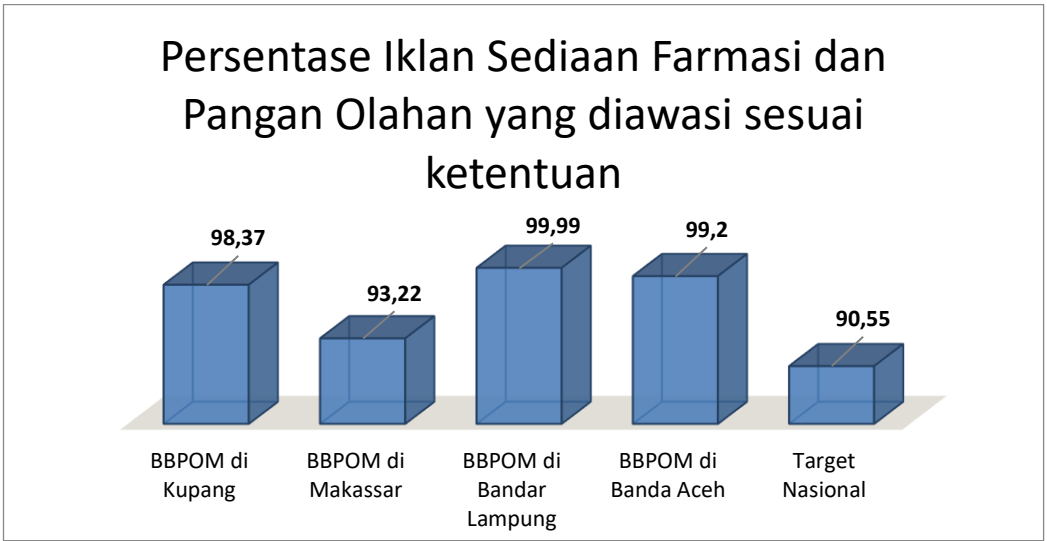
IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,28	98,37	107,77	Tercapai/ Melampaui ▲

IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang optimal. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 91,28%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 98,37%. Dengan capaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 107,77%, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan mulai dari tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.12 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan data capaian Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan tahun 2025, menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah mencapai hasil yang baik, dengan capaian 98,37% lebih tinggi dari capaian BBPOM di Makassar sebesar 93,22% dan lebih rendah dari capaian BBPOM di Banda Aceh sebesar 99,20%, dan BBPOM di Bandar Lampung sebesar 99,99%. Mengacu pada target nasional sebesar 90,55%, maka BBPOM di Kupang, BBPOM di Banda Aceh, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Makassar telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKSK ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti:

1) Sinergi antara petugas pengawasan iklan dan supervisor
   Kerjasama yang efektif tercermin dalam pemenuhan jumlah iklan yang diawasi, ketepatan waktu pelaporan, serta konsistensi pengambilan keputusan sesuai regulasi. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik, sehingga kualitas pengawasan meningkat dan hasil kerja memperoleh nilai tinggi.
2) Pendampingan ketua tim kepada petugas pengawasan iklan
   Dukungan dan arahan yang diberikan ketua tim memungkinkan petugas memahami regulasi yang berlaku untuk setiap komoditi. Pendampingan ini memperkuat kapasitas petugas dalam menafsirkan aturan, sehingga pengawasan iklan lebih tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

a) Sosialisasi/ Diseminasi/ Sharing/ Pelatihan bagi petugas pengawas Obat dan makanan
b) Rencana dan evaluasi hasil pelatihan
c) Monitoring dan evaluasi internal bulanan

d) Verifikasi pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut oleh Ketua Tim.

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	-	1. Sinergi antara petugas pengawasan iklan dan supervisor dalam pemenuhan jumlah iklan yang diawasi, ketepatan waktu pelaporan, serta konsistensi pengambilan keputusan sesuai regulasi 2. Revisi target sesuai dengan capaian kinerja, sehingga capaian kinerja bisa disimpulkan dengan baik dan dapat memberikan gambaran manfaat dari pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaksanakan	1. Monitoring dan evaluasi bersama pengawasan iklan 2. Revisi target pada desk penyesuaian target tahun berjalan	31 Desember 2026	Y	SDM - 2	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKSK Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan ditunjang oleh penguatan

koordinasi antara petugas pengawasan iklan dan supervisor, pendampingan ketua tim yang meningkatkan pemahaman regulasi, penerapan SOP yang konsisten, serta dukungan sistem digitalisasi pelaporan. Sinergi program dan kegiatan tersebut memastikan pengawasan berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar termasuk dalam sasaran meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Definisi IKSK tersebut sebagai berikut:

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
d. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
e. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan

selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	80,56	100,70	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar adalah 80,56% dengan capaian terhadap target sebesar 100,70% sehingga dikategorikan **Sangat Baik**. Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik tahun 2025 sesuai dengan pelaporan SIPT sebanyak 146 produk tembakau dari target tahunan 144 sampel dan 3 rokok elektronik dari target tahunan 3 sampel (100%).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	2024	-	-	-	-
	2025	80,00	80,56	100,70	Sangat Baik

IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

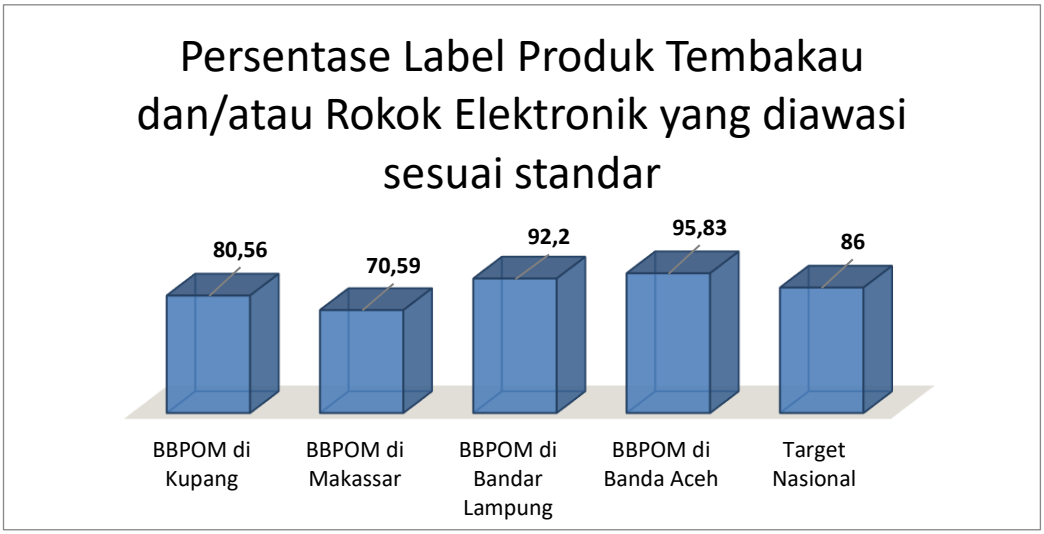
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84,00	80,56	95,90	Akan Tercapai 

IKSK Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar, menunjukkan kinerja yang cukup optimal. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 84,00%, sementara realisasi capaian kinerja baru mencapai 80,56%. Dengan capaian tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 95,90%, dengan kategori **Akan Tercapai**, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025-2029.

Kinerja ini menunjukkan bahwa perlu komitmen lebih untuk melaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik secara konsisten di tahun 2026 sesuai dengan ketentuan sehingga efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.13 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar

Berdasarkan data capaian IKSK Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar tahun 2025, menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang mencapai hasil yang cukup baik, dengan capaian 80,56% lebih kecil dari capaian BBPOM di Banda Aceh sebesar 95,83%, dan BBPOM di Bandar Lampung sebesar 92,20%, dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar dengan capaian 70,59%. Mengacu pada target nasional sebesar 86,00%, maka BBPOM di Kupang dan BBPOM di Makassar belum mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Banda Aceh dan BBPOM di Bandar Lampung telah mencapai target nasional. BBPOM di Kupang belum mencapai target nasional karena penetapan target tahun 2025 oleh pengampu lebih rendah dibandingkan target nasional. Namun, melalui peningkatan kinerja, target pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dapat dicapai sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan lebih efektif.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKSK Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti:

1) Peningkatan kualitas inspeksi dan supervisi terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik berdasarkan perencanaan serta konsistensi penerapan standar pengawasan sesuai regulasi nasional.
2) Pemanfaatan tenaga pengawas yang lebih terlatih melalui pelatihan teknis dan workshop serta dukungan sistem digitalisasi yang mempercepat proses verifikasi label melalui SIPT
3) Koordinasi dan kolaborasi ketua tim dan tim dalam melakukan pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik
4) Monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan secara konsisten untuk mengukur capaian kinerja, kendala dan tindaklanjut yang harus dilakukan

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

a) Sosialisasi/ Diseminasi/ Sharing/ Pelatihan bagi petugas pengawas Obat dan makanan
b) Rencana dan evaluasi hasil pelatihan
c) Monitoring dan evaluasi internal bulanan
d) Verifikasi pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut oleh Ketua Tim.

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	-	1. Peningkatan kualitas inspeksi dan supervisi terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik berdasarkan perencanaan serta konsistensi penerapan standar pengawasan sesuai regulasi nasional 2. Koordinasi dan kolaborasi ketua tim dan tim dalam melakukan pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik 3. Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 4. Monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan secara konsisten untuk mengukur capaian kinerja, kendala dan tindaklanjut yang harus dilakukan	1. Peningkatan kualitas inspeksi dan supervisi terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik berdasarkan perencanaan serta konsistensi penerapan standar pengawasan sesuai regulasi nasional 2. Koordinasi dan kolaborasi ketua tim dan tim dalam melakukan pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik 3. Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan 4. Monitoring dan evaluasi berkala setiap bulan secara konsisten untuk mengukur capaian kinerja, kendala dan tindaklanjut yang harus dilakukan	31 Desember 2026	Y	SDM - 2	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh:

1) Penguatan kapasitas pengawasan melalui program pelatihan teknis bagi pengawas untuk meningkatkan kompetensi dalam verifikasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar.
2) Digitalisasi sistem pengawasan melalui pemanfataan yang optimal SIPT pelaporan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar
3) Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran produsen dan distributor terkait label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar
4) Monitoring dan evaluasi berkelanjutan setiap bulan untuk mengukur capaian kinerja, kendala dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan

13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT termasuk dalam sasaran kegiatan mMeningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan. Komponen penilaian terdiri atas empat aspek, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Masing-masing aspek memiliki bobot yang sama, yaitu 25%.

Formula perhitungan:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT =
25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penjelasan perhitungan setiap komponen adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) – bobot 25%

   Dihitung dari persentase jumlah penggunaan tools antibiotik pada pemeriksaan apotek dibandingkan dengan target apotek, serta ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (B) – bobot 25%

   Dihitung dari persentase capaian jumlah kegiatan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba pada sarana pelayanan kefarmasian (khususnya apotek) dibandingkan dengan target tahunan UPT.

c. Pelaksanaan Advokasi (C) – bobot 25%

   Dihitung dari persentase capaian jumlah kegiatan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan dengan target tahunan UPT.

d. Pelaksanaan Publikasi (D) – bobot 25%

   Dihitung dari persentase capaian jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter dibandingkan target yang ditetapkan.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	104,75%	104,75%	Sangat Baik

Realisasi IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT Tahun 2025 mencapai 104,75%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Dengan demikian, indikator kinerja memperoleh capaian sebesar 104,75% dan termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi pengendalian AMR di wilayah UPT telah berjalan efektif dan melebihi target yang direncanakan, terutama melalui optimalisasi penggunaan tools

pengawasan, pelaksanaan bimbingan teknis, advokasi lintas sektor, serta publikasi hasil pengawasan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT	2024				
	2025	100%	104,75%	104,75%	Sangat Baik

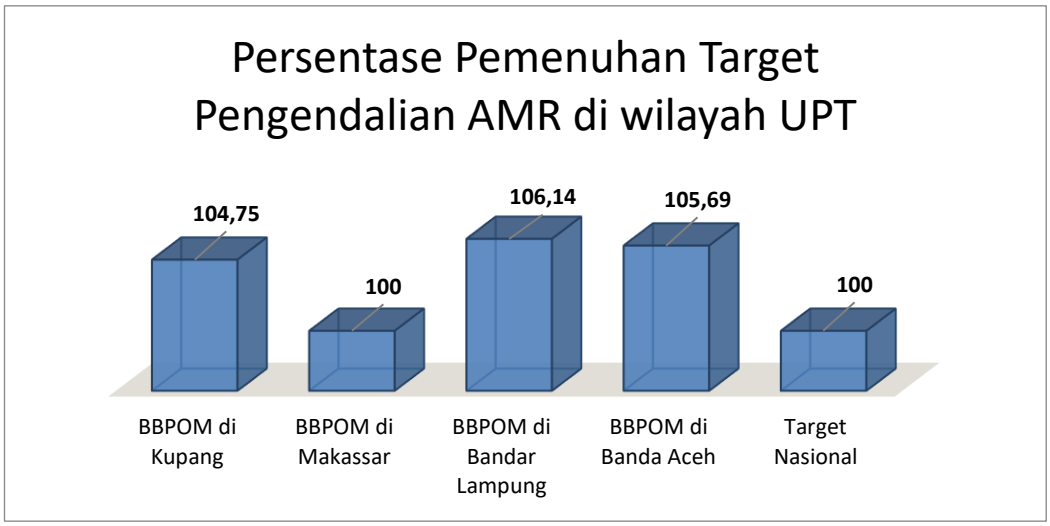
IKSK Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	104,75%	104,75%	Tercapai / Melampaui ▲

Realisasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT Tahun 2025 sebesar 104,75% telah melampaui target akhir Renstra sebesar 100%, dengan capaian 104,75% dan kategori **Tercapai/Melampaui**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi pengendalian AMR telah berada di atas target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi pengendalian AMR dan memberikan prospek yang sangat baik bagi keberlanjutan pencapaian kinerja pada periode Renstra berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.14 Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT

Realisasi Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah BBPOM di Kupang Tahun 2025 sebesar 104,75% berada di atas target nasional sebesar 100%. Dibandingkan dengan UPT lain, capaian BBPOM di Kupang lebih tinggi daripada BBPOM di Makassar (100%), namun sedikit lebih rendah dibandingkan BBPOM di Bandar Lampung (106,14%) dan BBPOM di Banda Aceh (105,69%). Perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang berada pada tingkat yang kompetitif antar UPT dan berkontribusi positif terhadap pencapaian target nasional pengendalian AMR.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator pengendalian AMR pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh penguatan komitmen organisasi, konsistensi pelaksanaan rencana aksi, serta dukungan koordinasi lintas sektor yang mendorong efektivitas implementasi kebijakan pengendalian AMR. Faktor tersebut memungkinkan pencapaian indikator melampaui target yang ditetapkan.

Di sisi lain, keberlanjutan kinerja masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran operasional, belum meratanya sinergi lintas sektor, serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan antibiotik yang rasional. Kondisi ini berpotensi memengaruhi stabilitas capaian kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, perbaikan kinerja diarahkan pada penguatan perencanaan berbasis prioritas dan risiko, peningkatan kolaborasi lintas sektor secara sistematis, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan pencapaian indikator.

Terhadap capaian IKSK ini akan dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko sesuai dengan kinerja IKSK yang telah tercapai tahun 2025. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	-	Penguatan perencanaan program pengendalian AMR berbasis prioritas dan risiko, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan monitoring dan evaluasi	Menyusun rencana kerja pengendalian AMR yang memprioritaskan kegiatan berdampak tinggi, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan konsistensi	31 Desember 2026	Y	T	-

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pelaksanaan dan pencapaian target.				

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian indikator pengendalian AMR didukung oleh pelaksanaan program utama yang meliputi penggunaan tools pengawasan antibiotik, bimbingan teknis kepada sarana kefarmasian, advokasi lintas sektor, dan publikasi edukasi kepada masyarakat. Program-program tersebut berkontribusi pada peningkatan kepatuhan sarana, pemahaman stakeholder, serta jangkauan edukasi publik.

Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan yang melibatkan kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah memberikan dampak paling signifikan terhadap capaian indikator. Sebaliknya, keterbatasan anggaran dan variasi kapasitas pelaksanaan di lapangan menyebabkan intensitas dan jangkauan program belum sepenuhnya merata.

Ke depan, diperlukan optimalisasi desain program, penguatan kualitas pelaksanaan, serta peningkatan efektivitas strategi komunikasi agar dampak kegiatan terhadap pengendalian AMR semakin terukur.

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM

merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

a. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

   Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya;

b. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

   Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya;

c. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

   Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:

   Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

a. SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
   1) Standar Ruang Lingkup;
   2) Standar Peralatan;
   3) Standar Kompetensi Laboratorium;
   4) Standar Metode yang terverifikasi.

b. SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
   1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
   2) Standar Peralatan;

3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,50	77,10	106,34	Sangat Baik

Pada Tahun 2025, IKSK Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium ditetapkan dengan target sebesar 72,50%. Realisasi yang dicapai mencapai 77,10%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 106,34%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan standar kemampuan laboratorium telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga kinerja pada indikator ini berada pada kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2024	-	-	-	-
	2025	72,50	77,10	106,34	Sangat Baik

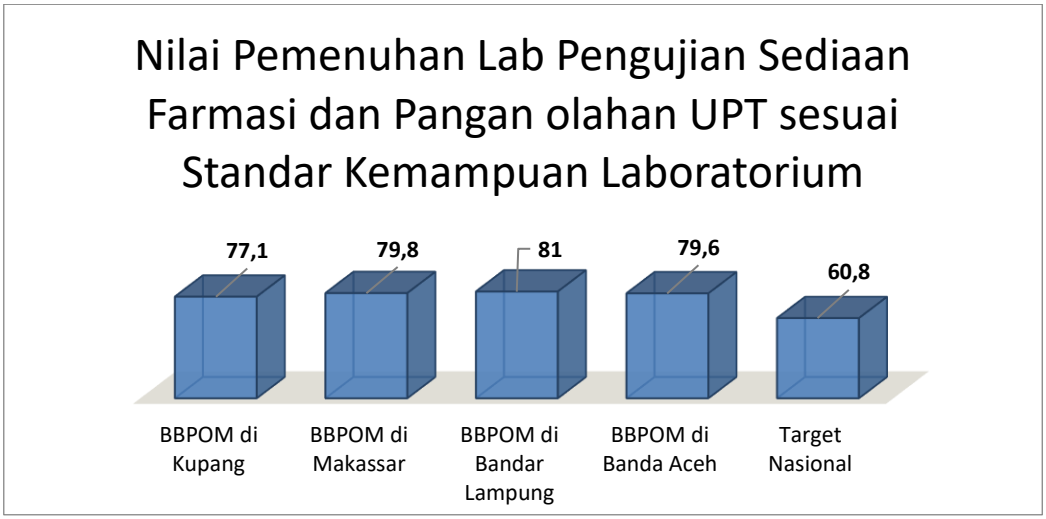
IKSK Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85,2	77,1	90,49	Akan Tercapai

Realisasi kinerja IKSK Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium hingga Tahun 2025 telah mencapai 77,10%, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 85,20%. Dengan capaian sebesar 90,49%, indikator ini berada pada kategori **Akan Tercapai**, sehingga pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai arah pencapaian target jangka menengah.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.15 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja IKSK Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT di Kupang mencapai

77,10%, yang berarti telah melampaui target nasional sebesar 60,80%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan standar kemampuan laboratorium BBPOM di Kupang berada di atas standar nasional yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan unit kerja lain, realisasi kinerja BBPOM di Kupang berada di bawah capaian nilai BBPOM di Lampung yang mencapai 81,00%, BBPOM di Makassar sebesar 79,80% dan BBPOM di Aceh sebesar 79,60%. Meskipun demikian, seluruh unit kerja tersebut secara umum telah melampaui target nasional. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang telah memenuhi standar nasional dan berada pada kategori baik, serta memiliki peluang untuk terus ditingkatkan guna memenuhi capaian unit kerja dengan nilai tertinggi.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKSK Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium pada beberapa aspek utama. Peningkatan tersebut mencakup empat aspek, yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan Laboratorium, serta Standar Metode Analisa Terverifikasi. Penambahan pemenuhan pada keempat aspek tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai capaian indikator dan menunjukkan penguatan kapasitas laboratorium secara berkelanjutan. Analisis terhadap penyebab keberhasilan terpenuhinya keempat aspek tersebut adalah :

1) Selama periode TW I sampai dengan TW IV, terjadi peningkatan aspek pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) sebesar 5,3%. Kenaikan ini ditunjukkan dengan adanya penambahan sebanyak 40 acuan/ruang lingkup pengujian serta peningkatan kesiapan laboratorium dalam melaksanakan pengujian sesuai standar yang ditetapkan oleh PPPOMN;
2) Peningkatan aspek Standar Peralatan sebesar 2,5% ditunjukkan dengan adanya pengadaan peralatan di tahun 2025 seperti GC-MS,

Microwave Digester, Refrigerator Incubator, Anaerobic Jar, dan Hot Plate;

3) Aspek pemenuhan Standar Metode Analisa Terverifikasi juga mengalami peningkatan sebesar 14,8%. Terdapat 35 metode analisa yang telah diverifikasi selama tahun 2025 sehingga dapat diastikan bahwa laboratorium menggunakan metode yang telah diverifikasi dalam melakukan pengujian.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Instrumen di laboratorium tidak berfungsi dengan optimal. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

a) Membuat perencanaan Suku Cadang, UPS, Alat Penunjang setiap awal tahun;
b) Mengisi Buku atau E-log book Riwayat Pemakaian Alat;
c) Adanya komitmen Pimpinan merevisi sisa anggaran untuk pengadaan suku cadang, UPS, Alat Penunjang.

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	Meningkatkan standar pemenuhan Metode Analisa (MA) Terverifikasi di tahun 2026	Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar kemampuan laboratorium tingkat 3 dan 4 di setiap triwulan	Januari s/d Desember 2026	Y	O-1	Instrumen di laboratorium tidak berfungsi dengan optimal

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu :

1) Monitoring dan evaluasi terhadap capaian standar pemenuhan yang dilaksanakan secara berkala yakni setiap triwulan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium;
2) Perencanaan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium dilaksanakan secara terintegrasi melalui penetapan kebutuhan reagen dan media pengujian, suku cadang, peralatan laboratorium, optimalisasi pengadaan laboratorium, serta pelatihan personel;
3) Peningkatan kompetensi petugas pengujian dilaksanakan melalui pelatihan internal yang didukung oleh PPPOMN, sejalan dengan pengajuan judul pelatihan internal yang mengacu pada metode pengujian dalam Standar Ruang Lingkup (SRL) dan/atau Metode Analisa (MA) terverifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian kompetensi personel laboratorium dengan metode yang diterapkan, serta mendukung peningkatan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium secara berkelanjutan;
4) Pelaksanaan verifikasi metode analisa pada Standar Ruang Lingkup (SRL) dan Metode Analisa (MA) terverifikasi dalam mendukung pencapaian Standar Kemampuan Laboratorium.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan hubungan dengan Pemerintah Pusat, termasuk dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat, diperlukan upaya menyeluruh dari hulu ke hilir (*from farm to table*) yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, dalam era otonomi daerah, pengawasan keamanan pangan masih menghadapi kendala perencanaan, pendanaan, SDM, serta sinkronisasi kebijakan, sehingga belum semua Kabupaten/Kota dapat melaksanakan secara optimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara dokumen perencanaan

daerah dan nasional, yang berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan.

Badan POM mendorong agar program keamanan pangan daerah sejalan dengan kebijakan pusat melalui:

a. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan keamanan pangan.
b. Pengaktifan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di daerah.
c. Pendampingan teknis, termasuk memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman termasuk dalam sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Definisi IKSK ini adalah:

a. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.
b. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
    1) advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
    2) mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
    3) mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
c. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
    1) Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
    2) Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10,00	10,00	100,00	Baik

Pada Tahun 2025, IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman ditetapkan dengan target sebesar 10,00%. Realisasi yang dicapai mencapai 10,00%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100,00%, dengan kategori **Baik.** Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan lintas sektor terkait mendukung kinerja IKSK tersebut sehingga capaian Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman dapat tercapai. Kota/Kabupaten pangan aman diharapkan dapat menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	2024	-	-	-	-
	2025	10,00	10,00	100,00	Baik

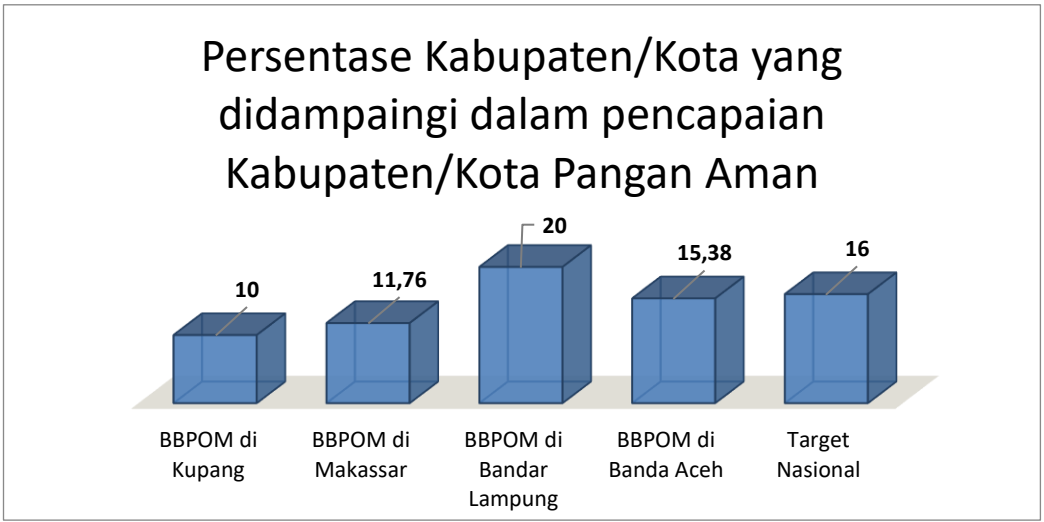
IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, tidak dapat dibandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100,00	10,00	10,00	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman hingga Tahun 2025 telah mencapai 10,00%, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100,00%. Dengan capaian sebesar 10,00%, indikator ini berada pada kategori **Perlu Upaya Keras**. Program ini masih berlangsung terus sampai akhir renstra, sehingga perlu strategi kinerja yang terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai arah pencapaian target jangka menengah, melalui koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, serta penguatan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Dengan strategi tersebut, diharapkan seluruh Kabupaten/Kota mampu menerapkan pengawasan pangan secara komprehensif dari hulu ke hilir.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.16 Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada BBPOM di Kupang mencapai 10,00%, yang jika dibandingkan dengan unit kerja lain, realisasi kinerja BBPOM di Kupang berada di bawah capaian BBPOM di Lampung yang mencapai 20,00%, BBPOM di Banda Aceh sebesar 15,38% dan BBPOM di Makassar sebesar 11,76%. Unit kerja yang telah melampaui target nasional adalah BBPOM di Lampung dan BBPOM di Aceh, sedangkan BBPOM di Makassar dan BBPOM di Kupang masih dibawah target nasional 16,00%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang perlu ditingkatkan lagi dalam melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait agar pemahaman terkait pentingnya kabupaten/kota pangan aman meningkat untuk menjaga masyarakat dari produk pangan yang tidak sesuai ketentuan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman disebabkan oleh beberapa upaya strategis, yaitu:

1) Koordinasi dan audiensi dengan pimpinan daerah, termasuk Wali Kota Kupang dan Sekretaris Daerah Kota Kupang, untuk memperkuat dukungan kebijakan.
2) Pelibatan lintas sektor terkait dalam kegiatan pengawasan bersama, sehingga komitmen terhadap keamanan pangan semakin solid.
3) Pendampingan langsung kepada stakeholder, khususnya dalam pengumpulan data dukung, guna memastikan kelengkapan dan akurasi informasi.
4) Penyamaan persepsi terkait data dukung penilaian mandiri, sehingga proses penilaian berjalan konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keberlanjutan program Kabupaten/Kota Pangan Aman, langkah tindak lanjut yang direncanakan meliputi:

1) Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait implementasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2) Pendampingan berkelanjutan kepada Kota Kupang dalam pemenuhan standar Kabupaten/Kota Pangan Aman, sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman.
3) Pemetaan kabupaten/kota yang akan didampingi dalam pemenuhan standar, sehingga intervensi dapat dilakukan secara terarah dan efektif.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko untuk tahun 2026.

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota	-	1. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait implementasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman. 2. Pendampingan berkelanjutan kepada Kota Kupang dalam pemenuhan standar Kabupaten/Kota Pangan Aman,	1. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait implementasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman. 2. Pendampingan berkelanjutan kepada Kota Kupang dalam pemenuhan standar Kabupaten/Kota	Januari s/d Desember 2026	T	-	-

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			sebagai bentuk perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman. 3. Pemetaan kabupaten/kota yang akan didampingi dalam pemenuhan standar, sehingga intervensi dapat dilakukan secara terarah dan efektif	Pangan Aman 3. Pemetaan kabupaten/kota yang akan didampingi dalam pemenuhan standar				

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKSK ini didukung oleh:

1) Aktivasi Tim Koordinasi

Pengaktifan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan menjadi langkah awal yang strategis. Melalui tim ini, disusun rencana aksi pengawasan pangan yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder sesuai peran dan kewenangan, sehingga pengawasan lebih terarah dan terintegrasi.

2) Sinergi Lintas Sektor

Pelaksanaan pengawasan pangan bersama lintas sektor memperkuat komitmen kolektif dalam menjamin keamanan pangan. Sinergi ini meningkatkan efektivitas pengawasan karena melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi teknis terkait.

3) Harmonisasi Data Dukung

Upaya penyamaan persepsi dalam pemenuhan data dukung penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Dengan data yang seragam dan terukur, proses penilaian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

16. Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

IKSK ini masuk dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi. Sesuai dengan definisi IKSK, indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK PIKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	50,00	100,00	Sangat Baik

Pada Tahun 2025, IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target kinerja sebesar 50,00%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100,00%, yang menunjukkan bahwa 1 (satu) sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi target, seluruhnya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100,00% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan pangan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	50,00	100,00	100,00	Sangat Baik

IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

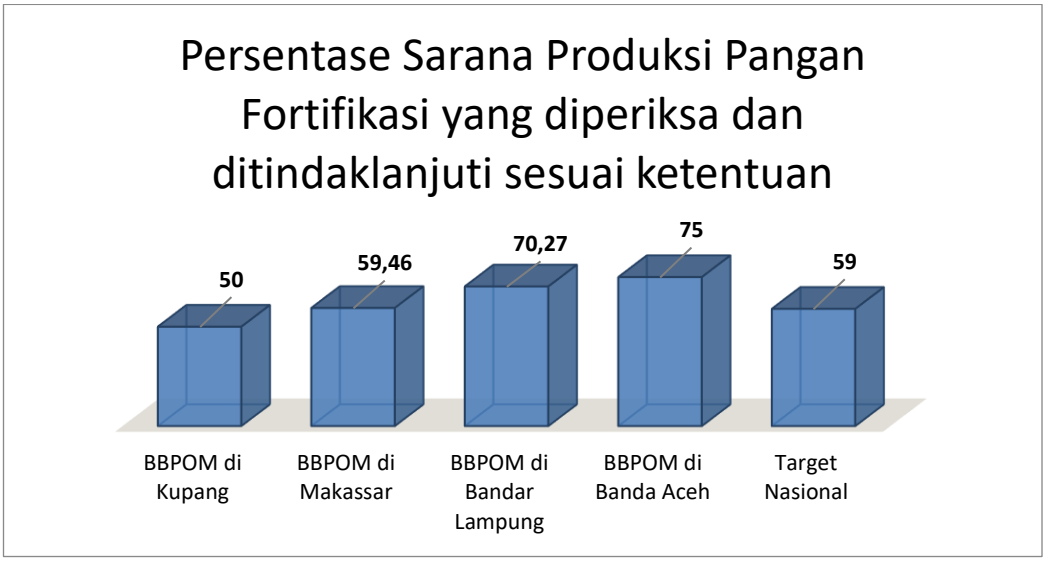
IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa	100,00	50,00	50,00	Perlu Upaya Keras

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				

IKSK Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, merupakan indikator baru yang mulai diukur pada tahun 2025, dengan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023. Target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 100,00%, sementara realisasi capaian kinerja mencapai 50,00% karena total sarana produksi pangan fortifikasi yang ditargetkan untuk diperiksa sejumlah 2 (dua) sarana produksi garam konsumsi beriodium, dan telah terlaksana 1 (satu) sarana produksi.

Dengan capaian tersebut, diperlukan upaya intensif berkelanjutan hingga akhir periode Renstra agar target 100,00% dapat tercapai. Terlebih tren sarana produksi pangan fortifikasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, hingga tahun 2025 terdapat 6 (enam) sarana produksi garam konsumsi beryodium di wilayah kerja BBPOM di Kupang. Oleh karena itu, capaian indikator ini dikategorikan **Perlu Upaya Keras**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.17 Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Jika dibandingkan dengan unit kerja lain, target kinerja BBPOM di Kupang yang paling rendah dibandingkan BBPOM di Makassar, BBPOM di Bandar Lampung, dan BBPOM di Banda Aceh. Hal ini karena baseline total sarana produksi pangan olahan fortifikasi yang harus diperiksa hanya 2 sarana, sehingga target yang ditentukan untuk tahun 2025-2026 adalah setengahnya yaitu sebesar 50,00%, angka ini masih di bawah target nasional tahun 2025 yaitu sebesar 59,00%.

Mengacu pada target nasional sebesar 59,00%, maka BBPOM di Makassar, BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Banda Aceh telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Kupang belum mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana tahun 2025 yang telah dibuat, dilaporkan di SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) tepat waktu, dan diterbitkan surat rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.

Adanya pertumbuhan sarana produksi pangan fortifikasi khususnya garam konsumsi beryodium di wilayah kerja BBPOM di Kupang pada tahun 2025, tentu saja merubah baseline total sarana yang harus diawasi. Hal ini dapat menjadi masukan pengambil kebijakan di level pusat untuk penyesuaian target persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang harus diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh BBPOM di Kupang di tahun berikutnya.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko untuk tahun 2026 dengan peristiwa risiko sesuai dengan capaian indikator kinerja tahun 2025. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (garam beryodium) mengikuti target sarana yang telah ditetapkan berdasarkan tarikan data nomor izin edar per tahun 2023. Sehingga 1 sarana produksi garam beryodium yang ada di Kota Kupang akan dilaksanakan tahun berikutnya karena target tahun 2025 hanya inspeksi 1 sarana.	Pemeriksaan 1 sarana produksi garam beryodium di Kota Kupang tahun 2026	April 2026	T	-	-

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

1) Konsisten melakukan pemeriksaan sarana sesuai target yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
2) Terus mengawal pertumbuhan sarana produksi garam beryodium di wilayah kerja BBPOM di Kupang dan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait komitmen implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
3) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin.

17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), berdasarkan penerimaan audiens terhadap aspek sumber atau narasumber, konten atau informasi, pemahaman, serta manfaat KIE yang dirasakan. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

a. Sumber atau Narasumber KIE
b. Konten atau Informasi KIE
c. Pemahaman Audiens KIE
d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

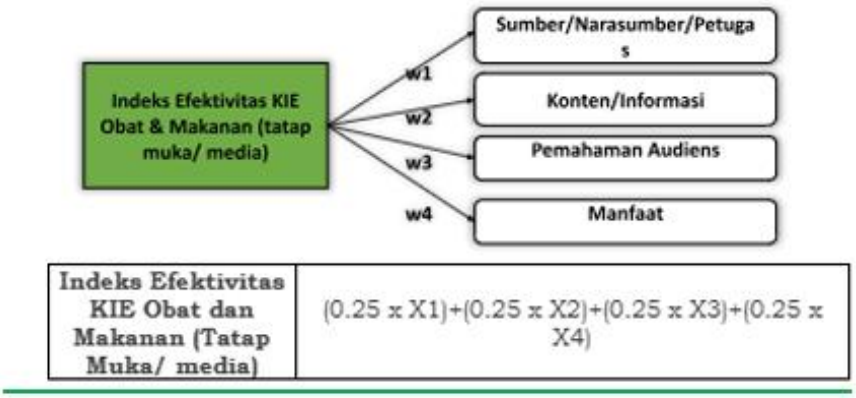
Nilai indeks diperoleh dari hasil survei efektivitas KIE langsung dan/atau KIE media yang diisi oleh responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Responden survei adalah masyarakat penerima manfaat KIE, baik peserta kegiatan KIE yang diselenggarakan UPT BPOM maupun masyarakat yang mengakses kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam satu bulan terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (face to face interview), penyebaran kuisioner, dan survey daring. Jumlah minimal responden ditentukan menggunakan tabel Krejcie Morgan berdasarkan populasi sasaran, yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada setiap triwulan.

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Cara Perhitungan dan Formula:

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis menggunakan rumus yang telah ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama pada aplikasi evaluasi KIE menggunakan akun masing-masing UPT. Adapun perhitungan indeks efektivitas KIE unit kerja mengacu pada formula yang telah ditetapkan dalam pedoman evaluasi KIE sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	90,51	103,93%	Sangat Baik

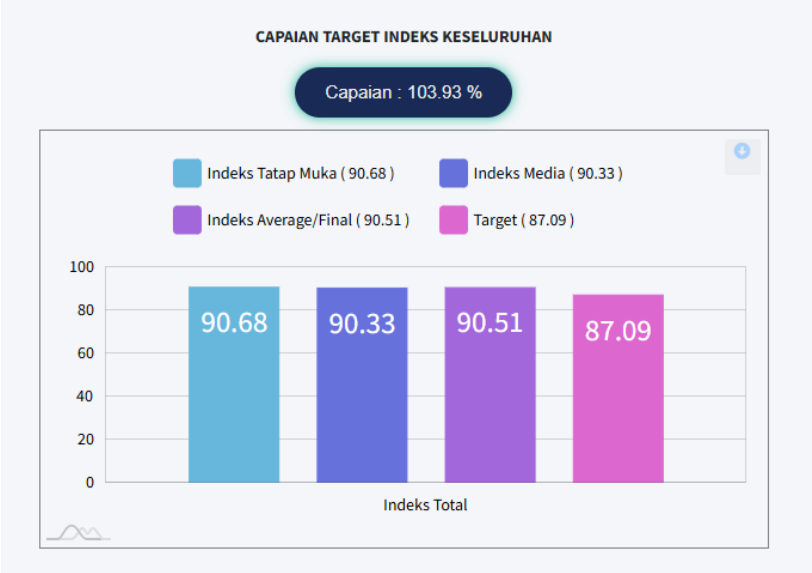
Realisasi IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT Tahun 2025 mencapai 90,51, melampaui target yang ditetapkan sebesar 87,09. Dengan demikian, indikator kinerja memperoleh capaian 103,93% dan termasuk dalam kategori **Sangat Baik**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE berjalan efektif dan melebihi standar kinerja yang direncanakan.

Rincian hasil indeks KIE dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 233)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.74	93.51
Konten/Informasi	3.72	92.99
Pemahaman Audiens	3.47	86.8
Manfaat	3.58	89.43
Indeks Tatap Muka	90.68	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 218)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100
Sumber Informasi	3.67	91.74
Konten/Informasi	3.69	92.16
Pemahaman Audiens	3.51	87.84
Manfaat	3.58	89.56
Indeks Media	90.33	



Jumlah Responden			Indeks			
Tatap Muka	Media	Total	Indeks Tatap Muka	Indeks Media	Indeks KIE	Kategori
233	218	451	90,68	90,33	90,51	Efektif

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2024	-	-	-	-
	2025	87,09	90,51	103,93%	Sangat Baik

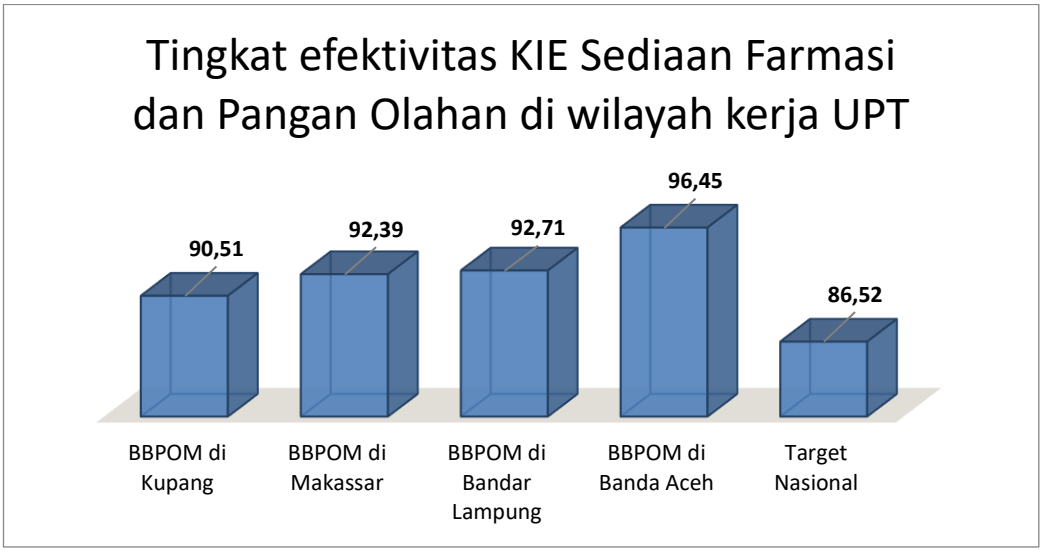
IKSK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan manual indikator.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90,58	90,51	99,92%	Akan Tercapai

Realisasi IKSK Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT pada tahun 2025 sebesar 90,51 telah mendekati target akhir periode Renstra Tahun 2029 sebesar 90,58, dengan capaian 99,92%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja indikator berada pada jalur yang sangat baik sehingga target akhir periode Renstra secara realistis optimis **Akan Tercapai**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.18 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE BBPOM di Kupang sebesar 90,51 berada di atas target nasional tahun 2025 (86,52), namun masih lebih rendah dibandingkan capaian beberapa UPT lain, yaitu BBPOM di Makassar

(92,39), BBPOM di Bandar Lampung (92,71), dan BBPOM di Banda Aceh (96,45). Seluruh UPT tersebut telah melampaui target nasional, dengan capaian tertinggi ditunjukkan oleh BBPOM di Banda Aceh.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja terutama dipengaruhi oleh konsistensi implementasi inovasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan mendukung perluasan jangkauan informasi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan anggaran serta variasi kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Perbedaan kapasitas sumber daya dan konsistensi penerapan pedoman turut memengaruhi optimalisasi capaian kinerja.

Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan sebagai berikut penguatan perencanaan berbasis skala prioritas agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, standardisasi pelaksanaan KIE sesuai pedoman yang berlaku untuk menjamin keseragaman mutu kegiatan, dan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjaga keberlanjutan dan kualitas capaian kinerja.

Terhadap capaian IKSK, telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko berupa masyarakat menerima dan mempercayai informasi yang tidak valid atau menyesatkan terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Risiko ini berpotensi menurunkan efektivitas program KIE serta memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Sebagai bentuk pengendalian terhadap risiko tersebut, telah dilaksanakan berbagai langkah, antara lain rapat evaluasi internal secara berkala, implementasi inovasi Jelas BPOM, implementasi inovasi Sinergik, implementasi inovasi RISET, implementasi inovasi TOGA SOPAN, implementasi inovasi PANTAR, sosialisasi Obat dan Makanan secara langsung/tatap muka, dan perluasan cakupan KIE melalui media pemerintah daerah.

Melalui identifikasi risiko yang sistematis, tindakan perbaikan dan mitigasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran. Dengan demikian, capaian kinerja IKSK diharapkan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan serta berkelanjutan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	Penguatan perencanaan berbasis prioritas, standardisasi pelaksanaan KIE sesuai pedoman, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja	Menyusun rencana kerja KIE sesuai pedoman dan juknis dengan memprioritaskan kegiatan berdampak tinggi, memperkuat kolaborasi stakeholder, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi melalui survei rutin dan review berkala untuk memastikan pencapaian target.	Desember 2026	Ya	S-5	Masyarakat menerima dan memperc ayai informasi tidak valid atau menyesatkan tentang sedian farmasi dan pangan olahan

f. **Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian tingkat efektivitas KIE didukung oleh implementasi berbagai inovasi KIE berbasis media dan tatap muka, khususnya melalui program JELAS BPOM, RISET, Toga SOPAN, Sinergi dengan mahasiswa KKN, serta kolaborasi dengan sekolah, tokoh agama, dan komunitas. Konsistensi produksi konten digital, pemanfaatan media sosial dan media lokal, serta perluasan kegiatan edukasi langsung meningkatkan jangkauan sasaran dan partisipasi masyarakat. Pendampingan pengisian survei efektivitas juga berkontribusi pada perbaikan kualitas data evaluasi.

Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran untuk kegiatan luring, belum meratanya pemahaman peserta dalam pengisian survei, serta kebutuhan penguatan strategi pengukuran efektivitas KIE. Optimalisasi kolaborasi stakeholder dan inovasi berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan peningkatan capaian kinerja.

18. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah sekolah yang telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan indikator:

1) Memiliki SK Tim Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif.
2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan atas komitmen baik untuk mengimplementasikan program keamanan pangan melalui rencana aksi program keamanan pangan di sekolah dan memberdayakan Kader Keamanan Pangan Sekolah yang mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025. Target tahun 2025 merupakan target jumlah sekolah pada tahun berjalan. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman (PJAS) terdiri dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama

yang dilakukan berupa advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah (guru/orang tua/komite sekolah). Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan program keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. IKSK ini termasuk dalam sasaran kegiatan meningkatnya evektifitas KIE.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100%	Baik

Pada akhir tahun 2025, seluruh tahapan kegiatan telah dilakukan sampai dengan tahap monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 10 sekolah pada 1 kabupaten. Capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah berhasil mencapai target 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2024				
	2025	10	10	100%	Baik

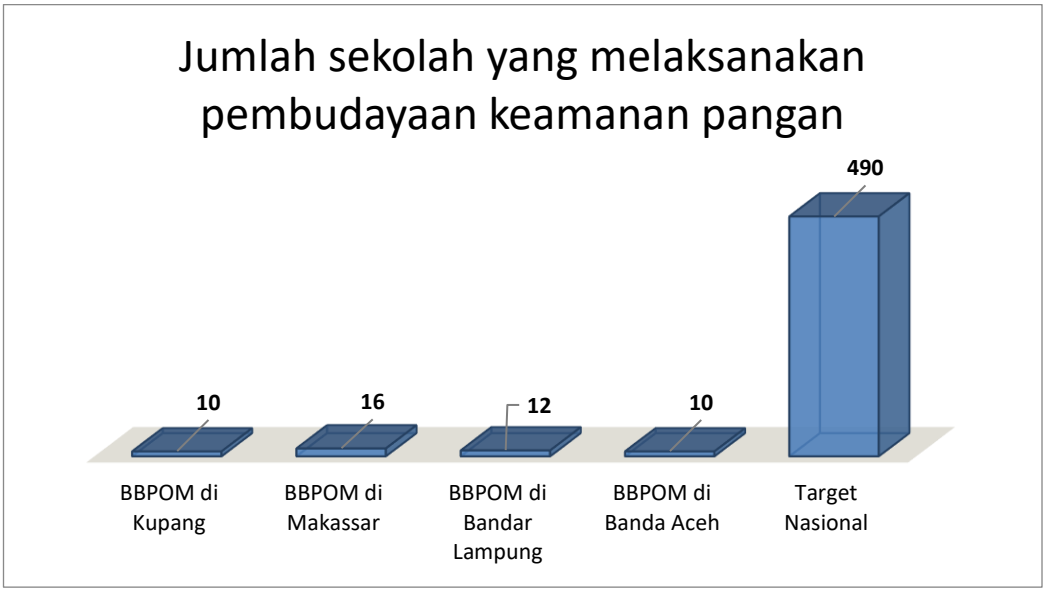
IKSK Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan manual indikator.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19	10	52,63%	Perlu Upaya Keras ▼

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 sebanyak 10 sekolah, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 19 sekolah, menunjukkan capaian sebesar 52,63%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memenuhi target jangka menengah. Oleh karena itu, capaian kinerja pada indikator ini dikategorikan **Perlu Upaya Keras**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.19 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan BBPOM di Kupang sebanyak 10 sekolah menunjukkan hasil yang setara dengan BBPOM di Banda Aceh, namun masih lebih rendah dari BBPOM di Bandar Lampung yang mencapai 12 sekolah dan BBPOM di Makassar yang mencapai 16 sekolah.

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2025 sebesar 490 sekolah, realisasi BBPOM di Kupang merupakan bagian dari kontribusi kolektif UPT BPOM di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target nasional. Realisasi kinerja ini mencerminkan peran aktif BBPOM di Kupang dalam menunjang keberhasilan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja BBPOM di Kupang.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan bagian program prioritas nasional keamanan pangan yang pada tahun 2025 telah dilaksanakan di 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: Kabupaten Kupang. Strategi program ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku komunitas sekolah akan pentingnya keamanan pangan dengan pemberdayaan kepala sekolah/guru dan orang tua siswa sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah. Kader diharapkan secara aktif dan mandiri melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah. Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 adalah 10 sekolah dengan capaian 100%. Penyebab keberhasilan sebagai berikut:

1) Komitmen Kepala Sekolah, Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah secara mandiri.
2) Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai jadwal.

3) Melakukan monitoring secara berkala pada setiap tahapan kegiatan untuk mencapai target per tahapan yang telah ditetapkan, baik internal BPOM di Kupang maupun Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan POM.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain:

1) Perlu dihadirkan Kepala Sekolah pada saat Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan sehingga dapat menguatkan komitmen serta mendorong kader dan komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara mandiri.
2) Melakukan pendampingan dan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi pada tahun 2025 secara intensif dan berkala sehingga keberlanjutan program keamanan PJAS tetap dilaksanakan di sekolah.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman yang sudah diintervensi tidak mengimplementasikan rencana aksi program keamanan pangan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Koordinasi dan advokasi dengan stakeholder terkait keberlanjutan program
2) Pengawalan terhadap sekolah yang sudah diintervensi tahun 2024
3) Rapat evaluasi internal

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	Penguatan komitmen kader keamanan pangan sekolah	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan intervensi keamanan pangan oleh kader keamanan pangan secara berkala	Desember 2026	Y	O-11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman yang sudah diintervensi tidak mengimplementasikan rencana aksi program keamanan pangan

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah koordinasi dan komitmen yang baik dengan Kepala Sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah (KKPS) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, BBPOM di Kupang juga melakukan pendampingan dan pengawalan kepada kader keamanan pangan sekolah melalui *Whatsapp* Grup Kader sehingga kader dapat meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan dan memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah.

Tahapan kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2025 adalah:

1) Koordinasi awal dan advokasi terpadu kepada lintas sektor.
2) Sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah perluasan cakupan dan sekolah intervensi lengkap.
3) Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah.
4) Monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dalam pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan secara mandiri.

5) Sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
6) Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi tahun sebelumnya (2024).

19. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa Pangan Aman merupakan desa yang mendapatkan intervensi keamanan pangan (desa baru) melalui kegiatan advokasi, bimbingan teknis, serta pendampingan intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis kepada komunitas desa, termasuk pengawalan berkelanjutan terhadap desa yang telah diintervensi. Sasaran intervensi mencakup desa maju, desa berkembang, desa lokus intervensi stunting, desa hasil kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta desa di kawasan destinasi wisata. Desa maju merupakan desa dengan nilai Indeks Desa membangun (IDM) > 0,707 hingga ≤ 0.815, sedangkan desa berkembang memiliki IDM > 0.599 hingga ≤ 0.707. IDM adalah indeks komposit yang mengukur ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi desa. Pelaksanaan program keamanan pangan desa meliputi tiga kegiatan utama, yaitu penguatan kapasitas desa, pemberdayaan komunitas desa, serta monitoring dan evaluasi. Suatu desa dikategorikan sebagai desa pangan aman apabila memiliki:

a. kader keamanan pangan desa yang aktif,
b. melaksanakan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, serta
c. memiliki dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri, baik melalui pemanfaatan dana desa, pendanaan mandiri, maupun integrasi dengan program lainnya.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	4	4	100%	Baik

Pada tahun 2025, target IKSK Jumlah Desa Pangan Aman dengan jumlah desa yang diintervensi oleh BBPOM di Kupang adalah 4 desa baru di satu kabupaten. Target tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya hingga akhir tahun, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	2024				
	2025	4	4	100%	Baik

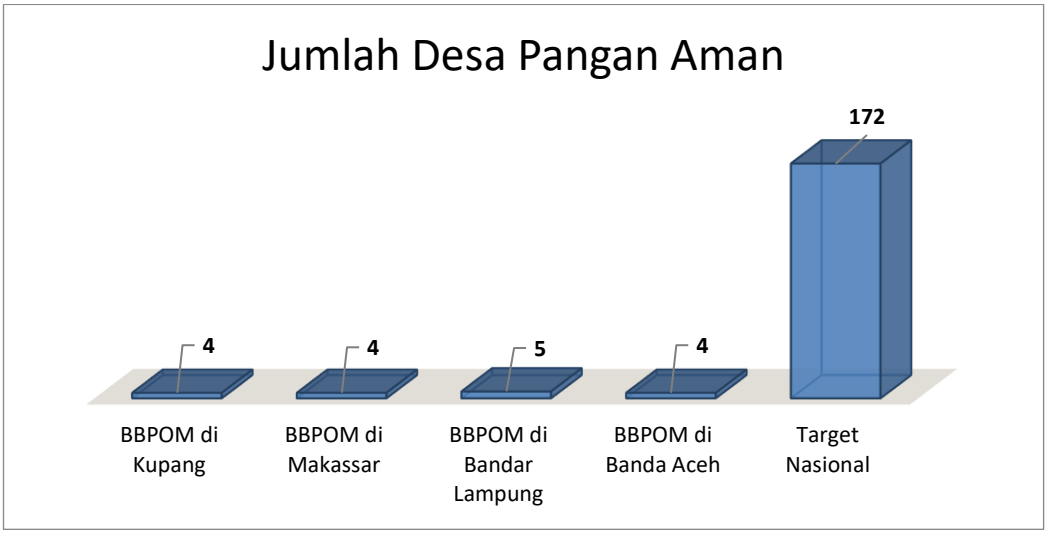
IKSK Jumlah Desa Pangan Aman tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan manual indikator.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	8	4	50%	Perlu Upaya Keras ▼

Realisasi Desa Pangan Aman pada tahun 2025 sebanyak 4 desa, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 8 desa, menunjukkan capaian sebesar 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memenuhi target jangka menengah. Oleh karena itu, capaian kinerja pada indikator ini dikategorikan **Perlu Upaya Keras**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.20 Jumlah Desa Pangan Aman

Realisasi capaian Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Kupang pada tahun 2025 sebanyak 4 desa, menunjukkan hasil yang setara dengan BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Aceh, namun masih lebih rendah dibandingkan BBPOM di Makassar yang mencapai 5 desa. Perbandingan ini menggambarkan bahwa kinerja BBPOM di Kupang berada pada tingkat yang kompetitif antar unit kerja.

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2025 sebesar 172 desa pangan aman, capaian BBPOM di Kupang merupakan bagian dari kontribusi kolektif unit pelaksana teknis BPOM dalam mendukung pencapaian target nasional. Capaian tersebut juga mencerminkan peran aktif BBPOM di Kupang dalam pelaksanaan program keamanan pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKSK Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 yang mencapai 100% terhadap target tahunan didukung oleh strategi pelaksanaan kegiatan yang menekankan efisiensi anggaran melalui pengintegrasian advokasi, bimbingan teknis, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi dalam satu rangkaian kegiatan terpadu. Optimalisasi sinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa, pemanfaatan fasilitas desa, dukungan pendanaan dari dana desa, serta

integrasi dengan program lain seperti percepatan penurunan stunting turut meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Peran aktif kader keamanan pangan desa juga memperkuat keberlanjutan intervensi di tingkat komunitas. Perencanaan berbasis prioritas dan risiko, khususnya pada desa lokus stunting dan desa dengan kerawanan pangan lebih tinggi, menjadikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.

Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi faktor penghambat dalam percepatan pencapaian target jangka menengah Renstra. Efisiensi pelaksanaan kegiatan membatasi jumlah desa yang dapat diintervensi setiap tahun sehingga capaian kumulatif belum optimal. Selain itu, kondisi geografis wilayah kerja yang luas dan mencakup daerah terpencil meningkatkan kebutuhan biaya operasional pendampingan dan monitoring. Keterbatasan kapasitas sebagian aparatur desa dalam mengintegrasikan program keamanan pangan ke dalam perencanaan desa juga menyebabkan keberlanjutan program masih memerlukan dukungan intensif dari BBPOM di Kupang. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan kolaboratif dengan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi model pendampingan yang efisien agar percepatan pencapaian target jangka menengah dapat terwujud secara berkelanjutan.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Desa pangan aman yang sudah diintervensi tahun sebelumnya tidak mengimplementasikan rencana aksi program keamanan pangan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Pertemuan pengawalan dengan TKPD/KKPD yang diintervensi setahun sebelumnya
2) Supervisi KKPD untuk implementasi rencana aksi
3) Rapat evaluasi internal

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Desa Pangan Aman	-	Memperkuat perencanaan kolaboratif dan kapasitas desa serta mengoptimalkan model pendampingan yang efisien melalui sinergi lintas sektor risiko.	Melasanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa untuk integrasi program dalam perencanaan program desa, disertai peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan sistem pendampingan hybrid (daring–luring) berbasis prioritas.	Desember 2026	Y	O-9	Desa pangan aman yang sudah diintervensi tahun sebelumnya tidak mengimplementasikan rencana aksi program keamanan pangan

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian IKSK Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 menunjukkan bahwa model pelaksanaan program berbasis advokasi, bimbingan teknis, dan pendampingan komunitas efektif dalam meningkatkan kapasitas desa dalam pengelolaan keamanan pangan. Kegiatan perkuatan kapasitas desa berkontribusi langsung pada terbentuknya kader keamanan pangan yang aktif serta tersusunnya rencana aksi desa. Pemberdayaan komunitas mendorong penerapan praktik keamanan pangan secara berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam memastikan implementasi rencana aksi desa berjalan sesuai target. Desa yang mendapatkan pendampingan intensif menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih baik dalam mengintegrasikan program keamanan pangan ke dalam perencanaan desa. Namun, variasi tingkat partisipasi komunitas

dan kesiapan desa menyebabkan hasil implementasi program belum merata di seluruh desa intervensi.

Secara umum, program Desa Pangan Aman telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian target tahunan. Ke depan, penguatan kualitas pendampingan dan peningkatan keterlibatan komunitas menjadi faktor kunci untuk meningkatkan dampak program secara lebih merata dan berkelanjutan.

20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator kinerja atau IKSK ini dihitung berdasarkan jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah terkait sebagai pasar percontohan untuk program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, serta monitoring dan evaluasi. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100%	Baik

Pada akhir tahun 2025, seluruh tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah selesai dilakukan. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 1 pasar dari target 1 pasar. Capaian jumlah pasar pangan berbasis komunitas telah berhasil mencapai target 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2024	-	-	-	-
	2025	1	1	100%	Baik

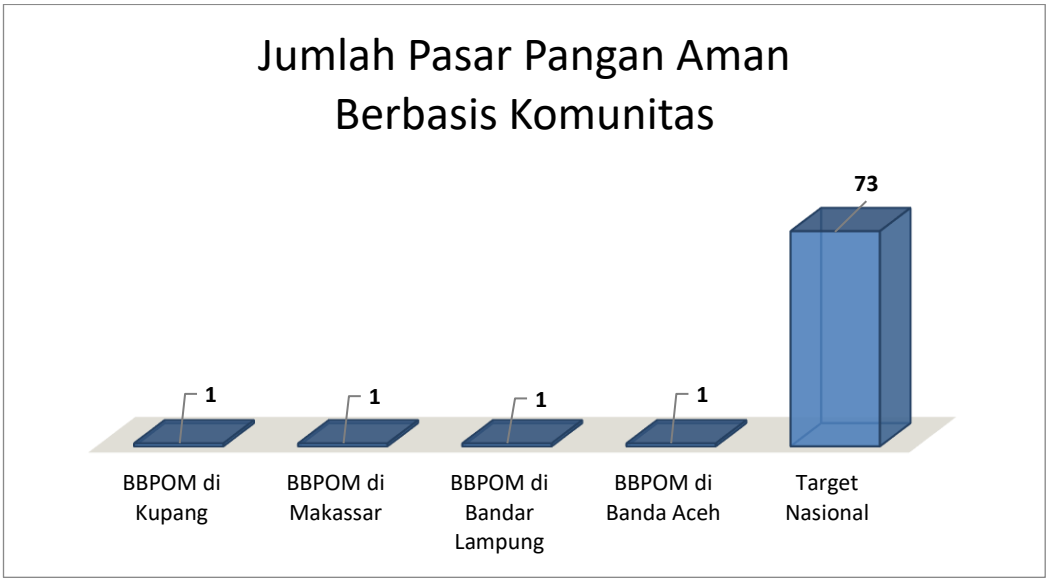
IKSK Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan manual indikator.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	1	50%	Perlu Upaya Keras

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2025 sebanyak 1 pasar, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 2 pasar, menunjukkan capaian sebesar 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memenuhi target jangka menengah. Oleh karena itu, capaian kinerja pada indikator ini dikategorikan **Perlu Upaya Keras**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.21 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas antar UPT tersebut berada pada tingkat yang sama, yaitu masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) baik BBPOM di Kupang, BBPOM di Makassar, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Banda Aceh telah berhasil mengintervensi 1 pasar.

Jika dibandingkan dengan target nasional tahun 2025 sebesar 73 pasar pangan aman berbasis komunitas, realisasi BBPOM di Kupang merupakan bagian dari kontribusi kolektif UPT BPOM di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target nasional. Realisasi kinerja ini mencerminkan peran aktif BBPOM di Kupang dalam pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Kupang.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian program prioritas nasional keamanan pangan yang pada tahun 2025 telah dilaksanakan di 1 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Kupang. Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2023 adalah 1 pasar dengan capaian 100%. Pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas relatif

lebih sulit dibandingkan program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Mengubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Ketersediaan sarana prasarana di pasar yang belum memadai dan tidak sesuai persyaratan juga menjadi tantangan tersendiri bagi BBPOM di Kupang dalam melaksanakan program ini. Minimnya program dari stakeholder sehingga tidak dapat dilakukan kolaborasi kegiatan di pasar. Namun demikian, BBPOM di Kupang tetap berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten menerapkan keamanan pangan. Kegiatan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi tetap dilakukan melalui pendampingan bagi petugas pengelola pasar saat melakukan monev.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain:

1) Melakukan perkuatan komitmen Pemerintah Daerah agar berkolaborasi dengan stakeholder lainnya sehingga keberlanjutan kegiatan keamanan pangan dapat dilakukan di pasar secara mandiri.
2) Mengawal dan terus melakukan pendampingan bagi petugas pengelola pasar yang sudah dilatih untuk mempertahankan kompetensi dan mampu melakukan pengawasan keamanan pangan secara berkelanjutan.
3) Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membawahi pasar agar program ini dapat direplikasi di masing-masing kabupaten/kota sehingga program pasar pangan aman berbasis komunitas tidak terbatas pada pasar yang diintervensi BBPOM di Kupang.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan Belum ada penganggaran pengawasan keamanan pangan secara mandiri di pasar yang sudah diintervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah

1) Koordinasi dan advokasi stakeholder terkait penganggaran pengawasan keamanan pangan secara mandiri

2) Pengawalan terhadap pasar yang sudah diintervensi 1 tahun sebelumnya
3) Rapat evaluasi internal

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait	Melakukan monitoring dan evaluasi petugas pengelola pasar secara berkala	Desember 2026	Y	O -10	Belum ada penganggaran pengawasan keamanan pangan secara mandiri di pasar yang sudah diintervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan sesuai tahapan sampai 100% yang artinya target 1 pasar yang diintervensi telah diselesaikan sampai Triwulan IV. Tahapan kegiatan intervensi pasar yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2025 adalah forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar, bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan di pasar, pengawasan keamanan pangan di pasar, serta pengawalan pasar. Koordinasi dengan lintas sektor yang sangat baik merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Peningkatan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan juga penting dilakukan agar komunitas pasar secara mandiri ikut serta dalam mengawasi pangan yang beredar di pasar dan menerapkan Cara

Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar. Pendampingan bagi petugas pengelola pasar dan koordinasi dengan lintas sektor tetap dilakukan sehingga program pasar pangan aman berbasis komunitas berkelanjutan di 3 kabupaten yang telah diintervensi pada tahun 2024. Tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2025 adalah:

1) Forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar
2) Sosialisasi keamanan pangan di pasar
3) Bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar
4) Pengawasan keamanan pangan di pasar
5) Pengawalan pasar yang sudah diintervensi tahun sebelumnya (2024).

21. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

IKSK Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan termasuk dalam sasaran kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. Definisi IKSK ini adalah:

a. Ruang Lingkup UMKM:
   1) UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
      a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
      b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
   2) Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
      UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

c) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:
   1) UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
   2) UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
   3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

c. Kriteria UMKM yang didampingi:
   1) Untuk UMK Pangan Olahan:
      a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
      b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.
   2) Untuk UMKM OBA:
      a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
      b) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
      c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
      d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
      e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan

f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

3) Untuk UMKM Kosmetik:
   a) UMKM yang memproduksi kosmetik;
   b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
   c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
   d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Pendampingan UMKM dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Badan POM melalui tenaga fasilitator untuk membantu UMKM dalam:

a. Memastikan produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
b. Memberikan bimbingan teknis, asistensi, serta edukasi agar UMKM mampu menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau CPPOB Pangan Olahan.
c. Meningkatkan daya saing produk UMKM sehingga dapat dipasarkan secara legal dan berkelanjutan.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,95	19,77	141,72	Tidak Dapat Disimpulkan

Target awal IKSK Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang ditetapkan adalah sejumlah 12 UMKM,

namun dalam pelaksanaannya terdapat 17 UMKM yang berhasil didampingi hingga tahap rekomendasi sertifikat. Capaian tersebut secara kuantitatif menunjukkan persentase realisasi sebesar 141,72% dari target yang ditetapkan. Angka ini merefleksikan adanya kelebihan capaian dibandingkan target awal sehingga dikategorikan **Tidak Dapat Disimpulkan**. Realisasi capaian ini tidak dapat disimpulkan karena terdapat beberapa faktor yang memengaruhi realisasi capaian, antara lain:

1) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha OBA, Kosmetik dan Pangan tentang penting peredaran produk yang sesuai standar regulasi, sehingga banyak yang mengajukan sertifikasi sarana dan registrasi produk Obat dan Makanan.
2) Adanya implementasi Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan Pasal 8, dimana Izin Penerapan CPPOB merupakan pra syarat wajib dalam pendaftaran produk pangan olahan di BPOM, sehingga meningkat permohonan dari pelaku usaha pangan untuk proses sertifikasi.

Dari total UMKM yang mengikuti program pendampingan, sejumlah 17 UMKM atau 19,77% berhasil menyelesaikan seluruh tahapan proses hingga memperoleh rekomendasi sertifikat. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan komitmen pelaku usaha terhadap penerapan prinsip Good Manufacturing Practices (GMP) serta kepatuhan terhadap regulasi BPOM. Secara rinci, capaian dapat digambarkan sebagai berikut:

- 3 UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat OBA:
- 4 UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat Kosmetik
- 10 UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat IP CPPOB Pangan Olahan

Capaian ini mencerminkan efektivitas program pendampingan yang memberikan dampak positif terhadap daya saing UMKM di sektor obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan. Dengan adanya sertifikat tersebut, UMKM memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam memasarkan produk secara legal, aman, dan berkualitas, baik di tingkat lokal maupun nasional.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	2024	-	-	-	-
	2025	12	17	141,72%	Tidak Dapat Disimpulkan

IKSK UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan terjadi perubahan manual indikator.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

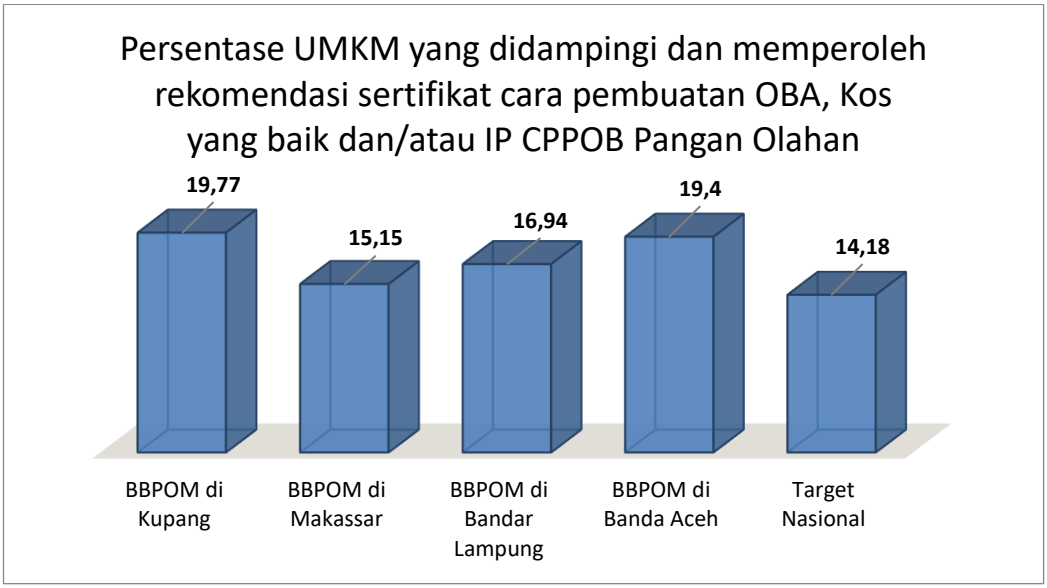
IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	97,67	19,77	20,24	Perlu Upaya Keras

Target akhir Renstra untuk indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (OBA), Kosmetik yang Baik, dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan ditetapkan sebesar 97,67%. Pada tahun 2025, realisasi pendampingan mencapai 19,77% dengan persentase capaian sebesar 141,72%. Namun, jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian ini baru mencapai 20,24% sehingga indikator dikategorikan Perlu Upaya Keras.

Meskipun realisasi belum mendekati target jangka menengah, capaian tahun 2025 menunjukkan efektivitas program pendampingan UMKM yang dilaksanakan. Hal ini sekaligus mencerminkan peningkatan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi standar produksi yang baik sesuai regulasi Badan POM. Keberhasilan ini menjadi indikator positif bahwa strategi pembinaan dan fasilitasi yang diterapkan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan UMKM.

Dengan demikian, capaian tahun 2025 dapat dijadikan landasan yang kuat untuk memperluas jangkauan pendampingan di tahun-tahun berikutnya, sehingga keberlanjutan program tetap terjaga dan target Renstra dapat dicapai secara lebih optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.22 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Realisasi IKSK persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik, dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan di BBPOM Kupang pada tahun 2025 sebesar 19,77%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian BBPOM Banda Aceh (19,40%), BBPOM Bandar Lampung (16,94%), dan BBPOM Makassar (15,15%).

Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 14,18%, capaian seluruh UPT menunjukkan kinerja pendampingan UMKM yang kompetitif dan berada jauh di atas rata-rata nasional. Keberhasilan melampaui target nasional ini menjadi indikator bahwa strategi pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh UPT telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan UMKM dalam menerapkan standar produksi yang baik. Selain itu, capaian ini dapat dijadikan dasar pengembangan model pendampingan ke daerah lain, sehingga pemerataan kualitas UMKM di seluruh Indonesia dapat lebih terjamin. Dengan demikian, keberhasilan tahun 2025 tidak hanya mencerminkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat arah kebijakan untuk memperluas jangkauan pendampingan di masa mendatang.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan capaian IKSK persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik, dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

1) Pendekatan pendampingan yang sistematis dan berbasis kebutuhan UMKM serta penerapan metode pembinaan yang lebih praktis dan aplikatif, sehingga memudahkan UMKM dalam memahami standar produksi yang baik, melalui Inovasi PEPETIN UMKM
2) UMKM semakin menyadari pentingnya sertifikasi sebagai jaminan mutu dan daya saing produk dan adanya dorongan internal pelaku usaha untuk memenuhi regulasi Badan POM sebagai syarat masuk pasar yang lebih luas
3) Konsistensi pelaksanaan program pendampingan di berbagai daerah
4) Regulasi yang jelas dan terukur menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar produksi
5) Peningkatan kepatuhan UMKM terhadap standar produksi yang baik

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak

memenuhi standar. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah tersedianya beberapa kegiatan yang mendukung capaian IKSK yaitu Inovasi PEPETIN UMKM 7 in 1, KIE terkait Obat dan Makanan, Pelaksanaan sanksi administratif, Inovasi Webinar SEO dan Inovasi VIZIN PRO. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	**P**ersentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	-	Meningkatkan kolaborasi dengan stakholder terkait	Memperkuat jejaring dengan stakholder yang memiliki program pendampingan UMKM Obat dan Makanan	Desember 2026	Y	S-1	Beredarnya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian IKSK persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik, dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tidak terlepas dari sejumlah program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung efektivitas pendampingan. Faktor penunjang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan sosialisasi regulasi dan standar produksi yang baik kepada UMKM secara berjenjang.
2) Penyediaan materi edukasi yang mudah dipahami, sehingga meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi.

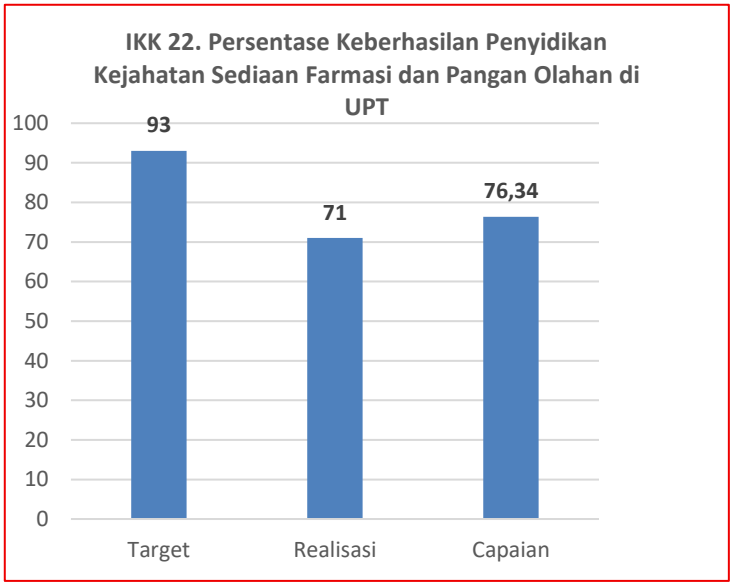
3) Pendampingan langsung di lapangan untuk memastikan UMKM memahami dan menerapkan prinsip Cara Pembuatan OBA/Kosmetik yang Baik.
4) Fasilitasi penyusunan dokumen pendukung sertifikasi agar proses berjalan lebih cepat dan tepat.
5) Pelatihan teknis bagi UMKM mengenai penerapan CPPOB pangan olahan.
6) Sinergi lintas sektor untuk memperluas jangkauan pendampingan dan memastikan keberlanjutan program.
7) Dukungan promosi produk UMKM yang telah bersertifikat, sehingga meningkatkan motivasi pelaku usaha untuk mengikuti program pendampingan.
8) Evaluasi capaian pendampingan secara periodik untuk menilai efektivitas program.

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Dalam konteks pengawasan nasional, BPOM memiliki mandat untuk melakukan pengawasan pre-market dan post-market, termasuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. BBPOM di Kupang sebagai salah satu UPT BPOM yang berada di wilayah provinsi NTT memegang peranan strategis dalam pelaksanaan fungsi cegah tangkal, intelijen, patroli siber, serta penyidikan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Keberhasilan proses penyidikan menjadi faktor kunci dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar untuk melindungi masyarakat. Pada tahun 2025 BBPOM di Kupang belum optimal melaksanakan kinerja Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Kupang yang dihitung berdasarkan Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

Berdasarkan Definisi IKSK:

a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan ini dilaksanakan oleh BBPOM di Kupang dalam rangka penyelesaian perkara yang ditangani PPNS.



Gambar Realisasi IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

b. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

c. Capaian kinerja dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

   1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
   2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
   3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
   4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

d. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
   = ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%
e. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
f. Perkara *carry over* yang dihitung menjadi capaian perkara, merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

`

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93,00	71,00	76.34	Cukup

Pada tahun 2025, target IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT ditetapkan sebesar 93,00%. Realisasi yang dicapai sebesar 71,00%, dengan rincian:

1) Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 4 perkara ditambah 1 perkara carry over
2) Jumlah perkara yang sampai dengan tahap 2 sebanyak 2 perkara
3) Jumlah perkara yang sampai pada tahap 1 sebanyak 1 perkara
4) Jumlah perkara yang sampai pada tahap SPDP sebanyak 1 perkara
5) Jumlah perkata carry over sampai pada tahap P21 dan SP3 sebanyak 1 perkara.

Dengan demikian, capaian kinerja terhadap target adalah sebesar 76,34% dari target yang ditetapkan, dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2024	-	-	-	-
	2025	93	71	76.34	Cukup

Realisasi IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) karena adanya perubahan serta perbedaan pada kalimat definisi operasional antara lain tahun sebelumnya fokus pada penindakan kejahatan obat dan makanan secara umum sedangkan untuk tahun 2025 lebih spesifik pada penyidikan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Tahun 2024 sebagai tahun terakhir periode renstra tahun 2020-2024, kalimat indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dan tahun 2025 sebagai tahun pertama periode renstra 2025–2029, IKSK adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Penindakan lebih luas mencakup proses intelijen dan penyidikan, sedangkan penyidikan bagian dari penindakan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

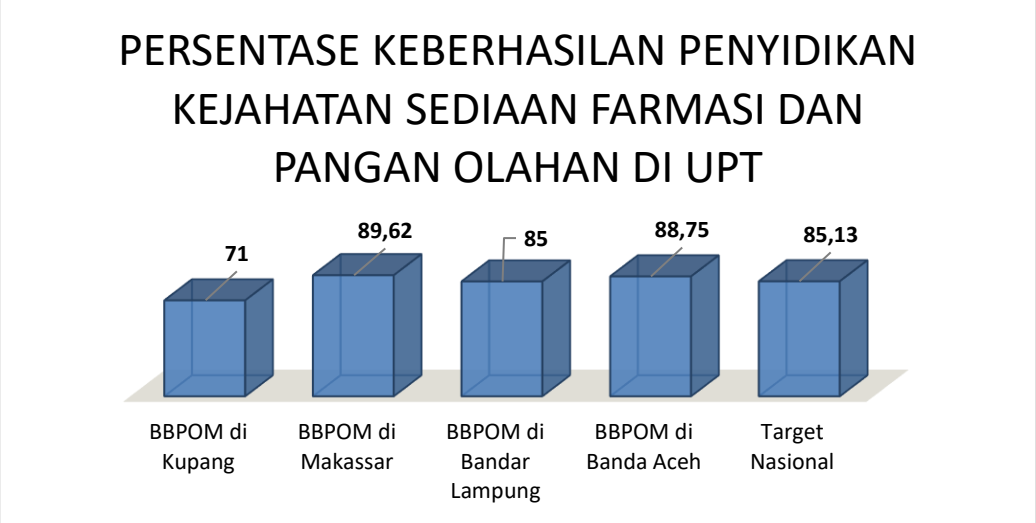
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	97,00	71,00	73,19	Akan Tercapai

Realisasi kinerja IKSK persentase Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Kupang tahun 2025 sebesar 71,00%, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 97,00%, dengan capaian realisasi terhadap target Renstra sebesar 73,19%, dengan kategori **Akan Tercapai**. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan rata-rata peningkatan nilai persentase sekitar 6-7 persen pertahun dalam kurun waktu empat tahun ke depan dan akan tercapai pada tahun 2029.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Undang-Undang tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru merupakan faktor eksternal yang berdampak langsung pada capaian IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.23 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Realisasi kinerja IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Kupang yaitu 71,00% lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja BBPOM di Makassar (89,62%), BBPOM di Lampung (85,00%) dan BBPOM di Aceh (88,75%). Jika dibandingkan terhadap target nasional BPOM sebesar 85,13%, maka BBPOM di Makassar, BBPOM di Lampung dan BBPOM di Aceh telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Kupang tidak mencapai target nasional, yang menunjukan bahwa BBPOM di Kupang belum mencapai sasaran maksimal dalam penyelesaian perkara penyidikan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh perkara yang ditangani BBPOM di Kupang, tidak semua sampai pada tahap 2 pada tahun 2025. Penyidikan perkara merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi ke depannya, namun pengendalian dengan melakukan evaluasi dalam pengukuran indikator kinerja keberhasilan serta penyesuaian manajemen perkara.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Realisasi kinerja IKSK pada tahun 2025 hanya mencapai 71% dari target sebesar 93% yang telah ditetapkan, sehingga dinyatakan tidak tercapai. Meskipun realisasi tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, kinerja penyidikan terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan tetap mencerminkan komitmen kuat dalam penegakan hukum. Proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian perkara.

Tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1) Perubahan target perkara

   Pada awal tahun terjadi penyesuaian target perkara akibat efisiensi anggaran dan perubahan definisi operasional. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Renstra 2025–2029 yang baru ditetapkan pada

semester II tahun 2025. Akibatnya, perhitungan target kinerja pada awal tahun masih menggunakan definisi operasional sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara target awal dan target yang berlaku kemudian.

2) Keterbatasan bukti dalam penyidikan praktik kefarmasian
   Kurangnya bukti yang kuat menghambat proses penyidikan terhadap perkara praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan melebihi batas waktu yang ditetapkan dan mengalami stagnasi.
3) Hambatan dalam penetapan tersangka perkara pangan kedaluwarsa
   Pada perkara peredaran pangan kedaluwarsa, dilakukan penghentian demi hukum karena faktor usia terlapor di atas 65 tahun menjadi kendala dalam proses penetapan tersangka. Hal ini berdampak pada keterlambatan proses hukum dan pencapaian target kinerja.

Kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sulit diprediksi baik dari segi waktu, lokasi, maupun jumlah kasus. Hal ini disebabkan oleh keragaman karakteristik pelaku serta modus operandi yang terus berubah seiring perkembangan situasi. Sebagai unit pelaksana teknis, BBPOM Kupang tetap berkewajiban melindungi masyarakat dari peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Upaya ini sekaligus bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah kerja BBPOM Kupang melalui pengawasan, penegakan hukum, dan pembinaan yang konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang akan dilakukan oleh BBPOM di Kupang untuk dapat mencapai kinerja di tahun 2026 antara lain :

1) Mengusulkan manual indikator ditetapkan sejak awal tahun sehingga UPT dapat menetapkan target yang sesuai.
2) Penguatan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian sejak awal sebelum proses penyidikan.
3) Evaluasi ulang unsur pidana pada perkara yang ditangani dan kemungkinan alternatif penyelesaian dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko penyelesaian berkas perkara tindak pidana Obat dan Makanan melebihi timeline. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Membuat Rencana Penyidikan
2) Berkoordinasi dengan CJS untuk pemanggilan saksi/tersangka
3) Pemanggilan Saksi/tersangka dengan upaya paksa

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Adanya perubahan perhitungan indikator kinerja pada bulan Juli 2025, karena perubahaan target perkara pada awal tahun akibat adanya efisiensi anggaran dan definisi operasional untuk penyesuaian dengan Renstra 2025–2029 yang baru ditetapkan pada semester 2 tahun 2025, sehingga perhitungan target kinerja pada awal tahun 2025 masih menggunakan definisi operasional sebelumnya.	Penatapan Manual indikator sejak awal tahun sehingga UPT dapat menetapkan target yang sesuai	Monev berkala dengan unit pengampu di Direktorat Penyidikan	Januari - Desember 2026	Ya	O-15	Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan melebihi timeline

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Kurangnya bukti yang kuat menghambat proses penyidikan perkara yang praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sehingga proses penyidikan melebihi timeline dan stagnan	Penguatan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian sejak awal sebelum proses penyidikan	Melakukan koordinasi dengan penuntut umum dan kepolisian sebelum proses penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Januari - Desember 2026	Ya	O-15	Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan melebihi timeline
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Kurangnya bukti yang cukup kuat dan usia lanjut calon tersangka (di atas 60 tahun) menghambat proses penetapan tersangka dan proses hukum pada perkara mengedarkan pangan kedaluwarsa	Evaluasi ulang unsur pidana pada perkara yang ditangani dan kemungkinan alternatif penyelesaian dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan	Melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan penuntut umum serta kepolisian terkait kendala yang dihadapi penyidik	Januari - Desember 2026	Ya	O-15	Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan melebihi timeline

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT di tahun 2025 yang dilakukan BBPOM di Kupang antara lain:

1) Secara rutin melakukan kegiatan intelijen di wilayah kerja BBPOM di Kupang dan melakukan input data kerawanan kejahatan secara konsisten setiap bulan dimana terdapat 100 (seratus) data kerawanan yang telah dilaporkan melalui aplikasi *dashboard* penindakan.
2) Koordinasi Tim Pemeriksaan dan Tim Penindakan selama tahun 2025 memberikan kontribusi signifikan terhadap tersedianya alat bukti awal

yang kuat dalam pemberian sanksi pidana untuk 2 (dua) perkara di bidang pangan di Kota Kupang dan Kabupaten Rote Ndao sehingga memberikan efek jera serta perlindungan maksimal bagi masyarakat

3) Peningkatan kompetensi petugas intelijen maupun pengawasan pada fungsi pemeriksaan yang dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek Intelijen bidang Obat dan Makanan pada tanggal 17 Oktober 2025.
4) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Kepolisian Polda NTT dalam penanganan 5 (lima) perkara di tahun 2025.
5) Koordinasi dengan pihak Asperindo terutama jasa ekspedisi JNT dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan obat – obat tertentu yang menunjang tercapainya target 1 (satu) perkara di Kabupaten Kupang.
6) Melakukan Reviu SOP Mikro dengan mempertimbangkan kembali waktu penyelesaian dalam penanganan perkara.

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator terkait dengan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah indikator baru sesuai dengan Rencana Strategis BPOM 2025 – 2029. Indikator ini diukur dari hasil terlaksananya kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Kupang. Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah hasil kegiatan patroli siber dan penjejakan digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan, sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM.

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
   1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun) .
   2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Pada tahun 2025 BBPOM di Kupang berhasil melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, yang diukur dengan IKSK Keberhasilan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar. Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesai sesuai standar	90,00	100,00	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan

Keberhasilan IKSK Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar oleh BBPOM Kupang pada tahun 2025 ditunjukkan dengan nilai realisasi sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan, yaitu 90,00%. Persentase capaian mencapai 111,11%, sehingga dikategorikan dengan kriteria **Tidak Dapat**

Disimpulkan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Cegah Tangkal dan Direktorat Siber, BBPOM Kupang berhasil mencapai realisasi sebesar 100% untuk indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber sebesar 50%
2) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan sebesar 25%
3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT sebesar 25%

Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100%. Namun, capaian tersebut dikategorikan "Tidak Dapat Disimpulkan" karena target yang ditetapkan oleh unit pengampu lebih kecil. Proses penyelesaian laporan dilakukan secara tepat waktu melalui penginputan Patroli Siber dan Profiling Siber setiap bulan pada aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Selain itu, PIC ADP di BBPOM Kupang secara konsisten melakukan koordinasi dengan PIC ADP di BPOM Pusat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Petugas juga menyelesaikan laporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan serta laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan secara tepat waktu. Dengan demikian, meskipun realisasi kinerja IKSK mencapai 100%, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian terhadap target tidak dapat disimpulkan karena adanya ketidaksesuaian dalam penetapan target.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesai sesuai standar	2024	-	-	-	-
	2025	90,00	100,00	111.11%	Tidak Dapat Disimpulkan

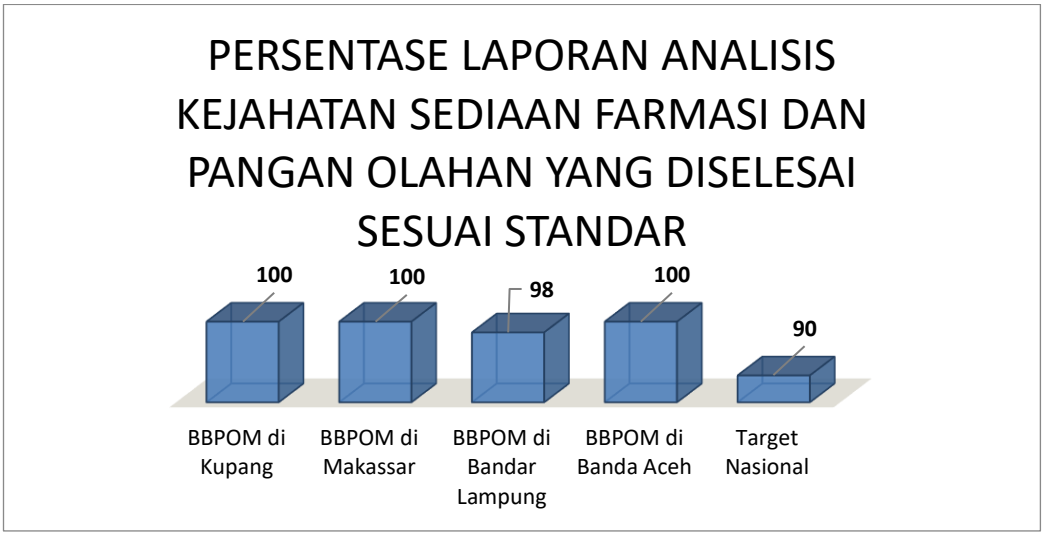
IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar tahun 2025, tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 untuk periode Renstra 2025-2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesai sesuai standar	94,00	100,00	106,38%	Tercapai / Melampaui 

Realisasi IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar pada tahun 2025 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 94%, maka diperoleh capaian sebesar 106,38%. Hasil ini dikategorikan **Tercapai/Melampaui**, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM Kupang telah dilaksanakan secara optimal. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pengawasan yang baik dan menjadi dasar penting untuk mempertahankan konsistensi kinerja hingga periode akhir Renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.24 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesai sesuai standar

Realisasi kinerja IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar oleh BBPOM Kupang pada tahun 2025 mencapai 100%, setara dengan capaian BBPOM Makassar (100,00%) dan BBPOM Banda Aceh (100,00%), serta lebih tinggi dibandingkan dengan BBPOM Bandar Lampung (98,00%).

Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 90,00%, keempat UPT tersebut telah melampaui target. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dalam melaksanakan kegiatan pelaporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar, sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak sesuai dengan ketentuan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar pada tahun 2025 memang telah tercapai dengan realisasi sebesar 100%. Namun, dalam pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terbatas menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan ilegal, khususnya yang beredar secara daring.

2) Kendala Infrastruktur Teknologi Informasi

   Gangguan jaringan internet pada waktu tertentu serta kendala teknis pada aplikasi pelaporan menyebabkan keterlambatan dan mengurangi kelancaran proses input data.

Upaya yang akan dilakukan oleh BBPOM di Kupang untuk dapat mencapai kinerja di tahun 2026 antara lain:

1) Pengembangan Inovasi SIAP BRO (Sistem Informasi Awal Patroli Siber) dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan obat dan makanan ilegal yang beredar secara online.
2) Berkoordinasi dengan PIC Pelaporan Siber dan ADP terkait kendala yang dihadapi BBPOM di Kupang

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Serangan balik digital dari pelaku (*phising, doxing, malware*). Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Pelatihan keamanan siber
2) Simulasi serangan siber
3) Pendampingan psikologis

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesai sesuai standar	Keterbatasan SDM untuk melakukan pengawasan obat dan makanan ilegal yang beredar secara online	Pengembangan Inovasi SIAP BRO (Sistem Informasi Awal Patroli Siber) dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan ilegal yang beredar secara *online*	Sosialisasi dan pengembangan inovasi SIAP BRO	Januari – Desember 2026	Ya	K-8	Serangan balik digital dari pelaku (*phising, doxing, malware*)
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Jaringan internet yang kurang memadai karena mengalami gangguan pada waktu tertentu serta gangguan pada aplikasi saat melakukan pelaporan	Melakukan Koordinasi dengan PIC Pelaporan Siber dan ADP terkait kendala yang dihadapi BBPOM di Kupang	Koordinasi secara rutin dengan PIC Pelaporan Siber dan ADP BPOM	Januari – Desember 2026	Ya	K-8	Serangan balik digital dari pelaku (*phising, doxing, malware*)

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar oleh BBPOM Kupang pada tahun 2025 antara lain:

1) Pelaporan Patroli Siber dan Profiling Siber

   Melaporkan hasil patroli siber sebanyak 467 tautan serta melakukan profiling siber kejahatan obat dan makanan sebanyak 12 kasus secara rutin sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.

2) Penginputan Data Kerawanan Kejahatan

Petugas penindakan secara rutin setiap bulan menginput data kerawanan kejahatan ke dalam sistem untuk mendukung analisis dan tindak lanjut.

3) Koordinasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Diversi Obat Keras
   BBPOM Kupang melakukan koordinasi dengan pihak terkait, salah satunya dengan J&T Express sebagai anggota ASPERINDO. Pada 5 Maret 2025, koordinasi ini berhasil menindaklanjuti laporan pengiriman obat keras berupa tramadol dan trihexyphenidyl dari Jakarta ke Kupang, sehingga kasus dapat ditangani dengan baik.
4) Penggalangan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
   Berkolaborasi dengan Direktorat Intelijen, BBPOM Kupang mengadakan kegiatan pengawasan bersama instansi yang memiliki fungsi intelijen pada 16 Oktober 2025, guna memperkuat sinergi dalam pengawasan obat dan makanan.
5) Kampanye Publik dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
   Melaksanakan kampanye publik melalui media daring BBPOM Kupang serta kegiatan KIE pada *car free day* (26 April 2025) untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap peredaran obat serta NAPPZA ilegal.
6) Pemanfaatan Kajian Pencegahan Kejahatan Pangan Olahan
   Melaksanakan KIE melalui media sosial, siaran radio, kegiatan di kampus, dan CFD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap distribusi obat dan pangan ilegal.
7) Pemanfaatan Informasi Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan
   Melakukan koordinasi dengan Bea Cukai Kupang terkait distribusi pangan tanpa izin edar (TIE), seperti produk Sosis Perdix dari Timor Leste yang beredar di wilayah perbatasan.

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. kebijakan pelayanan (24%),
b. profesionalisme SDM (25%),

c. sarana prasarana (18%),
d. sistem informasi pelayanan publik (11%),
e. konsultasi pengaduan (10%), dan
f. inovasi (12%).

Penilaian kinerja UPP BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian PEKPPP di Lingkungan BPOM dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortala.pom.go.id, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,92	104,68	Sangat Baik

Tahun 2025, BBPOM di Kupang menerima target Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,7 dan berhasil direalisasikan sebesar 4,92. Dengan capaian sebesar 104,68%, kinerja Indeks Pelayanan Publik berada pada kategori **Sangat Baik**, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah melampaui target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	2024	4,75	4,93	103,79	Sangat Baik
	2025	4,7	4,92	104,68	Sangat Baik

Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Kupang pada tahun 2025 sebesar 4,92 relatif stabil dibandingkan dengan tahun 2024 yang

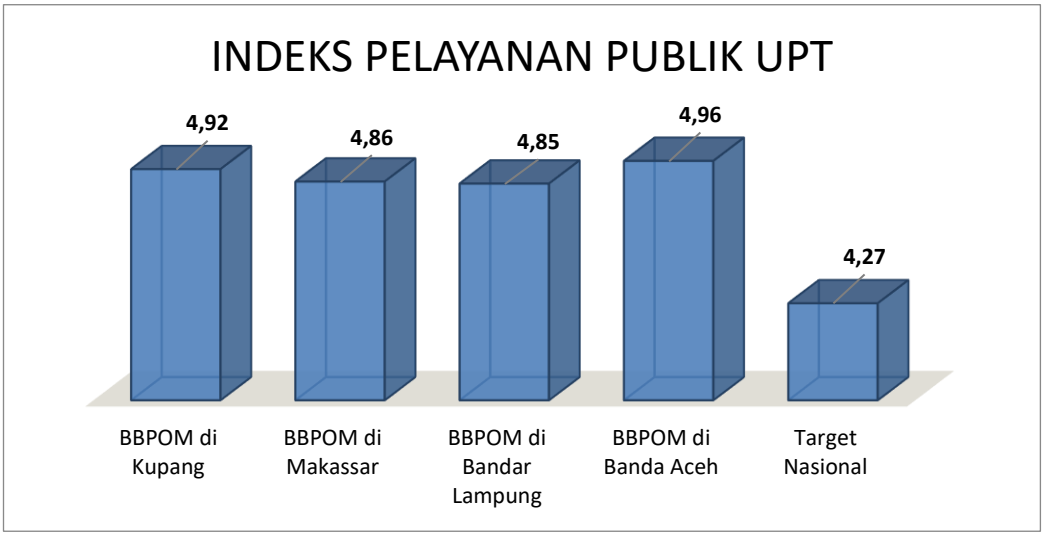
mencapai 4,93. Meskipun terjadi penurunan nilai yang tidak signifikan, capaian kinerja tetap meningkat secara persentase terhadap target dan berada pada kategori **Sangat Baik**, sehingga menunjukkan konsistensi mutu pelayanan publik yang terjaga.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,90	4,92	100,41	Tercapai / Melampaui ▲

Realisasi IKSK Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 sebesar 4,92 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 4,9 dengan capaian 100,41%. Capaian ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah tercapai bahkan melampaui sasaran yang ditetapkan, sehingga kinerja pada indikator ini dinilai **Tercapai/Melampaui**.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.25 Indeks Pelayanan Publik UPT

Realisasi IKSK Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Kupang pada tahun 2025 sebesar 4,92 lebih tinggi dibandingkan BBPOM di Makassar (4,86)

dan BBPOM di Bandar Lampung (4,85), serta sedikit berada di bawah BBPOM di Aceh (4,96). Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 4,27, capaian BBPOM di Kupang menunjukkan kinerja pelayanan publik yang sangat kompetitif dan berada jauh di atas rata-rata nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Keberhasilan pencapaian Indeks Pelayanan Publik didukung oleh pemenuhan enam aspek penilaian IPP, khususnya pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pelayanan publik. Optimalisasi sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan konsultasi dan pengaduan, serta pengembangan inovasi pelayanan turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IPP.

Adapun kendala yang dihadapi lebih bersifat potensial, yaitu perlunya konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil PEKPPP agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan meningkat. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan difokuskan pada pemantauan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil evaluasi PEKPPP tahun 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik tahun 2026.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko *Service Level Agreement* (SLA) tindak lanjut penyelesaian pengaduan obat dan makanan tidak sesuai. Aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Melaksanakan tindak lanjut pengaduan sesuai SOP
2) Monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan
3) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan secara konsisten

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	Melakukan reviu terhadap target tahun berikutnya	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi hasil PEKPPP tahun 2025 untuk peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2026	2026	Y	R-6	*Service Level Agreement* (SLA) tindak lanjut penyelesaian pengaduan obat dan makanan tidak sesuai

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Kupang ditunjang oleh pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara berkelanjutan, meliputi penyusunan dan implementasi kebijakan pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta optimalisasi sistem informasi pelayanan publik. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik melalui aplikasi evortala.pom.go.id, yang dilengkapi dengan wawancara dan verifikasi data secara daring, turut memastikan objektivitas penilaian dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Tidak terdapat kegiatan yang secara signifikan menghambat pencapaian pernyataan kinerja, namun penguatan tindak lanjut rekomendasi evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kinerja pada periode selanjutnya.

25. Nilai Pembangunan ZI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun

2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Cara Perhitungan Dan Formula:

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara Perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Kupang tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI	90	87,17	96,86	Baik

Tahun 2025, realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Kupang sebesar 87,17 dari target nilai 90,00 sehingga persen capaian kinerja sebesar 96,86 dengan kategori **Baik**. Nilai pembangunan ZI diperoleh dari penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada BBPOM di Kupang sebesar 87,17 dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	2,71	3,42	6,13	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,33	2,34	4,67	**TMS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,32	4,25	8,57	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,57	4,32	8,89	**MS**

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,19	6,88	12,07	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,43	3,55	7,98	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**48,31**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			22,11	
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,11	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,76	
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,76	**MS**
TOTAL HASIL						**38,88**	
NILAI PMPZI						**87,17**	

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Terkait hasil penilaian, BBPOM di Kupang harus melakukan perbaikan berdasarkan saran perbaikan yang diberikan tim penilai melalui hasil evaluasi. BBPOM di Kupang perlu memperbaiki nilai komponen pengungkit untuk bagian penataan tatalaksana dan meningkatkan nilai komponen pengungkit untuk bagian lainnya lebih optimal. Begitu juga dengan komponen hasil, nilai yang ada masih perlu ditingkatkan kembali di tahun 2026, walaupun capaian kinerja terkait IKSK ini masuk dalam kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI	2024	88,33	87,27	98,80	Baik
	2025	90	87,17	96,86	Baik

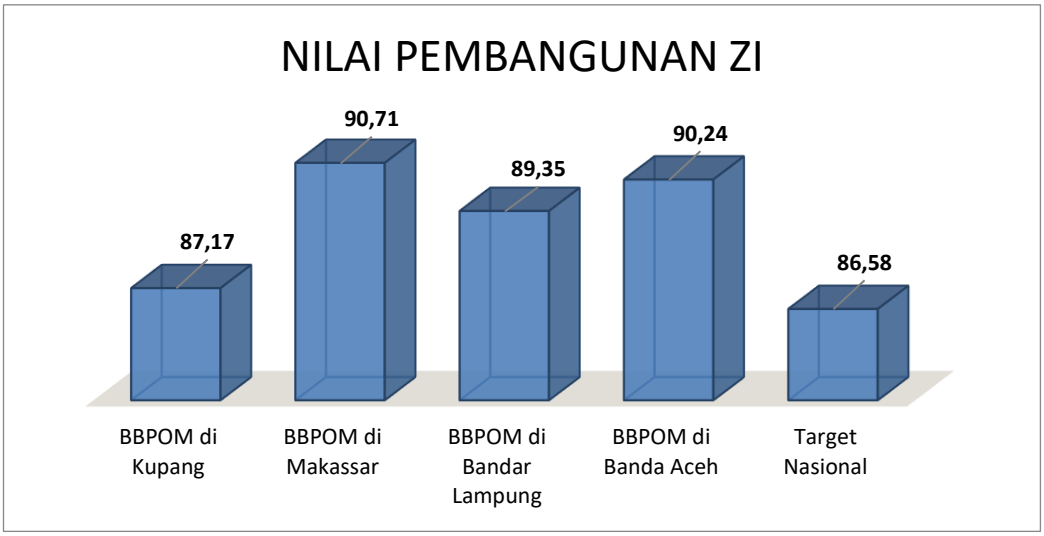
Tahun 2024, realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI 87,27 dengan capaian 98,80%, sedangkan tahun 2025 realisasi Nilai Pembangunan ZI mengalami penurunan menjadi 87,17 dengan capaian 96,86% dari target 2025. Setelah meraih WBK pada 2023, BBPOM di Kupang mencanangkan meraih WBBM pada 2025 sehingga menargetkan nilai pembangunan Zona Integritas sebesar 90. Target ini tidak tercapai karena nilai komponen pengungkit Penataan Tatalaksana Tidak Memenuhi Syarat.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI	91,00	87,17	95,79	Akan Tercapai

Realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI tahun 2025 sebesar 87,17 dibawah target akhir Renstra sebesar 91,00 dengan capaian 95,79% dengan kategori Akan Tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa target jangka menengah belum tercapai masih dibawah sasaran yang ditetapkan, sehingga kinerja pada indikator perlu ditingkatkan terus, dan menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam pembangunan ZI pada BBPOM di Kupang, sehingga perwujudan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat tercapai sampai akhir target Renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.26 NILAI PEMBANGUNAN ZI

Realisasi IKSK Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Kupang pada tahun 2025 sebesar 87,17 lebih rendah dibandingkan BBPOM di Makassar (90,71), BBPOM di Bandar Lampung (89,35), dan BBPOM di Aceh (90,24). Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 86,58, capaian BBPOM di Kupang dan UPT lainnya telah melebihi target nasional, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembangunan ZI untuk mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, telah berjalan dengan baik pada masing-masing UPT dengan capaian diatas target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) di BBPOM Kupang Tahun 2025 menunjukkan nilai 87,17 dari target 90,00, dengan capaian kinerja 96,86% dan kategori Baik. Walaupun capaian ini tergolong tinggi, namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target yaitu:

1) Penurunan Nilai Penataan Tatalaksana, yang menunjukkan bahwa indikator tata kelola, SOP, dan sistem kerja tidak konsisten diterapkan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi internal belum optimal, sehingga terjadi gap antara kebijakan dan praktik
2) Beberapa inovasi pelayanan publik belum menunjukkan keberlanjutan, termasuk integrasi digitalisasi proses kerja belum sepenuhnya efektif
3) Koordinasi lintas fungsi/bagian/tim masih belum optimal, terutama dalam standarisasi prosedur
4) Sistem pengawasan internal belum mampu mendeteksi dan mengoreksi deviasi secara cepat
5) Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, terdapat gap antara target (90,00) dan realisasi (87,17). Fokus perbaikan perlu diarahkan pada komponen pengungkit, khususnya Penataan Tatalaksana yang mengalami penurunan status. Berikut rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja:

1) Digitalisasi proses kerja dengan percepatan integrasi sistem informasi untuk mengurangi ketergantungan pada manualisasi
2) Review dan harmonisasi SOP dengan melakukan audit internal terhadap seluruh SOP, untuk memastikan konsistensi penerapan di setiap unit kerja dan memperbaiki daftar SOP untuk menghilangkan duplikasi SOP pada sistem manajemen terintegrasi
3) Pelatihan teknis dan manajerial yang berfokus pada kompetensi tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi
4) Evaluasi keberlanjutan inovasi dengan memastikan inovasi pelayanan publik tidak hanya bersifat jangka pendek
5) Tindak lanjut rekomendasi evaluasi dengan memastikan setiap catatan hasil evaluasi sebelumnya ditindaklanjuti dengan bukti nyata

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko SOP tidak diterapkan. Aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah melaksanakan kaji ulang dokumen, rapat tinjauan manajemen dan mengembangkan inovasi sinergi.

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Nilai Pembangunan ZI	Penurunan Nilai Penataan Tatalaksana, yang menunjukkan bahwa indikator tata kelola, SOP, dan sistem kerja tidak konsisten diterapkan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi internal belum optimal, sehingga terjadi gap antara kebijakan dan praktik Beberapa inovasi pelayanan publik belum menunjukkan keberlanjutan, termasuk integrasi digitalisasi proses kerja belum sepenuhnya efektif Koordinasi lintas fungsi/bagian/tim masih belum optimal, terutama dalam standarisasi prosedur Sistem pengawasan internal belum mampu mendeteksi dan mengoreksi deviasi secara cepat Tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi sebelumnya belum sepenuhnya dilaksanakan	1. Digitalisasi proses kerja dengan percepatan integrasi sistem informasi untuk mengurangi ketergantungan pada manualisasi 2. Review dan harmonisasi SOP dengan melakukan audit internal terhadap seluruh SOP, untuk memastikan konsistensi penerapan di setiap unit kerja dan memperbaiki daftar SOP untuk menghilangkan duplikasi SOP pada sistem manajemen terintegrasi 3. Pelatihan teknis dan manajerial yang berfokus pada kompetensi tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi 4. Evaluasi keberlanjutan inovasi dengan memastikan inovasi pelayanan publik tidak hanya bersifat jangka pendek 5. Tindak lanjut rekomendasi evaluasi dengan memastikan setiap catatan hasil evaluasi sebelumnya ditindaklanjuti dengan bukti nyata	1. Digitalisasi proses kerja dengan percepatan integrasi sistem informasi untuk mengurangi ketergantungan pada manualisasi 2. Review dan harmonisasi SOP dengan melakukan audit internal terhadap seluruh SOP, untuk memastikan konsistensi penerapan di setiap unit kerja dan memperbaiki daftar SOP untuk menghilangkan duplikasi SOP pada sistem manajemen terintegrasi 3. Pelatihan teknis dan manajerial yang berfokus pada kompetensi tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi 4. Evaluasi keberlanjutan inovasi dengan memastikan inovasi pelayanan publik tidak hanya bersifat jangka pendek 5. Tindak lanjut rekomendasi evaluasi dengan memastikan setiap catatan hasil evaluasi sebelumnya ditindaklanjuti dengan bukti nyata	2026	Y	R-7	SOP tidak diterapkan

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) dan memastikan target IKSK dapat tercapai, diperlukan kegiatan yang secara langsung memperkuat komponen pengungkit dan komponen hasil sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemilihan anggota tim kerja pembangunan ZI sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta membuat kriteria khusus dalam penentuan tim untuk setiap area perubahan.
2. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan ZI Tahun 2025 yang berisi target-target prioritas untuk Tahun 2025.
3. Menyusun rencana jadwal/agenda setting dalam rangka sosialisasi pembangunan WBK/WBBM baik untuk stakeholder internal maupun eksternal secara berkala.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan seluruh rencana kerja dapat terlaksana, serta menindaklanjuti hasil monitoring tersebut.
5. Terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada seluruh program perubahan Agent of Change untuk memastikan dampak pelaksanaan program perubahan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya.
6. Melakukan internalisasi pembangunan ZI dan nilai BerAKHLAK kepada seluruh pegawai.
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh SOP sesuai dengan kondisi dan kebutuhan unit kerja serta memastikan telah melakukan tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi dan implementasi SPBE untuk seluruh aplikasi maupun inovasi yang digunakan secara berkala termasuk tindak lanjut kendala pada hasil monitoring dan evaluasi tersebut sehingga dapat memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisiensi layanan unit kerja.
9. Memastikan keselarasan data antara laporan hasil monitoring evaluasi dengan laporan tindak lanjut yang dilakukan.

10. Mendokumentasikan proses pelaksanaan rotasi internal termasuk justifikasi rotasi pegawai.
11. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang berdasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan pegawai, serta menggunakan TNA sebagai dasar pengembangan kompetensi.
12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
13. Mendokumentasikan arahan pimpinan terkait perencanaan, pengukuran dan/atau pencapaian kinerja.
14. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait akuntabilitas kinerja kepada seluruh SDM pengelola akuntabilitas.
15. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala dan mendokumentasikannya.
16. Menyusun rencana tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, dan benturan kepentingan serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut atas monev periode sebelumnya.
17. Memanfaatkan masukan seluruh hasil SKM dan pengaduan masyarakat dalam reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.
18. Mendokumentasikan bukti implementasi pemberian penghargaan/sanksi bagi petugas pemberi pelayanan dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar yang sesuai dengan kriteria penilaian serta menyusun analisis dampak setelah terdapat inovasi tersebut.
19. Mendokumentasikan proses penilaian dalam rangka pemberian penghargaan/sanksi/kompensasi dalam kertas kerja.
20. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

26. Nilai AKIP

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Kupang tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai AKIP	80,5	78,15	97,08%	Baik

Realisasi nilai AKIP BBPOM di Kupang tahun 2025 berdasar hasil penilaian Inspektorat Utama BPOM adalah 78,15 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai AKIP Balai POM di Kupang belum mencapai target

dengan capaian 97,08% dan dikategorikan **Baik**. Bobot masing-masing komponen penilaian AKIP BBPOM di Kupang adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24	20,16
2	Pengukuran Kinerja	24	17,76
3	Pelaporan Kinerja	12	9,12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,20
5	Capaian Kinerja	20	15,91
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**78,15**
Predikat			**BB**

Dari hasil penilaian, perlu peningkatan lagi pada masing-masing komponen mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja, sehingga pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat terlaksana secara optimal.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP	2024	82,83	80,26	96,60	Baik
	2025	80,5	78,15	97,08	Baik

Berdasarkan data diatas jika dibandingkan dengan capaian 2024, realisasi nilai AKIP tahun 2025 masih lebih rendah. Penurunan kinerja tersebut terjadi pada komponen Capaian Kinerja, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,76	17,76
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	9,12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,20	15,20
5.	Capaian Kinerja	20	17,66	15,91
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**80,26**	**78,15**
Predikat			**A**	**BB**

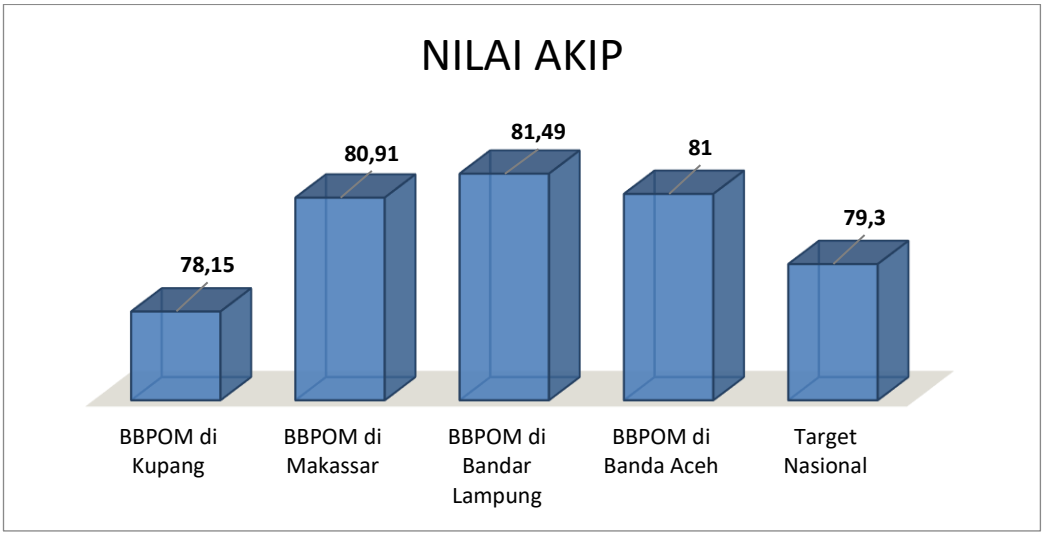
*Rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui Aplikasi SAPA APIP.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP	83	78,15	94,16	Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, realisasi tahun 2025 ini memperoleh capaian 94,16% dengan kategori **Akan Tercapai**. Apabila rekomendasi dan perbaikan penerapan SAKIP dilakukan dengan optimal maka target akhir Renstra bisa tercapai dengan baik.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.27 Nilai AKIP

Realisasi IKSK Nilai AKIP BBPOM di Kupang pada tahun 2025 sebesar 78,15 lebih rendah dibandingkan BBPOM di Makassar (80,91), BBPOM di Bandar Lampung (81,49), dan BBPOM di Aceh (81,00). Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 79,30, capaian BBPOM di Kupang masilh lebih rendah dibanding target nasional, sedangkan ketiga UPT lainnya telah melebihi target nasional, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sudah lebih optimal dibandingkan di BBPOM di Kupang.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan tercapainya target pada indikator ini adalah:

1) Perencanaan Kinerja, masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :
   a) Terdapat perbedaan pencatatan nomenklatur sasaran strategis antara SK IKU, RKT, PK, RAPK dan Renstra pada BBPOM di Kupang;
   b) Belum terdapat SK Penetapan IKU Tahun 2025 pada Loka POM di Kabupaten Belu;
   c) Usulan penetapan target Renstra periode 2025-2029 belum didukung dengan kertas kerja penyusunan target kinerja berdasarkan basis data yang memadai, seperti dasar perhitungan data/justifikasi;
   d) RAPK BBPOM di Kupang Tahun 2025 yang diupload pada esr belum memuat KRO, RO, Komponen, dan anggaran sesuai Aplikasi SIMETRIS.
2) Pengukuran Kinerja masih terdapat kelemahan:
   a) SOP Mikro pada BBPOM di Kupang tentang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja telah disusun namun belum terdapat definisi dan tugas yang jelas dari 5 (lima) pelaksana yang terlibat;

b) Belum terdapat SOP Pengumpulan Data Kinerja pada Loka POM di Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur;

c) Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja telah dapat ditelusuri ke dokumen monev (sumber data) namun data sumber yang diambil dari Aplikasi harus dilakukan cleansing atau intervensi sampai dapat digunakan untuk perhitungan realisasi kinerja;

d) Belum disusun Surat Keputusan/mekanisme pemberian reward dan punishment pada Loka POM di Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang telah mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi;

e) Pelaporan pada Aplikasi SIMETRIS belum diisi secara lengkap dan detail terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut.

3) Pelaporan Kinerja

a) Laporan kinerja interim TW III 2024, TW I s.d. II 2025 belum menyajikan highlight kinerja sebagaimana format laporan kinerja pada Kepka BPOM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

b) Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan narasi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yang sama dengan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan;

c) Efisiensi penggunaan anggaran telah disajikan dalam Lapkin Interim dan Lapkin Tahunan, namun belum terdapat informasi upaya yang dilakukan atau faktor-faktor penyebab terjadinya efisiensi maupun inefisiensi pada beberapa indikator kinerja. Kekurangan analisis ini terjadi pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024

d) Laporan Kinerja Tahun 2024, penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja pada bagian "Pemanfaatan Informasi Kinerja" masih terdapat beberapa kekurangan dalam pendalaman analisisnya, yakni belum menyajikan informasi mengenai justifikasi

dan hasil analisa terhadap capaian target indikator >120% dan capaian target indikator <100%

e) Laporan Kinerja Interim TW I dan TW II Tahun 2025 belum terdapat perbandingan antara capaian kinerja triwulanan terhadap capaian kinerja tahunan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a) Pada saat dilaksanakan evaluasi, Laporan Evaluasi Internal (LEI) Loka POM di Kabupaten Belu periode Triwulan II 2025 dan LEI Loka POM di Kabupaten Sumba Timur TW I 2025 terlambat disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
   b) Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2024 pada BBPOM di Kupang belum menyajikan hasil analisis capaian kinerja;
   c) Belum terdapat SK Tim Pengelola SAKIP pada Loka POM di Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.
5) Laporan Evaluasi Internal telah menyajikan Kendala/Hambatan, RTL dan monitoring RTL yang selaras, namun Rencana Aksi/RTL yang disusun pada Triwulan I tidak terdapat timeline yang spesifik untuk dapat ditindaklanjuti di periode berikutnya, sehingga progress tidak dapat dimonev dampaknya pada periode berikutnya.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko ketidakpastian data pengukuran kinerja. Aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah melaksanakan

1. Sosialisasi manual IKU atau definisi operasional
2. Membuat pedoman internal sumber data pengukuran kinerja
3. Rapat evaluasi internal.

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
26	Nilai AKIP	1. Terdapat kelemahan pada perencanaan kinerja dimana hasil evaluasi masih menunjukkan beberapa catatan yang rus diperbaiki 2. Pengukuran Kinerja harus diperbaiki sesuai catatan 3. Pelaporan kinerja masih harus diperbaiki karena analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2024 menyajikan narasi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yang sama dengan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja masih harus diperbaiki karena terdapat catatan perbaikan termasuk laporan evaluasi internal	1. Perbaikan terhadap catatan hasil evaluasi perencanaan sesuai petunjuk/pedoman yang berlaku. 2. Perbaikan terhadap catatan hasil evaluasi pengukuran kinerja sesuai petunjuk/pedoman yang berlaku 3. Perbaikan terhadap catatan hasil evaluasi pelaporan kinerja sesuai petunjuk/pedoman yang berlaku 4.	Perbaikan terhadap catatan hasil evaluasi AKIP sesuai petunjuk/pedoman yang berlaku.	Desember 2026	Y	S-4	Ketidakpastian data pengukuran kinerja

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKSK didukung oleh kegiatan:

1. Fokus pada kegiatan yang langsung berkontribusi pada indikator IKSK.
2. Mendorong kepemimpinan yang transparan dan partisipatif.
3. Membuat mekanisme feedback cepat agar deviasi target segera diperbaiki.
4. Digitalisasi terintegrasi dengan mempercepat implementasi dashboard monitoring real time.

27. Nilai Kinerja Anggaran

IKSK Nilai Kinerja Anggaran masuk salam sasaran kegiatan terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Definisi terkait IKSK Nilai Kinerja Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
    1) Revisi DIPA (bobot 10%)
    2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
    3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
    4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
    5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
    6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
    7) Capaian Output (bobot 25%)
    8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
    1) Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
    2) Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan dan Formula

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Kupang tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	5	4	80,00	Cukup

Pada tahun 2025, IKSK Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Kupang memperoleh nilai indeks sebesar 4. Nilai tersebut dihitung dari gabungan 50% Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 50% Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). BBPOM Kupang mencatat nilai IKPA sebesar 98,33 dan nilai EKA sebesar 79,96, sehingga menghasilkan total Nilai Kinerja Anggaran sebesar 89,15. Berdasarkan hasil tersebut, kategori indeks yang dicapai adalah 4. Jika dibandingkan dengan target indeks 5, capaian ini belum memenuhi target, dengan persentase pencapaian sebesar 80,00% dan masuk dalam kategori **Cukup.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	2024				
	2025	5	4	80,00	Cukup

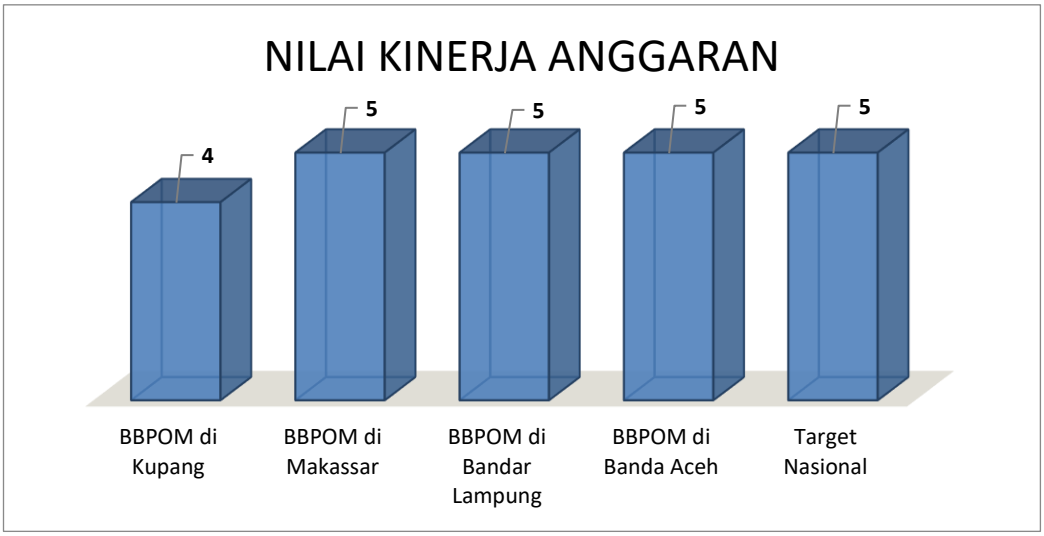
IKSK Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya perbedaan manual indikator dan satuan nilai.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	5	4	80,00	Akan Tercapai 

Realisasi IKSK Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 sebesar 4, berada di bawah target akhir Renstra sebesar 5, dengan capaian 80,00% dan kategori Akan Tercapai. Hasil ini menunjukkan bahwa target jangka menengah belum terpenuhi karena masih berada di bawah sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja pada indikator perlu terus ditingkatkan, khususnya pada nilai IKPA dan EKA yang menjadi tanggung jawab BBPOM Kupang. Peningkatan kinerja anggaran mencakup indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output, serta Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA). Upaya perbaikan diarahkan pada aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran di BBPOM Kupang.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.28 NILAI Kinerja Anggaran

Realisasi IKSK Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Kupang pada tahun 2025 sebesar 4 lebih rendah dibandingkan BBPOM di Makassar (5) dan BBPOM di Bandar Lampung (5), dan BBPOM di Aceh (5). Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 5, capaian BBPOM di Kupang menunjukkan bahwa nilai kinerja anggaran berada dibawag target rata-rata nasional, sehingga perlu upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja anggaran dengan upaya perbaikan yang diarahkan pada aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran di BBPOM Kupang melalui cakupan indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output, serta Dispensasi SPM.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Target IKSK Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Kupang Tahun 2025 adalah 5, namun realisasi hanya mencapai 4. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya gap dalam efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian anggaran. Beberapa kendala yang menjadi faktor penyebab yaitu:

1) Perencanaan anggaran kurang tepat dimana penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil dan prioritas strategis, serta terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan alokasi anggaran.
2) Realisasi belanja tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang direncanakan dimana penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun.
3) Pelaksanaan anggaran tidak optimal karena kegiatan yang direncanakan tidak seluruhnya terlaksana atau mengalami keterlambatan.
4) Kualitas Output dan Outcome belum maksimal yang ditunjukkan dengan masih terdapat kegiatan yang menghasilkan output, tetapi belum memberikan outcome yang signifikan terhadap indikator kinerja.
5) keterbatasan kapasitas SDM yang ditunjukkan dengan kurangnya pelatihan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran berbasis kinerja.
6) Sistem pengendalian internal belum mampu mendeteksi deviasi penggunaan anggaran secara cepat.

Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan antaralain:

1) Perbaikan perencanaan anggaran dengan menerapkan evidence-based budgeting dengan mengacu pada data perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran serta prioritas strategis.
2) Melakukan evaluasi realiasasi anggaran secara berkala untuk menyesuaikan rencana penarikan dana dan realisasi penggunaan.
3) Koordinasi antar fungsi/bagian dengan pengelola anggaran, untuk capaian kinerja anggaran.
4) Peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran berbasis kinerja.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Ketidaktepatan penggunaan Akun Belanja. Aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Sosialisasi penggunaan akun kegiatan belanja kepada seluruh pegawai
2) Peningkatan kontrol verifikasi keuangan secara berjenjang mulai dari Verifikator Keuangan, PPK dan PPSPM
3) Mengoptimalkan kinerja Tim PIPK dalam kegiatan audit internal setiap semester terhadap laporan keuangan Balai POM di Kupang

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	Nilai Kinerja Anggaran	1. Perencanaan anggaran kurang tepat dimana penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil dan prioritas strategis, serta terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan alokasi anggaran. 2. Realisasi belanja tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang direncanakan dimana penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun. 3. Pelaksanaan anggaran tidak optimal karena kegiatan yang direncanakan tidak	1. Perbaikan perencanaan anggaran dengan menerapkan evidence-based budgeting dengan mengacu pada data perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran serta prioritas strategis. 2. Melakukan evaluasi realiasasi anggaran secara berkala untuk menyesuaikan rencana penarikan dana dan realisasi penggunaan. 3. Koordinasi antar fungsi/bagian dengan pengelola anggaran, untuk capaian kinerja anggaran. 4. Peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran berbasis kinerja	1. Perbaikan perencanaan anggaran dengan menerapkan evidence-based budgeting dengan mengacu pada data perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran serta prioritas strategis. 2. Melakukan evaluasi realiasasi anggaran secara berkala untuk menyesuaikan rencana penarikan dana dan realisasi penggunaan. 3. Koordinasi antar fungsi/bagian dengan pengelola anggaran, untuk capaian kinerja anggaran. 4. Peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran berbasis kinerja	Desember 2026	Y	K-1	Ketidaktepatan penggunaan Akun Belanja

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		seluruhnya terlaksana atau mengalami keterlambatan. 4. Kualitas Output dan Outcome belum maksimal yang ditunjukkan dengan masih terdapat kegiatan yang menghasilkan output, tetapi belum memberikan outcome yang signifikan terhadap indikator kinerja. 5. keterbatasan kapasitas SDM yang ditunjukkan dengan kurangnya pelatihan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran berbasis kinerja. 6. Sistem pengendalian internal belum mampu mendeteksi deviasi penggunaan anggaran secara cepat						

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk memastikan target IKSK Nilai Kinerja Anggaran tercapai, diperlukan program/kegiatan yang secara langsung memperkuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran. Berikut analisis program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan:

1) Review RKA secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan dengan alokasi anggaran.

2) Penyusunan renlak kegiatan yang disesuaikan dengan rencana penarikan dana, dimana setiap kegiatan harus jelas kontribusinya terhadap indikator kinerja.
3) Monitoring berkala penyerapan anggaran setiap bulan dan melakukan evaluasi kendala dan tindak lanjut yang telah dilakukan
4) Audit Internal Anggaran secara berkala dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap kepatuhan penggunaan anggaran oleh tim PIPK.
5) Mengukur efektivitas penggunaan anggaran terhadap peningkatan kualitas layanan.

28. Indeks Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu: *Risk Naive, Risk Aware, Risk Defined, Risk Managed*, dan *Risk Enabled*. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM, penilaian tingkat maturitas manajemen risiko dilakukan oleh inspektorat utama. Tujuan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko adalah:

a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM sebagaimana diharapkan;
b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
c. Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

Ruang lingkup penilaian meliputi: Komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, reviu dan pemantauan.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian IKSK Indeks Manajemen Risiko pada BBPOM di Kupang tahun 2025 dapat dilihat berikut ini:

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	3	2,84	94,67	Baik

Tahun 2025, realisasi IKSK Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Kupang sebesar 2,84 dari target nilai 3 sehingga persen capaian kinerja sebesar 94,67% dengan kategori **Baik**. Ruang lingkup penilaian meliputi: Komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, reviu dan pemantauan. Tahun 2025, hasil penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Kepala BBPOM di Kupang dikategorikan *Risk Aware* dengan karakteristik risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	2024	-	-	-	-
	2025	3	2,84	94,67	Baik

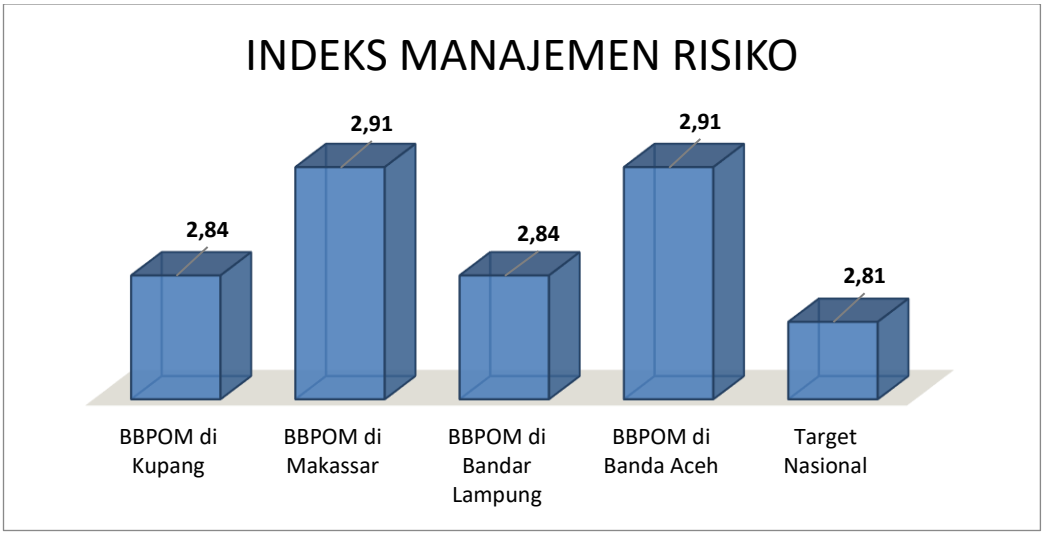
Realisasi kinerja IKSK Indeks Manajemen Risiko tahun 2025, tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	3,4	2,84	83,53	Akan Tercapai

Realisasi IKSK Indeks Manajemen Risiko tahun 2025 sebesar 2,84, berada di bawah target akhir Renstra sebesar 3,4 dengan capaian 83,53% sehingga dikategorikan Akan Tercapai. Hasil ini menunjukkan bahwa target jangka menengah belum terpenuhi karena masih berada di bawah sasaran yang ditetapkan, sehingga diperlukan perbaikan berkelanjutan agar nilai maturitas manajemen risiko dapat mencapai tingkat maturitas level selanjutnya sesuai dengan target akhir resntra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Serta Target Nasional Tahun 2025



Gambar 3.29 indeks manajemen risiko

Realisasi IKSK Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Kupang pada tahun 2025 sebesar 2,84 setara dengan BBPOM di Bandar Lampung (2,84) namun lebih rendah dibandingkan BBPOM di Makassar (2,91) dan BBPOM di Banda Aceh (2,91). Jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 2,81, capaian BBPOM di Kupang dan UPT lainnya telah melebihi

target nasional, yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan pada masing-masing UPT dengan baik.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Realisasi IKSK Indeks Manajemen Risiko belum tercapai pada tahun 2025 dari nilai yang ditargetkan. Hasil penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Kepala BBPOM di Kupang dikategorikan *Risk Aware* dengan karakteristik risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat. Tidak tercapai IKSK tersebut disebabkan beberapa hal yang menjadi hasil penilaian oleh inspektorat utama yaitu:

1) Telah terdapat kertas kerja penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak dalam risk register namun belum didukung oleh basis data yang memadai
2) Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko;
3) Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:
    a) Terdapat ketidakkonsistenan dalam penetapan nilai risiko inheren antar periode semester tanpa disertai justifikasi sebagai contoh pada risiko dengan kode risiko K3-2
    b) Terdapat aktivitas pengendalian saat ini (existing control) yang tidak selaras dengan risk event/penyebab/akibat, misalnya pada kode risiko H-1
4) Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan level risiko ≥16 pada semester I tahun 2025 dengan respon risiko reduce, namun deskripsi tindakan mitigasi sama dengan aktivitas pengendalian saat ini (*existing control*)

Terhadap kondisi tersebut direkomendasikan agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1) Melakukan penilaian risiko sesuai pedoman serta mendokumentasikan penentuan skor risiko pada kertas kerja beserta basis data yang memadai sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak;
2) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/sertifikasi/refreshment/workshop/awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko;
3) Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan PetunjuknPelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan;
4) Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Keterlambatan reviu daftar risiko sesuai juklak penerapan manajemen risiko. Aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Melakukan rapat / reviu daftar risiko di setiap awal semester
2) Sosialisasi manajemen risiko
3) Pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	Indeks manajemen Risiko	1. Telah terdapat kertas kerja penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak dalam risk register namun belum didukung oleh basis data yang memadai 2. Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang	1. Melakukan penilaian risiko sesuai pedoman serta mendokumentasikan penentuan skor risiko pada kertas kerja beserta basis data yang memadai sebagai dasar dalam menentukan	Melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi dari hasil penialaian yaitu: 1. Melakukan penilaian risiko sesuai pedoman serta mendokumentasikan penentuan	Desember 2026	Y	O-19	Keterlambatan reviu daftar risiko sesuai juklak penerapan manajemen risiko

No	IKSK	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	*Timeline*	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		memadai terkait manajemen risiko; 3. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko 4. Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan level risiko ≥16 pada semester I tahun 2025 dengan respon risiko reduce, namun deskripsi tindakan mitigasi sama dengan aktivitas pengendalian saat ini (existing control)	level kemungkinan dan dampak; 2. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/sertifikasi/ refreshment/workshop/awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko; 3. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan; 4. Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual	skor risiko pada kertas kerja beserta basis data yang memadai sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak; 2. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/sertifikasi/refreshment/workshop/awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko; 3. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan; 4. Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual				

f. Analisis program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian IKSK ke level Risk Managed atau lebih tinggi maka berikut analisis program atau kegiatan yang dapat menunjang yaitu:

1) Pelatihan manajemen risiko untuk semua level pegawai;

2) Digitalisasi risk register dan dashboard monitoring serta integrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran;
3) Review dan harmonisasi SOP manajemen risiko lintas unit serta penetapan mekanisme eskalasi risiko yang jelas;
4) Audit internal berkala terkait penerapan manajemen risiko.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tabel 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW III)

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) sampel obat seharusnya disampling pada sarana yang mewakili setiap jenis fasilitas yaitu IFK/GFK, PBF, RS, PKM, Klinik, Apotek dan/atau toko obat. Namun sampai dengan TW 3, baru 1 dari 5 kabupaten target yang dapat dilakukan pengambilan sampel mewakili setiap jenis sarana khususnya sampling di toko obat 2) tidak terealisasi untuk ketegori tertentu dari sampel kosmetik, oba dan kuasi	Mengajukan permohonan perubahan proporsi renlak sampling/kategori sampling pada direktorat terkait kendala sampling untuk: 1) Kosmetik sub kategori sampel kasus belum semuanya dikirim dari direktorat, baru terpenuhi 3 sampel dari target 15 sampel 2) Sampel Obat Bahan Alam UMKM setempat yang sudah tersampling 11 sampel dari target 14 sampel, masih kurang 3 sampel 3) sampel obat kuasi produk UMK Lokal	Selesai	-	-	1. PPK dan Penanggungjawab program segera melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan pembelian sampel 2. Pada bulan oktober kegiatan sampling dilakukan tanpa mekanisme pembiayaan back to back, tetapi sebagai perjalanan khusus pengambilan sampel 3. Segera koordinasikan dengan direktorat secara tertulis terkait kendala sampel kosmetik sub kategori sampel kasus	Y	O-4	Keterlambatan pelaporan hasil uji

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Sarana pelayanan kefarmasian yang sudah mendapat bimtek pelaporan KTD/ESO belum semuanya memberikan laporan, karena : 1) Tidak ada KTD/ESO yang terjadi di sarana pelayanan kefarmasian 2) Petugas Kesehatan yang berhubungan dengan pengobatan (dokter, perawat, bidan, dokter gigi) belum semuanya peduli terkait pelaporan KDT/ESO	1) terus melakukan kegiatan lanjutan dengan melakukan tindak lanjut langsung setiap bulan kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan pelaporan KTD/ESO 2) merespon langsung/pendampingan pada sarana yang mengalami kendala dalam pelaporan KTD/ESO 3) mengirimkan surat apresiasi kepada sarana pelayanan kefarmasian yang sudah melakukan pelaporan KTD/ESO melalui Target pelaporan KTD ESO tahun 2025 adalah 13 sarana, sampai dengan bulan agustus terdapat 5 sarana yang melaporkan melalui https://e-meso.pom.go.id/ADR sehingga capaian sampai dengan september adalah .38,14 %	Selesai	-	-	1. Tetap intens untuk menghubungi sarana pelayanan kesehatan yang harus melakukan pelaporan KTD/ESO 2. Agar dikawal untuk pemenuhan target tahunan	Y	S-3	Sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO melalui aplikasi e-Meso rendah
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko	Tidak Ada Kendala	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan	Selesai	-	-	1. Ketepatan pelaporan melalui SIPT sesuai	Y	O-4	Keterlambatan pelaporan hasil uji

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		sampling dan pengujian setiap bulan				timeline 2. Terkait hasil uji AMDK yang TMS mikrobiologi agar ditindaklanjuti bersama tim pemeriksaan, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan 3. Melihat kondisi sarana yang diawasi apakah sudah benar sesuai dengan yang di persyaratkan 4. Komunikasikan dengan Balai POM Ende terkait pengujian rutin agar mengusahakan menguji sampelnya secara mandiri			
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	1.Belum bisa melakukan pengujian histamin dengan KCKT 2. Berkaitan dengan administratif, harus ada surat permintaan dari SPPG	1. Pengadaan Reagen untuk pengujian histamin 2. Mengadakan bimtek penganan KLB KP	Selesai	-	-	1. Koordinasi dengan SPPG terkait dengan Bimtek Penjamah Pangan 2. Agar dilakukan inisiasi	Y	O-8	Keterlambatan deteksi dan respon penanganan KLB Keracunan Pangan

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
							penyamaan persepsi terkait penanganan KLB/KP bersama pemerintah daerah 3. Dipersiapkan untuk Bimtek KLB/KP 4. Pelaksanaan pelatihan internal penjamah pangan oleh petugas yang sudah dilatih			
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Menurut Surat Evaluasi Pengawasan PIRT TW II TA 2025 (No. Surat : T-PW.03.04.54.08.25.1669) Hasil evaluasi terhadap ketepatan waktu Pelaporan hasil sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling yaitu paling lambat tiap tanggal 15 di bulan berikutnya, terdapat 20 (90,91%) sampel dilaporkan tidak tepat waktu (tanggal 15 di bulan berikutnya)	Telah dievaluasi oleh tim Pengampu tertuang dalam Surat Evaluasi Pengawasan PIRT TW II TA 2025 (No. Surat : T-PW.03.04.54.08.25.1669) tanggal 29 Agustus 2025 dan menindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan berupa penjelasan terhadap ketepatan waktu Pelaporan hasil sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling yaitu paling lambat tiap tanggal 15 di bulan berikutnya, terdapat 20 (90,91%)	Selesai	-	-	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun	Y	O-4	Keterlambatan pelaporan hasil uji

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			sampel dilaporkan tidak tepat waktu (tanggal 15 di bulan berikutnya)							
6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	Masih terdapat beberapa sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi belum merespon tindak lanjut yang diberikan	- Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pleku usaha yang sarananya sudah diperiksa - dilakukan desk / pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha / Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.	Selesai	-	-	1. Agar dilakukan rekapitulasi pelaku usaha dan sarana yang belum menyampaikan CAPA dan pelaksanaan Desk CAPA bisa dilakukan secara online. 2. Untuk sarana pangan olahan agar disiapkan format CAPA yang dengan mudah diisi oleh Pelaku usaha dan disertakan foto perbaikan	Y	O-5	Rendahnya Tindak Lanjut / Feed back dari lintas sektor terhadap Rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi UKOT di Kota Kupang sesuai dokumen renlak yaitu pada bulan Oktober 2025	Selesai	-	-	Mohon agar dipertahankan kinerja sampai dengan akhir tahun	Y	O-5	Rendahnya Tindak Lanjut / Feed back dari lintas sektor terhadap Rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan	Beberapa sarana produksi Pangan MD di Kota Kupang sudah tidak	1. Menyampaikan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada	Selesai	-	-	Untuk sarana produksi yang sudah tutup agar	Y	O-5	Rendahnya Tindak Lanjut / Feed back dari lintas sektor

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	berproduksi saat diperiksa, sehingga perlu penggantian sarana atau membuat janji terlebih dahulu dengan penanggung jawab/ pemilik sarana	penanggung jawab sarana produksi pangan MD, dan rekomendasi peringatan IRTP kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dan Kota Kupang. 2. Memantau respon CAPA dari pelaku usaha dan lintas sektor				dialihkan ke sarana lain			terhadap Rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Melakukan pengawasan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya sehingga untuk kabupaten yang berdekatan dapat dilakukan sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda dalam sekali melakukan perjalanan tugas. Selain itu, dapat memanfaatkan SDM di bagian lain yang mempunyai kompetensi.	Selesai	-	-	Mohon agar dipertahankan sampai dengan akhir tahun	Y	S-1	Beredarnya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	- Memberikan surat peringatan kepada 4 sarana ritel tradisional yang TMK - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, kesesuaian	Selesai	-	-	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun	Y	SDM-2	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan							
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Melakukan sharing peraturan pengawasan iklan	Selesai	-	-	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun	Y	SDM-2	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	1) Jumlah target pengawasan label produk tembakau yang diawasi buylan februari dan maret kurang 2) Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu rendah	terus melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar/pedoman	Selesai	-	-	1. Kinerja baik, agar diperhatikan kembali tahun 2026 2. Diusulkan untuk target dinaikan menjadi 91% untuk tahun 2026 karena target tahun 2025 rendah	Y	SDM-2	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Tidak ada kendala	Implementasi inovasi RISET	Selesai	-	-		T		diidentifikasi pada daftar risiko tahun 2026, terkait kinerja pemenuhan target pengendalian AMR
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan	Tidak ada kendala	Melakukan verifikasi metode analisa, pengadaan suku cadang, reagen, baku pembanding dan perencanaan	Selesai	-	-	Mohon agar dikomunikasikan dengan pusat terkait peralatan di Lab,	Y	O - 1	Instrumen di laboratorium tidak berfungsi dengan optimal

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		pengembangan kompetensi yang dapat meningkatkan nilai standar kemampuan laboratorium.							
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	1. Advokasi Kabupaten/Kota terkait Kab/Kota Pangan Aman 2. Mengaktifkan TKPPOM 3. Mendampingi dan meastikan Kab/Kota mengisi tools Kab/Kota Pangan Aman	1. Aktif berkomunikasi ke Pemda terkait kegiatan pemebentukan Kab / Kota Pangan Aman termasuk penunjukkan PIC 2..Memastikan ke PemDa terkait penununjukkan PIC yang melakukan pengisian tools penilaian mandir kabupaten dan kota pangan aman 3. Mendampingi PIC dalam pengisisan tools kabupaten/kota pangan mana 4. Khusus Kota Kupang, mengundang petugas teknis terkait untuk rapat penyamaan persepsi dalam rangka pengisisan tools	Selesai	-	-		T		diidentifikasi pada daftar risiko tahun 2026
16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan	Realisasi presentasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dengan hasil 50%.	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (garam beryodium) mengikuti target sarana yang telah	Selesai	-	-	target telah tercapai, fokus untuk kegiatan di Indikator lain	T		diidentifikasi pada daftar risiko tahun 2026

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan		ditetapkan berdasarkan tarika data nomor izin edar per tahun 2023. Sehingga 1 sarana produksi garam beryodium yang ada di Kota Kupang akan dilaksanakan tahun berikutnya karena target tahun 2025 hanya inspeksi 1 sarana.							
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	tidak ada kendala	KIE Media 1. Implementasi Inovasi JELAS BPOM 2. Implementasi Inovasi RISET KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat 1. Melaksanakan kegiatan KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat sesuai renlak dengan mengacu kepada Pedoman KIE 2. Pendampingan peserta KIE dalam pengisian link survei pelaksanaan KIE 3. Pemberian materi KIE Obat dan Makanan	Selesai	-	-	1.DIbahas kembali terkait penerima manfaat KIE MBG (peran guru dalam pendistribusian MBG) 2. Akan di sinergikan dengan Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan pangan	Y	S-5	Masyarakat menerima dan mempercayai informasi tidak valid atau menyesatkan tentang sedian farmasi dan pangan olahan

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			kepada stakeholder untuk penyebaran informasi melalui media lokal							
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kesibukan kader keamanan pangan sekolah dengan kegiatan rutin di sekolah.	- Penguatan komitmen kader keamanan pangan sekolah dan komunikasi intensif melalui WAG Kader Keamanan Pangan Sekolah. - Melakukan penyerahan sertifikat sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada bulan Oktober (11 sekolah). - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.	Selesai	-	-	Segera dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan program PN ini, terkait kebutuhan anggaran agar disusun RAB untuk bahan diskusi pimpinan dan PPK	Y	O-11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman yang sudah diintervensi tidak mengimplementasikan rencana aksi program keamanan pangan
19	Jumlah desa pangan aman	Akses internet di desa Golo Loni sangat sulit	1. Memantau pelaksanaan fasilitasi oleh KKPD 2. Mendorong TKPD melakukan monev dan menyusun rencana aksi program KP secara mandiri di desanya 3. Menyelesaikan tahapan pengawalan untuk 1 desa di Manggarai Timur bekerjasama dengan Loka POM di Manggarai Barat	Selesai	-	-	Perencanaan anggaran untuk kegiatan KIE terkait Stunting untuk mendukung inovasi Dobrak Stunting , yang dikaitkan dengan program Desa Pangan Aman	Y	O-9	Desa pangan aman yang sudah diintervensi tahun sebelumnya tidak mengimplementasikan rencana aksi program keamanan pangan

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pengawalan pasar pasca intervensi tidak dapat dilakukan secara daring.	- PIC Balai melakukan pendampingan kepada petugas pengelola Pasar Nataga dan Pasar Rabu untuk membuat rencana aksi tahun 2026. - Pelaksanaan inovasi Pantar oleh petugas pengelola pasar di 4 pasar pasca intervensi tahun 2024 dan 1 pasar intervensi tahun 2025. - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.	Selesai	-	-	Perencanaan anggaran untuk kegiatan yang belum dibayarkan	Y	O-10	Belum ada penganggaran pengawasan keamanan pangan secara mandiri di pasar yang sudah diintervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Inputan data perusahaan pada sistem oss oleh pelaku usaha pangan, OBA dan kosmetik tidak konsisten sehingga butuh waktu perbaikan yang cukup lama (apalagi kalau sistemnya bermasalah)	1. Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1 2. Kolaborasi dengan stakholder (Dinkes, Pemberdayaan perempuan, poltekes, DMPTSP, BAT, OVOP, PMBN/Konsorsium Raihawu), Dinas PMD Propinsi, dan BAKAMLAR	Selesai	-	-	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun	Y	S-1	Beredarnya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar"
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	1.Capaian kinerja bulan September sebesar 81,25% telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 80%, namun tindak lanjut perkara belum	1.Meningkatkan koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memperjelas pembuktian terhadap unsur tindak pidana terhadap bukti	Selesai	-	-	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun	Y	O-15	Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan melebihi timeline

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Pangan Olahan di UPT	optimal karena pemenuhan alat bukti sesuai petunjuk jaksa masih belum terlaksanal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya untuk pengambilan keterangan tambahan tersangka dan saksi yang saat ini berada di luar wilayah NTT. 2. Perubahan Modus Operandi penjualan produk ilegal secara on line (tidak melakukan penyetokan barang) 3. Keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas intelijen dalam pengungkapan kasus bidang obat dan makanan	yang ada dan mengoptimalkan manajemen waktu dan sumber daya, termasuk penjadwalan ulang pemeriksaan saksi/ahli serta percepatan administrasi penyidikan. 2. Koordinasi dengan Kesbangpol Provinsi NTT agar bisa masuk dalam komunitas intelijen daerah diharapkan dapat membantu dalam pengungkapan kasus obat dan makanan yang diedarkan secara on line 3. Melakukan Bimtek Intelijen bagi petugas. 4. Penambahan SDM pada fungsi intelijen							
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Laporan Profilling Kejahatan Obat dan Makanan belum ada yang dapat dijadikan Target Operasi Penindakan karena belum ada pembinaan sebelumnya	1.Melakukan Evaluasi efektivitas patroli siber, jumlah produk ditakedown, dan jumlah kasus pidana yang berhasil diprofilling sampai dengan bulan September 2025 2. Merenacanakan kegiatan untuk menindakanlanjuti	Selesai	-	-	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun	Y	K-8	Serangan balik digital dari pelaku (phising, doxing, malware)

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			rekomendasi analisi kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Kupang							
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak ada kendala	Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik agar dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap	Selesai	-	-	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun	Y	R-6	Service Level Agreement (SLA) tindak lanjut penyelesaian pengaduan obat dan makanan tidak sesuai
25	Nilai Pembangunan ZI	Pokja Manajemen Perubahan: Belum rutin melakukan monev renja, penyelesaian data dukung dalam rangka pelaksanaan pembangunan ZI tepat waktu, dan penyelesaian program agen perubahan sesuai timeline	Melaksanakan rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan sesuai perencanaan	Selesai	-	-	Lakukan langkah perbaikan untuk persiapan WBBM 2026	Y	R-7	SOP tidak diterapkan
		Penataan Tata Laksana - Belum ada jadual sosialisasi per fungsi - Waktu untuk duduk bersama terbatas karena melaksanakan tugas-tugas.	Dukungan Manajemen untuk meningkatkan komitmen untuk , Sosialisasi SOP Mikro Meyediakan waktu untuk melakukan evaluasi secara bersama di internal tata laksana untuk meminimalisir kekeliruan.	Selesai	-	-				

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Pokja Penguatan Akuntabilitas : Format pelaporan hasil evaluasi internal per bulan masih belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang SAKIP dan dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam melakukan evaluasi bulanan	Membuat jadwal untuk agenda rapat Tim Pokja Akuntabilitas dan Tim AKIP	Selesai	-	-				
		Pokja Peningkatan kualitas pelayanan publik : 1. Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan namun belum memanfaatkan masukan seluruh hasil SKM dan pengaduan masyarakat. 2. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, namun belum terlihat implementasi penilaian sesuai kriteria	1. Melakukan dokumentasi hasil kegiatan pada semua aspek secara tertib 2. Melakukan reviu dan monev berkala terhadap SP 3. Melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi inspektorat	Selesai	-	-				

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dan analisis dampak setelah terdapat inovasi tersebut. 3. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan serta kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, namun belum terdapat kertas kerja yang jelas dan sesuai kriteria sebagai dasar dalam menetapkan pemberian penghargaan / sanksi/kompensasi yang didukung dengan bukti implementasinya.								
		Pokja Penguatan Pengawasan : Tidak ada kendala	1. Laporan dan monev Public campaign telah dilakukan secara berkala 2. KKE dan data dukung Manrisk telah dilakukan sesuai time line 30 September 2025	Selesai	-	-				
		Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur: 1. Belum semua pegawai mengisi matriks pengembangan kompetensi (Gap	1. Kerja tim Pokja SDM sesuai dengan pembagian tugas 2. Pengumpulan data dukung untuk renja pokja SDM tahun 2025 3. Pengisian monev renja	Selesai	-	-				

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		analysis) yang telah disediakan terkait perencanaan pengembangan kompetensi dan kompetensi yang telah diikuti	tiap bulan secara konsisten							
26	Nilai AKIP	1. Belum konsisten pengisian Capaian Output, RAPK, RHPK dan monev kinerja oleh ketua tim sesuai timeline yang telah diinformasikan 2. Pengisian monev evaluasi bulanan belum konsisten menyebutkan kendala terkait realisasi indeks yang tidak tercapai	1. Informasi kepada ketua tim dan tim sakip melalui flyer secara rutin, terkait pengumpulan data Capaian Output, RAPK, RHPK dan Monev setiap bulan sesuai dengan timeline yang ditetapkan secara internal, sebelum dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja 2. Pengawalan monev dan pengukuran kinerja setiap bulan	Selesai	-	-	Tetap melakukan perbaikan sesuai hasil desk AKIP kemarin	Y	S-4	Ketidakpastian data pengukuran kinerja
27	Nilai Kinerja Anggaran	1. Masih terdapat realisasi kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan seperti dalam RPD untuk belanja 51, 52 dan 53 2. Belum optimal pelaksanaaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang telah	1. Monitoring realisasi target kinerja dan anggaran sesuai dengan RPD TW IV 2. Monitoring penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 untuk mencegah deviasi pada bulan Oktober 2025 3. Monitoring dan evaluasi terhadap	Selesai	-	-	Dipertahankan kinerja khususnya nilai IKPA hingga akhir tahun	Y	K-1	Ketidaktepatan penggunaan Akun Belanja

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dibuat sehingga serapan anggaran untuk kegiatan yang telah dilaksanakan belum sesuai	realisasi penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 sampai dengan Oktober 2025 4. Revisi anggaran untuk kegiatan yang telah terealisasi dan masih terdapat sisa anggaran atau sebaliknya untuk kegiatan yang belum dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia atau tidak cukup							
28	Indeks Manajemen Risiko	Katim Frama: Tidak ada kendala	Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko sehingga target akhir tahun sebesar 100% dapat tercapai	Selesai	-	-	Untuk dilakukan monitoring dan evaluasi hingga akhir tahun 2025	Y	O-19	Keterlambatan reviu daftar risiko sesuai juklak penerapan manajemen risiko
		Ketua Tim : Yasinta 1.Dokumen data dukung aktifitas Pengendalian belum rutin dimonitoring 2. Pengukuran Kinerja dilakukan pada TW IV	1.Melakukan Evaluasi penerapan Manajemen Resiko pada fungsi penindakan 2. Mengumpulkan data dukung SPI sebagai bukti Aktifitas Pengendalian dalam manajemen risiko	Selesai	-	-				
		Ketua Tim : Esther KKE dan data dukung manrisk tahun sebelumnya yang dapat diajdikan data dukung	Mengumpulkan semua data dukung manrisk fungsoi Pemeriksaan sertifikasi dalam satu folfer yang baik	Selesai	-	-				

NO	IKSK	Kendala TW Sebelumnya (TW III)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW III)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Arahan Pimpinan	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		tidak terkumpul dalam satu folder sehingga mudah diakses								
		Ketua Tim Waty: Data dukung aktivitas pengendalian risiko semester I bagian TU masih belum selesai dilengkapi	Reviu dan kontrol pengumpulan data dukung risiko semester I bagian TU	Selesai	-	-				

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi internal secara periodik atau tahunan, terdapat beberapa informasi kinerja yang perlu ditindaklanjuti sebagai bentuk upaya perbaikan serta untuk penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja selanjutnya. Informasi kinerja yang telah dan akan dimanfaatkan antara lain:

1. Telah dilakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai dengan hasil evaluasi triwulan I dan II 2025 serta adanya desk target kinerja bersama unit pengampu sehubungan dengan adanya pemuktahiran informasi kinerja pada Renstra BPOM 2025-2029.

2. Melakukan perubahan kebijakan/strategi dalam rencana pelaksanaan kegiatan BBPOM di Kupang sehubungan dengan efisiensi anggaran. Perubahan strategi dilakukan salah satunya dengan revisi RAPK 2025 untuk indikator:

    - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan karena adanya perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dari tim kerja.

    - Indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas karena adanya perubahan tahapan kegiatan menyesuaikan dengan manual indikator dan efisiensi anggaran.

    - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan karena adanya perubahan progres tahapan kegiatan

    - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT menyesuaikan dengan *update* progres penanganan kasus baik internal maupun eksternal.

3. Melakukan revisi anggaran dan pembukaan blokir anggaran untuk mendukung pelaksanaan layanan publik ke masyarakat.

4. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, terdapat rekomendasi atau rencana aksi yang akan diupayakan untuk ditindaklanjuti agar mendukung pencapaian kinerja tahun selanjutnya.

5. Melakukan reviu atau perubahan target kinerja 2026 menyesuaikan dengan hasil capaian pada tahun 2025 untuk indikator yang belum mencapai target dan yang telah melampaui target >110%.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan secara konsisten untuk memantau rekomendasi dan tindak lanjut dalam perbaikan kinerja.

7. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan monitoring kinerja

8. Melakukan identifikasi risiko untuk setiap indikator dan sasaran dan dilakukan *update* secara berkala.

Memanfaatkan penggunaan anggaran tahun selanjutnya yang berbasis kinerja dan risiko sehingga perlu dilakukan revisi anggaran menyesuaikan dengan strategi dan kebijakan efisiensi yang masih berlangsung.

3.4. REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran Kegiatan dan Indikator 2025

DIPA Awal BBPOM di Kupang TA 2025 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran kegiatan sebesar Rp. 32.391.308.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 12,458,962,000. Selain itu juga terdapat revisi realokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNPN di lingkungan Badan POM, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran BBPOM di Kupang menjadi Rp.32,161,658,000. Pada triwulan III terdapat revisi anggaran terkait penambahan belanja pegawai dan operasional BBPOM di Kupang sebesar Rp. 624.136.000 sehingga total pagu anggaran BBPOM di Kupang menjadi Rp.32.785.794.000. Pada

triwulan IV terdapat revisi relaksasi anggaran blokir dan penambahan anggaran belanja pegawai dengan total pagu menjadi Rp.32.861.512.000.

Penyerapan anggaran BBPOM di Kupang sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 20.522.177.346 atau 62,46% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32.861.512.000. Realisasi anggaran program/kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Pagu Non Blokir	Realisasi	%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21.348.061.000	11.715.603.000	11.686.637.192	54,75
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11.513.451.000	8.844.486.000	8.835.540.154	76,74
Total		**32.861.512.000**	**20.560.089.000**	**20.522.177.346**	**62,46**

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Kegiatan (Rincian Output) Tahun 2025

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran			
		T	R	Capaian	Pagu DIPA	Pagu Non Blokir	Realisasi	%
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	42	42	100	168,721,000	42,000,000	41,930,950	24.85%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	249	269	100	197,339,000	197,339,000	194,500,555	98.56%
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	21564	594	90	6,708,498,000	92,000,000	91,933,905	1.37%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100	586,000,000	79,000,000	77,205,800	13.18%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	62	72	100	158,971,000	33,391,000	32,991,593	20.75%

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran			
		T	R	Capaian	Pagu DIPA	Pagu Non Blokir	Realisasi	%
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3	1	60	250,000,000	6,000,000	6,000,000	2.40%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	3	3	100	290,000,000	16,250,000	16,063,000	5.54%
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai standar kemampuan laboratorium	1	1	100	1,576,930,000	1,576,930,000	1,574,336,119	99.84%
3165.QCD.U54	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	4	4	100	504,716,000	504,716,000	499,237,715	98.91%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	10	100	428,438,000	55,500,000	55,380,000	12.93%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4	4	100	704,610,000	100,000,000	99,919,400	14.18%
3165.QDB.003	Pasar Pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	150,548,000	30,880,000	30,875,500	20.51%
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	46	100	46,850,000	4,300,000	4,250,000	9.07%
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	14	19	100	67,413,000	14,000,000	13,908,000	20.63%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	374	388	100	348,120,000	348,120,000	347,957,650	99.95%
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1089	1092	100	689,538,000	689,538,000	687,250,369	99.67%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	35	38	100	52,528,000	52,528,000	52,459,124	99.87%
3165.QIC.003	Layanan Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	607	1	100	1,701,000	1,701,000	1,701,000	100.00%

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran			
		T	R	Capaian	Pagu DIPA	Pagu Non Blokir	Realisasi	%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1	628	100	1,860,722,000	1,860,722,000	1,848,114,085	99.32%
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	3	100	6,556,418,000	6,010,688,000	6,010,622,427	91.68%
6384.EBA.962	Layanan BMN	1	0	83,33	8,000,000	0	-	0.00%
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	100	11,429,733,000	8,844,486,000	8,835,540,154	76.79%

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BBPOM di Kupang pada Perjanjian kinerja didukung oleh sumber daya anggaran yang telah dialokasikan pada setiap IKSK, berikut adalah rincian alokasi dan penggunaan anggaran pada setiap indikator tahun 2025:

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Per IKSK Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Anggaran		
				RPD	Realisasi	%
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	731,600,000	729,305,969	99.69%
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	4,300,000	4,250,000	98.84%
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	317,545,500	318,149,330	100.19%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	83,156,000	83,063,098	99.89%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	142,301,500	142,064,391	99.83%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Anggaran		
				RPD	Realisasi	%
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	85,348,000	84,199,700	98.65%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	26,264,000	26,659,562	101.51%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	26,264,000	26,659,562	101.51%
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	724,410,000	723,422,644	99.86%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	620,693,000	619,774,541	99.85%
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	30,491,000	30,362,460	99.58%
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	3,694,000	3,691,440	99.93%
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	138,363,000	138,062,600	99.78%
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,587,618,000	7,586,538,546	99.99%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Anggaran		
				RPD	Realisasi	%
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,778,000	21,028,332	101.20%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1,701,000	1,701,000	100.00%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	125,391,000	124,925,498	99.63%
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	55,500,000	55,380,000	99.78%
		19	Jumlah desa pangan aman	100,000,000	99,919,400	99.92%
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30,880,000	30,875,500	99.99%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,000,000	13,908,000	99.34%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	504,716,000	499,237,715	98.91%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	42,000,000	41,930,950	99.84%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Anggaran		
				RPD	Realisasi	%
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	197,339,000	194,500,555	98.56%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	8,170,183,000	8,161,306,237	99.89%
		26	Nilai AKIP	613,468,000	597,577,717	97.41%
		27	Nilai Kinerja Anggaran	162,085,000	162,080,000	100.00%
		28	Indeks Manajemen Risiko	14,700,000	14,085,000	95.82%

B. Realisasi Anggaran per Sasaran

Dalam mengawal pencapaian sasaran kegiatan yang tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, BBPOM di Kupang mendapat dukungan anggaran untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah realisasi anggaran per sasaran kegiatan pada tahun 2025:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT
		RPD	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10,542,826,000	10,537,232,174	99.94	106.70
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1,701,000	1,701,000	100.00	100.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	311,771,000	311,100,398	99.78	100.98
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	14,000,000	13,908,000	99.34	141.72
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	504,716,000	499,237,715	98.91	76.34

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT
		RPD	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN
	wilayah kerja BBPOM di Kupang				
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	42,000,000	41,930,950	99.84	111.11
7	Layanan Publik UPT yang prima	197,339,000	194,500,555	98.56	104.68
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8,960,436,000	8,935,048,954	99.72	92.15

C. Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber DayaTahun 2025

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%\,CapaianOutput}{\%\,Capaianinput} \quad IE = \frac{100\,\%}{100\,\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Kupang Tahun 2025 telah dihitung secara rinci dalam tabel berikut ini

Tabel 3.8 Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran			IE	TE	Ket.
				T	R	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	99.19	110.21	731,600,000	729,305,969	99.69	1.11	0.11	Efisien
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	28.26	108.69	4,300,000	4,250,000	98.84	1.10	0.10	Efisien
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	317,545,500	318,149,330	100.19	1.10	0.10	Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	83,156,000	83,063,098	99.89	1.00	0.00	Efisien
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	142,301,500	142,064,391	99.83	1.10	0.10	Efisien
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84.00	89.67	106.75	85,348,000	84,199,700	98.65	1.08	0.08	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran			IE	TE	Ket.
				T	R	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%			
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	100	104.71	26,264,000	26,659,562	101.51	1.03	0.03	Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	26,264,000	26,659,562	101.51	1.08	0.08	Efisien
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	100	104.03	724,410,000	723,422,644	99.86	1.04	0.04	Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	620,693,000	619,774,541	99.85	1.10	0.10	Efisien
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.68	98.37	114.81	30,491,000	30,362,460	99.58	1.15	0.15	Efisien
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80.56	100.70	3,694,000	3,691,440	99.93	1.10	0.10	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran			IE	TE	Ket.
				T	R	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%			
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104.75	104.75	138,363,000	138,062,600	99.78	1.00	0.00	Efisien
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.50	77.1	106.34	7,587,618,000	7,586,538,546	99.99	1.06	0.06	Efisien
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10	10	100.00	20,778,000	20,028,332	96.39	1.04	0.04	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100.00	1,701,000	1,701,000	100.00	1.00	0.00	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.09	90.51	103.93	125,391,000	124,925,498	99.63	1.04	0.04	Efisien
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100.00	55,500,000	55,380,000	99.78	1.10	0.10	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran			IE	TE	Ket.
				T	R	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%			
		19	Jumlah desa pangan aman	4	4	100.00	100,000,000	99,919,400	99.92	1.00	0.00	Efisien
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	30,880,000	30,875,500	99.99	1.00	0.00	Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13.95	19.77	141.72	14,000,000	13,908,000	99.34	1.43	0.43	Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	71	76.34	504,716,000	499,237,715	98.91	0.77	-0.23	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11	42,000,000	41,930,950	99.84	1.11	0.11	Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.92	104.68	197,339,000	194,500,555	98.56	1.06	0.06	Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran			IE	TE	Ket.
				T	R	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%			
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	90	87.17	96.86	8,170,183,000	8,161,306,237	99.89	0.97	-0.03	Tidak Efisien
		26	Nilai AKIP	80.5	78.15	97.08	613,468,000	597,577,717	97.41	1.00	0.00	Efisien
		27	Nilai Kinerja Anggaran	5	4	80.00	162,085,000	162,080,000	100.00	0.80	-0.20	Tidak Efisien
		28	Indeks Manajemen Risiko	3	2.84	94.67	14,700,000	14,085,000	95.82	0.99	-0.01	Tidak Efisien

Tabel 3.9 Perhitungan Efisiensi Per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		RPD	Realisasi	%	NPS				
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10,542,826,000	10,537,232,174	99.94	106.70	1.07	1	Efisien	0.07
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1,701,000	1,701,000	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	311,771,000	311,100,398	99.78	100.98	1.01	1	Efisien	0.01
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	14,000,000	13,908,000	99.34	141.72	1.43	1	Efisien	0.43
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	504,716,000	499,237,715	98.91	76.34	0.77	1	Tidak Efisien	-0.23
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	42,000,000	41,930,950	99.84	111.11	1.11	1	Efisien	0.11
7	Layanan Publik UPT yang prima	197,339,000	194,500,555	98.56	104.68	1.06	1	Efisien	0.06
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8,960,436,000	8,935,048,954	99.72	92.15	0.92	1	Tidak Efisien	-0.08

Capaian Realisasi Anggaran pada 8 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik. Besaran anggaran yang direalisasikan telah mampu mencapai output baik pada setiap sasaran kegiatan, sehingga termasuk dalam kategori “Efisien”, Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai sasaran kegiatan telah efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang memperoleh nilai capaian sebesar 106,70% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.536.232.174 dari total rencana penarikan dana triwulan IV. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan, pengawasan iklan, serta pengawasan sarana. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
2. Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” didukung oleh pencapaian indikator Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Capaian sasaran ini sampai dengan triwulan IV adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.701.000 (100%) dengan kategori Efisien.
3. Sasaran Kegiatan 3 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Kupang” memperoleh nilai capaian sebesar 100,98% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 311.100.398 dengan kategori penggunaan anggaran Efisien. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan KIE oleh BBPOM di Kupang, kegiatan sekolah, desa dan pasar aman. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
4. Sasaran Kegiatan 4 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” memperoleh nilai capaian sebesar 141,72% (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.908.000 (99,34%) dari target penyerapan triwulan IV sebesar Rp. 14.000.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM oleh BBPOM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target.
5. Sasaran Kegiatan 5 “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di

Kupang” memperoleh nilai capaian sebesar 76,34% (Cukup) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 499.237.715 (98,91%) dari target penyerapan triwulan IV. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan operasi intelijen serta penyidikan oleh BBPOM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan Tidak Efisien dalam mencapai target sasaran hal ini karena pencapaian sasaran masih rendah yakni sebesar 76,34% dengan kategori cukup.

6. Sasaran Kegiatan 6 “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif memperoleh nilai capaian sebesar 111,11% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.930.950 (99,84%) dari target penyerapan triwulan IV. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pemantauan siber oleh BBPOM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
7. Sasaran Kegiatan 7 “Layanan Publik BBPOM di Kupang yang prima” memperoleh nilai capaian sebesar 104,68% kategori Sangat Baik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.500.555 (98,56%). Berdasarkan penggunaan anggaran tersebut, pencapaian sasaran ini memperoleh kategori Efisien dalam mencapai target. Hal yang dilakukan dalam peningkatan kinerja sasaran ini adalah melakukan efektivitas pelayanan publik terhadap masyarakat.
8. Sasaran Kegiatan 8 “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” memperoleh capaian sebesar 92,15% kategori Baik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.935.048.954 (99,72%). Berdasarkan penggunaan anggaran tersebut, pencapaian sasaran ini memperoleh kategori Tidak Efisien. Penggunaan anggaran pada sasaran ini sudah optimal namun seluruh IKSK pada sasaran ini belum mencapai target

3.5. KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BELU

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

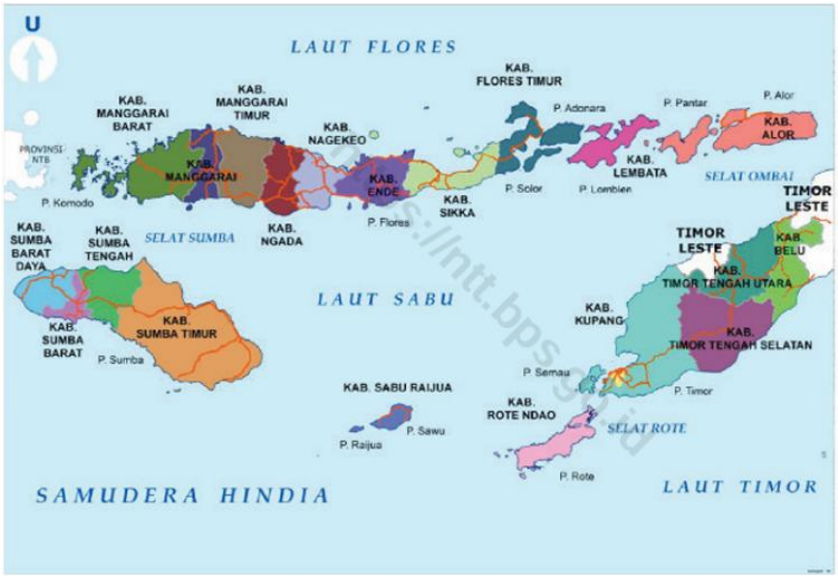
Loka POM di Kabupaten Belu terletak di wilayah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki cakupan wilayah kerja terdiri dari 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, total luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 2.445,57 km^2 atau 5,29% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu 46.446,64 km^2. Luas wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 3.10 Luas Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu

Kabupaten/Kota	Luas (km^2)	Persentase
Kabupaten Belu	1.284,94	2,71
Kabupaten Malaka	1.160,63	2,38
Total	**2.445,57**	**5,09**

Jumlah Penyebaran Kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT Tahun 2024 seperti pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Jumlah Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur



Jumlah penyebaran kecamatan, kelurahan/desa dan jumlah penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT Tahun 2024 seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 3.11 Penyebaran Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk di wilayah Loka POM di Kabupaten Belu

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (ribu)
Kabupaten Belu	12	81 desa dan 12 kelurahan	232,788
Kabupaten Malaka	12	127 desa	190,994
Total	**24**	**208 desa dan 12 kelurahan**	**423,782**

Jalur transportasi yang digunakan untuk menyusuri wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu adalah jalur darat. Adapun waktu tempuh yang dibutuhkan dari Kantor menuju wilayah kerja yakni berkisar 1 jam untuk lintas kecamatan di Kabupaten Belu dan berkisar 2 jam untuk Kabupaten Malaka.

1. Lingkungan Internal (Kapasitas UPT)

Lingkungan internal Loka POM di Kabupaten Belu dapat dideskripsikan dalam poin-poin sebagai berikut:

a. Infrastruktur

Dalam rangka mendukung pencapaian efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, Loka POM di Kabupaten Belu ditunjang dengan fasilitas/infrastruktur yang cukup memadai. Infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Belu sebagai berikut:

1) Luas Tanah dan Bangunan

Sejak bulan Oktober tahun 2023, Kantor Loka POM di Kabupaten Belu menempati lokasi di Jalan Dr.G.A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dengan luas bangunan 212 m^2.

2) Status Kepemilikan

Kantor yang dipakai oleh Loka POM di Kabupaten Belu merupakan Aset BMN BBPOM di Kupang yang terdiri dari dua ruangan. Saat ini telah memiliki Tanah Existing dengan luas : 2860 m^2 dengan Sertifikat Hak Pakai an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM (Sertifikat No. 24.04.000005104.0) dan tercatat di Aset BMN BBPOM di Kupang.

3) Penerangan

Gedung Administrasi Kantor Loka POM di Kabupaten Belu menggunakan listrik dari PLN dengan daya sebesar 13.200 watt.

4) Sarana Komunikasi

a. Nomor Telepon : +62 813-3151-0092
b. Nomor WhatsApp : +62 813-3151-0092
c. Alamat email : loka_belu@pom.go.id
d. Media Sosial : @bpom.belu
e. Tersedia jaringan internet nirkabel (Wi-Fi) yang dihubungkan dengan Virtual Private Network (VPN) yang berbasis satelit di Badan POM yang digunakan untuk pengiriman data SIPT, aplikasi e-bpom, dan layanan internet.

5) Sumber Air Sumber air untuk keperluan sehari-hari menggunakan air PDAM.

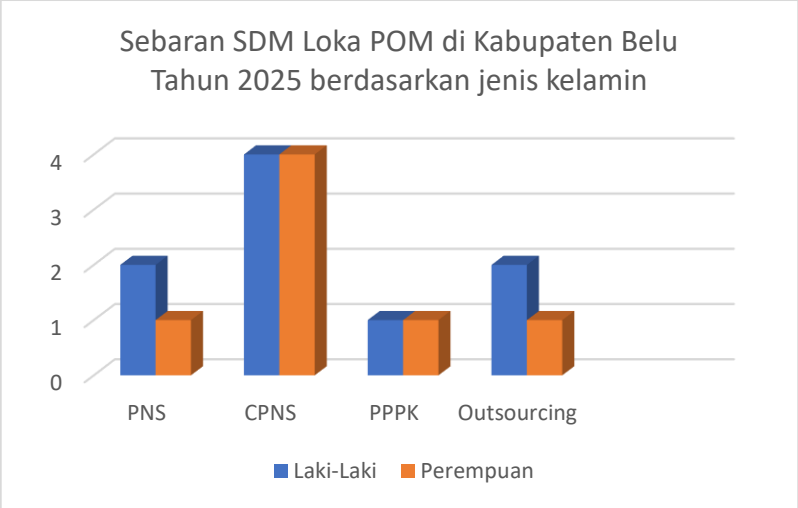
6) Kendaraan

Transportasi yang digunakan Loka POM di Kabupaten Belu untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan adalah 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor dengan kepemilikan inventarisasi dari BBPOM di Kupang.

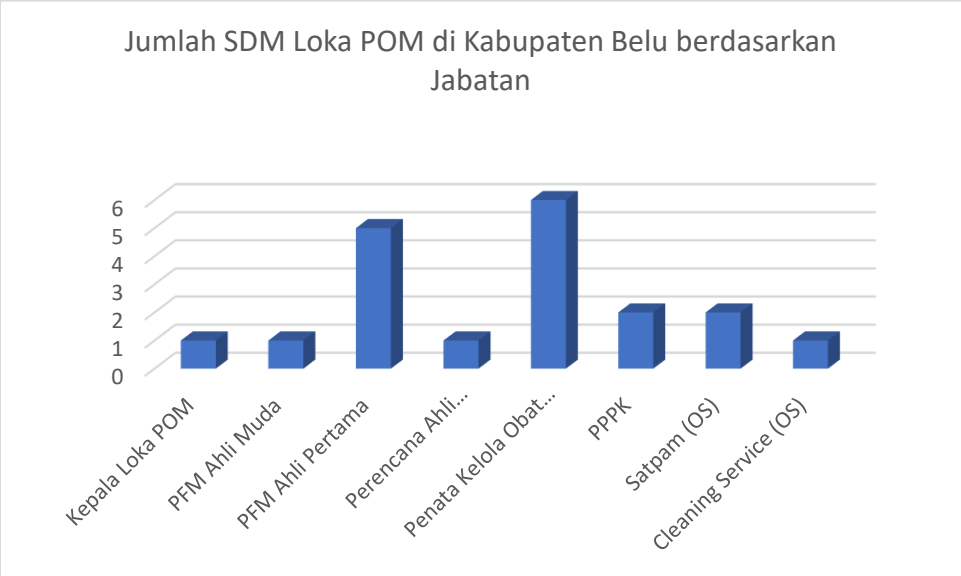
b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Belu pada tahun 2025 adalah 19 orang terdiri dari 3 PNS,11 CPNS, 2 PPPK dari BBPOM di Kupang dan 3 Outsourcing. Adapun klasifikasi pegawai Loka POM di Kabupaten Belu per 31 Desember 2025. Adapun sebaran pegawai Loka POM di Kabupaten Belu dapat dirinci pada Grafik 1.1 dan 1.2.

Grafik 1.1 Sebaran SDM Loka POM di Kabupaten Belu berdasarkan jenis kelamin



Grafik 1.2 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Belu berdasarkan Jabatan



Tenaga PNS terdiri dari 3 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai Kepala Loka dan 1 orang sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dan 1 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama. Tenaga CPNS terdiri dari 4 orang Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, 1 orang Perencana Ahli Pertama dan 6 orang Penata Kelola Obat dan Makanan. Tenaga PPPK terdiri dari 1 orang Penata Layanan Operasional dan 1 orang Pengelola Layanan Operasional.

c. Sumber Anggaran dan Realisasi Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Belu bersumber dari DIPA BBPOM di Kupang Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari Rupiah Murni, yakni sebesar Rp1.109.240.000,. Sepanjang tahun 2025, capaian realisasi anggaran yang diserap untuk penyelenggaraan program di bidang pengawasan obat dan makanan oleh Loka POM di Kabupaten Belu sebesar Rp1.105.729.803 (99.68%) pada TW IV.

d. Daftar Inventaris Kantor

Terkait dengan Inventaris barang, saat ini Loka POM di Kabupaten Belu telah memiliki beberapa meubelair dan perlengkapan perkantoran dalam jumlah yang cukup bagi seluruh staf.

Untuk menunjang kinerja pengujian makanan melalui Mobil Keliling, maka Loka POM di Kabupaten Belu juga memiliki 1 set Tes Kit Kimia.

2. Lingkungan Eksternal

Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu meliputi sarana produksi dan distribusi yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan pangan olahan berupa obat, makanan, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan serta sarana pelayanan kefarmasian. Total jumlah sarana produksi yang diawasi sebanyak 7 (tujuh) sarana dan sarana distribusi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) sarana. Adapun jumlah sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Belu dirinci pada Tabel 1.3.

No	Jenis Sarana	Kab. Belu	Kab. Malaka	Total
Sarana Produksi Obat dan Makanan				
1	Sarana produksi Obat (Unit Tranfusi Darah)	1	0	1
2	Industri Rumah Tangga Pangan	2	0	2
3	Industri Pangan	2	2	4
4	Industri Kosmetik	0	0	0
5	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)/Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	0	0

No	Jenis Sarana	Kab. Belu	Kab. Malaka	Total
Sarana Distribusi Obat dan Makanan				
1	Sarana Distribusi Pangan	19	11	30
2	Sarana Distribusi Kosmetik	5	5	10
3	Klinik Kecantikan	0	0	0
4	Sarana Distribusi Obat Tradisional	1	0	1
5	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	0	1	1
6	Pedagang Besar Farmasi	0	0	0
7	Apotek	6	5	11
8	Toko Obat	1	0	1
9	Instalasi Farmasi Pemerintah	1	1	2
10	Rumah Sakit	3	1	4
11	Puskesmas Kesehatan Masyarakat	2	2	4
12	Klinik	2	2	4

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Belu sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023, yaitu:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM



Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:

  a. ketua tim; dan

  b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Lingkungan BPOM, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan.

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Belu memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat. Wilayah Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste menjadi kawasan strategis sekaligus rawan terhadap peredaran produk ilegal dan tidak memenuhi ketentuan. Karakteristik wilayah perbatasan, tingginya mobilitas barang dan orang, serta masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di

Kabupaten Belu. Isu strategis Loka POM Belu dipengaruhi oleh faktor geografis (wilayah perbatasan), faktor sosial ekonomi (UMKM berkembang), serta keterbatasan sumber daya pengawasan.

Loka POM (Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran penting dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah perbatasan. Untuk Loka POM di Belu, beberapa isu strategis adalah:

1. Peredaran Produk sediaan farmasi dan pangan olahan tidak memenuhi ketentuan di Wilayah Perbatasan.

   Wilayah perbatasan membuka peluang masuknya obat, kosmetik, dan pangan olahan tanpa izin edar. Produk tersebut berpotensi:

   - Tidak memenuhi standar keamanan
   - Tidak memiliki izin edar (TIE), rusak, kadaluarsa
     Pengawasan jalur distribusi resmi maupun tidak resmi menjadi tantangan utama.

2. Keterbatasan SDM

   Sebagai unit pelaksana teknis, Loka POM Belu menghadapi:

   - Jumlah SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan Analisis Beban Kerja
   - Pengetahuan yang masih kurang terkait tugas dan fungsi
   - Terbatasnya pengetahuan personil untuk melakukan pengujian

3. Keterbatasan Sarana dan Prasana
   - Gedung Laboratorium kimia dan biologi yang tidak sesuai standar

     Loka POM di Kabupaten Belu hanya bisa melakukan pengujian kualitatif secara cepat untuk produk pangan (4 bahan berbahaya yaitu rodamin, boraks, metanin yellow dan formalin)

   - Terbatasnya alat lab untuk melakukan pengujan yang sesuai standar

4. Rendahnya Kesadaran dan pengetahuan Masyarakat

   Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam memilih produk aman (Cek KLIK: Kemasan, Label, Izin edar, Kedaluwarsa) menjadi isu strategis dalam aspek preventif.

5. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan Pelaku Usaha**.**

   Pengetahuan pelaku usaha untuk memproduksi sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan masih rendah.

   Loka POM di Kabupaten Belu memiliki tantangan strategis yang khas sebagai wilayah perbatasan. Diperlukan sinergi lintas sektor, penguatan sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan berkelanjutan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Belu atau renstra disusun dan digabung dengan renstra BBPOM di Kupang dengan mengacu pada Renstra BPOM 2025-2029.

2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan strategis yang berisi gambaran detail mengenai tujuan, sasaran, dan aktivitas yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi atau instansi selama satu tahun ke depan. RKT merupakan tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Belu kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Belu Tentang Rencana Kinerja Tahunan 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 disusun mengacu pada dokumen Rancangan Renstra BBPOM di Kupang 2025 – 2029 dikarenakan masih satu DIPA dengan BBPOM di Kupang, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2025. Selanjutnya Loka POM di Kabupaten Belu juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah rincian target kinerja yang tercantum pada dokumen RKT 2025:

Tabel 3.12 Rencana Kinerja Tahunan 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.88
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.12
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	86
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81.93
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	12.5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	keamanan dan mutu		
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	72
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.55
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.8
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100

3. Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2025 disahkan, pada akhir Desember tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Belu segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Loka POM

di Kabupaten Belu dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat penyesuaian target terhadap beberapa indikator kinerja berdasarkan hasil reviu dari Unit Pengampu dan memperhatikan rancangan Renstra BBPOM di Kupang. Berikut adalah Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025.

Tabel 3.13 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**82%**
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100%**
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**
		5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	**100%**

		6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80%**
		7	Persentase sarana fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**93.25%**
		8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**
		9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**85.52%**
		10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**85%**
		11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100%**
		12	Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**10**
		13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**50%**

2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**81.12**
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	**6.25%**
4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90%**
5	Layanan Publik UPT yang prima	17	Indeks Pelayanan Publik UPT	**3,51**
6	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	18	Indeks Manajemen Risiko	**1.6**
		19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	**100%**
		20	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP UPT sesuai standar	**100%**
		21	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	**100%**

Selain itu pada revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat penambahan target indikator sebanyak 4 indikator yaitu :

1. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
2. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

3. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
4. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

4. RAPK

Dalam penyusunan PK, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja. Bulan Agustus 2025, RAPK tahun 2025 mengalami penyesuaian mengacu pada hasil revisi PK 2025.

NO	IKSK	Bulan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti	0	16	32	40	48	58	64	100	100	100	100	100

	oleh stakeholder												
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	85.52	85.52	85.52	85.52	85.52
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	85	85	85	85	85
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
15	Persentase Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50

	yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	7	10	20	30	40	50	60	70	80	80	6.25
17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
18	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.51
19	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6
20	Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	-	10	15	20	25	30	35	66	75	83	91.6	100
21	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100
22	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	5.5	17	22.7	28	34	40	88	95	95	95	95	100

5. Metode Pengukuran

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\%Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

   Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

   1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
   2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

c. Capaian Perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	△
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 70).	▼

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator.

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	●
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	●
Baik	90% < x ≤ 100%	●
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	●
Kurang	<60%	●

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input.

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap kurang efisien

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

1. Jenis NKO

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

- Capaian Perjanjian Kinerja

  Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada BBPOM di Manado merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan diterbitkan oleh inspektorat yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi

Pemerintah dengan faktor koreksi dari capaian kine rja yang dinormalisasi sebagai berikut :

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Dalam implementasi atas pengukuran kinerja di Loka POM di Belu, masing-masing fungsi/bagian menyampaikan perkembangan rencana aksinya setiap bulan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja.
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya capaian kinerja.
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/sasaran.
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran.
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan.
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja.
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

C. CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BELU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Belu selama periode tahun 2025 yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan mengingat Loka POM di Kabupaten Belu diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance, diperoleh data Capaian Kinerja/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun Triwulan IV 2025 sebesar 94,28% dengan predikat “Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Belu telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Triwulan IV Tahun 2025.

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	99,69 %	121,57	Tidak dapat disimpulkan
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko	75%	100%	133,33	Tidak dapat disimpulkan

		yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	0%	0	-
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	93,33%	124,44	Tidak dapat disimpulkan
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100%	100%	100	Baik
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	91,67%	114,59	Tidak dapat disimpulkan
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25 %	100,50%	107,77	Sangat Baik
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan	75%	99%	132	Tidak dapat disimpulkan

		yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.52 %	100.83%	117.90	Tidak dapat disimpulkan
		13 - Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	12.08%	120.8	Tidak dapat disimpulkan
		29 - Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	102.30%	120.35	Tidak dapat disimpulkan
		30 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	102,30%	102,30	Sangat Baik
		31 – Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota pangan aman	50%	40%	80	Baik

2	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81,12	81.82%	100,86	Sangat Baik
3	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6,25	6,25%	100	Baik
4	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	93,75%	104,17	Sangat Baik
5	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51	4,36	124,22	Tidak dapat disimpulkan
6	09 - Terwujudnya tata kelola	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1,6	1,94	121,25	Tidak dapat disimpulkan

	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100%	100	100	Baik
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100%	100	100	Baik
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100%	100	100	Baik

Dari 21 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 10 Indikator kinerja dengan capaian “Tidak Dapat Disimpulkan” karena melebihi capaian 110%, 4 indikator dengan capaian ‘’Sangat Baik”, 6 indikator dengan capaian “Baik”, dan 1 indikator dengan capaian “0”. Indikator yang tidak ada realisasi karena tidak ada sampel KLB ditemukan, dan 1 indikator yang di *exclude* perhitungan karena diluar kendali kita (target tetap ada tiap TW untuk mengakomodir jika terjadi KLB) yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT.

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan

terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	99,69%	121,57%	Tidak dapat disimpulkan

Kegiatan sampling sediaan farmasi tahun 2025 di Loka POM di Kabupaten Belu mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Tidak ditemukannya sampel kategori antineoplastik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga perlu dilakukan perubahan kategori sampel dari kategori antineoplastik menjadi kategori obat dengan pemakaian terbanyak di Kabupaten Belu yaitu kategori anti hipertensi. Pergantian kategori sampel dilakukan setelah berkonsultasi dengan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA.
2. Tidak ditemukannya target sampel organ sensori sesuai dengan jadwal pada renlak sehingga diajukan perubahan waktu sampling kepada Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA.
3. Terbatasnya variasi dan jumlah sampel di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga kesulitan untuk melakukan sampling terhadap beberapa kategori sampel.
4. Tidak ditemukannya sarana tidak berizin online yang menjual obat keras sehingga diajukan perubahan sarana tidak berizin online menjadi offline.
5. Terbatasnya jumlah sarana distribusi yang menjual obat bahan alam dan kosmetik dalam jumlah banyak, sehingga pelaksanaan sampling dilaksanakan berulang pada beberapa sarana yang sama.

Sehingga didapatkan nilai realisasi sebesar 99,69% dengan capaian sebesar 121,57% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaian lebih dari 110%. Kelebihan realisasi dibandingkan dengan target dikarenakan seluruh kendala yang dihadapi sudah dikomunikasikan dengan baik kepada semua unit terkait.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	82%	99,69%	121,57%	Tidak dapat disimpulkan

Pada tahun 2024, realisasi kegiatan sampling UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100% dengan capaian sebesar 108,30%. Sedangkan pada tahun 2025, realisasi kegiatan sampling sebesar 99,69% dengan capaian sebesar 121,57% dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan” karena mencapai lebih dari 110%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87%	99,69%	115%	Tercapai/ Melampaui ▲

Realisasi kegiatan sampling sediaan farmasi di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 99,69% dari target akhir renstra 87%. Capaian kegiatan sampling sebesar 115%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

1. Tidak ditemukannya sampel kategori antineoplastik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga perlu dilakukan perubahan kategori sampel dari kategori antineoplastik menjadi kategori obat pemakaian terbanyak yaitu kategori anti hipertensi. Pergantian kategori sampel dilakukan setelah berkomunikasi dengan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA.
2. Terbatasnya variasi dan jumlah sampel di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu sehingga kesulitan untuk melakukan sampling terhadap beberapa kategori sampel obat, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan.
3. Tidak ditemukannya sarana tidak berizin online yang menjual obat keras sehingga diajukan perubahan sarana tidak berizin online menjadi offline.
4. Terbatasnya jumlah sarana distribusi yang menjual obat bahan alam dan kosmetik dalam jumlah banyak, sehingga pelaksanaan sampling dilaksanakan berulang pada beberapa sarana yang sama.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah Mengajukan permohonan perubahan proporsi renlak sampling/kategori sampling ke direktorat terkait :

1. Perubahan sampel kategori antineoplastik menjadi obat dengan penggunaan terbanyak di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu yaitu kategori antihipertensi.
2. Perlu dilakukan komunikasi terkait minimal sampel yang bisa diuji dengan balai penguji
3. Perubahan sarana tidak berizin online menjadi sarana tidak berizin offline.
4. Pelaksanaan sampling tetap dilaksanakan berulang pada beberapa sarana yang sama. Namun, tetap memprioritaskan sarana lain yang belum pernah dilakukan pengambilan sampel untuk dikunjungi terlebih dahulu.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ditemukannya sampel kategori antineoplastik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu	Pergantian kategori sampel	Pergantian kategori sampel dilakukan dengan berkomunikasi Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu & Ekspor Impor Obat & NAPPZA	-	T	-	-
		Terbatasnya variasi dan jumlah sampel di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu	Perlu dilakukan komunikasi terkait minimal sampel yang bisa diuji dengan balai penguji	Melakukan sampling dengan jumlah minimal sampel yang bisa diuji	-	T	-	-
		Tidak ditemukannya sarana tidak berizin online yang menjual obat keras	Berkoordinasi dengan direktorat terkait untuk pengajuan perubahan sarana	Perubahan sarana tidak berizin online menjadi sarana tidak berizin offline	-	T	-	-
		Terbatasnya jumlah sarana distribusi yang menjual obat bahan alam dan kosmetik dalam jumlah banyak, sehingga pelaksanaan sampling dilaksanakan berulang pada beberapa sarana yang sama.	Pelaksanaan sampling tetap dilaksanakan berulang pada beberapa sarana yang sama.	Pelaksanaan sampling tetap memprioritaskan sarana lain yang belum pernah dilakukan pengambilan sampel untuk dikunjungi terlebih dahulu	-	T	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1. Kegiatan Sampling dilakukan sesuai dengan Renlak dan Pedoman Sampling, dan kendala yang dihadapi di koordinasikan dengan KMEI dan ditwas terkait.
2. Melakukan pelatihan sampling sediaan farmasi terhadap personil baru melalui platform IDEAS BPOM.
3. Melakukan evaluasi kegiatan sampling di masing-masing komoditi setiap bulan.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Pangan Olahan adalah sampel produk pangan olahan yang di sampling secara representatif dari sarana distribusi untuk dilakukan pengawasan dan pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	100%	133,33	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) berupa persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan dengan target sebesar 75% pada tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, realisasi kinerja mencapai 100% yang berarti seluruh sampel pangan olahan yang berisiko yang menjadi target diambil telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan capaian sebesar 133,33%, kinerja indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori "Tidak dapat disimpulkan" karena capaian lebih dari 110%. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi realisasi capaian, seperti pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko yang telah berjalan sangat optimal dan sesuai dengan pedoman serta standar yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	75%	100%	133,33	Tidak dapat disimpulkan

Pada tahun 2024 dan 2025 terdapat perbedaan dalam pengelompokkan kategori sampel pangan olahan dan rumus perhitungan realisasi kinerjanya. Pada tahun 2024, kategori sampel pangan olahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sampel acak (sampel makanan yang memenuhi syarat) dan sampel targeted (sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar). Sementara itu, pada tahun 2025 terjadi penyederhanaan kategori. Dimana sampel acak dan sampel *targeted* digabung menjadi satu kategori sampel pangan olahan, sehingga perhitungan realisasi kinerja dilakukan berdasarkan pengelompokan kategori yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perhitungan realisasi sampel pangan olahan di tahun 2024 adalah hasil uji sampel yang Memenuhi Ketentuan (MK) dibagi dengan jumlah total sampel. Sedangkan perhitungan realisasi sampel pangan olahan di tahun 2025 dihitung berdasarkan kesesuaian target sampel (20%), kesesuaian parameter uji (20%), ketepatan pengambilan kesimpulan (20%), ketepatan waktu pengambilan sampel (10%), ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian (10%), dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (20%) sehingga realisasi tahun 2024 dan tahun 2025 tidak bisa dibandingkan secara langsung.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83%	100%	120,48%	Tercapai/ Melampaui ▲

Realisasi persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dari target tahunan sebesar 75%, realisasi tindak lanjut mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 120,48% dan termasuk dalam kategori “Tidak dapat disimpulkan” karena capaian lebih dari 110%. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor yang dapat mempengaruhi realisasi capaian, seperti pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko yang telah berjalan sangat optimal dan sesuai dengan pedoman serta standar yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 sebesar 83%, realisasi tahun 2025 telah melampaui target Renstra yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko telah berjalan sangat efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis jangka menengah, serta menjadi dasar yang kuat untuk menjaga konsistensi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

1. Sinergi yang efektif antara fungsi pemeriksaan dan pengujian guna memastikan kesesuaian antara total sampel yang diperiksa dan yang diuji.
2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* pengambilan dan pengiriman sampel ke Balai Penguji.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk mempertahankan kinerja kedepan adalah dengan tetap menjalankan kegiatan sampling pangan olahan sesuai pedoman dan *timeline* serta memastikan agar sinergi antar UPT penyampling dengan Balai Penguji tetap berjalan dengan baik.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko yaitu sampel yang dikirim petugas ke Balai Penguji kurang/tidak sesuai dengan ketentuan. Bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah dengan menjalin komunikasi yang baik antara petugas dari UPT penyampling dengan Balai Penguji sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan sampel pangan olahan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	1. Peningkatan sinergi yang efektif antara fungsi pemeriksaan dan pengujian guna memastikan kesesuaian antara total sampel yang diperiksa dan yang diuji.	Monev regional laboratorium setiap triwulan	Januari – Desember 2026	Y	O-5	Sampel yang dikirim petugas ke balai penguji kurang/tidak sesuai dengan ketentuan

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* pengambilan dan pengiriman sampel ke Balai Penguji.					

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1. Kegiatan Sampling dilakukan sesuai dengan Renlak Tahun Anggaran 2026 dan Pedoman Sampling, dan petugas dapat mengkoordinasikan ke Balai Penguji apabila tidak ditemukan produk yang sesuai kategori sampel sehingga dapat segera diusulkan alternatifnya.
2. Melakukan pelaporan SIPT sesuai dengan *timeline* kegiatan sampling.

3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sampel Produk Industri Rumah Tangga berisiko adalah sampel produk pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang berdasarkan hasil pengawasan, profil risiko, atau temuan sebelumnya memiliki potensi ketidaksesuaian terhadap persyaratan keamanan, mutu, dan/atau penandaan pangan sehingga perlu dilakukan pengujian dan tindak lanjut sesuai ketentuan. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut

yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	93,33%	124,44%	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja berupa persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan dengan target sebesar 75% pada tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, realisasi kinerja mencapai 93,33%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 124,44%. Dengan demikian, kinerja pada indikator ini termasuk dalam kategori "Tidak dapat disimpulkan" karena capaian lebih dari 110%. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor yang dapat mempengaruhi realisasi capaian, seperti pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko yang telah berjalan sangat optimal dan sesuai dengan pedoman serta standar yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	75%	93,33%	124,44%	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 belum ada indikator persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan realisasi dan capaian pada tahun 2025. Sementara itu, pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 75%. Dalam pelaksanaannya, realisasi mencapai 93,33%,

sehingga persentase capaian kinerja sebesar 124,44% dan termasuk dalam kategori “Tidak dapat disimpulkan” karena capaian lebih dari 110%. Capaian ini menunjukkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi realisasi capaian, yaitu pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko yang pada tahun 2025 telah berjalan dengan optimal sehingga realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	93,33%	109,80%	Tercapai/ Melampaui ▲

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasi tindak lanjut mencapai 93,33%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 109,80%.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 sebesar 85%, realisasi tahun 2025 telah melampaui target Renstra yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap PIRT berisiko, serta menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut berada pada jalur yang sangat baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

1. Sinergi yang efektif antara fungsi pemeriksaan dan pengujian guna memastikan kesesuaian antara total sampel yang diperiksa dan yang diuji.
2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* pengambilan dan pengiriman sampel ke Balai Penguji.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk mempertahankan kinerja kedepan adalah dengan tetap menjalankan kegiatan sampling PIRT sesuai pedoman dan *timeline* serta memastikan agar sinergi antar UPT penyampling dengan Balai Penguji tetap berjalan dengan baik.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko yaitu sampel yang dikirim petugas ke Balai Penguji kurang/tidak sesuai dengan ketentuan. Bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah dengan menjalin komunikasi yang baik antara petugas dari UPT penyampling dengan Balai Penguji sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan sampel PIRT.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	1. Peningkatan sinergi yang efektif antara fungsi pemeriksaan dan pengujian guna memastikan kesesuaian antara total sampel yang diperiksa dan yang diuji. 2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* pengambilan dan pengiriman sampel ke Balai Penguji.	Monev regional laboratorium setiap triwulan	Januari – Desember 2026	Y	O-5	Sampel yang dikirim petugas ke balai penguji kurang/tidak sesuai dengan ketentuan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1. Kegiatan Sampling dilakukan sesuai dengan Renlak Tahun Anggaran 2026 dan Pedoman Sampling, dan petugas dapat mengkoordinasikan ke Balai Penguji apabila tidak ditemukan produk

yang sesuai kategori sampel sehingga dapat segera diusulkan alternatifnya.

2. Melakukan pelaporan SIPT sesuai dengan *timeline* kegiatan sampling.

4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100%	100%	100%	Sangat Baik

Realisasi dari keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Belu telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh *stakeholder.*

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	2024	100%	100%	100%	Sangat Baik
	2025	100%	100%	100%	Sangat Baik

Pada tahun 2024, realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2025, realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Realisasi realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* di UPT Loka POM di Kabupaten Belu di tahun 2024 dan 2025 tidak mengalami perubahan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100%	100%	100%	Tercapai/ Melampaui ▲

Realisasi kegiatan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100% dari target akhir renstra 100%. Capaian kegiatan sampling sebesar 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman penanggung jawab sarana dalam membuat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1. Melakukan kegiatan pemantauan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) untuk membantu *stakeholder*/pelaku usaha membuat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
2. Membuat panduan singkat mengenai cara membuat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan bagi *stakeholder*.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Pelaku usaha tidak mengirimkan Tindak Lanjut / Feed back / CAPA Sarana Pangan terhadap Surat Peringatan / Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPOM	Melakukan kegiatan pemantauan dan pendampingan CAPA	Melakukan kegiatan pemantauan dan pendampingan CAPA		Y	S-01	Pelaku usaha kurang peduli dalam memberikan respon terhadap Tindak Lanjut / Feed back / CAPA hasil pengawasan
		Tindak Lanjut / Feed back / CAPA dari Instansi Pemerintah atau Sarana	Melakukan kegiatan pemantauan dan pendampingan CAPA	Melakukan kegiatan pemantauan dan pendampingan CAPA		T		

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		terhadap Surat Peringatan / Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPOM masih rendah						

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu:

1. Membuat panduan singkat mengenai cara membuat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan bagi sarana pelayanan kefarmasian.
2. Melakukan pemantauan CAPA secara rutin kepada pelaku usaha terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
3. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait cara pengisian CAPA.

5. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi pangan olahan merupakan bangunan, ruangan, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi pangan olahan, termasuk peralatan, instalasi, dan sistem pendukungnya, yang dirancang dan dioperasikan untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan di 4 (empat) sarana produksi pangan olahan dengan izin edar BPOM RI MD di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada hasil kajian analisis risiko, dengan memprioritaskan sarana produksi pangan berizin

edar BPOM RI MD yang memiliki riwayat atau *track record* tidak memenuhi ketentuan, sarana yang telah lama tidak dilakukan pemeriksaan, serta sarana baru.

Tujuan dilakukannya pemeriksaan sarana produksi pangan dengan izin edar BPOM RI MD untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang diproduksi. Tindak lanjut pada kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pemeriksaan sarana produksi, pelaporan hasil, tindak lanjut berupa perbaikan atau *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) dari pelaku usaha sarana produksi, hingga evaluasi tindak lanjut.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	91,67%	114,59	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 80%, realisasi mencapai 91,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana produksi pangan olahan telah melampaui target yang direncanakan, dengan tingkat capaian sebesar 114,59%. Berdasarkan hasil tersebut, indikator kinerja ini dikategorikan "tidak dapat disimpulkan"' karena capaian lebih dari 110%. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi realisasi capaian yaitu efektivitas pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan serta komitmen petugas dalam memastikan pemenuhan ketentuan keamanan dan mutu pangan olahan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	80%	91,67%	114,59	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya, indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 65% dengan realisasi mencapai 100%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 154% dan termasuk dalam kategori "Tidak dapat disimpulkan". Pada Tahun 2025, target indikator meningkat menjadi 80%, yang menunjukkan adanya peningkatan standar kinerja. Realisasi pada Tahun 2025 mencapai 91,67%, sehingga persentase capaian sebesar 114,59% dan tetap berada dalam kategori "Tidak dapat disimpulkan" karena capaian lebih dari 110%. Hal ini disebabkan faktor seperti efektivitas pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan serta komitmen petugas dalam memastikan pemenuhan ketentuan keamanan dan mutu pangan olahan.

Jika dibandingkan, meskipun capaian persentase pada Tahun 2025 (114,59%) lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 (154%), hal tersebut disebabkan oleh kenaikan target kinerja pada Tahun 2025. Secara substansi, kinerja tetap menunjukkan hasil yang sangat baik karena realisasi masih melebihi target yang ditetapkan pada kedua tahun tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90%	91,67%	101,85%	Tercapai/ Melampaui ▲

Realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 91,67%, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 80%, dengan tingkat capaian 101,85% dan kategori kinerja “sangat baik”. Jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2029 sebesar 90%, capaian Tahun 2025 juga telah melampaui target tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengawasan sarana produksi pangan olahan telah berada di atas jalur yang direncanakan serta mencerminkan efektivitas strategi dan pelaksanaan pengawasan yang diterapkan oleh petugas dari UPT Loka POM di Kabupaten Belu. Capaian ini menjadi modal positif untuk menjaga konsistensi dan terus meningkatkan kualitas pengawasan guna mempertahankan serta mengoptimalkan pencapaian target Renstra pada tahun-tahun berikutnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah :

1. Pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan dan terencana dengan baik berkontribusi pada tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk menghasilkan produk sesuai ketentuan.
2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, mulai dari kegiatan pemeriksaan sarana hingga pelaporan melalui SIPT.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah dengan meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan teknis, pendalaman pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan oleh petugas

pemeriksaan dan pembaruan informasi regulasi terkini agar mampu memberikan layanan yang profesional dan maksimal kepada masyarakat.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	1. Pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan dan terencana dengan baik berkontribusi pada tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk menghasilkan produk sesuai ketentuan 2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, mulai dari kegiatan pemeriksaan sarana hingga pelaporan melalui SIPT	1. Membuat perencanaan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan 2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, mulai dari kegiatan pemeriksaan sarana hingga pelaporan melalui SIPT	Tahun 2026	Y	H-01	Adanya komplain ketidakpuasan pelaku usaha terkait tindak lanjut hasil pengawasan petugas

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1. Perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan yang berkesinambungan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan seluruh sarana produksi pangan olahan yang menjadi target dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

2. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan pendampingan terkait pemahaman dan penguasaan SOP pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.

6. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi. Pemeriksaan sarana distribusi melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pemeriksaan sarana distribusi mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25%	100,5%	107,77%	Sangat Baik

Realisasi hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi tahun 2025 sebesar 100,5% dengan capaian sebesar 107,77%. Hal ini dikarenakan terdapat satu sarana distribusi sediaan farmasi (apotek) pemeriksaan rutin yang dilaporkan sebagai hasil pemeriksaan sarana dalam rangka intensifikasi pengawasan psikotropika pada SIPT sehingga tidak terhitung sebagai hasil pemeriksaan rutin. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan satu sarana distribusi sediaan farmasi untuk memenuhi target sarana distribusi sediaan farmasi tahun 2025 di TW 4.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan	2024	-	-	-	-

Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2025	93,25%	100,5%	107,77%	Sangat Baik

Pada tahun 2024, realisasi kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100% dengan capaian sebesar 133% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaian lebih dari 110%. Sedangkan pada tahun 2025, realisasi kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sebesar 100,5% dengan capaian sebesar 107,77% dengan kategori “sangat baik”.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75%	100,5%	105%	Tercapai/ Melampaui ▲

Realisasi kegiatan kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100,5% dari target akhir renstra 95,75%. Capaian kegiatan sampling sebesar 105%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1. satu sarana distribusi sediaan farmasi (apotek) pemeriksaan rutin yang dilaporkan sebagai hasil pemeriksaan sarana dalam rangka intensifikasi pengawasan psikotropika pada SIPT sehingga tidak terhitung sebagai hasil pemeriksaan rutin.
2. Terdapat satu sarana kosmetik yang menjadi target pemeriksaan tetapi tutup (tidak beroperasi) saat petugas datang melakukan pengawasan ke sarana. Sehingga diperlukan sarana pengganti sesuai dengan analisis resiko yang dibuat.

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

a. Melakukan koordinasi dengan Ditwas ONPP untuk menambah target sarana pelayanan kefarmasian rutin.
b. Kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi dilakukan sesuai dengan Renlak dan Juknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan fasilitas Khusus lainnya dan kendala yang dihadapi di koordinasikan dengan ditwas terkait.
c. Melakukan pelatihan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi terhadap personil baru melalui platform IDEAS BPOM.
d. Melakukan evaluasi kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi di masing-masing komoditi setiap bulan.
e. Melakukan pembaruan dokumen perencanaan pengawasan sarana distribusi kosmetik.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Beberapa petugas masih belum memahami/membaca SOP terkait pengawasan sarana	Peningkatan kompetensi petugas dan pendampingan langsung oleh BPOM Pusat	Mengikuti pelatihan melalui IDEAS dan media lain		Y	SDM-01	Ketidakseragaman tindakan petugas saat penanganan temuan di sarana

7. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat/fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengangkut, menyalurkan, dan/atau memperdagangkan pangan olahan. Target pemeriksaan sarana distribusi pangan oleh UPT Loka POM di Kabupaten Belu pada tahun 2025 sebanyak 30 (tiga puluh) sarana yang

terealisasi 100%. Pemeriksaan sarana distribusi pangan diklasifikasikan menjadi sarana ritel tradisional, sarana ritel modern dan juga pada gudang distributor. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui sarana yang tidak memenuhi ketentuan seperti sarana yang menyalurkan produk pangan tanpa izin edar, recall, pangan yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan kadaluarsa. Tindak lanjut pada sarana distribusi pangan olahan meliputi beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pemeriksaan sarana distribusi, pelaporan hasil, tindak lanjut berupa perbaikan atau *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) dari pelaku usaha sarana distribusi, hingga evaluasi tindak lanjut.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	99%	132	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 75%, realisasi pemeriksaan dan tindak lanjut mencapai 99%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 132%. Capaian yang melampaui target tersebut menempatkan indikator ini dalam kategori ‘tidak dapat disimpulkan’ karena capaian lebih dari 110%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta komitmen yang kuat dalam memastikan kepatuhan sarana distribusi terhadap ketentuan peredaran pangan olahan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	75%	99%	132	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Dari target yang ditetapkan sebesar 75%, realisasi pemeriksaan dan tindak lanjut mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 133,33% dan termasuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaian lebih dari 110%. Pada tahun 2025, indikator yang sama tetap menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dengan target sebesar 75%, realisasi mencapai 99%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 132% dan kembali berada pada kategori yang sama yaitu tidak dapat disimpulkan karena capaian lebih dari 110%.

Apabila dibandingkan, capaian kinerja pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik, di mana realisasi pada kedua tahun tersebut melampaui target yang ditetapkan. Meskipun capaian tahun 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024, namun secara umum kinerja tetap berada pada tingkat istimewa dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjut sarana distribusi pangan olahan yang berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	99%	116,47%	Tercapai/ Melampaui ▲

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasi pemeriksaan dan tindak lanjut mencapai 99%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 116,47% dan termasuk dalam kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaian lebih dari 110%. %. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi realisasi capaian yaitu efektivitas pelaksanaan pengawasan sarana distribusi

pangan olahan serta komitmen petugas dalam memastikan pemenuhan ketentuan keamanan dan mutu pangan olahan.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 sebesar 85%, realisasi tahun 2025 telah melebihi target tersebut secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan telah berjalan sangat efektif dan berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah, serta menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kinerja optimal pada tahun-tahun berikutnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah :

1. Pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan dan terencana dengan baik berkontribusi pada tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk menghasilkan produk sesuai ketentuan.
2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, mulai dari kegiatan pemeriksaan sarana hingga pelaporan melalui SIPT.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja ke depan adalah dengan meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan teknis, pendalaman pedoman pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan oleh petugas pemeriksaan dan pembaruan informasi regulasi terkini agar mampu memberikan layanan yang profesional dan maksimal kepada masyarakat.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	1. Pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan dan terencana dengan baik berkontribusi pada tumbuhnya	1. Membuat perencanaan pelaksanaan pengawasan yang	Tahun 2026	Y	H-01	Adanya komplain ketidakpuasan pelaku usaha terkait tindak lanjut hasil pengawasan petugas

			kesadaran pelaku usaha untuk menghasilkan produk sesuai ketentuan 2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, mulai dari kegiatan pemeriksaan sarana hingga pelaporan melalui SIPT	berkesinambungan 2. Kepatuhan petugas terhadap *timeline* kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, mulai dari kegiatan pemeriksaan sarana hingga pelaporan melalui SIPT				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1. Perencanaan pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang berkesinambungan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan seluruh sarana produksi pangan olahan yang menjadi target dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan pendampingan terkait pemahaman dan penguasaan SOP pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan.

8. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti

pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan, pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan, pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,52%	100,3%	117,28%	Tidak dapat disimpulkan

Kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan setiap bulan dengan realisasi sebesar 100,3%. Capaian IKSK ini 117,28% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaian lebih dari 110%. Realisasi kinerja melebihi dari target sehingga capaian menjadi tidak dapat disimpulkan karena dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan obat yang dilaporkan di SIPT melebihi target dalam renlak yaitu iklan obat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	85,52%	100,3%	117,28%	Tidak dapat disimpulkan

Pada tahun 2024, pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak masuk ke indeks kinerja utama (IKU) tahun 2024 sehingga tidak memiliki target dan realisasi. Pada tahun 2025, realisasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sebesar 100,3% dengan capaian 117,28% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaian lebih dari 110%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	91,92%	100,3%	109%	Tercapai/ Melampaui

diawasi sesuai ketentuan				

Realisasi kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100,3% dari target akhir renstra 91,92%. Capaian kegiatan sampling sebesar 109% dengan kategori “tercapai”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1. Melaksanakan pengawasan iklan sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan secara berkala.
3. Petugas kurang teliti dalam mengirim jumlah iklan di SIPT, sehingga jumlah iklan yang dikirim melebihi target.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase yaitu:

1. Kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan sesuai dengan Renlak.
2. Melakukan pelatihan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada petugas baru melalui platform IDEAS.
3. Melakukan rapat evaluasi bulanan secara internal untuk membahas capaian, kendala, dan rekomendasi untuk mencapai target sesuai dengan renlak.
4. Supervisor SIPT lebih memperhatikan jumlah iklan yang dikirim di SIPT sesuai dengan renlak atau tidak.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko keterlambatan pelaporan hasil uji. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi timeline pengujian. Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Petugas kesulitan menemukan kategori media iklan luar ruang komoditi kosmetik sesuai renlak				T		

9. Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Laboratorium merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM serta menjadi elemen strategis dalam mendukung visi BPOM, yaitu terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dalam salah satu sasaran strategis BPOM Tahun 2025–2029, yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, ditegaskan pentingnya penguatan kapabilitas laboratorium sebagai bagian kunci dalam sistem pengawasan. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM dalam melaksanakan fungsi pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan, baik pada laboratorium kimia maupun biologi, perlu diukur secara terstandar dan berkelanjutan. Sebagai instrumen pengukuran tersebut, Kepala BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. SKL merupakan acuan resmi dalam menilai, memantau, dan meningkatkan kemampuan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan.

Standar Kemampuan Laboratorium BPOM mencakup ruang lingkup kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang wajib dipenuhi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium secara berkelanjutan. SKL ditetapkan berdasarkan rencana strategis peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Untuk Loka POM sebagai Laboratorium Tingkat 1 dan Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 2, SKL terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Standar Ruang Lingkup;

2. Standar Peralatan; dan
3. Standar Kompetensi Laboratorium.

SKL UPT BPOM menjadi acuan bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis dalam melakukan pemantauan terhadap kapasitas dan kapabilitas laboratorium, termasuk ketersediaan dan kesesuaian peralatan (jenis dan jumlah), serta kompetensi personel dalam melaksanakan pengujian sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan.

Laboratorium Loka POM di Kabupaten Belu merupakan laboratorium tingkat 1 dengan nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 sebagai berikut.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	12.08	120.80	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Belu diperoleh realisasi sebesar 12,08 dibandingkan dengan target 2025 sebesar 10 sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 120,80% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi pemenuhan SKL sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 masih berada dalam rentang target, namun pada Triwulan IV terjadi peningkatan capaian sehingga nilai realisasi melampaui target yang telah ditetapkan dan kategori capaian berubah menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Hal ini disebabkan banyaknya parameter pengujian cepat kategori kimia pangan sebagai komponen pemenuhan *tools* SKL. Peningkatan nilai SKL per triwulan tercatat sebesar 6,69 pada Triwulan I, 8,98 pada Triwulan II, 10,53 pada Triwulan III, dan meningkat menjadi 12,08 pada Triwulan IV sehingga melebihi target pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan Lab	2024	-	-	-	-

Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2025	10	12.08	120.80	Tidak dapat disimpulkan

IKSK Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	12.08	86,29%	Akan tercapai

Realisasi pemenuhan standar kemampuan laboratorium di Loka POM di Kabupaten Belu pada tahun 2025 sebesar 12.08 dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2029 sebesar 14. Realisasi ini memenuhi persentase capaian sebesar 86,29% dari target jangka menengah dan merupakan kategori “akan tercapai”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

1. Target SKL 2025 merupakan target baseline sehingga perlu adanya penyesuaian.
2. Kurangnya koordinasi dengan Balai Koordinator (BBPOM di Kupang), Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan terkait penyesuaian target.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah:

1. Berkoordinasi dengan Balai Koordinator (BBPOM di Kupang), Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional terkait pengisian tools SKL dan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyesuaian target UPT Loka POM di Kabupaten Belu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu:

1. Kegiatan pengujian cepat melalui mobil laboratorium keliling sebagai pemenuhan standar ruang lingkup pengujian.
2. Kegiatan pengembangan kompetensi petugas penguji sebagai pemenuhan standar kompetensi pengujian.
3. Pengadaan alat pengujian sebagai pemenuhan standar alat laboratorium.
4. Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinasi (BBPOM di Kupang) dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait pengadaan alat dan reagen untuk menambah parameter pengujian cepat sebagai pemenuhan nilai SKL.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Penentuan Target Standar Kemampuan Laboratorium yang terlalu rendah	-	-	-	T	-	-

10. Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85%	93,5%	110%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik di tahun 2025 sebesar 93,5% dengan capaian sebesar 93,5% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaian lebih dari 110%. Realisasi IKSK ini melebihi dari target sehingga capaiannya tidak dapat disimpulkan karen jumlah label tembakau yang diawasi lebih banyak dibandingkan dengan renlak yang sudah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	2024	-	-	-	-
	2025	85%	93,5%	110%	Tidak dapat disimpulkan

Pada tahun 2024, kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik di UPT Loka POM di Kabupaten Belu tidak menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga tidak memiliki nilai target. Sedangkan tahun 2025, realisasi kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 93,5% dengan capaian sebesar 93,5% dengan kategori "tidak dapat disimpulkan" karena mencapai lebih dari 110%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84%	102,30%	122%	Tercapai/ Melampaui ▲

Realisasi kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 102,30% dari target akhir renstra 80%. Capaian kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 120,30% dengan kategori "tidak dapat disimpulkan" karena capaian lebih dari 110%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1. Jumlah sampel tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar sangat bervariasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu.
2. Kegiatan pengawasan Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dilakukan sesuai dengan Renlak.
3. Kompetensi petugas baru masih perlu dikembangkan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator pengawasan Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu dengan melakukan:

1. Monitoring dan evaluasi pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik secara berkala.
2. Peningkatan kompetensi petugas melalui IDEAS dan media lain.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Kompetensi petugas baru masih perlu dikembangkan				T		

11. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) merupakan capaian pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR yang diukur berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap target pengendalian AMR yang telah direncanakan, berdasarkan data pelaksanaan di wilayah UPT dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis yang berlaku.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	100%	100%	Sangat Baik

Pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu terealisasi 100% dengan capaian sebesar 100% di tahun 2025. Kegiatan pengendalian AMR terbagi menjadi empat kegiatan yaitu penggunaan tools pengawasan AMR, bimbingan teknis, advokasi lintas sektor dan publikasi AMR. Tools pengawasan AMR digunakan dalam kegiatan pemeriksaan sarana apotek sebanyak 10 (sepuluh) sarana. Bimbingan teknis pengendalian AMR dilakukan di bulan September 2025 di Kabupaten Malaka yang dihadiri oleh apoteker penanggung jawab sarana apotek di Kabupaten Malaka dan beberapa *stakeholder*. Advokasi lintas sektor telah dilakukan dengan bekerja sama bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Belu terkait pengendalian AMR. Sedangkan publikasi AMR telah dilakukan sebanyak dua kali di bulan September dan Desember tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	2024	-	-	-	-
	2025	100%	100%	100%	Sangat Baik

Pada tahun 2024, kegiatan pengendalian AMR di UPT Loka POM di Kabupaten Belu tidak menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga tidak memiliki nilai target. Sedangkan tahun 2025, realisasi pengendalian AMR di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	100%	100%	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kegiatan pengendalian AMR di UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100% dari target akhir renstra 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

1. Terdapat sarana apotek yang tidak mendistribusikan antibiotik sehingga tools pengawasan AMR tidak bisa digunakan
2. Pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kegiatan dengan mengeluarkan Surat Edaran terkait AMR.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT yaitu:

1. Kegiatan pengawasan sarana apotek menggunakan tools antibiotik sesuai dengan renlak.
2. Melaksanakan pelatihan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi melalui platform IDEAS terhadap personil baru.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
4. Melakukan pemantauan distribusi antibiotik ke sarana apotek melalui melalui EWAS saat menyusun renlak pemeriksaan sarana dan kordinasi dengan dinas kesehatan terkait hasil pemeriksaan apotek.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Data distribusi antibiotik tidak update	• Pemantauan distribusi antibiotik ke sarana apotek melalui EWAS saat penyusunan renlak pemeriksaan sarana • Kordinasi dengan dinas kesehatan terkait hasil pemeriksaan apotek	-	-	T	-	-

12. Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota pangan aman

Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah program Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengawasan pangan

terpadu di tingkat daerah melalui penguatan komitmen pemerintah daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak konsumsi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	50%	40%	80	Baik

Persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 50%, realisasi pendampingan mencapai 40%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 80%. Hasil tersebut menempatkan indikator ini dalam kategori Baik, yang mencerminkan bahwa sebagian besar target pendampingan telah berhasil dilaksanakan serta menunjukkan komitmen dalam mendukung penguatan pengawasan pangan dan peningkatan keamanan pangan di tingkat daerah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	2024	-	-	-	-
	2025	50%	40%	80	Baik

Pada tahun 2024, persentase kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum menunjukkan capaian kinerja karena kegiatan pendampingan belum dilaksanakan. Pada tahun 2025, kegiatan pendampingan mulai dilaksanakan dengan target sebesar 50%, dengan realisasi mencapai 40% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 80% dan termasuk kategori **“**Baik**”** yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendampingan telah berjalan cukup optimal meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Capaian realisasi yang dibawah target disebabkan oleh faktor anggaran instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keamanan pangan

sehingga masih sedikit jumlah kegiatan yang dapat menjadi poin tambahan dalam penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	100%	40%	40%	Perlu Upaya Keras ▼

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 sebesar 100%, capaian tahun 2025 masih berada di bawah target jangka menengah yang ditetapkan. Hal ini disebabkan, target UPT untuk tahun 2025 adalah sebesar 50% sehingga realisasi masih jauh dari target renstra tahun 2029. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah target Kabupaten/Kota yang didampingi dalam program Kabupaten/Kota Pangan Aman (dari satu menjadi dua) di Tahun Akhir Renstra (2029) dan faktor anggaran instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan keamanan pangan sehingga masih sedikit jumlah kegiatan yang dapat menjadi poin tambahan dalam penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Namun demikian, capaian sebesar 40% ini menunjukkan kemajuan yang positif dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan pendampingan pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pencapaian target Renstra secara penuh pada tahun 2029.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

1. Minimnya kegiatan yang menjadi poin penilaian akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
2. Dokumen yang dikumpulkan menjadi data dukung penilaian tidak memenuhi persyaratan.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah dengan memfasilitasi advokasi dari petugas BPOM pusat dengan PIC

pemerintah daerah dan rutin melakukan follow up terkait permintaan dokumen ke instansi pemda terkait.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Time line	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman	1. Minimnya kegiatan yang menjadi poin penilaian akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah 2. Dokumen yang dikumpulkan menjadi data dukung penilaian tidak memenuhi persyaratan	1. Memfasilitasi advokasi dari petugas BPOM pusat dengan PIC pemerintah daerah 2. Rutin melakukan follow up terkait permintaan dokumen ke instansi pemda terkait	1. Memfasilitasi advokasi dari petugas BPOM pusat dengan PIC pemerintah daerah 2. Rutin melakukan follow up terkait permintaan dokumen ke instansi pemda terkait	Tahun 2026	Y	S-02	Nilai IKU Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak tercapai

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota pangan aman yaitu:

1. Membuat timeline jelas kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2. Melakukan pendampingan intensif ke pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai PIC.
3. Melakukan evaluasi progress pendampingan kabupaten/kota pangan aman yang rutin setiap bulan

13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektivitas kualitas dan sebaran (kuantitas) melalui

pelaksanaan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan BPOM.

Indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 indikator :

a) Tingkat pemahaman terhadap sumber informasi KIE
b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima
c) Tingkat pemahaman terhadap manfaat program KIE
d) Tingkat minat terhadap informasi KIE

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	81.12	81.82	100,8%	Sangat Baik

Untuk IKU Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 81.82 dengan target 81.12 dan persentase capaian sebesar 100,8% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan KIE melampaui dari target yang ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	2024	-	-	-	-
	2025	81.12	81.82	100,8%	Sangat Baik

IKSK Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Loka POM di Kabupaten Belu tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dikarenakan Indikator dalan capaian IKSK memiliki satuan penilaian yang berbeda. Pada tahun 2024 satuan penilaian dalam persentase, sedangkan pada tahun 2025 satuan penilaian berupa Indeks.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	84.36	81.82	96,9%	Akan Tercapai

Realisasi kinerja IKSK Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Loka POM di Kabupaten Belu tahun 2025 sebesar 81.82, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 84.36, dengan capaian realisasi terhadap target Renstra sebesar 96,9%, dengan kategori Akan Tercapai. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan capaian berada di jalur yang baik dan di akhir periode renstra akan tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei KIE secara langsung

   Saat dilaksanakan kegiatan KIE oleh Loka POM di Kabupaten Belu, setelah kegiatan berlangsung, peserta diminta untuk melakukan pengisian survei sesuai dengan 4 (empat) indikator efektifitas KIE yang dilakukan melalui pengisian formulir survei di web evaluasi KIE.
2. Melakukan survei KIE melalui media

   Survei efektivitas kegiatan KIE melalui media dilakukan di setiap bulannya dengan meminta masyarakat untuk melakukan penilaian mengenai konten yang telah diposting melalui sosial media sesuai dengan 4 (empat) indikator efektifitas KIE yang dilakukan melalui pengisian formulir survei di web evaluasi KIE.
3. Melakukan pemutakhiran informasi mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan di sosial media dan website

   Untuk memastikan informasi sediaan farmasi dan pangan olahan akurat dan *up to date*, maka tim sosial media selalu melakukan pemutakhiran informasi

terkini berkaitan dengan sediaan farmasi dan pangan olahan di laman sosial media maupun *website*.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1. Meningkatkan kompetensi petugas KIE dalam menyampaikan pesan/informasi. Petugas KIE sebagian besar masih berstatus CPNS, sehingga masih memiliki pengalaman yang terbatas pada kegiatan KIE. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kompetensi petugas dalam menyampaikan informasi.
2. Penyediaan formulir cetak untuk pelaksanaan survey pada saat dilakukan kegiatan KIE.
3. Melakukan survei efektivitas KIE melalui platform sosial media secara rutin setiap bulan.
4. Memastikan informasi yang disampaikan kepada audiens akurat dan *up to date*, baik saat dilaksanakan KIE langsung ataupun KIE melalui sosial media.
5. Melibatkan faktor penilaian pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan kegiatan KIE.
6. Membuat alat peraga yang dapat digunakan saat pelaksanaan kegiatan KIE langsung seperti :
   a. Tiruan produk untuk KIE mengenai Cek KLIK
   b. Pembuatan poster
   c. Pembuatan alat peraga sederhana untuk KIE Keamanan Pangan

Terhadap capaian IKSK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum dilakukan identifikasi risiko untuk menganalisis risiko yang ada dalam pelaksanaan kegiatan KIE yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja dan capaian IKSK. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis risiko terhadap IKSK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di tahun berikutnya.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Petugas KIE masih minim pengetahuan	Peningkatan kompetensi petugas KIE	Petugas mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi		T	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yaitu;

1. Melakukan survei efektivitas KIE secara langsung setelah dilakukan kegiatan KIE yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kualitas KIE yang diberikan kepada audiens dan pemahaman audiens terhadap materi yang disampaikan oleh petugas secara langsung.
2. Melakukan survei efektivitas KIE melalui platform sosial media secara rutin di setiap bulannya untuk menilai sejauh mana kualitas KIE yang diberikan kepada audiens dan pemahaman audiens terhadap konten yang diunggah melalui platform sosial media.
3. Melakukan pemutakhiran informasi terkini mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan di berbagai platform (sosial media, website) dan memastikan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

14. Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan (ada)

Sertifikasi pangan olahan merupakan proses penting dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan legalitas produk pangan yang diproduksi dan beredar di masyarakat. Sertifikasi ini menjadi bentuk pengakuan bahwa suatu produk pangan

olahan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga sertifikasi yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas terkait di tingkat daerah bahwa Pangan telah memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6,25	6,25	100	Baik

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam (OBA) yang Baik, Kosmetik yang Baik, dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) telah mencapai hasil yang optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 6,25, realisasi juga mencapai 6,25, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh target pendampingan UMKM telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pendampingan serta komitmen dalam mendorong peningkatan kepatuhan UMKM terhadap penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	2024	81	81	100	Baik
	2025	6,25	6,25	100	Baik

dan/atau IP CPPOB pangan olahan					

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam (OBA) yang Baik, Kosmetik yang Baik, dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 81, realisasi juga mencapai 81, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100% dan termasuk dalam kategori Baik.

Pada tahun 2025, meskipun target yang ditetapkan mengalami penyesuaian menjadi 6,25, realisasi pendampingan UMKM tetap berhasil memenuhi target tersebut dengan capaian 6,25 atau 100%, dan kembali berada pada kategori Baik.

Secara komparatif, capaian kinerja pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan konsistensi pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM, di mana seluruh target yang ditetapkan pada masing-masing tahun dapat dicapai secara penuh. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pendampingan serta keberlanjutan upaya peningkatan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik oleh UMKM, meskipun terdapat perbedaan besaran target setiap tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100%	6,25%	6,25%	Perlu upaya keras ▼

Target akhir renstra di tahun 2025 adalah 6,25. Bila dilihat dari hasil realisasi tahun 2025 dan dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 sebesar 100, maka capaian pada periode pelaporan ini telah setara dengan target Renstra, sehingga menunjukkan bahwa indikator kinerja tersebut berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah.

Hal ini sesuai dengan rumus perhitungan indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan yang baik, dimana capaian didasarkan dari akumulasi jumlah UMKM yang berhasil didampingi dari tahun 2025 hingga 2029. Target jumlah UMKM yang didampingi di Tahun 2025 adalah 1 sarana UMKM, sedangkan target total UMKM yang didampingi hingga tahun 2029 adalah sebanyak 16 sarana UMKM, sehingga target di tahun 2025 hanya 6,25% dan sudah berhasil dipenuhi oleh UPT.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

1. Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi izin edar.
2. Adanya kekurangan persyaratan registrasi yang membutuhkan waktu untuk dipenuhi atau diperbaiki, seperti kesalahan penulisan dalam dokumen perizinan dan perbaikan sarana.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah petugas rutin melakukan follow up ke pelaku UMKM untuk mendorong kemajuan progress pengurusan registrasi izin edar dan perbaikan dokumen perizinan atau perbaikan sarana.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Tidak adanya komitmen pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan registrasi izin edar	Memberikan pendampingan langsung terhadap pelaku usaha	Memberikan pendampingan langsung terhadap pelaku usaha		Y	R-05	Pelaku usaha komplain terkait layanan pendampingan UMKM BPOM
2	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Kekurangan persyaratan registrasi yang membutuhkan waktu untuk dipenuhi atau diperbaiki	Rutin melakukan follow up ke pelaku usaha	Rutin melakukan follow up ke pelaku usaha		T		Pelaku usaha membutuhkan waktu lama untuk memenuhi persyaratan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB yaitu:

1. Kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan sesuai dengan Renlak, dan kendala yang dihadapi di koordinasikan dengan direktorat registrasi pangan olahan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pendampingan UMKM secara rutin setiap bulan.

15. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan suatu kegiatan dalam mendeteksi adanya tindak kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di

wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Belu. Pada pelaksanaannya, kegiatan Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan OSediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terdiri dari tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	94%	104,17%	Sangat Baik

Realisasi diperoleh dari nilai ketepatan waktu pelaporan siber sebesar 43,75% dari bobot penillaian sebesar 50%, nilai kualitas analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan sebesar 25% dari bobot 25% dan nilai tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal sebesar 25% dari bobot nilai 25%, sehingga jumlah keseluruhan dari realisasi 94% dan jumlah capaiannya sebesar 104,17% yang mana nilai tersebut melewati dari target yang direncanakan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	2024	-	-	-	
	2025	90%	94%	104,17%	Sangat Baik

Pada 2024 pelaksanaan kegiatan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan mencakup pelaporan analisis siber dan analisis cegah tangkal

kejahatan tetapi tidak terdapat target, realisasi dan capaiannya, sehingga tidak dapat melakukan perbandingan terget, realisasi, dan capaian pada tahun 2024 dan 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	94%	104,17%	Tercapai/ Melampaui ▲

Target akhir renstra pada tahun 2025 yaitu 90%, sedangkan pada realisasi kegiatan analisis kejahatan sedian farmasi dan pangan olahan pada tahun 2025 yaitu 94% dengan capaian yaitu 104,17%**.**

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu sebagai berikut Pelaporan patroli siber yang dilaporkan melewati waktu yang ditentukan.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah melakukan pelaporan analisis patroli siber secara tepat waktu setiap bulannya.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pelaporan patroli siber yang belum dilakukan secara tepat waktu	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan :

1. Kegiatan patroli siber yang dilaporkan secara tepat waktu setiap bulannya
2. Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari direktorat cegah tangkal
3. Membuat analisis kerawanan kejahatan kewilayahan secara baik.

16. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPT BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51	4.36	124%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Loka POM di Kabupaten Belu adalah sebesar 4.36 dengan target 3.51 dan persentase capaian sebesar 124% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut melebihi batas evaluasi kinerja yang telah ditentukan (110%), sehingga hasil penilaian tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan jumlah Sumber Daya Manusia di Loka POM di Kabupaten Belu yaitu sebanyak 11 (sebelas) CPNS pada bulan Juni tahun 2025, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan optimal dan juga IKSK ini merupakan target baru sehingga dalam proses perencanaan belum dapat dilakukan pengukuran akurat dalam penetapan target.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	2024	-	-	-	-
	2025	3.51	4.36	124%	Tidak dapat disimpulkan

IKSK Indeks Pelayanan Publik (IPP) tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	3.7	4.36	117,83%	Tercapai / Melampaui ▲

Realisasi IKSK Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 adalah sebesar 4,36 telah melampaui target akhir Renstra sebesar 3,7 dengan capaian 117,83%. Capaian ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah tercapai bahkan

melampaui sasaran yang ditetapkan, sehingga kinerja pada indikator ini dinilai Tercapai/Melampaui.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah :

1. Telah tersedianya standar pelayanan di Loka POM di Kabupaten Belu
2. Telah tersedianya SDM yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik. Petugas telah melakukan pelatihan pelayanan prima melalui platform IDEAS.
3. Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik baik secara elektronik maupun non-elektronik
4. Telah dilakukan pemutakhiran informasi di subsite maupun media sosial
5. Petugas telah menindaklanjuti seluruh layanan permintaan informasi dan pengaduan di Loka POM di Kabupaten Belu

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1. Melakukan penyediaan fasilitas penunjang pelayanan publik seperti :
   a. Huruf *braille*
   b. Fasilitas toilet untuk kelompok rentan
   c. Pemasangan CCTV di area kantor
2. Mengadakan pelatihan untuk menunjang komunikasi dengan kelompok rentan seperti pelatihan bahasa isyarat
3. Menindaklanjuti inovasi yang telah dibuat pada tahun sebelumnya
4. Menindaklanjuti SK penghargaan dan sanksi untuk pegawai pelaksana pelayanan publik.

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik yaitu *:*

1. Kegiatan pelatihan petugas pelayanan publik melalui platform IDEAS
2. Pemutakhiran berkala informasi di subsite maupun sosial media
3. Melakukan input rutin pelayanan dan menindaklanjuti layanan secara tepat waktu.

Terhadap capaian IKSK Indeks Pelayanan Publik (IPP) telah dilakukan identifikasi risiko untuk menganalisis risiko yang ada dalam pelaksanaan Pelayanan Publik yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja dan capaian IKSK. Dengan dilakukannya identifikasi risiko maka dapat meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik, sehingga dapat berjalan secara optimal.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum adanya petugas yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat	Mengadakan pelatihan petugas	Mengadakan pelatihan petugas		Y	R-02	Pelanggan tidak mendapat informasi obat dan makanan secara optimal
2	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum lengkapnya fasilitas untuk kelompok rentan	Melengkapi fasilitas	Melengkapi fasilitas pelayanan publik untuk kelompok rentan		T	-	-

17. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan atau sasaran organisasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	1.6	1.9	118%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi kinerja Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Belu adalah sebesar 1.9 dengan target 1.6 dan persentase capaian sebesar 118%

dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut melebihi batas evaluasi kinerja yang telah ditentukan (110%), sehingga hasil penilaian tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan karena IKSK ini merupakan target baru sehingga dalam proses perencanaan belum dapat dilakukan pengukuran akurat dalam penetapan target.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	2024	-	-	-	
	2025	1.6	1.9	118%	Tidak dapat disimpulkan

IKSK Indeks Manajemen Risiko tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	2.5	1.9	76%	Akan Tercapai

Realisasi kinerja IKSK Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Belu tahun 2025 sebesar 1.9, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 2.5, dengan capaian realisasi terhadap target Renstra sebesar 76%, dengan kategori Akan Tercapai. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan rata-rata peningkatan nilai persentase sekitar 6-

7 per tahun dalam kurun waktu empat tahun ke depan dan akan tercapai pada tahun 2029.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah :

1. Melakukan penetapan selera risiko yang belum ditetapkan sebelumnya sebagai pedoman dalam penyusunan daftar risiko untuk menentukan level risiko pada setiap aspek yang telah dianalisis.
2. Melakukan studi di UPT lain terkait manajemen risiko dan melakukan diseminasi hasil pembelajaran kepada tim manajemen risiko untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap manajemen risiko.
3. Diperlukan analisis risiko lebih dalam pada masing - masing fungsi dan melakukan review dari masing-masing risiko yang telah diindentifikasi.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1. Melakukan analisis risiko pada masing-masing fungsi yang terdapat di unit kerja.
2. Tim auditor melakukan review terhadap daftar risiko yang telah disusun oleh masing-masing fungsi yang terdapat di unit kerja.
3. Mengadakan pembinaan oleh pusat terkait dengan manajemen risiko guna meningkatkan pemahaman keseluruhan pegawai dalam melakukan analisis risiko.
4. Melakukan review bersama oleh tim manajemen risiko terkait daftar risiko secara rutin di setiap semester.

Terhadap capaian IKSK Indeks Manajemen Risiko belum dilakukan identifikasi risiko untuk menganalisis risiko yang ada dalam pelaksanaan kegiatan manajemen risiko yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja dan capaian IKSK. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis risiko terhadap IKSK Indeks Manajemen risiko di tahun berikutnya untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan secara optimal.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks manajemen Risiko UPT BPOM	Masih minimnya pemahaman dan kemampuan dalam melakukan analisis risiko	Mengadakan pelatihan secara online kepada pegawai Loka POM di Kabupaten Belu	Mengadakan pelatihan secara online kepada pegawai Loka POM di Kabupaten Belu		T	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu; *(contoh) :*

1. Melakukan kegiatan pelatihan melalui platform IDEAS mengenai manajemen risiko.
2. Melaksanakan studi di UPT lain terkait manajemen risiko dan melakukan diseminasi hasil pembelajaran kepada tim manajemen risiko untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap manajemen risiko
3. Melakukan review risiko di tiap semester oleh tim manajemen risiko.

18. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Hal itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belu.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	Sangat Baik

Untuk IKU Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Belu pada tahun 2025 sebesar 100% dengan target 100% dan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria ”Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	2024	-	-	-	-
	2025	100	100	100	Sangat Baik

IKU persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT pada tahun 2024 dengan target 100%, realisasi 100% dan capaian 100% kategori baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	Tercapai/ Melampaui ▲

Target akhir Renstra untuk IKU Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2029 memiliki target 100%, realisasi 100%, capaian 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah :

1. Tersusunnya beberapa SOP di tahun 2025.

2. Tersusunnya beberapa dokumen manajemen risiko Loka POM di Kab. Belu di tahun 2025.
3. Terlaksananya kegiatan rutin untuk menunjang kinerja pegawai seperti Jumat Sehat dan Ibadah Bersama setiap Senin.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah tetap melakukan komunikasi yang baik di tim monev dan melanjutkan kegiatan rutin untuk menunjang kinerja pegawai seperti Jumat Sehat, Ibadah Bersama, dan Jumat arsip.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Tidak Ada	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Terlaksananya kegiatan rutin untuk menunjang kinerja pegawai seperti Jumat Sehat, Ibadah Bersama setiap Senin dan Jumat arsip.

19. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

SAKIP yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu hal penting dalam administrasi pemerintahan untuk memenuhi tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik. SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui

perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa kinerja instansi berdampak pada layanan publik.

Loka POM di Kabupaten Belu memiliki target data dukung yaitu dokumen Perencanaan Kinerja yang diselesaikan, dokumen Pengukuran Kinerja yang diselesaikan, dan dokumen Pelaporan Kinerja yang diselesaikan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100	100	100	Sangat Baik

Untuk parameter persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar pada pada tahun 2025 sebesar 100% dengan target 100% dan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria ”Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	2024	-	-	-	-
	2025	100	100	100	Sangat Baik

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100	100	100	Tercapai/ Melampaui

Pada Tahun 2024 di Loka POM di Kabupaten Belu untuk IKU persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar memiliki target akhir Renstra 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota dalam tim sehingga dokumen yang disusun sesuai standar dan tepat sasaran.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah meningkatkan komunikasi dengan Balai Besar di Kupang dan kerjasama yang baik antar anggota tim sehingga dokumen yang disusun sesuai standar, tepat sasaran dan tepat waktu.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	Tidak Ada	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator melakukan rapat rutin setiap bulan untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan komunikasi yang intens dengan Balai Besar di Kupang.

20. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100	100	100	Sangat Baik

Untuk IKU Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100% (efisien) dari target tahun 2025 sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	2024	-	-	-	-
	2025	100	100	100	Sangat Baik

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100	100	100	Tercapai/ Melampaui ▲

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah melakukan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu, melakukan kegiatan sesuai renlak dan melakukan revisi DIPA sesuai kegiatan, dan komunikasi yang baik dengan Balai koordinator yaitu Balai Besar di Kupang.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah meningkatkan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu, melakukan kegiatan sesuai renlak dan melakukan revisi DIPA sesuai kegiatan, dan komunikasi yang baik dengan Balai koordinator yaitu Balai Besar di Kupang.

Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Tidak Ada	-	-	-	-	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT yaitu melakukan kegiatan sesuai renlak dan anggaran kegiatan.

3.6. KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Lingkungan BPOM, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan

Tugas utama Loka POM di Kabupaten Sumba Timur adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini mencerminkan posisi strategis organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pengawasan, mengingat Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Apabila pengelolaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat, atau disalahgunakan, maka dapat menimbulkan risiko yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengawasan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat/konsumen, peningkatan akses masyarakat terhadap produk, serta kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai bagian integral dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur memiliki peran yang penting dan strategis sebagai ujung tombak pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di seluruh Pulau Sumba. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur terus melakukan berbagai upaya penguatan dan optimalisasi kinerja. Untuk mendukung pencapaian outcome pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di seluruh Pulau Sumba, diperlukan analisis lingkungan secara menyeluruh, baik internal maupun eksternal,

guna mengidentifikasi potensi, tantangan, serta peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal

A. INTERNAL

Sarana dan Prasarana

Tabel 3.15 Data Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung dan Tanah Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah: 232 m^2/ 3950m^2
2.	Rumah Dinas	1 Unit	Luas Bangunan/ Tanah: 48m^2/ 100m^2
3.	Sumber Listrik (PLN) BBPOM di Kupang	11.000 Watt	-
4.	Kendaraan Roda 4	1 unit	1 unit kondisi baik
5.	Kendaraan Roda 2	1 unit	1 unit kondisi baik

Kantor Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menempati lokasi di Jalan Bhineka No. 4 Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur dengan luas bangunan 232 m2. Kantor yang dipakai oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur merupakan Pinjam Pakai Pemerintah Daerah Kab. Sumba Timur yang terdiri dari dua ruangan. Saat ini telah memiliki Tanah Existing dengan luas : 3950 m2 dengan Sertifikat Hak Pakai an. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM (Sertifikat No. 24.11.07.03.4.4.00038) dan tercatat di Aset BMN BBPOM di Kupang.

Transportasi yang digunakan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur untuk melaksanakan tugas pengawasan Sediaan Farmais dan pangan Olahan adalah 1

unit mobil dan 1 unit motor dengan kepemilikan inventarisasi dari BBPOM di Kupang.

Secara umum, pemenuhan kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja sampai dengan Desember 2025 telah cukup mendukung operasional. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah sumber daya manusia dan meningkatnya kebutuhan perkantoran, diperlukan pengadaan tambahan alat pengolah data dan meubelair untuk memperkuat layanan manajemen pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sumber Daya Manusia

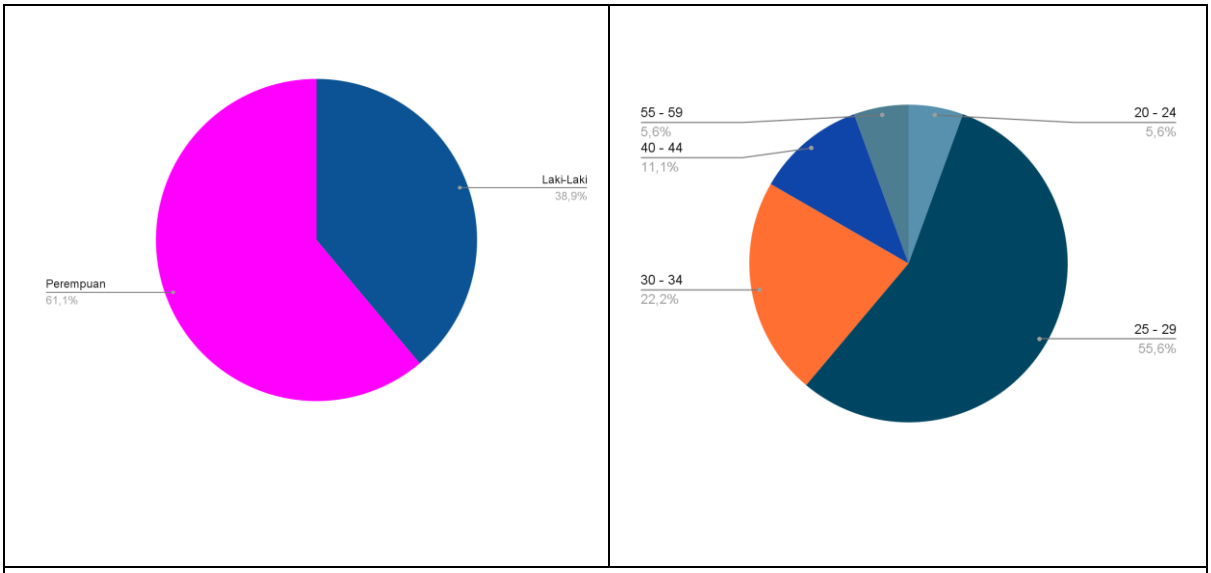
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan. Kualifikasi pendidikan dan kompetensi menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas pengawasan.

Sampai dengan Desember 2025, jumlah ASN di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tercatat sebanyak 18 orang, terdiri atas 5 PNS, 12 CPNS, dan 1 PPPK BBPOM di Kupang yang diperbantukan dalam mendukung kegiatan operasional. Dengan demikian, jumlah ASN Loka POM di Kabupaten Sumba Timur hingga Desember 2025 berjumlah 18 orang. Profil gambaran SDM Loka POM di Kabupaten Sumba Timur secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16 Jumlah ASN Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

No	UPT	Pendidikan								Total
		S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SLTA	SLTP	
1.	Kepala	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	Bagian TU	0	0	0	1	0	1	0	0	2
3.	Fungsi Pengujian	0	0	1	1	0	0	0	0	2

4.	Fungsi Pemeriksaan	0	1	1	5	0	0	0	0	7
5.	Fungsi Penindakan	0	0	1	1	0	1	0	0	3
6.	Fungsi Informasi dan Komunikasi	0	0	2	1	0	0	0	0	3
	TOTAL	**1**	**1**	**5**	**9**	**0**	**2**	**0**	**0**	**18**



Gambar 1.1. Profil SDM Berdasarkan Gender dan Umur

Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya anggaran yang masih tergabung pada DIPA Awal BBPOM di Kupang TA 2025 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran kegiatan **Rp. 2.282.318.970** (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 931.491.970. Selain itu, terdapat revisi relaksasi blokir anggaran untuk dukungan anggaran kegiatan sertifikasi Loka POM

di Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp. 47.261.700. Sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Sumba Timur adalah **Rp. 1.398.088.700.**

B. EKSTERNAL

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur terletak di wilayah Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki cakupan wilayah kerja terdiri dari 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, total luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebesar 10.914,39 km^2. Luas wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

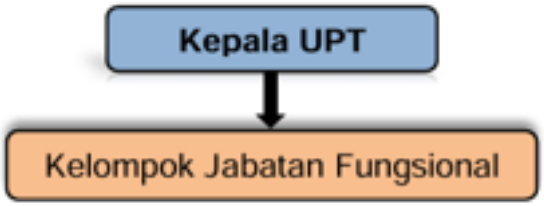
Jumlah sarana produksi dan distribusi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17 Data Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Sarana yang diawasi tahun 2025
Sarana Produksi			
1	Industri Pangan	4	1
2	Industri Rumah Tangga Pangan	226	2
3	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	0
4	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	0
5	Industri Kosmetik	0	0
6	Sarana produksi Obat (Unit Transfusi Darah)	0	0
TOTAL		**231**	**3**
Sarana Distribusi			
1	Pedagang Besar Farmasi	2	2
2	Apotek	64	13
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	4	4
4	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	10	7
5	Puskesmas	59	9
6	Klinik	8	5
7	Toko Obat Berizin	3	3
8	Sarana Distribusi Pangan	337	41
9	Sarana Distribusi Kosmetik	290	14
10	Sarana Distribusi Obat Tradisional	137	1
11	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	137	1
TOTAL		**1051**	**100**

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Sumba Timur



Gambar Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023, yaitu:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu proses perencanaan yang digunakan untuk menentukan arah kebijakan dan strategi organisasi melalui pengambilan keputusan yang tepat dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya yang tersedia. Renstra mencerminkan komitmen bersama dalam jangka menengah terhadap upaya yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan organisasi. Saat ini, rencana strategis Loka POM di Kabupaten Sumba Timur masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana strategis BBPOM di Kupang 2025-2029 yang mengacu pada rencana strategis BPOM 2025-2029, mengingat pengelolaan sumber daya anggaran masih tergabung dengan DIPA Awal BBPOM di Kupang.

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Nomor HK.02.02.34C.09.24.14 Tahun 2025 Tentang Rencana Kinerja Tahunan 2025.Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 disusun mengacu pada dokumen RancangaN Renstra BBPOM di Kupang 2025 – 2029 dikarenakan kita masih satu DIPA dengan BBPOM di Kupang, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja

tahun 2025 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2025. Selanjutnya Loka POM di Kabupaten Sumba Timur juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah rincian target kinerja yang tercantum pada dokumen RKT 2025:

Tabel 3.18 Rencana Kinerja Tahunan 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90,4
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	70
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,55
10	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko	2,2

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2025 disahkan, pada akhir Desember tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Sumba Timur segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat penyesuaian target terhadap beberapa indikator kinerja berdasarkan hasil reviu dari Unit Pengampu dan memperhatikan rancangan Renstra BBPOM di Kupang. Berikut adalah Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025.

Tabel 3.19 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**82%**
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**

		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100%**
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**
		5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	**75%**
		6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**80%**
		7	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**93%**
		8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**
		9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**79,17%**
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**87,44**
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	11	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	**92%**
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	12	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**70%**
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	13	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90%**

6	Layanan Publik UPT yang prima	14	Indeks Pelayanan Publik UPT	**3,51**
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	15	Indeks Manajemen Risiko	**2**
		16	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	**100%**
		17	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP UPT sesuai standar	**100%**
		18	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	**100%**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sumba Timur kembali dilakukan penyesuaian pada bulan agustus 2025 berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama No. PR.07.2.08.25.451 terkait proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Revisi Perjanjian Kinerja ini memuat dan memperbaharui kembali *breakdown* target kinerja yang mengacu pada hasil desk kesepakatan target antara UPT dan Unit Pengampu yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2025. Berikut adalah matriks revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.20 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		**Indikator Kinerja**		**Target 2025**
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85,5%%**
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	**100%**
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**

		5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	**75%**
		6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**88%**
		7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**93%**
		8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85%**
		9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	**85,17%**
		10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**80%**
		11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	**100%**
		12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	**8**
		13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	**25%**
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	**87,44**
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	**6,67%**
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**70%**

5	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	**90%**
6	Layanan Publik UPT yang prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	**3,51**
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	19	Indeks Manajemen Risiko	**2**
		20	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	**100%**
		21	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP UPT sesuai standar	**100%**
		22	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	**100%**

Kegiatan :	**Anggaran**:
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 1.169.335.860
Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp. 1.112.983.110

Pada revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat perubahan target dan manual indikator pada beberapa indikator yaitu:

1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2) Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
3) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Selain itu pada revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat penambahan target indikator sebanyak 4 indikator yaitu

1) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

2) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
3) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
4) Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, turut disusun rencana aksi sebagai langkah operasional untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disusun dengan penetapan target bulanan guna memantau perkembangan realisasi capaian terhadap Perjanjian Kinerja. Pada bulan Agustus 2025, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami penyesuaian yang mengacu pada hasil revisi PK Tahun 2025.

Tabel 3.21 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

NO	IKSK	Bulan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93

	Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	20	30	40	50	60	70	80	85	92
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-	15	30	35	50	55	60	65	70	70
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90

24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.51
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
29	Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT	35	40	45	50	55	60	65	70	75	85	95	100
30	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100
31	Tingkat Efisiensi Pengunaan Anggaran UPT	75	75	75	78	78	80	85	86	88	90	95	100

Berdasarkan hasil monitoring kinerja bulanan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur serta adanya revisi dokumen Perjanjian Kinerja sehubungan dengan pemuktahiran Renstra BBPOM di Kupang terdapat perubahan pada target RAPK, berikut adalah rincian target RAPK yang telah direvisi:

Tabel 3.22 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

NO	IKSK	Bulan											
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	82	82	82	82	82	82	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan	80	80	80	80	80	80	80	88	88	88	88	88

	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	85	85	85	85	85
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	85.17	85.17	85.17	85.17	85.17
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	7.44	7.8	7.8	7.8	8
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	20	30	40	50	60	70	80	85	6.67
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	-	-	15	30	35	50	55	60	65	70	70
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar												
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.51
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
29	Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT	35	40	45	50	55	60	65	70	75	85	95	100
30	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100
31	Tingkat Efisiensi Pengunaan Anggaran UPT	75	75	75	78	78	80	85	86	88	90	95	100

5. METODE PENGUKURAN

Capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari masing-masing indikator pada setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya, persentase capaian kinerja setiap indikator dihitung dengan membandingkan nilai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada rumus berikut.

$$\%Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {(bobot x %capaian)1 + (bobot x %capaian)2 + ...(bobot x %capaian)n}/ n

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

IE = %Capaian Output / %Capaian Input

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap kurang efisien

CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur selama periode tahun 2025. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2025 sebesar 92.02% dengan predikat Baik.

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 7 sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.23 Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.50	98.19	114.84	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	86.33	115.11	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	100.00	100.00	Baik
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	92.00	122.67	Tidak dapat disimpulkan

		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.00	75.00	100	Baik
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	100.00	113.64	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	97.07	104.38	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	96.19	113.16	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.17	96.30	113.07	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang di awasi sesuai standar	80.00	88.7	110.86	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	104.17	104.17	Sangat Baik
		Nilai pemenuhan Lab pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan	8	7.44	93.00	Baik

		Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium				
		Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota Pangan Aman	25	23	92	Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.44	88.24	100.91	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67	6.67	100	Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70.00	55	78.57	Cukup
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	93.84	104.27	Sangat Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51	3.86	109.97	Sangat Baik

7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	2	1.84	92.00	Baik
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00	100.00	100.00	Baik
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100.00	100.00	100.00	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100.00	100.00	100.00	Baik

Dari 22 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 1 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 9 indikator kinerja dengan kategori “Baik”, 5 indikator dengan kategori “Sangat baik”, dan 7 indikator kinerja dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan Farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel Sediaan Farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.5	98.19	114.84	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2025, IKSK Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memiliki target kinerja sebesar 85.5%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 98.19%, yang menunjukan bahwa seluruh sampel Sediaan Farmasi sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian indikator persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 114.84%, dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor yang dapat mempengaruhi realisasi capaian, seperti pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel Sediaan Farmasi berisiko yang telah berjalan sangat optimal dan sesuai dengan pedoman serta standar yang ditetapkan.

Realisasi sampel Sediaan Farmasi masing - masing sampai pada akhir tahun 2025 yaitu

1) Sampel Obat 16 dari target 16 sampel (100%). Pada sampel obat tidak ditemukannya sarana tidak berizin online yang menjual obat keras sehingga diajukan perubahan sarana tidak berizin online menjadi offline.
2) Sampel Obat Bahan Alam termasuk Kuasi 11 dari target 11 sampel (100%)
3) Sampel Suplemen Kesehatan 5 dari target 5 sampel (100%)
4) Sampel Kosmetik 28 dari target 27 sampel (104%)

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	85.5	98.19	114.84	Tidak Dapat Disimpulkan

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.5	98.19	102.81	Tercapai/ Melampaui ▲

IKSK Persentase sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan menunjukan kinerja yang sangat baik. Target renstra yang telah ditetapkan sebesar 90.5%, sementara realisasi capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98.18%. Hal ini menunjukan bahwasanya seluruh sampel Sediaan Farmasi berisiko telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan capaian kinerja tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 102.81% yang menunjukan bahwa realisasi kinerja sudah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan pada Renstra BPOM 2025-2029. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1) Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan.
2) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling dan pengawasan penandaan sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
3) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Balai Besar POM Surabaya dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu BBPOM di Kupang.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1) Mengajukan permohonan perubahan proporsi renlak sampling/ kategori sampling ke direktorat terkait:
   a) Sampel Obat khususnya Vaksin
   b) Sampel Obat Bahan Alam

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Sosialisasi/ Diseminasi/ Sharing/ Pelatihan bagi petugas pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2) Rencana dan evaluasi hasil pelatihan
3) Monitoring dan evaluasi internal bulanan
4) Verifikasi pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut oleh Ketua Tim

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		1. Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan. 2. Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling dan pengawasan penandaan sampel Sediaan	1. Pengambilan sampel sesuai dengan pedoman sampling untuk masing-masing komoditi. 2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan bagi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur guna meningkatkan kompetensi, pemahaman, dan kemandirian dalam pelaksanaan sampling serta pengawasan penandaan sampel Sediaan	desember 2026	Y	SDM-05	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

			Farmasi dan Pangan Olahan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan. 3. Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Balai Besar POM Surabaya dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu BBPOM di Kupang.	Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 3. Melaksanakan penguatan koordinasi dan kerja sama teknis dengan Balai Besar/Balai penguji, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengujian dan meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.				

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1) Kegiatan Sampling dilakukan sesuai dengan Renlak dan Pedoman Sampling, dan kendala yang dihadapi di koordinasikan dengan KMEI dan ditwas terkait

2) Melaksanakan *on job training* (OJT) sampling Sediaan Farmasi Terhadap personil baru.

3) Personil yang melakukan kegiatan sampling telah mengikuti Pelatihan Pedoman Sampling dan Pengujian melalui modul E-learning IDEAS dan memperoleh sertifikat.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan, yang tidak termasuk pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko merupakan sampel yang dipilih berdasarkan hasil evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Yang dimaksud dengan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sampel yang telah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta

ditindaklanjuti berdasarkan pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya yang berlaku. Pemeriksaan dan pengujian sesuai Pedoman Sampling meliputi kesesuaian target sampel Unit Pelaksana Teknis (UPT), kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, serta ketepatan pelaporan kegiatan sampling dan pengujian.

Adapun tindak lanjut sesuai pedoman pengawasan atau ketentuan lainnya antara lain mencakup tindak lanjut terhadap produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian dan/atau produk Tidak Izin Edar (TIE), rusak, atau kedaluwarsa; pembinaan terhadap sarana distribusi dan/atau sarana produksi; pemeriksaan sarana produksi dan/atau sarana distribusi terhadap implementasi CPPOB/CPerPOB yang terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS; koordinasi dengan pusat dan lintas UPT dalam penyampaian hasil uji produk TMS; serta tindak lanjut terhadap sampel TIE, rusak, atau kedaluwarsa, termasuk melalui upaya persuasif kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan produk secara sukarela dan langkah lain guna memastikan produk tersebut tidak beredar.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	86.33	115.11	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi IKSK Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Tahun 2025 mencapai 86,33% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko telah melampaui target yang direncanakan.

Selama tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sebanyak 60 sampel pangan olahan berisiko sebagai dasar pelaksanaan tindak lanjut sesuai ketentuan. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 115,11%, dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor yang dapat mempengaruhi realisasi capaian, seperti pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko yang telah berjalan sangat optimal dan sesuai dengan pedoman serta standar yang ditetapkan.

Dari sejumlah sampel yang disampling terdapat 3 sampel AMDK yang TMS parameter Mikrobiologi dan 1 sampel AMDK yang TMS parameter Mikrobiologi dan Bromat.

Selain itu terdapat 4 sampel Pangan Olahan yang TMS parameter Mikrobiologi dan 1 sampel mengandung DNA Porcine.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	75	86.33	115.11	Tidak Dapat Disimpulkan

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKSK baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	86.33	104.01	Tercapai/ Melampaui 

IKSK Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai Ketentuan menunjukan kinerja yang sangat baik. Target renstra yang telah ditetapkan sebesar 83%, sementara realisasi capaian kinerja tahun 2025 sebesar 86.33%. Hal ini menunjukan bahwasanya seluruh sampel Pangan Olahan berisiko telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan capaian kinerja tersebut, persentase capaian kinerja mencapai 104.01% yang menunjukan bahwa realisasi kinerja sudah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan pada Renstra BPOM 2025-2029. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1) Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2025 untuk masing - masing komoditi yang telah ditetapkan.

2) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling dan pengawasan penandaan sampel pangan olahan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
3) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Balai Besar POM Surabaya dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu BBPOM di Kupang.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah mengajukan permohonan perubahan proporsi renlak sampling/ kategori sampling ke direktorat terkait:

1) Sampel Pangan Olahan dengan Kategori mengandung sorbitol,
2) Sampel PIRT dan Sampel Pangan *Frozen*

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Sosialisasi/ Diseminasi/ Sharing/ Pelatihan bagi petugas pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2) Rencana dan evaluasi hasil pelatihan
3) Monitoring dan evaluasi internal bulanan
4) Verifikasi pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut oleh Ketua Tim

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	1. Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan.	1. Pengambilan sampel sesuai dengan pedoman sampling untuk masing-masing komoditi. 2. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan bagi	Desember 2026	Y	SDM-05	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

			2. Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling dan pengawasan penandaan sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan. 3. Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Balai Besar POM Surabaya dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai Besar POM di Kupang.	petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur guna meningkatkan kompetensi, pemahaman, dan kemandirian dalam pelaksanaan sampling serta pengawasan penandaan sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. 3. Melaksanakan penguatan koordinasi dan kerja sama teknis dengan Balai Besar/Balai penguji, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengujian dan meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan				

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel Pangan Olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1) Kegiatan Sampling dilakukan sesuai dengan Renlak dan Pedoman Sampling, dan kendala yang dihadapi di koordinasikan dengan direktorat pengawas sarana peredaran pangan olahan dan direktorat pengawas sarana produksi pangan olahan.
2) Melaksanakan *on job training* (OJT) sampling Pangan Olahan Terhadap personil baru.
3) Personil yang melakukan kegiatan sampling telah mengikuti Pelatihan Pedoman Sampling dan Pengujian melalui modul E-learning IDEAS dan memperoleh sertifikat.
4) Melakukan evaluasi penerimaan sampel di masing-masing komoditi per bulan
5) Koordinasi dengan pusat, balai penguji dan lintas UPT lain terkait hasil pengujian sampel yang TMS.

3. Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan merupakan sampel pangan yang diduga sebagai penyebab terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi, atau diduga menyebabkan dua orang atau lebih mengalami sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel tersebut dapat berupa pangan olahan dalam kemasan maupun pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM, dengan sumber sampel berasal dari internal BPOM dan/atau eksternal BPOM seperti Dinas terkait dan Kementerian/Lembaga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Baik

Realisasi Indikator IKSK Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Tahun 2025 dimana terdapat 9 sampel KLB dari Loka POM di Kabupaten Sumba Timur mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2025, seluruh sampel KLB yang terjadi telah dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sebagai bagian dari upaya respon cepat terhadap KLB. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 100% dan berada dalam kategori baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	2024	-	-	-	-
	2025	100	100	100	Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Tercapai/ Melampaui 

IKSK Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target Renstra yang ditetapkan sebesar 100% telah terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sampel KLB keracunan pangan telah dilakukan pengujian sesuai standar yang berlaku oleh UPT. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 100%, yang berarti telah memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025–2029. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1) Koordinasi yang baik bersama stakeholder khususnya Dinas Kesehatan setempat terkait laporan investigasi dan BBPOM di Kupang sebagai balai koordinator.
2) Telah ditetapkan SK Tim Gerak Cepat KLB Internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah melakukan koordinasi/ advokasi ke OPD pemerintah daerah untuk dapat dibentuk dan disahkan SK Tim Gerak Cepat KLB di setiap Kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risikoBeredarnya produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Inovasi Kasipaman
2) KIE terkait Obat dan Makanan
3) Pelaksanaan sanksi administratif

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala /Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	1. Koordinasi yang baik bersama stakeholder khususnya Dinas Kesehatan setempat terkait laporan investigasi dan BBPOM di Kupang sebagai balai koordinator. 2. Menyusun SK Tim Gerak Cepat KLB Internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	1. Telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, 2. Telah dilakukan penyusunan SK Tim Gerak Cepat KLB internal dan advokasi ke pemerintah daerah untuk pembentukan Tim Gerak Cepat KLB Kabupaten	Desember 2026	Y	O-43	Beredarnya produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT sesuai ketentuan yaitu adanya monev kinerja yang dilakukan setiap bulan dan telah dilakukan pendekatan melalui komunikasi WhatsApp dengan PIC Puskesmas dan Dinas Kesehatan bagian Epidemiologi Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih

menggunakan metode *targeted* berbasis analisis risiko sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku. Yang dimaksud dengan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sampel yang telah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta ditindaklanjuti berdasarkan pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya. Pemeriksaan dan pengujian sesuai pedoman sampling meliputi kesesuaian target sampel Unit Pelaksana Teknis (UPT), kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel, serta ketepatan pelaporan kegiatan sampling dan pengujian.

Adapun tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat, baik berupa produk Tidak Izin Edar (TIE), rusak, kedaluwarsa, maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil pengujian, yang ditujukan kepada pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) serta dikoordinasikan dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dan DPM-PTSP sebagai OPD penerbit SPP-IRT, dan/atau dilaporkan kepada Pusat apabila merupakan kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	92	122.67	Tidak Dapat Disimpulkan

Target IKSK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 75%, sampai pada akhir tahun 2025 realisasi mencapai 92%. Realisasi yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa seluruh sampel PIRT yang disampling dan diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 122.67% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor yang dapat mempengaruhi realisasi capaian, seperti pelaksanaan pengawasan, ketepatan waktu pengambilan dan pelaporan sampel serta tindak lanjut terhadap sampel produk PIRT berisiko yang telah berjalan sangat optimal dan sesuai dengan pedoman serta standar yang ditetapkan.

Pelaksanaan sampling PIRT yang ditargetkan hingga TW II telah dilakukan sesuai target yaitu 5 sampel. Ditemukan 4 sampel produk PIRT dengan hasil evaluasi penandaan TMK Minor.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	75	92	122.67	Tidak Dapat Disimpulkan

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92	108.23	Tercapai/ Melampaui

IKSK Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan hasil kinerja yang sangat optimal. Target Renstra sebesar 85% pada tahun 2025 berhasil dilampaui dengan realisasi capaian sebesar 92%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa seluruh sampel PIRT berisiko telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan persentase capaian kinerja sebesar 108,23%, indikator ini tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPOM 2025–2029. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling dan Penguatan koordinasi dengan balai koordinator, yaitu BBPOM di Kupang.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah dapat dilakukan pembuatan renlak sampling tahunan untuk sampel PIRT dari hasil survey sarana PIRT yang masih beroperasi di wilayah pengawasan.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Beredarnya produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Inovasi Kasipaman

2) KIE terkait Obat dan Makanan

3) Pelaksanaan sanksi administratif

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagaiRisiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Melakukan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling dan Penguatan koordinasi dengan balai koordinator,yaitu BB POM di Kupang.	Telah dilakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan penguatan koordinasi dengan balai koordinator, yaitu BBPOM di Kupang.	Desember 2026	Y	O-43	Beredarnya produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1. Kegiatan Sampling dilakukan sesuai dengan Renlak dan Pedoman Sampling, dan kendala yang dihadapi di koordinasikan dengan ditwas dan Balai Koordinator terkait.
2. Melaksanakan *on job training* (OJT) sampling Pangan Olahan Terhadap personil baru.
3. Personil yang melakukan kegiatan sampling telah mengikuti Pelatihan Pedoman Sampling dan Pengujian melalui modul E-learning IDEAS dan memperoleh sertifikat.
4. Koordinasi terhadap produk yang telah disampling kepada Dinas Kesehatan di wilayah kerja, agar tidak terjadi *double* sampling dengan sampling yang dilakukan

oleh Dinas Kesehatan. Selain itu juga terkait pembinaan kepada pelaku usaha dikarenakan hasil evaluasi penandaan sampel kategori TMK Minor (4 sampel).

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan/atau distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, dan kefarmasian, baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi pelaku usaha, baik badan hukum maupun perorangan, serta lintas sektor yang terdiri dari pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, dan institusi lain yang terkait dengan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, rekomendasi penghentian sementara kegiatan (PSK), pencabutan izin atau pencabutan Nomor Izin Edar (NIE), serta tindak lanjut kasus lainnya yang bersumber dari hasil pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana kefarmasian, hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan kepada media lokal atau KPID, hasil pengawasan label, penanganan kasus, maupun pengaduan konsumen.

Output yang diharapkan oleh petugas setelah menerbitkan keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi adalah tindak lanjut dari pemangku kepentingan. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	75	75	100	Baik

Realisasi IKSK Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tepat waktu pada tahun 2025 adalah 75%, sehingga capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori Baik.

Rincian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh pelaku usaha 86,21% dan dari lintas sektor 63,79%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	2024	75	72.25	96.33	Baik
	2025	75	75	100	Baik

IKSK pada tahun 2024 ditetapkan dengan target sebesar 75 dan berhasil direalisasikan sebesar 72.25. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 96.33% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 75 dan capaian realisasi mencapai 75. Dengan demikian, persentase capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100% terhadap target yang ditetapkan. Meskipun secara nominal target pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, tingkat efektivitas pelaksanaan tetap terjaga dengan baik, karena seluruh target yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal. Secara perbandingan, kinerja pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, yang tercermin dari capaian yang lebih besar, sekaligus mempertahankan tingkat pencapaian yang sangat baik dengan terpenuhinya seluruh target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	85	75	88.23	Akan Tercapai

IKSK Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder menunjukkan capaian kinerja yang baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan. Target Renstra sebesar 85% pada tahun 2025 terealisasi sebesar 75%.

Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 88,23% terhadap target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh stakeholder, meskipun masih terdapat selisih yang perlu dioptimalkan untuk mencapai target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra BPOM 2025–2029. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan akan mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan. Hasil dengan kriteria “Baik” pada menunjukkan bahwa feedback / tindak lanjut atas hasil pengawasan dari pelaku usaha maupun instansi terkait sudah baik.

Beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku kepentingan.
2) Keterbatasan akses komunikasi dan akses transportasi terutama pada sarana yang ada di wilayah terpencil dan terluar.
3) Kurangnya komitmen dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pemenuhan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Rendahnya Tindak Lanjut / *Feedback* dari lintas sektor terhadap Rekomendasi hasil pengawasan obat dan makanan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Advokasi pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM)
2) Monitoring dan evaluasi rencana aksi TKPPOM
3) Monitoring dan evaluasi CAPA

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	-	Melakukan pendekatan secara persuasif ke instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan.	Melakukan pendekatan secara persuasif ke instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan	Desember 2026	Y	SDM-06	Rendahnya Tindak Lanjut / Feed back dari lintas sektor terhadap Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah dengan dilakukan Rapat Koordinasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilaksanakan tiap semester. Selain itu juga dilakukan pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag dan DPMPTSP masing masing kabupaten kota. Khususnya kepada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian telah dilakukan bimtek dan pendampingan pembuatan *Corrective Action Preventive Action* (*CAPA*).

6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

IKSK ini mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dikategorikan berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, serta mencakup aspek pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi seluruh fasilitas yang memproduksi pangan olahan

dengan izin edar MD, izin edar IRTP, pangan olahan untuk tujuan ekspor, maupun sebagai bahan baku produksi pada sarana lain.

Pemeriksaan dan tindak lanjut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dinyatakan sesuai ketentuan apabila didukung oleh ketersediaan serta pengelolaan data sarana produksi pangan olahan yang memadai, pemenuhan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait, serta pedoman lainnya. Kesesuaian tersebut antara lain dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaan tindak lanjut dan kesesuaian bentuk tindak lanjut, termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113.64	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi IKSK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100, dengan capaian terhadap target adalah 113,64% kategori Tidak dapat disimpulkan. Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai 100% (2 sarana IRTP, 1 sarana Pangan MD sebagai pemeriksaan rutin dan 1 sarana Pangan MD untuk sertifikasi diperiksa, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan). Capaian realisasi tersebut dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan pengawasan sarana produksi Pangan Olahan serta komitmen petugas dalam memastikan pengawasan sarana produksi Pangan Olahan di periksa secara tepat waktu dan diberikan grading dengan tepat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	88	100	113.64	Tidak Dapat Disimpulkan

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	100	112.35	Tercapai/ Melampaui

IKSK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target Akhir Renstra sebesar 89%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 112.35% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi pangan olahan yang menjadi objek pengawasan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan optimal.
2) Penguatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu BBPOM di Kupang.
3) Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait.
4) Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator Persentase sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten. Selain itu melakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1. Sosialisasi/ Diseminasi/ Sharing/ Pelatihan bagi petugas pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Rencana dan evaluasi hasil pelatihan
3. Monitoring dan evaluasi internal bulanan
4. Verifikasi pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut oleh Ketua Tim

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	1. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan optimal. 2. Penguatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu BBPOM di Kupang. 3. Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. **4.** Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan	1. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan sudah dilaksanakan secara konsisten dan optimal. 2. Penguatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu BBPOM di Kupang. 3. Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. 4. Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten	Desember 2026	Y	SDM-05	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

			Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten.					

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah dilakukan kegiatan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten

7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi Yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi merupakan sarana atau fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan kegiatan distribusi sediaan farmasi. Sarana tersebut meliputi fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat, antara lain Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian; fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, apotek, toko obat, dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri atas usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotek, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; serta fasilitas distribusi kosmetik yang meliputi fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana atau fasilitas yang diperiksa merupakan jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi maupun penyerahan obat yang telah dilakukan pemeriksaan pada tahun berjalan. Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan, hingga pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut dinyatakan sesuai ketentuan apabila dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi perundang-undangan yang berlaku, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi Yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	97.07	104.38	Sangat Baik

Realisasi hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi tahun 2025 sebesar 97,07% dengan capaian sebesar 104,38%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit, Puskesmas) dilakukan pemeriksaan sarana dalam rangka intensifikasi pengawasan psikotropika pada SIPT sehingga terhitung sebagai hasil pemeriksaan rutin, sehingga jumlah sarana pemeriksaan melebihi jumlah target awal menjadi 43 sarana.

Target Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi total sebanyak 52 sarana, sarana distribusi OBA dan SK masing - masing 1 sarana, sarana distribusi kosmetik 14 sarana dan sarana distribusi obat serta pelayanan kefarmasian 36 sarana.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi Yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	93	97.07	104.38	Sangat Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi Yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.75	97.07	101.37	Tercapai/ Melampaui

IKSK Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target Akhir Renstra sebesar 95.75%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 97.07%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 101.37% terhadap target jangka menengah yang

ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang menjadi rencana pengawasan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan optimal.
2. Penguatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu BBPOM di Kupang.
3. Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait
4. Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi Yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu dengan melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten. Selain itu melakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1. Sosialisasi/ Diseminasi/ Sharing/ Pelatihan bagi petugas pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Rencana dan evaluasi hasil pelatihan
3. Monitoring dan evaluasi internal bulanan
4. Verifikasi pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut oleh Ketua Tim

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan

No	IKSK	Kendala /Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi Yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		1. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan optimal. 2. Penguatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu BBPOM di Kupang. 3. Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. 4. Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten	1. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan sudah dilaksanakan secara konsisten dan optimal. 2. Penguatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu BBPOM di Kupang. 3. Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. 4. Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten	Desember 2026	Y	SDM-05	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah dilakukan kegiatan kolaborasi pendampingan pelaku usaha dan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten.

8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan merupakan tempat dilakukannya berbagai kegiatan vital, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, hingga penyaluran pangan olahan. Untuk menjamin standar kualitasnya, sarana ini harus diperiksa melalui beberapa tahap sistematis yang dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan di lapangan, pelaporan hasil, hingga tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan tersebut wajib dilakukan sesuai ketentuan yang mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait. Hal ini meliputi pemenuhan target jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, ketepatan waktu dalam pelaporan, serta kesesuaian tindak lanjut, di mana tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap instruksi pertama yang diberikan segera setelah pemeriksaan sarana selesai dilakukan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96.19	113.16	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi IKSK Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 96,19 dari target sebesar 85 dengan besaran capaian 113,16% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan dan komitmen petugas dalam memastikan pemenuhan ketentuan keamanan dan mutu Pangan Olahan serta ketepatan petugas dalam memberikan tindak lanjut hasil pengawasan sudah optimal. Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada tahun 2025 sudah diperiksa 42 sarana dari target 42 sarana, dan seluruhnya telah diperiksa dan terdapat 3 hasil tindak lanjut yang tidak sesuai dengan ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	85	96.19	113.16	Tidak Dapat Disimpulkan

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96.19	101.25	Tercapai/ Melampaui

Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target Akhir Renstra sebesar 95%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 96.19%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 101.25% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh sarana distribusi pangan olahan yang menjadi objek pengawasan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan optimal.
2. Penguatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu BBPOM di Kupang.
3. Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait

4. Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan Yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu dengan melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten. Selain itu melakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1. Sosialisasi/ Diseminasi/ Sharing/ Pelatihan bagi petugas pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Rencana dan evaluasi hasil pelatihan
3. Monitoring dan evaluasi internal bulanan
4. Verifikasi pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut oleh Ketua Tim

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	1. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan optimal. 2. Penguatan koordinasi dan komunikasi baik	1. Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan sudah dilaksanakan secara konsisten dan optimal. 2. Penguatan koordinasi dan	Desember 2025	Y	SDM-05	Inkonsistensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

			secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu BBPOM di Kupang. 3. Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. 4. Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten	komunikasi baik secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu BBPOM di Kupang. 3. Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. 4. Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten				

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah dilakukan kegiatan kolaborasi pendampingan pelaku usaha dan KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten.

9. Persentase iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Pengawasan terhadap sediaan farmasi mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari obat, bahan obat, obat bahan alam (termasuk bahannya), kosmetik, suplemen kesehatan, hingga obat kuasi. Salah satu aspek krusial dalam pengawasan ini adalah pemantauan iklan, yaitu setiap keterangan atau pernyataan mengenai produk-produk tersebut termasuk kosmetik isi ulang dan pangan olahan yang disajikan dalam bentuk visual, audio, maupun audio visual untuk kepentingan pemasaran atau perdagangan.

Pelaksanaan pengawasan iklan dilakukan melalui tahapan evaluasi yang ketat, pelaporan hasil, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan yang ditemukan. Seluruh proses ini harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, yang berarti pemeriksaan dan evaluasi wajib didasarkan pada regulasi perundang-undangan, pedoman pengawasan periklanan yang relevan, pedoman tindak lanjut, serta mematuhi waktu (timeline) yang telah ditetapkan dalam pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.17	96.30	113.07	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi IKSK Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 96,30 dari target sebesar 85,17 dengan besaran capaian 113,07% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta ketepatan petugas dalam memberikan kesimpulan terhadap iklan yang telah diawasi. Realisasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan target per masing - masing komoditi sebagai berikut pangan olahan 82 iklan, Obat 24 iklan, OBA 15 iklan, Kuasi 5 iklan, SK 10 iklan dan Kosmetik 120 iklan telah dilaporkan serta dievaluasi sesuai dengan ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	2024	-	-	-	-
	2025	85.17	96.30	113.07	Tidak Dapat Disimpulkan

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.37	96.30	104.25	Tercapai/ Melampaui

IKSK Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target Akhir Renstra sebesar 92.37%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 96.30%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 104.25% terhadap target jangka menengah yang

ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang menjadi rencana pengawasan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Komitmen petugas pengawasan menjadi kunci ketercapaian IKU pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
2) pemahaman petugas pengawasan dalam memilah kategori iklan baik dari sediaan, maupun kategori pangan menjadi salah satu faktor utama dalam ketercapaian IKU
3) Tingginya tingkat kesadaran PBF dan apotek terkait ketentuan iklan obat tertentu

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator Persentase iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan yaitu pendampingan dan sharing peraturan terkait pengawasan iklan, serta mengikuti bimtek dan melakukan sharing hasil bimtek pengawasan iklan dan label REL antar petugas.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Keterbatasan iklan/promosi yang diawasi sesuai media yang ditentukan terhadap ketentuan target yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Memperluas pengawasan iklan/promosi pada wilayah yang masih menjadi cakupan wilayah kerja LOKA sesuai peraturan perundang-undangan
2) Melakukan MONEV internal bulanan

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Persentase iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	-	1. Komitmen petugas pengawasan menjadi kunci ketercapaian IKU pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan. 2. pemahaman petugas pengawasan dalam memilah kategori iklan baik dari sediaan, maupun kategori pangan menjadi salah satu faktor utama dalam ketercapaian IKSK. 3. Tingginya tingkat kesadaran PBF dan apotek terkait ketentuan iklan obat tertentu.	1. Komitmen dari petugas dalam melaksanakan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2. pemahaman petugas pengawasan dalam memilah kategori iklan baik dari sediaan, maupun kategori pangan menjadi salah satu faktor utama dalam ketercapaian IKSK. 3. Tingginya tingkat kesadaran PBF dan apotek terkait ketentuan iklan obat tertentu.	Desember 2026	Y	S-01	Keterbatasan iklan/promosi yang diawasi sesuai media yang ditentukan terhadap ketentuan target yang telah ditetapkan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah Tersedia renlak revisi pengawasan iklan pangan dan kosmetik serta adanya kegiatan OPINI sharing pengetahuan dan diseminasi pengetahuan/ pelatihan antar petugas yang merupakan terobosan dari Agen Perubahan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang di awasi sesuai standar

Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik merupakan setiap keterangan mengenai produk tersebut yang disajikan dalam bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan, dimasukkan ke dalam, maupun menjadi bagian dari kemasannya. Pengawasan terhadap label ini dilaksanakan dengan menilai kesesuaiannya terhadap standar pencantuman peringatan kesehatan, termasuk informasi wajib pada kemasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan terhadap kemasan sampel produk yang diambil langsung dari peredaran, baik di tempat penjualan maupun distributor. Seluruh proses ini harus berjalan sesuai standar, yang berarti pemeriksaan atau evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan yang mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau, pedoman tindak lanjut, serta ketentuan lain yang berlaku.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang di awasi sesuai standar	80	88.7	110.86	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi IKSK Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah 88,7 dari target sebesar 80 dengan besaran capaian 110,86% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik serta komitmen petugas dalam memastikan pemenuhan target dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan yang sudah dilaksanakan secara optimal. IKSK ini baru mulai dilakukan pengukuran pada bulan agustus dan september berdasarkan hasil revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Jumlah target pengawasan label produk tembakau yang diawasi sebanyak 84 produk tembakau dari target tahunan 84 sampel dan 3 rokok elektronik dari target tahunan 3 sampel. Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu (SIPT diteruskan kepala balai ke pusat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya) adalah 65 dari 84 sampel (77,4%)

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang di awasi sesuai standar	2024	-	-	-	-
	2025	80	88.7	110.86	Tidak Dapat Disimpulkan

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang di awasi sesuai standar	85	88.7	104.34	Tercapai/ Melampaui

IKSK Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target Akhir Renstra sebesar 85%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 88.7%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 104.34% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukan bahwa seluruh label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang menjadi sasaran pengawasan telah melalui proses pemeriksaan serta tindak lanjut sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah Peningkatan frekuensi pengawasan di lapangan sesuai dengan rencana kerja dan pemetaan lokasi peredaran produk. Untuk meningkatkan persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang sesuai standar, langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan dengan Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas melalui pelatihan terkait regulasi pelabelan dan pengawasan tembakau/rokok elektronik.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Keterbatasan iklan/promosi yang diawasi sesuai media yang ditentukan terhadap ketentuan target yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Memperluas pengawasan iklan/promosi pada wilayah yang masih menjadi cakupan wilayah kerja LOKA sesuai peraturan perundang-undangan.
2) Melakukan MONEV internal bulanan

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	-	Peningkatan frekuensi pengawasan di	Dilakukan perluasan pengawasan di	Desember 2026	Y	S-01	Keterbatasan iklan/promosi yang diawasi sesuai media yang ditentukan

	elektronik yang di awasi sesuai standar		lapangan sesuai dengan rencana kerja dan pemetaan lokasi peredaran produk tembakau/rokok elektronik.	lapangan sesuai dengan rencana kerja dan pemetaan lokasi peredaran produk tembakau/rokok elektronik.				terhadap ketentuan target yang telah ditetapkan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah Tersedia renlak revisi pengawasan iklan pangan dan kosmetik serta adanya kegiatan OPINI sharing pengetahuan dan diseminasi pengetahuan/ pelatihan antar petugas yang merupakan terobosan dari Agen Perubahan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

11. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian masing-masing UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan ini mencerminkan tingkat konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR secara menyeluruh di setiap wilayah kerja.

Komponen penilaian meliputi

a) Penggunaan Tools Pengawasan AMR sebagai instrumen monitoring dan evaluasi
b) Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemangku kepentingan
c) Pelaksanaan advokasi dalam rangka memperkuat komitmen dan dukungan lintas sektor
d) Pelaksanaan publikasi sebagai bentuk diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat maupun stakeholder terkait

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104.17	104.17	Sangat Baik

Pengendalian AMR di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur terealisasi 104,17% dengan capaian sebesar 104,17% di tahun 2025. Kegiatan pengendalian AMR terbagi menjadi empat kegiatan yaitu penggunaan tools pengawasan AMR, bimbingan teknis, advokasi lintas sektor dan publikasi AMR. Tools pengawasan AMR digunakan dalam kegiatan pemeriksaan sarana apotek sebanyak 10 (sepuluh) sarana. Bimbingan teknis pengendalian AMR dilakukan di bulan Oktober 2025 di Kabupaten Sumba Barat Daya secara Hybrid yang dihadiri oleh apoteker penanggung jawab sarana apotek di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sumba Timur (terdiri dari 4 kabupaten) dan beberapa *stakeholder*. Advokasi lintas sektor telah dilakukan dengan bekerja sama bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati terkait pengendalian AMR. Sedangkan publikasi AMR telah dilakukan sebanyak dua kali di bulan September dan Desember tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	2024	-	-	-	-
	2025	100	104.17	104.17	Sangat Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104.17	104.17	Tercapai/ Melampaui 

IKSK Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target Akhir Renstra sebesar 100%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 104.17%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 104.17% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR di wilayah UPT telah mencapai target yang direncanakan dari mulai penggunaan tools hingga pelaksanaan bimtek, advokasi dan publikasi sebagai bentuk diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dan stakeholder. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah telah dilakukan Pengawalan Penerbitan Surat Edaran Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, pemantauan dan komunikasi proaktif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten di wilayah Sumba guna memastikan proses rapat internal dan penerbitan nomor surat untuk SE dapat berjalan sesuai jadwal yang diharapkan.

Penyebab mendasar yang menjadi penghambat dan tertundanya rilis Surat Edaran Bupati terkait AMR adalah panjangnya proses birokrasi dan koordinasi antarinstansi setelah pelaksanaan kegiatan inisiasi. Kegiatan pertemuan advokasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai pintu gerbang rekomendasi kebijakan. Meskipun pertemuan awal telah dilaksanakan, pengusulan *draft* kebijakan (SE) dari Dinkes kepada Sekretariat Daerah (Setda) dan Tim Ahli Bupati memerlukan serangkaian tahapan telaah staf, kajian dampak, hingga persetujuan akhir. Setiap tahapan ini memerlukan waktu yang signifikan, sehingga dokumen Surat Edaran belum dapat dirilis secara resmi oleh Bupati sebelum akhir Oktober 2025.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Terjadinya penyalahgunaan sampah obat. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) KIE terkait Obat
2) Kerjasama dengan organisasi profesi dan sarana pelayanan kefarmasian
3) Pelaksanaan kampanye Ayo Buang Sampah Obat (ABSO)

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan

No	IKSK	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah daerah sumba timur	akan melakukan pemantauan dan komunikasi proaktif dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Sumba	Desember 2026	Y	R-08	Terjadinya penyalah gunaan sampah obat

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah adanya komunikasi proaktif dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah daerah baik melalui koordinasi langsung maupun melalui pesan WhatsApp.

12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ditetapkan oleh BPOM sebagai acuan peningkatan kapasitas laboratorium di seluruh Indonesia yang diukur melalui sistem agregasi empat tingkatan. Tingkat 4 (Balai Regional) di tujuh wilayah utama bertugas menjalankan pengujian unggul dan koordinasi konfirmasi, sementara Tingkat 3 fokus pada pengujian dasar serta parameter non-unggul. Untuk level kabupaten/kota, Tingkat 2 dan 1 berperan dalam pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dengan cakupan wilayah kerja yang lebih spesifik. Pemenuhan standar ini dibedakan berdasarkan kompleksitas layanannya; Laboratorium Tingkat 4 dan 3 wajib memenuhi empat komponen utama yang meliputi standar ruang lingkup, peralatan, kompetensi laboratorium, serta metode yang terverifikasi. Sedangkan untuk Laboratorium Tingkat 2 dan 1, pemenuhan difokuskan pada tiga komponen dasar yaitu standar ruang lingkup, peralatan, dan kompetensi laboratorium.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	8	7.44	93	Baik

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sumba Timur diperoleh realisasi sebesar 7,44 dibandingkan dengan target 2025 sebesar 8 sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 93% dikategorikan baik. Hal ini disebabkan karena belum memiliki ruang gedung Laboratorium yang memadai. Kondisi saat ini hanya ada ruang yang disekat dengan triplek di ruang pinjam pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	2024	-	-	-	-
	2025	8	7.44	93	Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	12	7.44	62	Perlu Upaya Keras 

IKSK Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Target Akhir Renstra sebesar 12 pada tahun 2025 terealisasi sebesar 7.44 Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 62% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian tersebut

menunjukan bahwa pemenuhan standar kemampuan laboratorium belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya karena Loka POM di Kabupaten Sumba Timur belum memiliki gedung laboratorium yang memadai untuk mendukung kegiatan pengujian. Saat ini, gedung kantor masih menggunakan sistem pinjam pakai fasilitas milik Pemerintah Daerah, sehingga ruangan dan infrastruktur laboratorium belum sepenuhnya memenuhi standar. Oleh karena itu, indikator ini masuk pada kategori perlu upaya keras untuk mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa Faktor kendala dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Belum memiliki Laboratorium (Gedung kantor dan Lab yang digunakan yang dipakai merupakan gedung PEMDA yang dipinjam pakai)
2) Belum memiliki alat Laboratorium secara langkap
3) Tidak ada anggaran renovasi gedung Laboratorium yang dipinjam pakai/ gedung tidak bisa direhab berubah bentuk untuk Laboratorium.

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium adalah dilakukan koordinasi dengan Roren dan instansi pembina pusat terkait anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium serta dilakukan penyesuaian justifikasi penurunan target jika anggaran pembangunan tetap tidak ada.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Penguji terpapar bahaya kimia, fisik, biologi yang membahayakan kesehatan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Menampung limbah dalam wadah (botol bekas reagen)
2) Pemusnahan limbah oleh pihak eksternal pada tahun 2022 dan 2023
3) Menggunakan APD
4) Pengadaan daya tahan tubuh
5) MCU
6) Melakukan destruksi pada limbah patogen sebelum dibuang
7) Menyiapkan fasilitas P3K
8) Menyiapkan spil kit

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala/Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	Terbatasnya sumber daya sarana dan prasarana serta anggaran	1. Belum memiliki Laboratorium (Gedung kantor dan Lab yang digunakan yang dipakai merupakan gedung PEMDA yang dipinjam pakai). 2. Belum memiliki alat Laboratorium secara lengkap. 3. Tidak ada anggaran renovasi gedung Laboratorium yang dipinjam pakai/ gedung tidak bisa direhab berubah bentuk untuk Laboratorium.	1. Mengusulkan pembangunan dan pengadaan gedung kantor serta laboratorium permanen melalui perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap, disertai dengan koordinasi bersama Pemerintah Daerah untuk dukungan lahan maupun fasilitas, guna mendukung kemandirian dan optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan. 2. Belum memiliki alat Laboratorium secara lengkap. 3. mengusulkan anggaran untuk renovasi gedung Laboratorium yang dipinjam pakai..	Desember 2026	Y	K-31	Penguji terpapar bahaya kimia, fisik, biologi yang membahayakan kesehatan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah adanya komitmen yang baik dari penguji walaupun dengan segala keterbatasan yang ada berusaha untuk meningkatkan kemampuan pengujian dengan pelatihan online gratis yang telah tersedia.

13. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Pendampingan Kabupaten/Kota ditujukan bagi daerah yang memiliki potensi dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang

rantai pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pendampingan ini mencakup tiga langkah strategis, yaitu melakukan advokasi terkait penyelenggaraan keamanan pangan di daerah, mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (TKPPOM) di tingkat Kabupaten/Kota, serta mendampingi dan memastikan pengisian *tools* penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Sebuah Kabupaten/Kota dinyatakan berhasil didampingi apabila telah mengisi *tools* penilaian mandiri secara lengkap mencakup kriteria komitmen, perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, hingga inovasi serta mengirimkan hasil penilaian tersebut dengan nilai minimal 60 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	23	92	Baik

Target IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sebesar 25%, realisasi pada tahun 2025 adalah 23% dengan capaian 92%. Capaian ini dikarenakan pada saat pengisian *tools* penilaian mandiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sumba tengah sebesar 55,44 (masih dibawah target sebesar 60). Sehingga indikator ini masuk kedalam kategori baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	2024	-	-	-	-
	2025	25	23	92	Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	23	23	Perlu Upaya Keras 

IKSK Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman menunjukkan capaian kinerja terhadap target jangka menengah yang masih belum optimal. Target Akhir Renstra sebesar 100 pada tahun 2025 terealisasi sebesar 23% Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 23% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan dukungan sarana prasarana. Oleh karena itu, indikator ini masuk pada kategori perlu upaya keras untuk mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa Faktor kendala dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Keterbatasan data pendukung terhadap pencapaian IKU
2) Keterbatasan waktu dan kesibukan PIC Kabupaten Sumba Tengah yang menjadi target pendampingan
3) Koordinasi lintas sektor di daerah yang belum maksimal

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah dilakukan pengajuan anggaran RO baru terhadap IKU ini dan dilakukan koordinasi dan pendekatan lebih inten kepada stakeholders terkait tentunya dengan kondisi efisiensi anggaran.

No	IKSK	Kendala/Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam	Koordinasi yang belum berjalan maksimal dan	Pendekatan lebih intens kepada *stakeholders* terkait tentunya dengan	Dilakukan pendekatan dan Koordinasi yang lebih masif kepada *stakeholders* namun	Desember 2026	T	-	-

	pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	rendahnya komitmen awal untuk berpartisipasi dari masing-masing Pemda	kondisi efisiensi anggaran.	dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran				

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah adanya komitmen yang baik dari PIC Loka POM di Kabupaten Sumba Timur untuk memfollow up terhadap PIC daerah / stakeholder terkait dengan melalui komunikasi secara daring walaupun dengan segala keterbatasan yang ada.

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan ukuran keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UPT BPOM. Efektivitas ini dinilai berdasarkan indeks yang mencakup empat indikator utama, yaitu kualitas narasumber, relevansi konten informasi, tingkat pemahaman audiens, serta manfaat yang dirasakan oleh peserta. Ragam kegiatan KIE yang dievaluasi meliputi edukasi langsung secara tatap muka maupun melalui berbagai kanal seperti media sosial, media cetak, elektronik, digital, hingga media luar ruang.

Data indeks efektivitas ini diperoleh melalui survei terhadap responden masyarakat yang merupakan penerima manfaat langsung kegiatan KIE atau mereka yang pernah mengakses produk informasi BPOM dalam satu bulan terakhir. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka, penyebaran kuesioner, maupun survei daring yang kemudian diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Untuk menjamin akurasi data, penentuan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel Krejcie-Morgan dengan populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang telah diproporsikan pada setiap triwulannya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.44	88.24	100.91	Sangat Baik

Target IKSK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar 87.44, realisasi pada tahun 2025 adalah 88.24, dengan capaian 100.91%. Sehingga indikator ini masuk kedalam kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2024	-	-	-	-
	2025	87.44	88.24	100.91	Sangat Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90.93	88.24	97.04	Akan Tercapai

IKSK Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT menunjukkan capaian kinerja yang baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan. Target Renstra sebesar 90.93% pada tahun 2025 terealisasi sebesar 88.24%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 97.04% terhadap target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta stakeholder terkait keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, meskipun masih terdapat selisih yang perlu dioptimalkan untuk mencapai target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Renstra BPOM 2025–2029. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan akan mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1) Melakukan survei KIE secara langsung

   Saat dilaksanakan kegiatan KIE oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, setelah kegiatan berlangsung, peserta diminta untuk melakukan pengisian survei sesuai dengan 4 (empat) indikator efektifitas KIE yang dilakukan melalui pengisian formulir survei di web evaluasi KIE.

2) Melakukan survei KIE melalui media

   Survei efektivitas kegiatan KIE melalui media dilakukan di setiap bulannya dengan meminta masyarakat untuk melakukan penilaian mengenai konten yang telah diposting melalui sosial media sesuai dengan 4 (empat) indikator efektifitas KIE yang dilakukan melalui pengisian formulir survei di web evaluasi KIE.

3) Melakukan pemutakhiran informasi mengenai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di sosial media dan website

   Untuk memastikan informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan akurat dan up to date, maka tim sosial media selalu melakukan pemutakhiran informasi terkini berkaitan dengan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di laman sosial media maupun *website*.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1) Meningkatkan kompetensi petugas KIE dalam menyampaikan pesan/informasi. Petugas KIE sebagian besar masih berstatus CPNS, sehingga masih memiliki pengalaman yang terbatas pada kegiatan KIE. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kompetensi petugas dalam menyampaikan informasi.
2) Melakukan survey efektifitas KIE melalui platform sosial media secara rutin setiap bulan.
3) Memastikan informasi yang disampaikan kepada audiens akurat dan *up to date*, baik saat dilaksanakan KIE langsung ataupun KIE melalui sosial media.
4) Membuat alat peraga yang dapat digunakan saat pelaksanaan kegiatan KIE langsung seperti :
   a) Tiruan produk untuk KIE mengenai Cek KLIK
   b) Pembuatan poster
   c) Pembuatan alat peraga sederhana untuk KIE Keamanan Pangan

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Peserta KIE tidak memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Menetapkan agenda setting KIE
2) Pengembangan kompetensi narasumber KIE
3) Rapat Evaluasi Internal

4) Pengukuran Pretest dan Posttest peserta

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala/Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	Peningkatan kompetensi petugas KIE, Melakukan survey efektifitas KIE, Memastikan informasi yang disampaikan kepada audiens akurat dan *up to date* dan Membuat alat peraga.	Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan pembinaan KIE, disertai dengan pelaksanaan survei efektivitas KIE secara berkala, penyediaan dan pembaruan materi informasi yang akurat dan mutakhir, serta pengembangan alat peraga edukatif yang sesuai, guna meningkatkan kualitas dan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.	Desember 2026	Y	SDM-08	Peserta KIE tidak memahami materi yang disampaikan oleh narasumber

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1) Melakukan survey efektivitas KIE secara langsung setelah dilakukan kegiatan KIE yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kualitas KIE yang diberikan kepada audiens dan pemahaman audiens terhadap materi yang disampaikan oleh petugas secara langsung.
2) Melakukan survey efektivitas KIE melalui platform sosial media secara rutin di setiap bulannya untuk menilai sejauh mana kualitas KIE yang diberikan kepada

audiens dan pemahaman audiens terhadap konten yang diunggah melalui platform sosial media.

3) Melakukan pemutakhiran informasi terkini mengenai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di berbagai platform (sosial media, website) dan memastikan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

15. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Kategorisasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada sektor pangan olahan ditentukan berdasarkan besaran modal usaha di luar tanah dan bangunan, di mana Usaha Mikro memiliki modal paling banyak Rp1.000.000.000,- dan Usaha Kecil hingga Rp5.000.000.000,-. UMK Pangan Olahan dinilai telah menerapkan standar keamanan dan mutu produksi apabila mampu mengimplementasikan prinsip CPPOB yang dibuktikan dengan terbitnya Izin Penerapan (IP) CPPOB skala UMK. Sementara itu, pada sektor Obat Bahan Alam (OBA), pendampingan diarahkan agar UKOT dan UMOT mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik, mulai dari yang belum bersertifikat hingga yang ingin meningkatkan fasilitasnya, dengan indikator keberhasilan berupa diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap. Di sektor kosmetik, ruang lingkup pendampingan mencakup industri kosmetik golongan A dan B agar mampu memenuhi standar produksi yang ditandai dengan terbitnya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	6.67	6.67	100	Baik

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam (OBA) yang Baik, Kosmetik yang Baik, dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) telah mencapai hasil yang optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar 6,25, realisasi juga mencapai 6,25, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Realisasi pada tahun 2025 ini Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berhasil mendampingi dan menerbitkan sertifikat IP-CPPOB dari 1 UMKM Pangan Olahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan pendampingan UMKM telah terpenuhi

sesuai dengan perencanaan dan seluruh tahapan pendampingan telah dilaksanakan sesuai pedoman, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pendampingan serta komitmen dalam mendorong peningkatan kepatuhan UMKM terhadap penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	2024	-	-	-	-
	2025	6.67	6.67	100	Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100	6.67	6.67	Perlu Upaya Keras 

IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan menunjukkan capaian kinerja terhadap target jangka menengah yang masih belum optimal. Target Akhir Renstra sebesar 100 pada tahun 2025 terealisasi sebesar 6.67% Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 6.67% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Pada tahun 2025, pendampingan baru diberikan kepada 1 UMKM dari target kumulatif sebanyak 15 UMKM hingga akhir periode Renstra. Oleh karena itu, indikator ini masuk pada kategori perlu upaya keras untuk mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

1) Komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dalam rangka pemenuhan persyaratan registrasi izin edar.
2) Adanya kekurangan persyaratan registrasi yang membutuhkan waktu untuk dipenuhi atau diperbaiki, seperti kesalahan penulisan dalam dokumen perizinan dan perbaikan sarana.
3) Minimnya literasi digital kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha kesulitan menggunakan aplikasi yang ada.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1) Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM dengan penyesuaian dengan efisiensi Anggaran.
2) Kolaborasi dengan Stakeholder terkait literasi digital kepada pelaku usaha.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Masih ditemukan produk UMKM Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Melakukan pendampingan pelaku usaha (UMKM)
2) Melakukan Replikasi Inovasi Pepetin UMKM dari Balai Koordinator

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala/Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	-	1. Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM dengan penyesuaian dengan efisiensi Anggaran 2. Kolaborasi dengan Stakeholder terkait literasi digital kepada pelaku usaha	Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM dengan penyesuaian dengan efisiensi Anggaran	Desember 2026	Y	O-43	Masih ditemukan produk UMKM Obat dan Makanan yang tidak memiliki izin edar

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah adanya implementasi inovasi UMKM dengan melihat dan mereplikasi Inovasi BBPOM di Kupang PEPETIN UMKM 7 in 1 namun pada awal tahun ini terkendala dengan penyesuaian Efisiensi anggaran sehingga pendampingan dilakukan dengan zoom meeting di hari sesuai kesepakatan dengan pelaku usaha dan petugas pendampingan.

16. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Capaian kinerja penyidikan dihitung melalui mekanisme pembobotan terhadap setiap tahapan dalam proses penyelesaian berkas perkara, sekaligus mempertimbangkan pencapaian target perkara yang ditetapkan. Adapun tahapan dan bobot yang diberikan adalah sebagai berikut:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%.
b) Tahap I (penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum/JPU) sebesar 40%.
c) P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU) sebesar 30%.
d) Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU) sebesar 15%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di UPT	70	55	78.57	Cukup

Realisasi IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di UPT adalah 55% dari target yang ditetapkan 70%, sehingga capaiannya sebesar 78.57%. Sehingga masuk ke dalam kategori cukup. Pada tahun 2025 target Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yaitu 1 perkara, dengan hasil di akhir tahun progres telah sampai pada Tahap 1.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di UPT	2024	-	-	-	-
	2025	70	55	78.57	Cukup

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di UPT	78	55	70.51	Akan Tercapai 

IKSK Persentase Keberhasilan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT menunjukkan capaian kinerja yang baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan. Target akhir Renstra sebesar 78% pada tahun 2025 terealisasi sebesar 55%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 70.51% terhadap target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyidikan telah berjalan sesuai prosedur, namun efektivitas penyelesaian perkara belum optimal. Perkara yang ditangani saat ini masih berada pada tahap P-19 (pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi), sehingga proses penyidikan masih memerlukan pemenuhan petunjuk dan kelengkapan administrasi maupun materiil sebelum dinyatakan lengkap (P-21). Selain itu, pada tahun 2025 terdapat keterbatasan SDM penyidik yang berdampak pada beban kerja dan waktu penyelesaian perkara. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan akan mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu sebagai berikut :

1) Terdapat 1 perkara di wilayah kerja sumba timur dikembalikan SPDPnya karena Saksi Ahlinya meninggal dunia.

2) Kurangnya SDM (Penyidik) di Loka POM Kab. Sumba Timur

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah Membuat usulan untuk pelatihan Penyidik staf Loka POM di Kab. Sumba Timur.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Tuntutan hukum dari pelaku usaha terhadap hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Pendampingan/ bantuan dari Biro Hukum dan Organisasi BPOM
2) Melakukan Replikasi Inovasi dari Balai Koordinator

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	Indikator	Kendala/Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan di UPT	Terdapat 1 perkara di wilayah kerja sumba timur dikembalikan SPDPnya dan akan diproses ulang setelah pemenuhan BA saksi ahli baru	1. diusulkan untuk pergantian saksi ahli 2. Diusulkan untuk pelatihan Penyidik untuk staf Loka Sumba TImur	1. diusulkan untuk pergantian saksi ahli 2. Diusulkan untuk pelatihan Penyidik untuk staf Loka Sumba TImur	Desember 2026	Y	R-07	Tuntutan hukum dari pelaku usaha terhadap hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah pengambilan keterangan tambahan tersangka sesuai dengan petunjuk belum dilaksanakan karena tersangka di luar pulau sumba, pengambilan keterangan saksi dari organisasi profesi IAI. sehingga capaian untuk IKU ini tidak dapat tercapai dengan baik.

17. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu Analisis Penelusuran Siber dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal. Analisis Penelusuran Siber merupakan hasil kegiatan patroli siber dan penjejakan digital (profiling siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di wilayah kerja UPT BPOM. Hasil kegiatan ini dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan.

Sementara itu, Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang mencakup penyusunan laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan serta laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan, masing-masing disampaikan satu kali dalam satu tahun.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	93.84	104.27	Sangat Baik

Realisasi diperoleh dari nilai ketepatan waktu pelaporan siber sebesar 45,84% dari bobot penilaian sebesar 50%, nilai kualitas analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan sebesar 23% dari bobot 25% dan nilai tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal sebesar 25% dari bobot nilai 25%, sehingga jumlah keseluruhan dari realisasi 93,84% sehingga capaiannya sebesar 104,27% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	2024	-	-	-	-
	2025	90	93.84	104.27	Sangat Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	93.84	99.78	Akan Tercapai 

IKSK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar menunjukkan capaian kinerja yang baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan. Target akhir Renstra sebesar 94% pada tahun 2025 terealisasi sebesar 93.84%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 99.78% terhadap target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyusunan dan penyelesaian laporan analisis kejahatan telah dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan substansi, maupun kualitas analisis. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan akan mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu sebagai berikut :

1) Pelaporan patroli siber tidak dilakukan secara tepat waktu yang dilakukan setiap bulannya sehingga hasil akhirnya 45,84% dari bobot 50%.
2) Menindaklanjuti semua rekomendasi cegah tangkal yang diberikan pada semester 2 (dua) tahun 2025
3) Membuat analisis kerawanan kejahatan kewilayahan dan dinilai oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1) Melakukan pelaporan analisis patroli siber secara tepat waktu setiap bulannya
2) Melakukan tindak lanjut semua rekomendasi cegah tangkal secara tepat
3) Membuat analisis kerawanan kejahatan kewilayahan tahun 2026 secara baik sesuai dengan pedoman agar nilai kualitas analisis dapat tercapai sesuai target.

No	Indikator	Kendala/ Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	-	1. Melakukan pelaporan analisis patroli siber secara tepat waktu setiap bulannya. 2. Melakukan tindak lanjut semua rekomendasi cegah tangkal secara tepat. 3. Membuat analisis kerawanan kejahatan kewilayahan tahun 2026 secara baik sesuai dengan pedoman agar nilai kualitas analisis dapat tercapai sesuai target.	1. Melaporkan secara rutin dan sesuai timeline hasil pengawasan patroli siber dan profiling kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 2. Melakukan tindak lanjut semua rekomendasi cegah tangkal secara tepat. 3. Membuat analisis kerawanan kejahatan kewilayahan tahun 2026 secara baik sesuai dengan pedoman agar nilai kualitas analisis dapat tercapai sesuai target.	Desember 2026	**T**	**-**	**-**

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan :

1) Kegiatan patroli siber yang dilaporkan secara tepat waktu setiap bulannya
2) Melakukan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal
3) Membuat analisis kerawanan kejahatan kewilayahan secara baik sesuai dengan pedoman.

18. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah berdasarkan enam aspek penilaian, yaitu Kebijakan Pelayanan dengan bobot 24%, Profesionalitas Sumber Daya Manusia sebesar 25%, Sarana dan Prasarana sebesar 18%,

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) sebesar 11%, Konsultasi dan Pengaduan sebesar 10%, serta Inovasi sebesar 12%.

Penilaian IPP dilakukan melalui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) BPOM yang mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP), sehingga hasil pengukuran dapat menggambarkan tingkat kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51	3.86	109.97	Sangat Baik

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,86 dari target 3.51 sehingga persentase capaian sebesar 109,97% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	2024	-	-	-	-
	2025	3.51	3.86	109.97	Sangat Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	3.7	3.86	104.32	Tercapai/ Melampaui

IKSK Indeks Pelayanan Publik UPT menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik terhadap target jangka menengah. Target Akhir Renstra sebesar 3.7, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3.86. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai

104.32% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di UPT telah dilaksanakan secara optimal, baik dari aspek standar pelayanan, kompetensi petugas, sarana dan prasarana, sistem pengelolaan pengaduan, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah :

1) Telah tersedianya standar pelayanan di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
2) Telah tersedianya SDM yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik. Petugas telah melakukan pelatihan pelayanan prima melalui platform IDEAS.
3) Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik baik secara elektronik maupun nonelektronik
4) Telah dilakukan pemutakhiran informasi di subsite maupun media sosial
5) Petugas telah menindaklanjuti seluruh layanan permintaan informasi dan pengaduan

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1) Melakukan penyediaan fasilitas penunjang pelayanan publik.
2) Mengadakan pelatihan untuk menunjang komunikasi dengan kelompok rentan seperti pelatihan bahasa isyarat.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Komplain dari pelaku usaha atas hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Sosialisasi/ Diseminasi/Sharing / Pelatihan tentang pelayan publik/ prima
2) Penyediaan media konsultasi dan pengaduan

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala/ Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	1. Melakukan penyediaan fasilitas penunjang pelayanan publik. 2. Mengadakan pelatihan untuk menunjang komunikasi dengan kelompok rentan seperti pelatihan bahasa isyarat.	1. Melakukan penyediaan fasilitas penunjang pelayanan publik. 2. Mengadakan pelatihan untuk menunjang komunikasi dengan kelompok rentan seperti pelatihan bahasa isyarat	Desember 2026	Y	R-02	Komplain dari pelaku usaha atas hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik yaitu *:*

1) Kegiatan pelatihan petugas pelayanan publik melalui platform IDEAS
2) Pemutakhiran berkala informasi di subsite maupun sosial media
3) Melakukan input rutin pelayanan dan menindaklanjuti layanan secara tepat waktu.

19. Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko sebagai bagian dari upaya pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan sistematis yang mencakup budaya, proses, dan struktur organisasi untuk menentukan langkah atau tindakan terbaik dalam menghadapi berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

Tingkat maturitas manajemen risiko menggambarkan kondisi atau tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi, yang terbagi ke dalam lima kategori, yaitu Risk Naive, Risk Aware, Risk Defined, Risk Managed, dan Risk Enabled. Penilaian tingkat maturitas ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan desain dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai sebagaimana diharapkan, memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja dan manfaat penerapan manajemen risiko, serta memastikan pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko secara konsisten dan berkelanjutan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	2	1.84	92	Baik

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur mendapatkan nilai Indeks manajemen risiko sebesar 1,84 dari target 2 sehingga persentase capaian sebesar 92% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	2024	-	-	-	-
	2025	2	1.84	92	Baik

Tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	2.2	1.84	83.63	Akan Tercapai 

IKSK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM menunjukkan capaian kinerja yang baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan. Target akhir Renstra sebesar 2.2 pada tahun 2025 terealisasi sebesar 1.84. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 83.63% terhadap target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di lingkungan UPT BPOM telah dilaksanakan melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara terstruktur. Namun demikian, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal konsistensi penerapan, efektivitas mitigasi risiko, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran risiko pada masing-masing unit kerja. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan akan mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1) Melakukan penetapan selera risiko yang belum ditetapkan sebelumnya sebagai pedoman dalam penyusunan daftar risiko untuk menentukan level risiko pada setiap aspek yang telah dianalisis.
2) Melakukan studi di UPT lain terkait manajemen risiko dan melakukan diseminasi hasil pembelajaran kepada tim manajemen risiko untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap manajemen risiko.
3) Diperlukan analisis risiko lebih dalam pada masing - masing fungsi dan melakukan review dari masing-masing risiko yang telah diidentifikasi.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1) Melakukan analisis risiko pada masing-masing fungsi yang terdapat di unit kerja.
2) Tim auditor internal melakukan review terhadap daftar risiko yang telah disusun oleh masing-masing fungsi yang terdapat di unit kerja.
3) Mengadakan pembinaan oleh pusat terkait dengan manajemen risiko guna meningkatkan pemahaman keseluruhan pegawai dalam melakukan analisis risiko.
4) Melakukan review bersama oleh tim manajemen risiko terkait daftar risiko secara rutin di setiap semester.

No	IKSK	Kendala/Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	keterbatasan Kompetensi SDM Loka POM di Kab. Sumba Timur yang memahami terkait manajemen risiko.	5) Melakukan analisis risiko pada masing-masing fungsi yang terdapat di unit kerja. 6) Mengadakan pembinaan oleh pusat terkait dengan manajemen risiko guna meningkatkan pemahaman keseluruhan pegawai dalam melakukan analisis risiko.	5. Melakukan analisis risiko pada masing-masing fungsi yang terdapat di unit kerja. 6. Mengadakan pembinaan oleh pusat terkait dengan manajemen risiko guna meningkatkan pemahaman keseluruhan pegawai dalam melakukan analisis risiko.	Desember 2026	T	-	-

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah

1) Melakukan kegiatan pelatihan melalui platform IDEAS mengenai manajemen risiko.
2) Melaksanakan studi di UPT lain terkait manajemen risiko dan melakukan diseminasi hasil pembelajaran kepada tim manajemen risiko untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap manajemen risiko
3) Melakukan review risiko di tiap semester oleh tim manajemen risiko.

20. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Implementasi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	Baik

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100% dengan kategori baik.

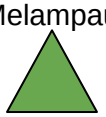
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	2024	100	100	100	Baik
	2025	100	100	100	Baik

Tahun 2024, target IKSK kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT sesuai standar ditetapkan adalah 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025, target kembali ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja tahun 2025 juga mencapai 100% terhadap target. Hal ini menegaskan adanya konsistensi dalam implementasi rencana aksi reformasi birokrasi serta kemampuan mempertahankan kinerja pada tingkat yang sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	Tercapai/ Melampaui 

IKSK Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik terhadap target jangka menengah. Target Akhir Renstra sebesar 100%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 100% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan waktu yang direncanakan. Pelaksanaan tersebut mencakup pemenuhan dokumen dukung, implementasi program reformasi birokrasi, penguatan tata kelola, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan pengawasan dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1) Melakukan penetapan target dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang mencakup 7 pokja area perubahan.
2) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan untuk pembuatan dan realisasi dokumen rencana aksi
3) Diperlukan analisis rencana aksi dalam pada masing - masing fungsi dan melakukan review dari masing-masing rencana aksi yang telah diidentifikasi dan dibagi.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1) Melakukan pelatihan terkait Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai baik dengan pelatihan ideas maupun bimbingan dari BPOM Pusat.

2) Tim Reformasi Birokrasi melakukan review terhadap hasil kerja yang telah direalisasikan setiap Bulan.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Adanya keberpihakkan dan kebocoran informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Pernyataan komitmen tidak menerima gratifikasi di Surat Tugas.
2) Whistle Blowing System.
3) Penerapan Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai
4) Sosialiasi Tolak Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal
5) Penggagasan pembuatan Pin Toga (Tolak Gratifikasi)

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala/ Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	-	1. Melakukan pelatihan terkait Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai baik dengan pelatihan ideas maupun bimbingan dari BPOM Pusat. 2. Tim Reformasi Birokrasi melakukan review terhadap hasil kerja yang telah direalisasikan setiap Bulan.	4. Mengusulkan pelatihan terkait Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawai baik dengan pelatihan ideas maupun bimbingan dari BPOM Pusat. 5. Tim Reformasi Birokrasi melakukan review terhadap hasil kerja yang telah direalisasikan setiap Bulan.	Desember 2026	Y	F-01	Adanya keberpihakkan dan kebocoran informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Melakukan kegiatan pelatihan melalui platform IDEAS mengenai Reformasi Birokrasi, dan melaksanakan studi di UPT lain yang telah meraih predikat WBK / WBBM untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif.

21. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Unit Organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas di lingkungan BPOM. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker, dokumen SAKIP yang harus dipenuhi terdiri atas 11 (sebelas) dokumen, yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun n+1, Perjanjian Kinerja (PK) tahun n, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun n, Capaian RAPK Triwulan IV tahun n-1, Capaian RAPK Triwulan I tahun n, Capaian RAPK Triwulan II tahun n, Capaian RAPK Triwulan III tahun n, Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV tahun n-1, Laporan Evaluasi Internal Triwulan I tahun n, Laporan Evaluasi Internal Triwulan II tahun n, serta Laporan Evaluasi Internal Triwulan III tahun n. Keseluruhan dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja berjalan secara sistematis dan terukur.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100	100	100	Baik

Realisasi Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 100% dari target 100% sehingga capaian sebesar 100% dengan kategori baik.

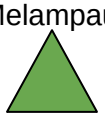
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	2024	100	100	100	Baik
	2025	100	100	100	Baik

Pada tahun 2024, target IKSK Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2025,

target yang ditetapkan tetap sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja tahun 2025 kembali mencapai 100% terhadap target. Kondisi ini menunjukkan konsistensi dalam penyusunan seluruh dokumen SAKIP berhasil disusun sesuai timeline dan standar yang berlaku.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100	100	100	tercapai/ Melampaui 

IKSK Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik terhadap target jangka menengah. Target Akhir Renstra sebesar 100%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 100% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen SAKIP di lingkup UPT telah disusun dan dipenuhi sesuai dengan pedoman SAKIP. Pemenuhan tersebut meliputi dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang dilakukan secara konsisten dan tepat waktu. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota dalam tim sehingga dokumen yang disusun sesuai standar dan tepat sasaran.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah meningkatkan komunikasi dengan Balai Besar di Kupang dan kerjasama yang baik antar anggota tim sehingga dokumen yang disusun sesuai standar, tepat sasaran dan tepat waktu.

No	IKSK	Kendala/Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

						sebagai Risiko (Y/T)		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	-	Melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota dalam tim sehingga dokumen yang disusun sesuai standar.	Konsisten dalam komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota dalam tim sehingga dokumen Sakip yang disusun sesuai standar.	Desember 2026	**T**	**-**	**-**

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator melakukan rapat rutin setiap bulan untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan komunikasi yang intens dengan BBPOM di Kupang.

22. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Efisiensi merupakan kemampuan suatu kegiatan dalam menggunakan input yang lebih sedikit untuk menghasilkan output yang sama atau lebih besar, atau dengan kata lain persentase capaian output sama atau lebih tinggi dibandingkan persentase capaian input. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membandingkan persentase capaian output terhadap persentase capaian input, yaitu dengan rumus:

$$\frac{Persentase\ Capaian\ Output}{Persentase\ Capaian\ Input}\ x100\%$$

Selanjutnya, tingk Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) melalui rumus:

$$TE=\frac{(IE-SE)}{SE}$$

Apabila nilai IE ≥ SE, maka kegiatan dinilai efisien, sedangkan apabila IE ≤ SE, maka kegiatan dinilai tidak efisien. Adapun kriteria penilaian menyatakan bahwa kegiatan dikategorikan efisien apabila nilai TE berada pada rentang 0 sampai dengan 1, dan dikategorikan tidak efisien apabila nilai TE kurang dari 0 atau melebihi 1.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

IKSK	Target	Realisasi	Capaian	Kategori

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100	100	100	Baik

Untuk IKSK Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, dari Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebesar 100% (efisien) dari target TW IV tahun 2025 sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 100% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

IKSK	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	2024	100	100	100	Baik
	2025	100	100	100	Baik

Pada tahun 2024, target IKSK Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT sesuai standar ditetapkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan tetap sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja tahun 2025 kembali mencapai 100% terhadap target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

IKSK	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100	100	100	Tercapai/ melampaui

IKSK Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT sesuai standar menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik terhadap target jangka menengah. Target Akhir Renstra sebesar 100%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 100% terhadap target jangka menengah yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan anggaran di lingkup UPT telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dilakukan secara konsisten melalui pemantauan dan evaluasi berkala guna

memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan output kegiatan. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan tercapai/melampaui target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah melakukan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu, melakukan kegiatan sesuai renlak dan RPD yang telah direncanakan setiap triwulan dan melakukan koordinasi yang baik dengan Balai koordinator yaitu Balai Besar di Kupang.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah meningkatkan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu, melakukan kegiatan sesuai renlak dan RPD yang telah direncanakan setiap triwulan serta melakukan revisi DIPA sesuai kegiatan, dan koordinasi yang baik dengan Balai koordinator yaitu BBPOM di Kupang.

Terhadap capaian IKSK ini telah dilakukan identifikasi risiko dengan peristiwa risiko Ketidaktepatan penggunaan Akun Belanja. Sebagai bentuk aktivitas pengendalian terhadap peristiwa risiko tersebut adalah:

1) Sosialisasi penggunaan akun kegiatan belanja kepada seluruh pegawai
2) Peningkatan kontrol verifikasi keuangan secara berjenjang mulai dari Verifikator Keuangan, PPK dan PPSPM
3) Mengoptimalkan kinerja Tim PIPK dalam kegiatan audit internal setiap semester terhadap laporan keuangan Balai POM di Kupang

Dengan identifikasi risiko maka tindakan perbaikan atau mitigasi risiko dapat dilaksanakan dengan tepat sehingga kinerja IKSK dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

No	IKSK	Kendala/ Permasalaha	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah dikelola sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	-	Meningkatkan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu, melakukan kegiatan sesuai renlak dan RPD yang telah direncanakan setiap triwulan serta melakukan revisi DIPA sesuai kegiatan, dan koordinasi yang baik dengan Balai koordinator yaitu BBPOM di Kupang.	Konsisten dalam mempertanggungjawaban kegiatan secara tepat waktu, melakukan kegiatan sesuai renlak dan RPD yang telah direncanakan setiap triwulan serta melakukan revisi DIPA sesuai kegiatan, dan koordinasi yang baik dengan Balai koordinator yaitu BBPOM di Kupang.	Desember 2026	Y	K-1	Ketidaktepatan penggunaan Akun Belanja

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT yaitu melakukan kegiatan sesuai renlak dan anggaran kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Kupang Tahun 2025 terdapat 8 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 BBPOM di Kupang serta Rencana Kinerja Tahunan. Berikut hasil pencapaian kinerja BBPOM di Kupang pada triwulan III Tahun 2025, yaitu:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Kupang pada tahun 2025 adalah **92,21%** dengan predikat **Baik.**
2. Sasaran Kegiatan (1) Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **106,70** dengan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai berikut:
   a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 110,21 ketegori Tidak Dapat Disimpulkan
   b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dengan capaian sebesar 108,69 kategori Sangat Baik
   c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
   d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100 kategori Baik.
   e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
   f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 106,75 kategori Sangat Baik.
   g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,71 kategori Sangat Baik.

h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
i. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,03 kategori Sangat Baik.
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 kategori Sangat Baik
k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 114,81 kategori Tidak Dapat Disimpulkan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 100,25 kategori Sangat Baik
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan capaian sebesar 104,75 kategori Sangat Baik
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 106,34 kategori Sangat Baik.
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian 100 kategori Baik

3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** nilai pencapaian sasarannya memperoleh nilai sebesar 100 dengan kategori Baik.
4. Sasaran Kegiatan ke-3 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di wilayah kerja BBPOM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 101,60 (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai berikut:
   a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 103,93 kategori Sangat Baik
   b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan realisasi 10 sekolah dan capaian sebesar 100% kategori Baik.

c. Jumlah desa pangan aman dengan realisasi 4 Desa dan capaian sebesar 100% kategori Baik.
d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan realisasi 1 Pasar dan capaian sebesar 100% kategori Baik.

5. Sasaran Kegiatan Ke-4 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** diukur dari pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 141,72 kategori Tidak Dapat Disimpulkan.
6. Sasaran Kegiatan 5 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 76,34 kategori Cukup
7. Sasaran Kegiatan 6 **Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif** diukur dari pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 111,11 kategori Tidak Dapat disimpulkan.
8. Sasaran Kegiatan 7 **Layanan Publik UPT yang prima,** diukur dari pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik yang memperoleh predikat Pelayanan Prima dengan nilai 4,92 dan capaian sebesar 104,68 kategori Sangat Baik
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** didukung pencapaiannya dengan IKSK sebagai berikut:
    a. Nilai Pembangunan ZI dengan capaian sebesar 96,86 kategori Baik
    b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 97,08 kategori Baik
    c. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 80 kategori cukup
    d. Indeks Manajemen Risiko dengan capaian sebesar 94,67 kategori Baik

Penyerapan anggaran BBPOM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 20.524.129.168 atau 62,46% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.861.512.000.

Realisasi Anggaran pada 8 Sasaran Kegiatan sudah baik sampai dengan akhir 2025 pencapaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sudah baik dan efisien. Penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja ini akan terus dilakukan secara optimal dan dilakukan penyesuaian pada periode selanjutnya apabila diperlukan melalui mekanisme revisi anggaran.

4.2. SARAN ATAU REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala setiap bulan untuk memastikan keselarasan perencanaan sampling, penerimaan sampel, pengujian, dan pengadaan reagen.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan untuk mengetahui kendala terkait pelaporan KTD/ESO dan tindak lanjut perbaikan
3. Monitoring dan evaluasi regional laboratorium setiap triwulan
4. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor terkait laporan investigasi KLB keracunan pangan
5. Memperhatikan perhitungan untuk capaian terhadap target
6. Sosialisasi dan edukasi untuk peningkatan pemahaman stakeholder mengenai standar keamanan, mutu, dan manfaat tindak lanjut pengawasan.
7. Monitoring dan evaluasi CAPA tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi
8. Pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan berbasis risiko
9. Peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait distribusi sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui KIE
10. Monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan

11. Sinergi antara petugas pengawasan iklan dan supervisor dalam pemenuhan jumlah iklan yang diawasi, ketepatan waktu pelaporan, serta konsistensi pengambilan keputusan sesuai regulasi
12. Peningkatan kualitas inspeksi dan supervisi terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik berdasarkan perencanaan serta konsistensi penerapan standar pengawasan sesuai regulasi nasional
13. Penguatan perencanaan program pengendalian AMR berbasis prioritas dan risiko, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan monitoring dan evaluasi
14. Meningkatkan standar pemenuhan Metode Analisa (MA) Terverifikasi di tahun 2026
15. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait implementasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman.
16. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (garam beryodium) mengikuti target sarana yang telah ditetapkan
17. Penguatan perencanaan berbasis prioritas, standardisasi pelaksanaan KIE sesuai pedoman, serta peningkatan sistem monitoring dan evaluasi untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja
18. Penguatan komitmen kader keamanan pangan sekolah
19. Memperkuat perencanaan kolaboratif dan kapasitas desa serta mengoptimalkan model pendampingan yang efisien melalui sinergi lintas sektor risiko
20. Melakukan monitoring dan evaluasi petugas pengelola pasar secara berkala
21. Memperkuat jejaring dengan stakholder yang memiliki program pendampingan UMKM Obat dan Makanan
22. Monev berkala dengan unit pengampu di Direktorat Penyidikan terkait kegiatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
23. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi hasil PEKPPP tahun 2025 untuk peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2026
24. Evaluasi keberlanjutan inovasi dengan memastikan inovasi pelayanan publik tidak hanya bersifat jangka pendek
25. Melakukan evaluasi realiasasi anggaran secara berkala untuk menyesuaikan rencana penarikan dana dan realisasi penggunaan.

26. Perbaikan perencanaan anggaran dengan menerapkan evidence-based budgeting dengan mengacu pada data perencanaan kegiatan dan penggunaan anggaran serta prioritas strategis.

Demikianlah Laporan Kinerja BBPOM di Kupang Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi BBPOM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 26 Februari 2026

Kepala Balai Besar POM di Kupang

Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Balai Besar POM di Kupang			NTT						**32.391,3**	**34.324,7**	**35.682,7**	**36.909,1**	**40.081,2**
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			BBPOM di Kupang						**21.848,0**	**22.940,4**	**24.087,4**	**25.291,8**	**27.821,0**
SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**		BBPOM di Kupang										
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90	91	92	93	94					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		84	85	86	87	88					

	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		95,5	96	97	98	99					
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		96,13	97,25	98,13	98,75	99,38					
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95					
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		85,68	87,08	88,48	89,88	91,28					
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80	81	82	83	84					
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100					
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		72,5	76	78	81,7	85,2					
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		10	20	30	40	100					
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84					
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	50	60	70					

	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		276	276	380	380	400					
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		978	1029	1080	1131	1188					
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		28	39	42	46	51					
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		446	564	593	625	660					
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		144	204	204	216	216					
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		0	0	0	0	0					
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1					
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	1	1	1	1					
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	644	644	644	644					
SK 2	**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**	BBPOM di Kupang										
	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		50	50	100	100	100					

	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			1	1	2	2	2					
SK 3	**Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja UPT**		BBPOM di Kupang										
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		87,09	87,96	88,83	89,71	90,58					
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		10	12	15	16	19					
	3	Jumlah desa pangan aman		4	7	7	8	8					
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	2	2	2	2					
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			21.000	21.400	21.480	21.576	21.691					
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			26	26	32	38	40					
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			10	12	15	16	19					
	RO 4: Desa Pangan Aman			4	7	7	8	8					
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	2	2	2	2					
SK 4	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**		BBPOM di Kupang										
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara		13,95	32,56	53,49	74,42	97,67					

	pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan											
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		12	16	18	19	21					
SK 5	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**	BBPOM di Kupang										
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		93	94	95	96	97					
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		3	3	4	4	4					
SK 6	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**	BBPOM di Kupang										
	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94					
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14	14	15	15	15					
SK 7	**Layanan Publik UPT yang prima**	BBPOM di Kupang										
	1 Indeks Pelayanan Publik UPT		4,7	4,75	4,8	4,85	4,9					
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		245	338	346	364	384					

SK 8	**Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**		BBPOM di Kupang										
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		90	90,25	90,5	90,75	91					
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		80,5	81	81,5	82	83					
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5					
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		3	3,1	3,2	3,3	3,4					
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1					
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1					
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			1	1	1	1	1					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			BBPOM di Kupang						**10.543,2**	**11.384,2**	**11.595,2**	**11.617,2**	**12.260,2**
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1					
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1					

LAMPIRAN 1.A

Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Loka POM di Kab Belu			NTT						**2.061,0**	**4.561,2**	**5.017,4**	**5.519,1**	**6.071,0**
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Loka POM di Belu						**961,0**	**3.461,1**	**3.807,4**	**4.188,1**	**4.606,9**
SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**		Loka POM di Belu										
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	83,25	84,5	85,75	87					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	81	83					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	82	85					

	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		6,25	12,5	31,25	62,5	100					
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0					
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	83	85	87	90					
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93,25	93,88	94,5	95,13	95,75					
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	82	85					
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		85,52	87,12	88,72	90,32	91,92					
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80	81	82	83	84					
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100					
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		10	11	12	13	14					
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		50	100	100	100	100					

	16 Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84					
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		0	40	40	40	40					
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		39	39	41	43	45					
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		52	52	55	58	61					
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		4	5	6	6	7					
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		67	76	83	91	99					
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		84	84	84	84	84					
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		0	0	1	1	1					
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	1	1	1	1					
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	1	1	1	1					
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	117	117	117	117					

SK 2	**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**	Loka POM di Belu										
	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0					
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		0	0	0	0	0					
SK 3	**Meningkatnya efektivitas KIE**	Loka POM di Belu										
	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		81,12	81,93	82,74	83,55	84,36					
	2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		0	1	1	1	1					
	3 Jumlah desa pangan aman		0	1	1	1	1					
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		0	1	1	1	1					
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		47	60	90	120	150					
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		17	5	6	7	11					
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		0	1	1	1	1					
	RO 4: Desa Pangan Aman		0	1	1	1	1					
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		0	1	1	1	1					

SK 4	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**		Loka POM di Belu										
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		6,25%	12,50%	31,25%	62,50%	100%					
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			1	1	3	5	6					
SK 5	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**		Loka POM di Belu										
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		0	72	74	76	78					
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			0	1	1	1	2					
SK 6	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**		Loka POM di Belu										
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94					
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15					
SK 7	**Layanan Publik UPT yang prima**		Loka POM di Belu										
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		3,51	3,55	3,6	3,65	3,7					

	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		2	15	17	20	22					
SK 8	**Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**	Loka POM di Belu										
	1 Persentase implememtasi rencana aksi Reformasi birokrasi di lingkup UPT		100	100	100	100	100					
	2 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar		100	100	100	100	100					
	3 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran		100	100	100	100	100					
	4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		1,6	1,8	2	2,25	2,5					
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1	1	1	1	1					
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1					
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		1	1	1	1	1					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM		Loka POM di Belu						**1.100,0**	**1.100,0**	**1.210,0**	**1.331,0**	**1.464,1**
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1					
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1					

LAMPIRAN 1.B

Matriks Kinerja dan Pendanaan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Loka POM di Kab Sumba Timur			NTT						**2.282,3**	**2.510,5**	**2.738,7**	**2.967,0**	**3.195,2**
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Loka POM di Sumba Timur						**1.182,3**	**1.410,5**	**1.438,7**	**1.517,0**	**1.645,2**
SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**		Loka POM di Sumba Timur										
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85,5	86,75	88	89,25	90,5					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	81	83					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	77	79	82	85					
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		75	78	80	82	85					

	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	100	100	100	100				
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		88	89	90	91	92				
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	93,75	94,5	95,25	95,75				
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	90	92	95				
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		85,17	86,77	88,57	90,37	92,37				
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80	82	83	84	85				
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100				
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		8	9	10	11	12				
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		25	50	75	100	100				
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84				

	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		0	30	30	30	30					
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		59	59	62	65	68					
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		59	60	63	66	69					
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		3	5	6	6	7					
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		94	104	114	124	137					
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		84	84	84	84	84					
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		0	0	1	1	1					
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	1	1	1	1					
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	1	1	1	1					
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	239	239	239	239					
SK 2	**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**	Loka POM di Sumba Timur										

	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0					
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			0	0	0	0	0					
SK 3	**Meningkatnya efektivitas KIE**		Loka POM di Sumba Timur										
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		87,44	88,31	89,18	90,06	90,93					
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		0	1	1	1	1					
	3	Jumlah desa pangan aman		0	1	1	1	1					
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		0	1	1	1	1					
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			0	60	90	120	150					
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			0	5	6	8	10					
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			0	1	1	1	1					
	RO 4: Desa Pangan Aman			0	1	1	1	1					
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			0	1	1	1	1					

SK 4	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**	Loka POM di Sumba Timur										
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		6,67	20	40	66,67	100					
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		1	2	3	4	5					
SK 5	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**	Loka POM di Sumba Timur										
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		70	72	74	76	78					
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		1	1	1	1	2					
SK 6	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**	Loka POM di Sumba Timur										
	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94					
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14	14	15	15	15					
SK 7	**Layanan Publik UPT yang prima**	Loka POM di Sumba Timur										

	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		3,51	3,55	3,6	3,65	3,7					
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			2	15	15	19	19					
SK 8	**Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**		Loka POM di Sumba Timur										
	1	Persentase implememtasi rencana aksi Reformasi birokrasi di lingkup UPT		100	100	100	100	100					
	2	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar		100	100	100	100	100					
	3	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran		100	100	100	100	100					
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2	2,05	2,1	2,15	2,2					
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1					
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1					
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			1	1	1	1	1					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Loka POM di Sumba Timur						**1.100,0**	**1.100,0**	**1.300,0**	**1.450,0**	**1.550,0**
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1					

	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1					

LAMPIRAN 2: PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Awal

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: YOSEPH NAHAK KLAU
Jabatan	: KEPALA BALAI POM DI KUPANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KUPANG, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA BALAI POM DI KUPANG	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
YOSEPH NAHAK KLAU	TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KUPANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.48 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.2 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.09 %
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.5 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 32,391,308,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,848,061,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,543,247,000

KUPANG, 12 February 2025

Pihak Pertama
KEPALA BALAI POM DI KUPANG

YOSEPH NAHAK KLAU

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

Perjanjian Kinerja Revisi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SEM LAPIK
Jabatan	: KEPALA BALAI BESAR POM DI KUPANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KUPANG, 30 September 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA BALAI BESAR POM DI KUPANG	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
SEM LAPIK	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.68 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.09 %
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13.95 %
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	90 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.5 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 32,785,794,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,348,061,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,437,733,000

KUPANG, 30 September 2025

Pihak Pertama
KEPALA BALAI BESAR POM DI KUPANG

SEM LAPIK

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN 3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA AWAL

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,049,075,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	46,850,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	397,982,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	65,776,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	145,052,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	72	74	76	78	80	81	82	83	84	84	84	187,484,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	32,711,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	24,651,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	498,478,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	498,478,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	51,220,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	10	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,701,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65	65	65	68.78	68.78	68.78	69.49	69.49	69.49	70.2	8,633,348,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	6,867,469,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	20	25	50	65	75	85	90	90	95	10	428,438,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	20	25	50	62.5	75	75	75	80	95	4	704,610,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	20	25	50	65	75	85	85	90	95	1	150,548,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	81	67,413,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			10	20	30	40	50	60	70	80	90	93	504,716,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	168,721,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	197,339,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	10,227,997,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.5	1,024,110,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	250,320,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	166,820,000
														Total	32,391,308,000

Kupang, 08 May 2025

Plt. Kepala Balai Besar POM di Kupang

Yoseph Nahak Klau

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA REVISI

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	689,538,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	46,850,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	222,264,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	19,416,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	87,372,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	72	74	76	78	80	81	84	84	84	84	84	124,930,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	95	95	95	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	26,264,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	26,264,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	790,636,500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	835,776,500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	85.68	85.68	85.68	85.68	85.68	38,080,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	4,880,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	66,419,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65	65	65	68.78	68.78	68.78	69.49	69.49	69.49	72.5	8,133,348,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												10	19,068,000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	10	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,701,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	6,867,469,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	20	25	50	65	75	85	95	95	100	10	428,438,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	20	25	50	62.5	75	75	80	80	100	4	704,610,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	20	25	50	65	75	85	95	95	100	1	150,548,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	30	40	50	60	82	83	84	85	13.95	67,413,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			10	20	30	40	50	55	60	70	80	93	504,716,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	168,721,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	197,339,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	11,003,998,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.5	1,242,131,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	275,784,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	41,820,000
														Total	32,785,794,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Kupang, 01 October 2025

KEPALA BALAI BESAR POM DI KUPANG

SEM LAPIK

LAMPIRAN 4. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
Jl. R.A Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Telp. (0380) 5884595, 8554596, Fax. (0380) 8554596.
Email : bpom_kupang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR HK.02.02.4B.02.25.46 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG,

YOSEPH NAHAK KLAU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR HK.02.02.4B.02.25.46 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Kupang
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	**Layanan Publik UPT yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Kupang
9.2	Nilai AKIP Balai POM di Kupang
9.3	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang
9.4	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kupang

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG,

YOSEPH NAHAK KLAU

LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA & NKO TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%Capaian	Normalisasi Capaian	Koreksi berdasarkan nilai AKIP (BB)	Hasil
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	99.19	110.21%	110.00%	10%	99.00
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	28.26	108.69%	108.69%	10%	97.82
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89%	109.89%	10%	98.90
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00%	100.0%	10%	90.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	10%	98.90
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84.00	89.67	106.75%	106.75%	10%	96.08
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	100	104.71%	104.71%	10%	94.24
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89%	109.89%	10%	98.90
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	100	104.03%	104.03%	10%	93.63
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89%	109.89%	10%	98.90

		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.68	98.37	114.81%	110.00%	10%	99.00
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	80.2	100.25%	100.25%	10%	90.23
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	104.75	104.75%	104.75%	10%	94.28
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.50	77.1	106.34%	106.34%	10%	95.71
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10.00	10.00	100.00%	100.00%	10%	90.00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100.00%	100.00%	10%	90.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.09	90.51	103.93%	103.93%	10%	93.54
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100.00%	100.00%	10%	90.00
		19	Jumlah desa pangan aman	4	4	100.00%	100.00%	10%	90.00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00%	100.00%	10%	90.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13.95	19.77	141.72%	110.00%	10%	99.00

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	71	76.34%	76.34%	10%	68.71
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11%	110.00%	10%	99.00
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.92	104.68%	104.68%	10%	94.21
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	90	87.17	96.86%	96.86%	10%	87.17
		26	Nilai AKIP	80.5	78.15	97.08%	97.08%	10%	87.37
		27	Nilai Kinerja Anggaran	5	4	80.00%	80%	10%	72.00
		28	Indeks Manajemen Risiko	3	2.84	94.67%	94.67%	10%	85.20
TOTAL CAPAIAN							**2581.77**		
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)							**92.21**		
PREDIKAT NKO							**Baik**		

LAMPIRAN 6. PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR BALAI BESAR POM DI KUPANG TAHUN 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran			IE	TE	Keterangan
				T	R	%Capaian	Alokasi	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	99.19	110.21	731,600,000	729,305,969	99.69	1.11	0.11	Efisien
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	28.26	108.69	4,300,000	4,250,000	98.84	1.10	0.10	Efisien
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	317,545,500	318,149,330	100.19	1.10	0.10	Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00	83,156,000	83,063,098	99.89	1.00	0.00	Efisien
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100	109.89	142,301,500	142,064,391	99.83	1.10	0.10	Efisien
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84.00	89.67	106.75	85,348,000	84,199,700	98.65	1.08	0.08	Efisien
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	100	104.71	26,264,000	26,659,562	101.51	1.03	0.03	Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	26,264,000	26,659,562	101.51	1.08	0.08	Efisien
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	100	104.03	724,410,000	723,422,644	99.86	1.04	0.04	Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	620,693,000	619,774,541	99.85	1.10	0.10	Efisien
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.68	98.37	114.81	30,491,000	30,362,460	99.58	1.15	0.15	Efisien

		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80.2	100.25	3,694,000	3,691,440	99.93	1.00	0.00	Efisien
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104.75	104.75	138,363,000	138,062,600	99.78	1.05	0.05	Efisien
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.50	77.1	106.34	7,587,618,000	7,586,538,546	99.99	1.06	0.06	Efisien
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10	10	100.00	20,778,000	20,028,332	96.39	1.04	0.04	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100.00	1,701,000	1,701,000	100.00	1.00	0.00	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.09	90.51	103.93	125,391,000	124,925,498	99.63	1.04	0.04	Efisien
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100.00	55,500,000	55,380,000	99.78	1.00	0.00	Efisien
		19	Jumlah desa pangan aman	4	4	100.00	100,000,000	99,919,400	99.92	1.00	0.00	Efisien
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	30,880,000	30,875,500	99.99	1.00	0.00	Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13.95	19.77	141.72	14,000,000	13,908,000	99.34	1.43	0.43	Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	71	76.34	504,716,000	499,237,715	98.91	0.77	-0.23	Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	100	111.11	42,000,000	41,930,950	99.84	1.11	0.11	Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.92	104.68	197,339,000	194,500,555	98.56	1.06	0.06	Efisien

8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	90	87.17	96.86	8,170,183,000	8,161,306,237	99.89	0.97	-0.03	Tidak Efisien
		26	Nilai AKIP	80.5	78.15	97.08	613,468,000	597,577,717	97.41	1.00	0.00	Efisien
		27	Nilai Kinerja Anggaran	5	4	80.00	162,085,000	162,080,000	100.00	0.80	-0.20	Tidak Efisien
		28	Indeks Manajemen Risiko	3	2.84	94.67	14,700,000	14,085,000	95.82	0.99	-0.01	Tidak Efisien

LAMPIRAN 7. PENGUKURAN EFISIENSI SASARAN KEGIATAN TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		RPD	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN				
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	10,542,826,000	10,536,232,174	99.94	106.67	1.07	1	Efisien	0.07
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1,701,000	1,701,000	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	311,771,000	311,100,398	99.78	100.98	1.01	1	Efisien	0.01
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	14,000,000	13,908,000	99.34	141.72	1.43	1	Efisien	0.43
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	504,716,000	499,237,715	98.91	76.34	0.77	1	Tidak Efisien	-0.23
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	42,000,000	41,930,950	99.84	111.11	1.11	1	Efisien	0.11
7	Layanan Publik Balai Besar POM di Kupang yang prima	197,339,000	194,500,555	98.56	104.68	1.06	1	Efisien	0.06
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8,960,436,000	8,935,048,954	99.72	92.15	0.92	1	Tidak Efisien	-0.08

LAMPIRAN 8. RHPK dan Perhitungan Kinerja 2025

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	Januari	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	Februari	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	Maret	100.00	100.00	100.00	94.41	98.60
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	April	100.00	100.00	100.00	95.79	98.95
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	Mei	99.48	98.92	100.00	96.11	98.63
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	Juni	98.75	98.86	96.33	97.20	97.79
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	Juli	99.93	99.29	97.15	97.05	98.35
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	Agustus	99.16	98.76	97.16	94.74	97.45
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	September	99.59	99.90	99.76	96.91	99.04
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	Oktober	99.72	99.78	99.80	99.23	99.63
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	November	100.00	99.87	99.82	98.91	99.65
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beris	Desember	99.96	99.57	99.83	97.41	99.19

Kertas kerja indikator “Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan” dapat diakses secara rinci pada link berikut

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoEex89AAO35H38WexR4zpWX9jfocHEC/edit?usp=sharing&ouid=111468724092595925277&rtpof=true&sd=true

2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

1	Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)
2		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	26,00
3		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
4		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
5		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
6		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
7		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
8		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
9		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
10		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
11		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
12		Balai Besa POM di Kupang	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaj	Desember	
13						

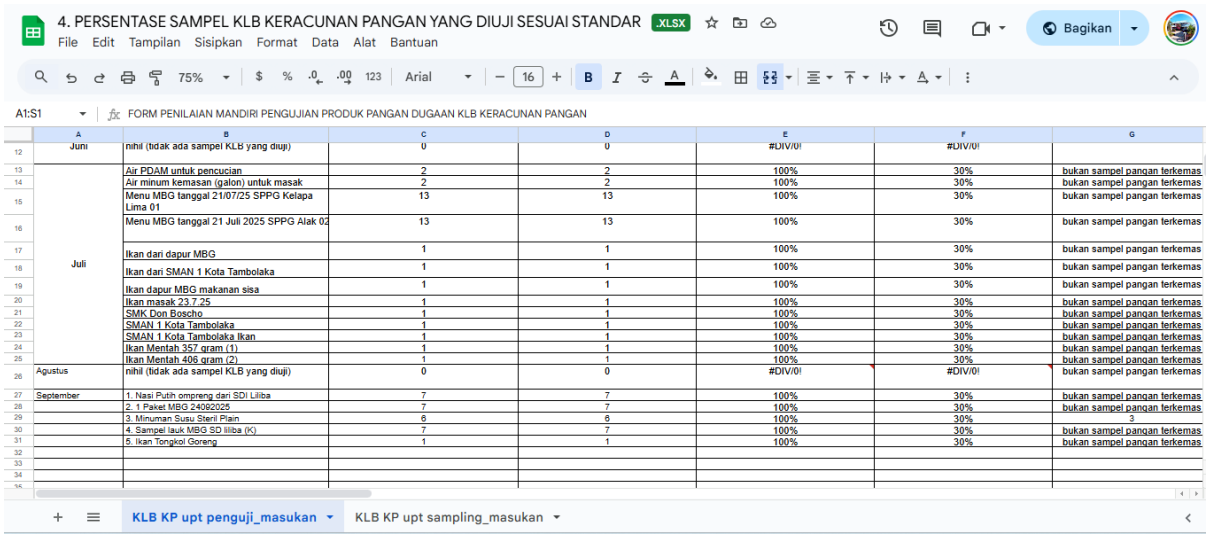
Kertas kerja indikator “Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM” dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9rRZZOUGpDg46vU8jHGY7mNRgEt6Wgy/edit?gid=2143688548#gid=2143688548

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan (s.d)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Balai Besa	3	Persentase sampel Pangan Olal	Oktober	100,00	89,34	100,00	89,34	100,00	97,14
Balai Besa	3	Persentase sampel Pangan Olal	November	100,00	91,89	100,00	91,89	100,00	97,89
Balai Besa	3	Persentase sampel Pangan Olal	Desember	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kertas kerja indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/130Bkub-tY_86IWbkHnUGqty7saXcav2u/edit?usp=sharing&ouid=111468724092595925277&rtpof=true&sd=true

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar



12	Juni	nihil (tidak ada sampel KLB yang diuji)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
13	Juli	Air PDAM untuk pencucian	2	2	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
14		Air minum kemasan (galon) untuk masak	2	2	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
15		Menu MBG tanggal 21/07/25 SPPG Kelapa Lima 01	13	13	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
16		Menu MBG tanggal 21 Juli 2025 SPPG Alak 02	13	13	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
17		Ikan dari dapur MBG	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
18		Ikan dari SMAN 1 Kota Tambolaka	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
19		Ikan dapur MBG makanan sisa	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
20		Ikan masak 23.7.25	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
21		SMK Don Boscho	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
22		SMAN 1 Kota Tambolaka	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
23		SMAN 1 Kota Tambolaka Ikan	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
24		Ikan Mentah 357 gram (1)	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
25		Ikan Mentah 406 gram (2)	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
26	Agustus	nihil (tidak ada sampel KLB yang diuji)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	bukan sampel pangan terkemas
27	September	1. Nasi Putih ompreng dari SDI Liliba	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
28		2. 1 Paket MBG 24092025	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
29		3. Minuman Susu Steril Plain	6	6	100%	30%	3
30		4. Sampel lauk MBG SD liliba (K)	7	7	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
31		5. Ikan Tongkol Goreng	1	1	100%	30%	bukan sampel pangan terkemas
32							
33							
34							

Kertas kerja indikator “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar” dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z2nBb2HV5kGqsC-xq9MRJnwaHvj_0qtJ/edit?gid=1024612742#gid=1024612742

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

	Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan (s.d)	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Uji (Bobot 20
7		Balai Besa POM di Kupang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85,00	100,00	100,00
8		Balai Besa POM di Kupang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85,00	100,00	100,00
9		Balai Besa POM di Kupang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	91,00	100,00	100,00
10		Balai Besa POM di Kupang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	91,00	100,00	100,00
11		Balai Besa POM di Kupang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	91,00	#DIV/0!	#DIV/0
12		Balai Besa POM di Kupang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	91,00	#DIV/0!	#DIV/0
13		Balai Besa POM di Kupang	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	91,00	#DIV/0!	#DIV/0

Kertas kerja indikator “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NfmwZgH2cqsMaDhjgjjMWHyZfmYCex3o/edit?gid=1928536671#gid=1928536671

6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu

	Kode Unit Kerja	Nama Indikator	s.d Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
2		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Januari		25,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Februari		92,31	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Maret		76,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	April		80,65	#DIV/0!	#DIV/0!
6		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Mei		90,91	100,00	95,45
7		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juni		80,65	100,00	90,32
8		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Juli		78,07	100,00	89,04
9		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Agustus		71,92	100,00	85,96
10		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	September		72,68	100,00	86,34
11		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kertas kerja indikator “Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu” dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1usJQ9A6EX4eo-tY2suwGKHvo0JJfa8bN/edit?gid=1417554649#gid=1417554649

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

e Unit K	Nama Unit Kerja	le Indik	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA & SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist Januari		95,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist Februari		95,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist Maret		95,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist April		95,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist Mei		95,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist Juni		95,00	0,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist Juli		95,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist Agustus		95,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist September		95,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist Oktober		95,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist November		95,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	BBPOM Kupang	7	Persentase sarana dist Desember		95,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kertas kerja indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pqoRPqY7oV8ZkO0GHerr0gZA7MA2LdCd/edit?gid=92575204#gid=92575204

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	Januari	#DIV/0!
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	Februari	#DIV/0!
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	Maret	#DIV/0!
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	April	100,00
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	Mei	100,00
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	Juni	100,00
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	Juli	100,00
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	Agustus	100,00
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	September	100,00
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	Oktober	#DIV/0!
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	November	#DIV/0!
	BBPOM di Kupang	8	Persentase Sarana Produksi Panga	Desember	#DIV/0!

Kertas kerja indikator dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y-3WBZYu2RsVyRKJooFMr9XVmlSD-Jw1/edit?gid=284749399#gid=284749399

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	Januari	96,13	95,83	100,00	100,00	100,00
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	Februari	96,13	95,83	100,00	100,00	100,00
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	Maret	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	April	96,13	97,06	100,00	100,00	100,00
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	Mei	96,13	101,67	100,00	100,00	100,00
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	Juni	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	Juli	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	Agustus	96,13	100,00	100,00	100,00	100,00
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	September	96,13	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	Oktober	96,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	November	96,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
BBPOM di Kupang	9	Persentase sarana dist	Desember	96,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kertas kerja indikator “Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/179KR7tF6jbfUit94DTBQrTEPCXhlfQAH/edit?gid=535597792#gid=535597792

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan (s.d)	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	Januari	7	7	7	20,00	7	7	70,00
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	Februari	11	11	11	20,00	11	11	70,00
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	Maret	31	31	31	20,00	31	31	70,00
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	April	48	48	48	20,00	48	48	70,00
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	Mei	63	63	63	20,00	63	63	70,00
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	Juni	82	82	82	20,00	82	82	70,00
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	Juli	104	104	104	20,00	104	104	70,00
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	Agustus	117	117	117	20,00	117	117	70,00
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	September	124	124	124	20,00	124	124	70,00
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	Oktober				#DIV/0!			#DIV/0!
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	November				#DIV/0!			#DIV/0!
Balai Besa POM	10	Persentase sarana distribusi	Desember				#DIV/0!			#DIV/0!

Kertas kerja indikator “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htJTY8f8EjAkIakE76gBiSsxCjgN7zMg/edit?gid=1944262888#gid=1944262888

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Nama Unit Kerja	Kode Indikat	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	Januari		#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	54.44	#DIV/0!
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	Februari		100.00	100.00	100.00	100.00	97.16	99.43
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	Maret		97.50	100.00	100.00	100.00	96.98	98.90
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	April		100.00	100.00	100.00	100.00	97.21	99.44
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	Mei		100.00	100.00	100.00	100.00	97.11	99.42
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	Juni		100.00	100.00	100.00	100.00	97.49	99.50
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	Juli		100.00	100.00	99.07	100.00	97.18	99.25
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	Agustus		100.00	100.00	99.19	100.00	97.42	99.32
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	September		100.00	100.00	100.00	100.00	97.46	99.49
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	Oktober		#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	November		#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Balai Besar POM di Kupang	11	Persentase Iklar	Desember		#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Kertas kerja indikator “Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan” dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ky2s-BS4qLHDMM8izN5tK7E4EiK_OJN8/edit?gid=1609775028#gid=1609775028

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

HASIL PENGAWASAN LABEL UPT BPOM TAHUN 2025

BALAI BESAR POM

No	NAMA UPT	Realisasi Jumlah laporan Label	Realisasi Laporan Label tepat waktu	Target Indikator	Realisasi Indikator
1	BBPOM ACEH	100,0%	91,67%	80,0%	95,8%
2	BBPOM BANDUNG	102,0%	83,33%	80,0%	92,6%
3	BBPOM BANJARBARU	100,0%	83,33%	91,0%	91,7%
4	BBPOM DENPASAR	102,0%	87,75%	92,0%	94,9%
5	BBPOM JAKARTA	100,0%	80,88%	85,0%	90,4%
6	BBPOM JAYAPURA	110,3%	72,06%	91,0%	91,2%
7	BBPOM BANDAR LAMPUNG	100,0%	84,31%	91,0%	92,2%
8	BBPOM MAKASSAR	93,6%	47,55%	80,0%	70,6%
9	BBPOM MANADO	104,9%	58,82%	91,0%	81,9%
10	BBPOM MATARAM	102,0%	86,76%	92,0%	94,4%
11	BBPOM MEDAN	102,9%	42,16%	80,0%	72,5%
12	BBPOM PADANG	102,0%	93,14%	90,0%	97,5%
13	BBPOM PALANGKARAYA	101,5%	77,45%	91,0%	89,5%
14	BBPOM PALEMBANG	144,6%	61,27%	91,0%	102,9%
15	BBPOM PEKAN BARU	102,0%	83,33%	91,0%	92,6%
16	BBPOM PONTIANAK	100,5%	82,84%	91,0%	91,7%
17	BBPOM SAMARINDA	102,5%	62,25%	80,0%	82,4%
18	BBPOM SEMARANG	104,4%	80,39%	91,0%	92,4%
19	BBPOM SERANG	100,0%	89,71%	91,0%	94,9%
20	BBPOM SURABAYA	104,9%	83,33%	91,0%	94,1%
21	BBPOM YOGYAKARTA	101,5%	92,65%	85,0%	97,1%
22	BBPOM GORONTALO	100,7%	87,50%	85,0%	94,1%
23	BBPOM KUPANG	102,1%	58,30%	80,0%	80,2%

Rata-Rata Realisasi Jumlah : 103.7%
Rata-Rata ketepatan waktu pelaporan: 77%
Rata-Rata Realisasi Indikator: 90,3%

Kertas kerja indikator dapat diakses secara rinci pada link berikut
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1njh0kjHzy1szmxaFE1jOUolsJbm3bd30/edit?gid=1539539664#gid=1539539664

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Bulan	Target Indikator (%)	% Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%)	Realisasi (%)
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Kertas kerja indikator dapat diakses secara rinci pada link berikut
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zswOMXp3TnT-Q5LnNf_scgjHa3uBiDqG/edit?gid=528092854#gid=528092854

14. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Desember	10.00	1.00	10.00	10	Hanya Kota Kupang yang secara aktif melakukan pengisian tools penilaian mandiri Kabupaten / Kota Pangan Aman dengan nilai yang diperoleh 78.28 % dari Target minimal 60 %	1. Melakukan advokasi ke kabupaten dan kota terkaut program kabupaten dan kota pangan aman melalui penyampaian surat secara resmi maupun koordinasi seacar langsung ke Pemeritah Daerah (Sekretaris Daerah) 2. Menaktivasi TKPPOM di Kabupaten dan Kota yang telah terbentuk untuk pelaksanaan program Kabuapten dan Kota Pangan Aman 3. Mendampingi pengisian tools kabupaten/kota pangan aman

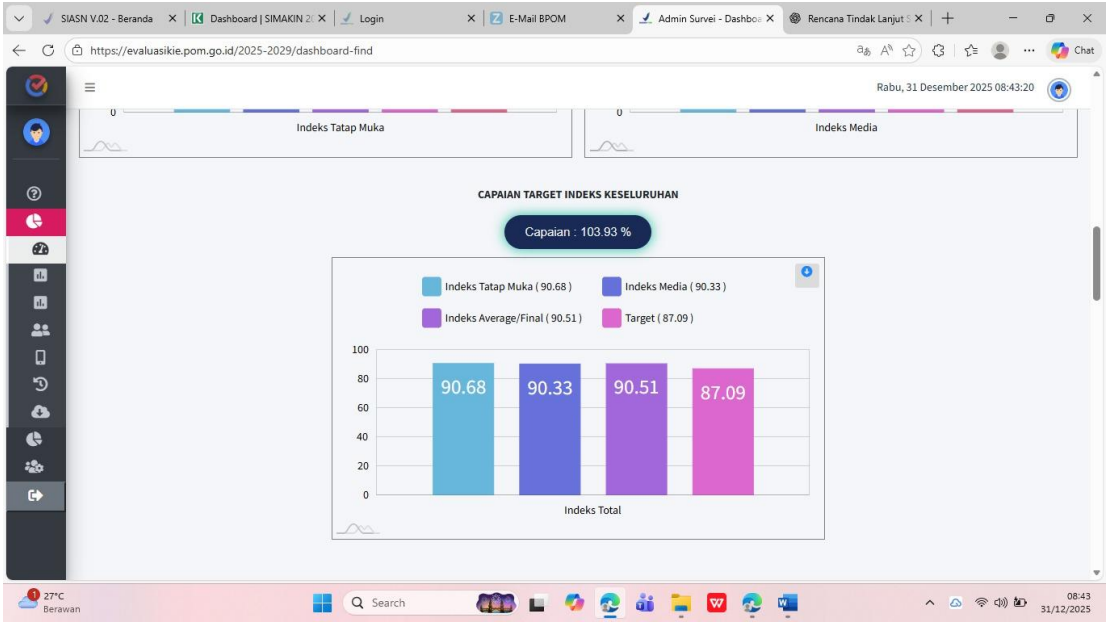
Kertas kerja indikator dapat diakses secara rinci pada link berikut
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IJ5bd99jCrsoqTuQwfdeLRQSGITkgYG3/edit?gid=2125628396#gid=2125628396

15. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

ode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
12	Persentase Cakı	Agustus	50	1	2	50,00	Tidak ada kendala	fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah selesai bulan Mei 2025
12	Persentase Cakı	September	50	1	2	50,00	Tidak ada kendala	IKU Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah selesai bulan Mei 2025
12	Persentase Cakı	Oktober			2	0,00		
12	Persentase Cakı	November			2	0,00		
12	Persentase Cakı	Desember			2	0,00		

Kertas kerja indikator dapat diakses secara rinci pada link berikut
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dq0AFNR85ETrWOf9Qu6ktnRjSrsssFVo/edit?gid=1301332152#gid=1301332152

16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT



17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi
Maret	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0	25,00
Mei	50	25,00	20,00	25,00	0,00	3	73,00
Juni	65	25,00	20,00	25,00	5,00	3	78,00
Juli	75	25,00	20,00	25,00	10,00	3	83,00
Agustus	85	25,00	20,00	25,00	15,00	5	90,00
September	90	25,00	20,00	25,00	20,00	5	95,00
Oktober	90	25,00	20,00	25,00	20,00	5	95,00
November	95	25,00	20,00	25,00	20,00	5	95,00
Desember	10						100,00

18. Jumlah desa pangan aman

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi
Januari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Maret	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0	25,00
Mei	50	25,00	25,00	0,00		3	53,00
Juni	62,5	25,00	25,00	20,00		3	73,00
Juli	75	25,00	25,00	20,00	0,00	5	75,00
Agustus	75	25,00	25,00	20,00	0,00	5	75,00
September	80	25,00	25,00	20,00	0,00	10	80,00
Oktober	80	25,00	25,00	20,00	0,00	10	80,00
November	100	25,00	25,00	20,00	0,00	10	80,00
Desember	4						100,00

19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi
ι Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ι Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ι Maret	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ι April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0	25,00
ι Mei	50	25,00	25,00	0,00	0,00	0	50,00
ι Juni	65	25,00	25,00	20,00	5,00	0	75,00
ι Juli	75	25,00	25,00	20,00	5,00	5	80,00
ι Agustus	85	25,00	25,00	20,00	20,00	5	95,00
ι September	85	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
ι Oktober	90	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
ι November	95	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00
ι Desember	1						100,00

20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan
Januari	5	0.00	0.00	0.00		14
Februari	10	450.00	10.00	10.00	33.57	14
Maret	20	500.00	10.00	90.00	42.86	14
April	30	550.00	10.00	90.00	46.43	14
Mei	40	600.00	10.00	90.00	50.00	14
Juni	50	750.00	10.00	250.00	72.14	14
Juli	60	800.00	140.00	250.00	85.00	14
Agustus	82	900.00	140.00	250.00	92.14	14
September	83	950.00	160.00	250.00	90.67	15
Oktober	84	950.00	160.00	250.00	90.67	15
November	85	1000.00	160.00	270.00	95.33	15
Desember	12	10.00	3.00	4.00	19.77	86

Kertas kerja indikator dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r_psZkWVHPTvPxOjDXts1jhVwkTGJfj0/edit?gid=1838272754#gid=1838272754

21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL	Monev RTL
	3. Perubahan Modus Operandi penjualan produk ilegal secara on line (tidak melakukan penyetokan barang)		
71,00	**1.Capaian kinerja bulan Desember sebesar 71 % tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 93 %. 2. Terdapat 2 perkara pada tahun 2025 yang proses penyidikan belum sampai tahap 2 karena petunjuk jaksa yang belum dapat dipenuhi oleh PPNS 2. Perubahan Modus Operandi penjualan produk ilegal secara on line (tidak melakukan penyetokan barang)**	**1. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara 2.Koordinasi dengan stakeholder khusus Intelkam dalam pengungkapn kasus bidang obat dan makanan**	Telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pembahasan terkait P19 perkara atas nama tersangka MI dan dengan Korwas PPNS Polda NTT untuk dilakukan Gelar Perkara

Kertas kerja indikator dapat diakses secara rinci pada link berikut https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0H0YLKY5zFj6lqfFQ2mFmeRGjMwe0KW/edit?usp=drive_web&ouid=111468724092595925277&rtpof=true

22. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Lampiran
Surat Dinas Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
Nomor : T-PW.01.08.34.01.26.19
Tanggal : 9 Januari 2026

HASIL MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN IKU AMR LEVEL UPT TAHUN 2025

No.	Unit Pelaksana Teknis	Target	Capaian
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	100%	105.69%
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	100%	106.14%
3	Balai Besar POM di Bandung	100%	100.26%
4	Balai Besar POM di Banjarbaru	100%	106.18%
5	Balai Besar POM di Denpasar	100%	105.43%
6	Balai Besar POM di Gorontalo	100%	104.28%
7	Balai Besar POM di Jakarta	100%	103.41%
8	Balai Besar POM di Jayapura	100%	104.44%
9	Balai Besar POM di Kupang	100%	104.75%
10	Balai Besar POM di Makassar	100%	101.92%
11	Balai Besar POM di Manado	100%	104.18%
12	Balai Besar POM di Mataram	100%	105.69%
13	Balai Besar POM di Medan	100%	105.72%
14	Balai Besar POM di Padang	100%	105.57%
15	Balai Besar POM di Palangkaraya	100%	102.16%
16	Balai Besar POM di Palembang	100%	105.81%

23. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : BBPOM di Kupang
Triwulan/Tahun : 4/2025
Tanggal Penilaian : 23 Desember 2025
Nama Tim Penilai : 1. Rohmania, S.Farm., Apt.
2. Aan Riana Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	80.5	77.1	72.5	106.4
2.	Standar Peralatan	88.6			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	70			
4.	Standar Metode Terverifikasi	51.6			

Kendala Pemenuhan
Keterbatasan reagen/media, baku pembanding serta suku cadang untuk melakukan verifikasi parameter dalam rangka pemenuhan SKL

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan revisi anggaran sehingga dapat dilakukan pengadaan reagen/media, baku pembanding serta suku cadang yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi parameter dalam rangka pemenuhan SKL

Tim Penilai PPPOMN

1 Rohmania, S.Farm., Apt.

2 Aan Riana Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Kepala BBPOM di Kupang

Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt

24. Nilai Pembangunan ZI

NOTA DINAS
NOMOR: B-PI.06.06.7.08.25.275

Yth.	:	Plt. Kepala Balai Besar POM di Kupang
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	-
Hal	:	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Kupang
Tanggal	:	14 Agustus 2025

Berdasarkan
1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2025;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Kupang.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai Besar POM di Kupang sebesar **87,17** dengan rincian sebagai berikut

25. Nilai AKIP

Lampiran-2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
Tanggal : 5 Januari 2026

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,76	17,76	0,00
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	9,12	-0,36
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,20	15,20	0,00
5.	Capaian Kinerja	20	17,66	15,91	-1,75
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**80,26**	**78,15**	**-2,11**
Predikat			**A**	**BB**	**Turun dari A ke BB**

26. **Nilai Kinerja Anggaran**

Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
		Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
BALAI BESAR POM DI KUPANG	79,96	92,19	100,00	5,45

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100,00	90,44	98,81	100,00	100,00	100,00	100,00	98,33	100%	0.00	98.33
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10,00	13,57	19,76	10,00	10,00	10,00	25,00				
Nilai Aspek	95.22		99.70				100.00				

Sumber: https://monev.kemenkeu.go.id/

27. Indeks Manajemen Risiko

Lampiran 2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.26.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	**45,00**	**45,50**	**0,50**
Nilai Maturitas	**2,813**	**2,844**	**0,031**
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*	*Risk Aware*	

LAMPIRAN 9. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Belu

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BELU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FERDIAN DWI ARMANTO
Jabatan	: Kepala Loka POM di Kabupaten Belu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Atambua, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka POM di Kabupaten Belu	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
FERDIAN DWI ARMANTO	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BELU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.12 %
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81.12
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 %
4.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
5.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51
6.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.6
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100 %
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,061,001,000 (Dua Miliar Enam Puluh Satu Juta Seribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	961,001,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,100,000,000

Atambua, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Belu

FERDIAN DW. ARMANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Belu

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BELU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	158,421,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - PENGADAAN SAMPEL OBAT LOKA POM BELU	34,421,000	34,421,000
2.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	B - PENGADAAN ALAT LAB LOKA BELU	300,000,000	99,000,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Y - PENGADAAN GLASSWARE DAN REAGEN LOKA POM BELU	50,000,000	25,000,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	122,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	B - PENGADAAN ALAT LAB LOKA BELU	300,000,000	102,000,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Y - PENGADAAN GLASSWARE DAN REAGEN LOKA POM BELU	50,000,000	10,000,000
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM BELU	20,000,000	10,000,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM BELU	20,000,000	5,000,000
2.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	B - PENGADAAN ALAT LAB LOKA BELU	300,000,000	48,000,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Y - PENGADAAN GLASSWARE DAN REAGEN LOKA POM BELU	50,000,000	7,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	63,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM BELU	20,000,000	5,000,000
2.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	B - PENGADAAN ALAT LAB LOKA BELU	300,000,000	51,000,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Y - PENGADAAN GLASSWARE DAN REAGEN LOKA POM BELU	50,000,000	7,500,000

		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	16	32	40	48	56	64	72	80	88	96	100	214,420

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OLEH LOKA POM BELU	4,614,000	138,420
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YI - PEMANTAUAN AMR/CAPA POS POM ATAMBUA	3,800,000	76,000

		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4,475,580

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OLEH LOKA POM BELU	4,614,000	4,475,580

		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	72,925,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YK - Peningkatan Kompetensi Petugas Loka POM di Kabupaten Belu	32,130,000	16,065,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Y - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM BELU	45,880,000	38,998,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YI - PEMANTAUAN AMR/CAPA POS POM ATAMBUA	3,800,000	1,862,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YJ - BIMTEK/KIE AMR/CAPA LOKA POM BELU	16,000,000	16,000,000

		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	104,749,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YH - PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA HARI RAYA/KLB/FOOD SECURITY/MOBLING	31,500,000	31,500,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YD - OPERASI PENANGANAN DAN PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG TMK	21,720,000	21,720,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YC - Intensifikasi Menjelang Hari Raya Bersama Lintas Sektor	23,600,000	23,600,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Y - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM BELU	45,880,000	6,882,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YK - Peningkatan Kompetensi Petugas Loka POM di Kabupaten Belu	32,130,000	16,065,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YI - PEMANTAUAN AMR/CAPA POS POM ATAMBUA	3,800,000	1,862,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YG - PEMUKTAHIRAN DATA SARANA PRODUKSI,DISTRIBUSI OM DAN PELAYANAN FARMAKES	3,120,000	3,120,000

		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	16,240,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YB - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN MAKANAN LABEL HALAL TERMASUK ROKOK	16,240,000	16,240,000

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi			81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	77,576,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	di masing-masing wilayah kerja UPT	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	F - WORKSHOP PENYEBARAN INFORMASI LOKA POM BELU	47,962,000	47,962,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	G - OPERASIONAL DAN LAYANAN KIE LOKA POM BELU	29,614,000	29,614,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		7	10	20	30	40	50	60	65	70	75	80	10,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	C - PENDAMPINGAN LANGSUNG LOKA POM BELU	10,000,000	10,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	35,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	C - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Loka POM Belu	35,000,000	35,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.51	18,400,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	EA - TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI (LOKA POM BELU)	10,764,000	10,764,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	E - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA/ REGISTRASI PRODUK (LOKA POM BELU)	7,636,000	7,636,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												1.6	146,681,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN FASILITAS KANTOR LOKA POM DI KAB BELU	50,000,000	12,500,000
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM BELU	100,000,000	25,000,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Y - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM	67,000,000	16,750,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
			BELU		
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - OPERASIONAL LOKA POM BELU	369,725,000	92,431,250

05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		10	15	20	25	30	35	40	55	70	85	100	311,141,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PF - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH PIMPINAN LOKA POM BELU	145,860,000	145,860,000
2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN FASILITAS KANTOR LOKA POM DI KAB BELU	50,000,000	12,500,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Y - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM BELU	67,000,000	16,750,000
4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM BELU	100,000,000	25,000,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - OPERASIONAL LOKA POM BELU	369,725,000	92,431,250
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PD - BIMTEK SAKA POM	18,600,000	18,600,000

06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar		18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	712,496,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN FASILITAS KANTOR LOKA POM DI KAB BELU	50,000,000	12,500,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Y - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM BELU	67,000,000	16,750,000
3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM BELU	100,000,000	25,000,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - OPERASIONAL LOKA POM BELU	369,725,000	92,431,250
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PA - PENGADAAN SERAGAM DINAS LOKA POM BELU	43,696,000	43,696,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PB - JASA TENAGA OUTSOURCHING	132,444,000	132,444,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PC - KEGIATAN KEROHANIAN DAN KESEGARAN JASMANI LOKA POM BELU	11,740,000	11,740,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PE - KOORDINASI TERKAIT KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, SAKIP DAN KEARSIPAN DAN KEGIATAN TERPADU	347,100,000	347,100,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	5.5	17	22.7	28	34	40	45	57	68	80	91	100	146,681,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PG - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	15,200,000	15,200,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PH - PENGADAAN REAGEN TEST KIT UNTUK FOOD SECURITY/PEMERIKSAAN	15,635,000	15,635,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - OPERASIONAL LOKA POM BELU	369,725,000	92,431,250
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM BELU	100,000,000	25,000,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Y - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM BELU	67,000,000	16,750,000
4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN FASILITAS KANTOR LOKA POM DI KAB BELU	50,000,000	12,500,000

Total 2,061,001,000

Atambua, 12 February 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Belu

FERDIAN DWI ARMANTO

Lampiran 11. Tingkat Efisiensi Loka POM di Kab. Belu

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI TAHUN 2025
Loka POM di Kabupaten Belu

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	82	99.69	121.57	30,978,900	30,978,639	100.00	**1.22**	**0.22**	**95 %**
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	75	100.00	133.33	10,035,000	10,033,005	99.98	**1.33**	**0.33**	**95 %**
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh	100	0.00	0.00	4,014,000	4,013,202	99.98	**0.00**	**-1.00**	**75 %**
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	93.33	124.44	3,010,500	3,009,901	99.98	**1.24**	**0.24**	**95 %**
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	100	100.00	100.00	138,420	138,420	100.00	**1.00**	**0.00**	**100 %**
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan	80	91.67	114.59	4,475,580	4,475,580	100.00	**1.15**	**0.15**	**100 %**
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	93.25	100.50	107.77	54,785,300	53,091,602	96.91	**1.11**	**0.11**	**100 %**
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	75	99.00	132.00	125,858,000	122,591,302	97.40	**1.36**	**0.36**	**95 %**
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai	85.52	100.83	117.90	9,620,000	9,607,200	99.87	**1.18**	**0.18**	**100 %**
10	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	81.12	81.82	100.86	13,100,000	13,086,000	99.89	**1.01**	**0.01**	**100 %**
11	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat	6.25	6.25	100.00	1,500,000	1,500,000	100.00	**1.00**	**0.00**	**100 %**
12	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	90	94.00	104.44	12,000,000	11,999,500	100.00	**1.04**	**0.04**	**100 %**
13	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51	4.36	124.22	4,930,000	4,930,000	100.00	**1.24**	**0.24**	**95 %**
14	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.6	1.90	118.75	64,783,000	59,544,243	91.91	**1.29**	**0.29**	**95 %**
15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100.00	100.00	130,234,595	130,196,965	99.97	**1.00**	**0.00**	**100 %**
16	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100	100.00	100.00	226,400,743	226,397,957	100.00	**1.00**	**0.00**	**100 %**
17	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100	95.00	95.00	64,611,743	64,611,743	100.00	**0.95**	**-0.05**	**75 %**
29	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	85	102.30	120.35	3,442,100	3,442,071	100.00	**1.20**	**0.20**	**95 %**
30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100.00	100.00	15,400,000	15,400,000	100.00	**1.00**	**0.00**	**100 %**
13	Nilai pemenuhan lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT	10	12.08	120.80	288,783,000	288,444,918	99.88	**1.21**	**0.21**	**95 %**
31	Persentase Kabupaten/kota pangan yang didampingi dalam pencapaian	50	40.00	80.00	3,010,500	3,009,901	99.98	**0.80**	**-0.20**	**75 %**
	TOTAL			105.53	1,071,111,381	1,060,502,149	99.32	**1.06**	**0.06**	**100 %**

Lampiran 12. Pengukuran Kinerja Loka POM di Kab. Belu

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BELU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	99,69 %	121,57	Tidak dapat disimpulkan
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	100%	133,33	Tidak dapat disimpulkan
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	0%	0	-
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	93,33%	124,44	Tidak dapat disimpulkan
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100%	100%	100	Baik
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	91,67%	114,59	Tidak dapat disimpulkan
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25%	100,50%	107,77	Sangat Baik

		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	99%	132	Tidak dapat disimpulkan
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.52%	100.83%	117.90	Tidak dapat disimpulkan
		13 - Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	12.08%	120.8	Tidak dapat disimpulkan
		29 - Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85	102.30%	120.35	Tidak dapat disimpulkan
		30 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	102,30%	102,30	Sangat Baik
		31 – Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota pangan aman	50%	40%	80	Baik
2	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81,12	81.82%	100,86	Sangat Baik
3	05 - Meningkatnya pendampingan	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan	6,25	6,25%	100	Baik

	UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan				
4	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	93,75%	104,17	Sangat Baik
5	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51	4,36	124,22	Tidak dapat disimpulkan
6	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1,6	1,94	121,25	Tidak dapat disimpulkan
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100%	100	100	Baik
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100%	100	100	Baik
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100%	100	100	Baik

Lampiran 13. Revisi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Belu

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BELU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FERDIAN DWI ARMANTO
Jabatan	: Kepala Loka POM di Kabupaten Belu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Atambua, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka POM di Kabupaten Belu	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
FERDIAN DWI ARMANTO	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BELU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.52 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	85 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81.12
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.25 %
4.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
5.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51
6.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.6
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 %
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100 %
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,061,001,000 (Dua Miliar Enam Puluh Satu Juta Seribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	909,804,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,151,197,000

Atambua, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Belu

FERDIAN DWI ARMANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran 14. Revisi RAPK Loka POM di Kab. Belu

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BELU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	30,978,900

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - PENGADAAN SAMPEL OBAT LOKA POM BELU	34,421,000	30,978,900

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	10,035,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM BELU	20,070,000	10,035,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,014,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM BELU	20,070,000	4,014,000

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	3,010,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM BELU	20,070,000	3,010,500

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	16	32	40	48	58	64	100	100	100	100	100	138,420

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OLEH LOKA POM BELU	4,614,000	138,420

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4,475,580

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OLEH LOKA POM BELU	4,614,000	4,475,580

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	93.25	45,842,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YI - PEMANTAUAN AMR/CAPA POS POM ATAMBUA	3,800,000	1,862,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YK - Peningkatan Kompetensi Petugas Loka POM di Kabupaten Belu	27,090,000	13,545,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Y - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM BELU	60,870,000	30,435,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125,858,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YG - PEMUKTAHIRAN DATA SARANA PRODUKSI,DISTRIBUSI OM DAN PELAYANAN FARMAKES	3,120,000	3,120,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YI - PEMANTAUAN AMR/CAPA POS POM ATAMBUA	3,800,000	1,938,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YK - Peningkatan Kompetensi Petugas Loka POM di Kabupaten Belu	27,090,000	13,545,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Y - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM BELU	60,870,000	30,435,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YC - Intensifikasi Menjelang Hari Raya Bersama Lintas Sektor	23,600,000	23,600,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YD - OPERASI PENANGANAN DAN PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG TMK	21,720,000	21,720,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YH - PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA HARI RAYA/KLB/FOOD SECURITY/MOBLING	31,500,000	31,500,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	84.12	85.52	85.52	85.52	85.52	85.52	16,240,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YB - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN MAKANAN LABEL HALAL TERMASUK ROKOK	16,240,000	16,240,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar									85	85	85	85	85	3,442,100

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - PENGADAAN SAMPEL OBAT LOKA POM BELU	34,421,000	3,442,100

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100	16,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	YJ - BIMTEK/KIE AMR/CAPA LOKA POM BELU	16,000,000	16,000,000

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium										10	10	10	10	288,783,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Y - PENGADAAN GLASSWARE DAN REAGEN LOKA POM BELU	50,000,000	50,000,000
2.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	B - PENGADAAN ALAT LAB LOKA BELU	238,783,000	238,783,000

15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman													50	3,010,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	C - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM BELU	20,070,000	3,010,500

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	81.12	77,576,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	F - WORKSHOP PENYEBARAN INFORMASI LOKA POM BELU	47,962,000	47,962,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	G - OPERASIONAL DAN LAYANAN KIE LOKA POM BELU	29,614,000	29,614,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		7	10	20	30	40	50	60	70	80	80	6.25	10,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	C - PENDAMPINGAN LANGSUNG LOKA POM BELU	10,000,000	10,000,000

4.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	35,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	C - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Loka POM Belu	35,000,000	35,000,000

5.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.51	18,400,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	EA - TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI (LOKA POM BELU)	10,764,000	10,764,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	E - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA/ REGISTRASI PRODUK (LOKA POM BELU)	7,636,000	7,636,000

6.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												1.6	163,431,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM BELU	100,000,000	25,000,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Y - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM BELU	67,000,000	16,750,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - OPERASIONAL LOKA POM BELU	436,725,000	109,181,250
4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN FASILITAS KANTOR DAN LOKA POM DI KAB BELU	50,000,000	12,500,000

		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		10	15	20	25	30	35	66	75	83	91.6	100	289,617,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN FASILITAS KANTOR DAN LOKA POM DI KAB BELU	50,000,000	12,500,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Y - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM BELU	67,000,000	16,750,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM BELU	100,000,000	25,000,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - OPERASIONAL LOKA POM BELU	436,725,000	109,181,250
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PD - BIMTEK SAKA POM	18,600,000	18,600,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PF - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH PIMPINAN LOKA POM BELU	105,860,000	105,860,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENEMPATAN CPNS 2025	49,591,000	1,726,000

06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	751,717,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PA - PENGADAAN SERAGAM DINAS LOKA POM BELU	43,696,000	43,696,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PC - KEGIATAN KEROHANIAN DAN KESEGARAN JASMANI LOKA POM BELU	11,740,000	11,740,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PB - JASA TENAGA OUTSOURCHING/HONOR PPNPN LOKA POM BELU	156,556,000	156,556,000
4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN FASILITAS KANTOR DAN LOKA POM DI KAB BELU	50,000,000	12,500,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PH - PENGADAAN REAGEN TEST KIT UNTUK FOOD SECURITY/PEMERIKSAAN	14,023,000	14,023,000
6.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM BELU	100,000,000	25,000,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PG - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	15,200,000	15,200,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Y - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM BELU	67,000,000	16,750,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - OPERASIONAL LOKA POM BELU	436,725,000	109,181,250
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	PE - KOORDINASI TERKAIT KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, SAKIP DAN KEARSIPAN DAN KEGIATAN TERPADU	347,071,000	347,071,000

07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	5.5	17	22.7	28	34	40	88	95	95	95	95	100	163,431,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Y - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM BELU	67,000,000	16,750,000
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM BELU	100,000,000	25,000,000
3.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	B - PENGADAAN FASILITAS KANTOR DAN LOKA POM DI KAB BELU	50,000,000	12,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	P - OPERASIONAL LOKA POM BELU	436,725,000	109,181,250

Total 2,061,001,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Atambua, 29 August 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Belu

FERDIAN DWI ARMANTO

LAMPIRAN 15. PK, RAPK sebelum revisi Loka POM di Kab. Sumba Timur

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BERNARDUS BEDA MORON
Jabatan	: Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalan dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Waingapu, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
BERNARDUS BEDA MORON	TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.17 persen
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.44 indeks
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92 persen
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	70 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Olahan di UPT	
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51 Indeks
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2 Indeks
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100 persen
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,282,318,646 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,182,320,000
2.	WA.6364 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,099,998,646

Waingapu, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

BERNARDUS BEDA MORON

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	169,055,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	D - PENGADAAN SAMPEL OBAT LOKA POM SUMBA TIMUR	39,055,000	39,055,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Z - PEMELIHARAAN ALAT DAN OPERASIONAL LABORATORIUM LOKA POM SUMBA TIMUR	50,000,000	25,000,000
3.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	C - PENGADAAN ALAT LAB LOKA POM SUMBA TIMUR	300,000,000	105,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	139,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	C - PENGADAAN ALAT LAB LOKA POM SUMBA TIMUR	300,000,000	105,000,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Z - PEMELIHARAAN ALAT DAN OPERASIONAL LABORATORIUM LOKA POM SUMBA TIMUR	50,000,000	10,000,000
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	D - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM SUMBA TIMUR	30,000,000	24,000,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	55,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	C - PENGADAAN ALAT LAB LOKA POM SUMBA TIMUR	300,000,000	45,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Z - PEMELIHARAAN ALAT DAN OPERASIONAL LABORATORIUM LOKA POM SUMBA TIMUR	50,000,000	7,500,000
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	D - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM SUMBA TIMUR	30,000,000	3,000,000

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	55,500,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	D - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM SUMBA TIMUR	30,000,000	3,000,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Z - PEMELIHARAAN ALAT DAN OPERASIONAL LABORATORIUM LOKA POM SUMBA TIMUR	50,000,000	7,500,000
3.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	C - PENGADAAN ALAT LAB LOKA POM SUMBA TIMUR	300,000,000	45,000,000

06 - Persentase keputusan/rekomendasi		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,356,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZG - PEMANTAUAN AMR dan CAPALOKA POM SUMBA TIMUR	6,780,000	1,356,000

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	3,461,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OLEH LOKA POM SUMBA TIMUR	3,461,000	3,461,000

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93,454,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	158,795,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZJ - PENINGKATAN KOMPETENSI LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR	27,876,000	13,938,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZI - BIMTEK/KIE AMR/CAPA LOKA POM SUMBA TIMUR	14,539,000	14,539,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Z - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI LOKA POM SUMBA TIMUR	124,530,000	62,265,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZG - PEMANTAUAN AMR dan CAPALOKA POM SUMBA TIMUR	6,780,000	2,712,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZD - OPERASI PENANGANAN DAN PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG TMK	13,560,000	13,560,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZE - PEMUKTAHIRAN DATA SARANA PRODUKSI,DISTRIBUSI OM DAN PELAYANAN FARMAKES	4,120,000	4,120,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZC - INTENSIFIKASI MENJELANG HARI RAYA BERSAMA STAKEHOLDER	40,880,000	40,880,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZF - PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA HARI RAYA/KLB/FOOD SECURITY LUAR KOTA	21,320,000	21,320,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZG - PEMANTAUAN AMR dan CAPALOKA POM SUMBA TIMUR	6,780,000	2,712,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZJ - PENINGKATAN KOMPETENSI LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR	27,876,000	13,938,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Z - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI LOKA POM SUMBA TIMUR	124,530,000	62,265,000

		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	18,560,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZB - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN MAKANAN LABEL HALAL TERMASUK ROKOK	18,560,000	18,560,000

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	81,060,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	G - WORKSHOP PENYEBARAN INFORMASI LOKA POM SUMBA TIMUR	22,062,000	22,062,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh	H - PELAKSANAAN KEGIATAN TERPADU LOKA POM SUMBA	25,900,000	25,900,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	KIE	UPT			
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	F - OPERASIONAL DAN KIE PAMERAN LOKA POM SUMBA TIMUR	18,698,000	18,698,000
4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	FA - KIE MELALUI MEDIA/IKLAN LAYANAN MASYARAKAT LOKA SUMBA TIMUR	11,400,000	11,400,000
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	FB - PENGUMPULAN DATA KERACUNAN DI RUMAH SAKIT	3,000,000	3,000,000

3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		10	10	20	30	40	50	60	70	80	85	92	10,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	D - PENDAMPINGAN LANGSUNG LOKA POM SUMBA TIMUR	10,000,000	10,000,000

4.	06 - Terlaksananya Penindakan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan				15	30	35	50	55	60	65	70	70	126,179,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	116,920,000	29,230,000
2.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	86,544,000	21,636,000
3.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	31,240,000	7,810,000
4.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	96,800,000	24,200,000
5.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	4,736,000	1,184,000
6.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	2,960,000	740,000
7.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	2,960,000	740,000
8.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan	99,080,000	24,770,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	MAKANAN DI BPOM KUPANG		Makanan		
9.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	2,960,000	740,000
10.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	2,960,000	740,000
11.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	38,120,000	9,530,000
12.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	8,364,000	2,091,000
13.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	3,904,000	976,000
14.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	7,168,000	1,792,000

5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	35,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	D - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Loka POM Sumba Timur	35,000,000	35,000,000

6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.51	18,400,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	FA - TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI (LOKA POM SUMBA TIMUR)	10,960,000	10,960,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	F - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA/ REGISTRASI PRODUK (LOKA POM SUMBA TIMUR)	7,440,000	7,440,000

7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2	248,572,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QE - PELAKSANAAN KORDINASI PIMPINAN LOKA POM SUMBA TIMUR	363,145,000	181,572,500
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Z - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM SUMBA TIMUR	67,000,000	67,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	35	40	45	50	55	60	65	70	75	85	95	100	736,853,646

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL KANTOR BALAI	282,060,000	997,646
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QC - PEMERIKSAAN KESEHATAN	15,975,000	15,975,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QB - JASA TENAGA OUTSOURCHING	248,170,000	248,170,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QA - PENGADAAN SERAGAM KANTOR LOKA POM SUMBA TIMUR	28,000,000	28,000,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - OPERASIONAL LOKA POM SUMBA TIMUR	432,911,000	432,911,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QD - RAPAT EKSTERNAL DAN KEGIATAN KEROHANIAN LOKA POM SUMBA TIMUR	10,800,000	10,800,000

		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	281,572,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	75	75	75	78	78	80	85	86	88	90	95	100	50,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QE - PELAKSANAAN KORDINASI PIMPINAN LOKA POM SUMBA TIMUR	363,145,000	181,572,500
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	C - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM SUMBA TIMUR	100,000,000	100,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	C - PENGADAAN FASILITAS KANTOR LOKA POM SUMBA TIMUR	50,000,000	50,000,000

Total	2,282,318,646

Waingapu, 12 February 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

BERNARDUS BEDA MORON

LAMPIRAN 16. PK, RAPK setelah revisi Loka POM di Kab. Sumba Timur

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BERNARDUS BEDA MORON
Jabatan	: Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Waingapu, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
BERNARDUS BEDA MORON	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.5 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.17 persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8 nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25 persen
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.44 indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67 persen
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70 persen
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	5.51 Indeks
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2 Indeks
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100 persen
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2,282,318,970 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3185 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,169,335,860
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,112,983,110

Waingapu, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

BERNARDUS BEDA MORON

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	39,055,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	D - PENGADAAN SAMPEL OBAT LOKA POM SUMBA TIMUR	39,055,000	39,055,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	21,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	D - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM SUMBA TIMUR	30,000,000	21,000,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	D - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM SUMBA TIMUR	30,000,000	3,000,000

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	3,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	D - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM SUMBA TIMUR	30,000,000	3,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,356,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZG - PEMANTAUAN AMR dan CAPALOKA POM SUMBA TIMUR	6,780,000	1,356,000
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OLEH LOKA POM SUMBA TIMUR	3,461,000	0

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	88	88	88	88	88	3,461,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OLEH LOKA POM SUMBA TIMUR	3,461,000	3,461,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	78,915,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZJ - PENINGKATAN KOMPETENSI LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR	27,876,000	13,938,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Z - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI LOKA POM SUMBA TIMUR	124,530,000	62,265,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZG - PEMANTAUAN AMR dan CAPALOKA POM SUMBA TIMUR	6,780,000	2,712,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	85	85	85	85	85	158,795,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZC - INTENSIFIKASI MENJELANG HARI RAYA BERSAMA STAKEHOLDER	40,880,000	40,880,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZG - PEMANTAUAN AMR dan CAPALOKA POM SUMBA TIMUR	6,780,000	2,712,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZJ - PENINGKATAN KOMPETENSI LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR	27,876,000	13,938,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Z - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI LOKA POM SUMBA TIMUR	124,530,000	62,265,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZD - OPERASI PENANGANAN DAN PENERTIBAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG TMK	13,560,000	13,560,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZE - PEMUKTAHIRAN DATA SARANA PRODUKSI,DISTRIBUSI OM DAN PELAYANAN FARMAKES	4,120,000	4,120,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam	ZF - PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA HARI	21,320,000	21,320,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	rangka pemeriksaan sarana	RAYA/KLB/FOOD SECURITY LUAR KOTA		

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	79.17	85.17	85.17	85.17	85.17	85.17	14,848,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZB - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN MAKANAN LABEL HALAL TERMASUK ROKOK	18,560,000	14,848,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	3,712,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZB - PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN MAKANAN LABEL HALAL TERMASUK ROKOK	18,560,000	3,712,000

13 - Persentase pemenuhan target												100	14,539,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pengendalian AMR di wilayah UPT													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZI - BIMTEK/KIE AMR/CAPA LOKA POM SUMBA TIMUR	14,539,000	14,539,000

		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium								7.44	7.8	7.8	7.8	8	337,021,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	Z - PEMELIHARAAN ALAT DAN OPERASIONAL LABORATORIUM LOKA POM SUMBA TIMUR	50,000,000	50,000,000
2.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	C - PENGADAAN ALAT LAB LOKA POM SUMBA TIMUR	287,021,000	287,021,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian												25	3,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Kabupaten/Kota Pangan Aman													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	D - PENGADAAN SAMPEL MAKANANLOKA POM SUMBA TIMUR	30,000,000	3,000,000

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	87.44	81,060,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	G - WORKSHOP PENYEBARAN INFORMASI LOKA POM SUMBA TIMUR	22,062,000	22,062,000
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	H - PELAKSANAAN KEGIATAN TERPADU LOKA POM SUMBA	25,900,000	25,900,000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	F - OPERASIONAL DAN KIE PAMERAN LOKA POM SUMBA TIMUR	18,698,000	18,698,000
4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	FA - KIE MELALUI MEDIA/IKLAN LAYANAN MASYARAKAT LOKA SUMBA TIMUR	11,400,000	11,400,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	FB - PENGUMPULAN DATA KERACUNAN DI RUMAH SAKIT	3,000,000	3,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		10	10	20	30	40	50	60	70	80	85	6.67	10,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	D - PENDAMPINGAN LANGSUNG LOKA POM SUMBA TIMUR	10,000,000	10,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				15	30	35	50	55	60	65	70	70	126,173,860

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	74,900,000	20,972,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	106,824,000	26,706,000
3.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	2,220,000	555,000
4.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	2,180,000	545,000
5.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	1,480,000	370,000
6.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	112,589,000	33,776,700
7.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	1,440,000	360,000
8.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	1,480,000	370,000
9.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	58,300,000	14,575,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	9,414,000	2,353,500
11.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	3,904,000	1,132,160
12.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	7,168,000	1,792,000
13.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	59,426,000	14,856,500
14.	DR.3165.QCD.U54 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	31,240,000	7,810,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	35,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan	D - Pertemuan Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah	35,000,000	35,000,000

11/14

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan oleh UPT	Aktual Obat dan Makanan	Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Loka POM Sumba Timur		

6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT													3.51	18,400,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	F - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI SARANA/ REGISTRASI PRODUK (LOKA POM SUMBA TIMUR)	7,440,000	7,440,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	FA - TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI (LOKA POM SUMBA TIMUR)	10,960,000	10,960,000

7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2	248,572,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QE - PELAKSANAAN KORDINASI PIMPINAN LOKA POM SUMBA TIMUR	363,145,000	181,572,500
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	Z - PELAKSANAAN KOORDINASI OLEH LOKA POM SUMBA TIMUR	67,000,000	67,000,000

		05 - Persentase implementasi rencana	35	40	45	50	55	60	65	70	75	85	95	100	749,838,110	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - OPERASIONAL KANTOR BALAI	353,194,000	482,110
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QC - PEMERIKSAAN KESEHATAN	15,975,000	15,975,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QA - PENGADAAN SERAGAM KANTOR LOKA POM SUMBA TIMUR	28,000,000	28,000,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - OPERASIONAL LOKA POM SUMBA TIMUR	438,910,000	438,910,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QB - JASA TENAGA OUTSOURCHING/HONOR PPNPN LOKA POM SUMBA TIMUR	255,671,000	255,671,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QD - RAPAT EKSTERNAL DAN KEGIATAN KEROHANIAN LOKA POM SUMBA TIMUR	10,800,000	10,800,000

06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	281,572,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	C - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA LOKA POM SUMBA TIMUR	100,000,000	100,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	QE - PELAKSANAAN KORDINASI PIMPINAN LOKA POM SUMBA TIMUR	363,145,000	181,572,500

07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	75	75	75	78	78	80	85	86	88	90	95	100	50,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	C - PENGADAAN FASILITAS KANTOR LOKA POM SUMBA TIMUR	50,000,000	50,000,000

Total	2,282,318,970

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Waingapu, 29 August 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur



BERNARDUS BEDA MORON

LAMPIRAN 17. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.50	98.19	114.84	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	86.33	115.11	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	100.00	100.00	Baik
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	92.00	122.67	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase kepuasan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.00	75.00	100	Baik
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	100.00	113.64	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	97.07	104.38	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan	85.00	96.19	113.16	Tidak dapat disimpulkan

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.17	96.30	113.07	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang di awasi sesuai standar	80.00	88.69	110.86	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	104.17	104.17	Sangat Baik
		Nilai pemenuhan Lab pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	8	7.44	93.00	Baik
		Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota Pangan Aman	25	23	92	Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.44	88.24	100.91	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	6.67	6.67	100	Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	70.00	55	78.57	Cukup

	efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	93.84	104.27	Sangat Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51	3.86	109.97	Sangat Baik
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	2	1.84	92.00	Baik
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00	100.00	100.00	Baik
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100.00	100.00	100.00	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100.00	100.00	100.00	Baik

LAMPIRAN 18. PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,5	98,19	114,84	39.055.000	37.372.882	95,69	1,20	0,20	95 %
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	86,33	115,11	21.000.000	21.000.000	100,00	1,15	0,15	100 %
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	3.000.000	2.850.000	95,00	1,05	0,05	100 %
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	92	122,67	3.000.000	3.000.000	100,00	1,23	0,23	95 %
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	75,00	100,00	1.952.000	1.952.000	100,00	1,00	0,00	100 %
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113,64	3.461.000	3.460.000	99,97	1,14	0,14	100 %
7	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	97,07	104,38	63.658.500	64.362.422	101,11	1,03	0,03	100 %

8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96,19	113,16	160.869.500	159.836.882	99,36	1,14	0,14	100 %
9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,17	96,30	113,07	12.572.000	12.477.360	99,25	1,14	0,14	100 %
10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	88,69	110,86	3.143.000	3.119.340	99,25	1,12	0,12	100 %
11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104,17	104,17	14.610.000	14.610.000	100,00	1,04	0,04	100 %
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	8	7,44	93,00	49.864.000	49.863.864	100,00	0,93	-0,07	75 %
13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota Pangan Aman	25	23	92,00	3.000.000	3.000.000	100,00	0,92	-0,08	75 %
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,44	88,24	100,91	13.100.000	12.703.500	96,97	1,04	0,04	100 %
15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP	6,67	6,67	100,00	1.640.000	1.575.000	96,04	1,04	0,04	100 %

	CPPOB Pangan Olahan									
16	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70	55	78,57	126.179.000	62.348.027	49,41	1,59	0,59	92 %
17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	93,84	104,27	12.000.000	11.961.250	99,68	1,05	0,05	100 %
18	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51	3,86	109,97	2.610.000	2.610.000	100,00	1,10	0,10	100 %
19	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2	1,84	92,00	36.694.000	36.692.203	100,00	0,92	-0,08	75 %
20	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100,00	222.307.000	221.901.859	99,82	1,00	0,00	100 %
21	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100	100	100,00	22.385.000	22.384.003	100,00	1,00	0,00	100 %
22	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT	100	100	100,00	0	0	0,00	0,00	-1,00	75 %
	TOTAL	75	23	103,76	816.100.000	749.080.591	91,79	1,13	0,13	100 %